



**WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA TERNATE  
TAHUN 2016 - 2021**





**WALIKOTA TERNATE**

**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA TERNATE  
TAHUN 2016-2021**







**WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA TERNATE TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TERNATE,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016 -2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011



- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
  23. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99);
  24. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE**

**DAN**

**WALIKOTA TERNATE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016-2021.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Ternate.
6. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Kota Ternate.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMN Tahun 2015-2019.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai landasan untuk menyusun Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

#### **Pasal 3**

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan ke dalam RKPD tahunan untuk 5 (lima) tahun kedepan.
- (2) Tahapan dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama pada bulan Mei minggu ke-4 (empat) setiap tahunannya.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD setiap tahunnya.

#### **Pasal 4**

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijabarkan kedalam Renstra PD untuk selanjutnya dijadikan landasan untuk penyusunan Renja PD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- (2) Renstra PD dan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat pada (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diubah minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada :
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan

- dokumen RPJMD tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai sebagaimana substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. Terjadi perubahan yang mendasar, seperti antara lain : terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan perubahan kebijakan nasional;
  - d. Merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila perumusan kebijakan dalam dokumen RPJMD bertentangan dengan kebijakan nasional.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA, PPAS dan RAPBD tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.

## **BAB III**

### **SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

#### **Pasal 7**

RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan;
- d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;



- g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan;
- i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan
- j. BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

### **Pasal 8**

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 9**

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BAPPEDA.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan evaluasi terhadap pencapaian target dan indikator masing-masing program dan kegiatan setiap tahunnya.
- (5) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala BAPPEDA.

### **Pasal 10**

Tahapan dan tata cara pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

Pada saat Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kota Ternate 2016-2021 dan RPJPD 2005-2025, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

## **BAB VI**


### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 15 Agustus 2016

**WALIKOTA TERNATE,**



*[Handwritten signature]*

**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 16 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



*[Handwritten signature]*

**M. TAUHID SOLEMAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR 151

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA : (8/2016)**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE**  
**NOMOR 8 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KOTA TERNATE TAHUN 2016-2021**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Selanjutnya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan dan dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat

Daerah (Renstra PD) untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen Renstra PD selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk optimalisasi pencapaian target kinerja pelaksanaan RPJMD, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 260, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, berkewajiban mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan RPJMD, serta melakukan pembinaan, fasilitasi pemantauan dan supervisi kepada seluruh perangkat daerah dalam melakukan penyusunan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Dalam implementasi selanjutnya, dokumen RPJMD Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain : seluruh perangkat daerah, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pakar dan akademis, serta kalangan dunia dalam perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pemantauan dalam upaya terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang transparan, adil, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, melalui beberapa langkah antara lain yaitu :

- a. Menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan baik Pemerintah daerah, masyarakat dan stake holder dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah dalam upaya pencapaian target Visi, Misi dan program kerja pemerintahan daerah;
- b. Mendorong tercapainya konsistensi, sinkronisasi dan sinergi, serta keselarasan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah, maupun antara pusat, provinsi dan Pemerintah Kota Ternate;
- c. Mendorong tercapainya keserasian, konsistensi dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pembinaan dan pengawasan;
- d. Mendorong terlaksananya pengendalian pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. Mendorong terwujudnya peran serta dan partisipasi masyarakat secara optimal dalam pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Perumusan Visi dan Misi dimaksudkan dalam upaya memberdayakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka menengah.

Visi Pemerintahan Kota Ternate yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 adalah "Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan". Untuk mewujudkan capaian target Visi secara maksimal, maka perlu dirumuskan kedalam beberapa Misi, dimana antara misi yang satu dengan yang lain saling terkait sebagai satu kesatuan yang utuh, sebagai berikut :

1. Membangun Ternate yang mandiri adil dan sejahtera;
2. Membangun Kota Ternate sebagai kota berbudaya dan agamais;
3. Mewujudkan infrastruktur jasa dan perdagangan yang merata antar wilayah perkotaan;
4. Membangun Kota Ternate sebagai kota pesisir dan maritim; dan
5. Membangun Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata unggulan berbasis budaya, sejarah dan bahari.

Peraturan Daerah tentang RPJMD Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016-2021 terdiri dari 6 (enam) Bab dan 12 (dua belas) Pasal yang menguraikan tentang (1) ketentuan Umum; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; (3) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; (4) Pengendalian dan Evaluasi; (5) Ketentuan Peralihan; dan (6) Ketentuan Penutup.

Selanjutnya untuk menjamin agar dokumen RPJMD yang akan dirumuskan berkesinambungan dengan dokumen RPJMD ini, maka selama belum ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, Peraturan Daerah ini masih dapat dijadikan pedoman untuk perumusan kebijakan penyusunan Dokumen RPJMD periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih berikutnya. Hal ini dalam upaya untuk menjamin agar Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun 2005-2025 untuk mensejahterakan masyarakat Kota Ternate dapat dicapai secara maksimal.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 128



## DAFTAR ISI

<b>Bab I.</b>	<b>Pendahuluan</b>	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Dasar Hukum Penulisan	3
1.3.	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya	6
1.4.	Sistematika Penulisan	9
1.5.	Maksud dan Tujuan	12
<b>Bab II.</b>	<b>Gambaran Umum Kondisi Daerah</b>	
2.1.	Aspek Geografi dan Demografi	14
2.1.1.	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	14
2.1.2.	Potensi Pengembangan Wilayah	21
2.1.3.	Wilayah Rawan Bencana	23
2.1.4.	Demografi	24
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	27
2.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	27
2.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial	34
2.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	41
2.3.	Aspek Pelayanan Umum	42
2.3.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib	42
2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Pilihan	75
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	83
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	84
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	86
2.4.3.	Fokus Iklim Investasi	88
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	89
<b>Bab III.</b>	<b>Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan</b>	<b>96</b>
3.1.	Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu	96
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD Masa Lalu	97
3.1.2.	Neraca Daerah	111
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	114
3.2.1.	Proporsi Kebutuhan Belanja Aparatur	115
3.2.2.	Defisit Riil Anggaran Kota Ternate	119
3.2.3.	Analisis Sumber Penutup Defisit Riil	119
3.3.	Kerangka Pendanaan	120
3.3.1.	Proyeksi Kerangka Pendanaan Berdasarkan Data Masa Lalu	121
3.3.2.	Analisa Kerangka Pendanaan	124

<b>Bab IV.</b>	<b>Analisis Isu-Isu Strategis</b>	<b>127</b>
4.1.	Permasalahan Pembangunan	127
4.1.1.	Urusan Wajib	138
4.1.2.	Urusan Pilihan	144
4.2.	Isu-isu Strategis	145
4.2.1.	Urusan Wajib	148
4.2.2.	Urusan Pilihan	152
4.3.	Isu Lingkungan Strategis	153
4.3.1.	Isu Strategis Lingkungan Internal	153
4.3.2.	Isu Strategis Lingkungan Eksternal	154
4.3.3.	Isu-isu Strategis Nasional dan Provinsi	155
<b>Bab V.</b>	<b>Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</b>	<b>162</b>
5.1.	Visi	162
5.2.	Misi	167
5.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	171
<b>Bab VI.</b>	<b>Strategi dan Arah Kebijakan</b>	<b>189</b>
6.1.	Strategi	189
6.2.	Arah Kebijakan	189
<b>Bab VII.</b>	<b>Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah</b>	<b>204</b>
7.1.	Kebijakan Umum	204
7.2.	Program Pembangunan Daerah	215
<b>Bab VIII.</b>	<b>Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kerangka Pendanaan</b>	<b>232</b>
<b>Bab IX.</b>	<b>Penetapan Indikator Kinerja Daerah</b>	<b>350</b>
9.1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	350
9.2.	Aspek Pelayanan Umum	351
9.3.	Aspek Daya Saing Daerah	351
<b>Bab X.</b>	<b>Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan</b>	<b>370</b>
10.1.	Pedoman Transisi	370
10.2.	Kaidah Pelaksanaan	371
10.3.	Penutup	373

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	7
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kota Ternate	16
Gambar 2.2	Data Curah Hujan Kota Ternate Tahun 2015	21
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Kota Ternate Tahun 2015	26
Gambar 2.4	Perkembangan Angka Inflasi Kota Ternate Tahun 2012-2015	30
Gambar 2.5	Angka Partisipasi Kasar Kota Ternate Tahun 2013-2015	36
Gambar 2.6	Pertumbuhan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Ternate Tahun 2013-2015	37
Gambar 3.1	Kontribusi Komponen PAD terhadap Total PAD Kota Ternate Tahun 2012-2014	102
Gambar 3.2	Pertumbuhan Pendapatan Daerah terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2012-2014	103
Gambar 3.3	Persentase Belanja tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2012-2014	108
Gambar 3.4	Persentase Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2012-2014	109
Gambar 3.5	Persentase Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Ternate Tahun 2012-2014	117

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Daratan Kota Ternate Menurut Kecamatan Tahun 2015	17
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kota Ternate Tahun 2013-2015	25
Tabel 2.3	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Ternate Tahun 2012-2015	28
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010-100 Menurut Lapangan Usaha Kota Ternate Tahun 2012-2014	29
Tabel 2.5	Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Ternate Tahun 2013-2015 (2010 = 100)	31
Tabel 2.6	Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Kota Ternate Tahun 2013-2015	32
Tabel 2.7	Jumlah Tindak Pidana dan Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kota Ternate Tahun 2013-2015	33
Tabel 2.8	Resiko Penduduk dan Selang Waktu Terjadi Tindak Pidana Kota Ternate Tahun 2013-2015	33
Tabel 2.9	Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kota Ternate Tahun 2015	35
Tabel 2.10	APK SD, SMP, SMA di Kota Ternate Tahun 2013-2015	36
Tabel 2.11	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Ternate Tahun 2012-2015	38
Tabel 2.12	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Ternate Tahun 2012-2015	39
Tabel 2.13	Pertumbuhan Persentase Balita Gizi Buruk Kota Ternate Tahun 2012-2014	39
Tabel 2.14	Jumlah Group dan Museum Kota Ternate Tahun 2012-2015	41
Tabel 2.15	Sarana dan Prasarana Olah Raga Kota Ternate Tahun 2012-2015	42
Tabel 2.16	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah di Kota Ternate Tahun 2015	43
Tabel 2.17	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah Kota Ternate Tahun 2012-2015	44
Tabel 2.18	Rasio Guru Murid Kota Ternate Tahun 2012- 2015	45
Tabel 2.19	Angka Putus Sekolah Kota Ternate Tahun 2012-2014	46
Tabel 2.20	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Kota Ternate Tahun 2012-2014	47
Tabel 2.21	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Ternate Tahun 2015	48
Tabel 2.22	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Ternate Tahun 2012-2015	48
Tabel 2.23	Perkembangan Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis Kota Ternate Tahun 2012-2015	49
Tabel 2.24	Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Ternate Tahun 2015	49



Tabel 2.25	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) Menurut Tahun dan Penolong Proses Kelahiran di Kota Ternate Tahun 2013-2015	50
Tabel 2.26	Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Ternate Tahun 2012-2015	51
Tabel 2.27	Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin dan Sumber Air Minum di Kota Ternate Tahun 2015	52
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Pengelolaan Urusan Perumahan Kota Ternate Tahun 2015	53
Tabel 2.29	Ruang Terbuka Hijau Kota Ternate Tahun 2015	53
Tabel 2.30	Jumlah Bangunan Ber-IMB Kota Ternate Tahun 2015	54
Tabel 2.31	Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Ditetapkan dengan Perda dan Perkada Kota Ternate Tahun 2012-2015	55
Tabel 2.32	Data Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kota Ternate Tahun 2012-2016	57
Tabel 2.33	Jumlah Pelabuhan dan Terminal Angkutan Umum Kota Ternate Tahun 2012-2015	57
Tabel 2.34	Perkembangan Penumpang Naik dan Turun di Pelabuhan Kota Ternate Tahun 2012-2015 (Orang)	58
Tabel 2.35	Bongkar/Muat Barang di Pelabuhan Kota Ternate Tahun 2012-2015 (M3)	58
Tabel 2.36	Persentase Penanganan Timbulan Sampah Kota Ternate Tahun 2012-2014	59
Tabel 2.37	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Ternate Tahun 2012-2014	59
Tabel 2.38	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kota Ternate Tahun 2015	60
Tabel 2.39	Rasio Penduduk Ber KTP, Rasio Penduduk Berakte Kelahiran dan Rasio Pasangan Berakte Nikah Kota Ternate Tahun 2013-2015	61
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate Tahun 2014-2015	61
Tabel 2.41	Capaian Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Ternate Tahun 2012-2015	63
Tabel 2.42	Pencapaian Kinerja Bidang Sosial di Kota Ternate Tahun 2014-2015	65
Tabel 2.43	Indikator Ketenagakerjaan Kota Ternate Tahun 2013-2015	66
Tabel 2.44	Persentase Koperasi Aktif Kota Ternate Tahun 2012-2015	66
Tabel 2.45	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate Tahun 2012-2015	66
Tabel 2.46	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Ternate Tahun 2012-2015	67
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Ternate Tahun 2012-2014	68
Tabel 2.48	Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Kota Ternate Tahun 2012-2015	68
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Ternate Tahun 2012-2015	69
Tabel 2.50	Rasio Jumlah Pol PP per 1.000 Penduduk dan Pos Kamling Per Jumlah Kelurahan dan Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Ternate Tahun 2013-2015	70

Tabel 2.51	Capaian Kinerja Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian Kota Ternate Tahun 2012-2015	71
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kota Ternate Tahun 2012-2014	72
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Ternate Tahun 2012-2015	73
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kota Ternate Tahun 2012-2015	73
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Daerah Kota Ternate Tahun 2012-2015	74
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Ternate Tahun 2012-2015	75
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Daerah Kota Ternate Tahun 2012-2015	75
Tabel 2.58	Produksi Tanaman Pangan Kota Ternate Tahun 2012-2014	76
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kota Ternate Tahun 2012-2015	78
Tabel 2.60	Luas Hutan Berdasarkan Fungsi Hutan Kota Ternate Tahun 2015	78
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Ternate Tahun 2013-2015	79
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kota Ternate Tahun 2011-2015	79
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2012-2015	80
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Ternate Tahun 2012-2015	82
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kota Ternate Tahun 2015	83
Tabel 2.66	Persentase Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota Ternate Tahun 2012-2015	86
Tabel 2.67	Jumlah Barang yang Terangkut Melalui Bandara dan Pelabuhan di Kota Ternate Tahun 2013-2015 (dalam Ton)	86
Tabel 2.68	Persentase Luas Ruang Kota Ternate Tahun 2012-2015	87
Tabel 2.69	Fasilitas Bank Menurut Status Di Kota Ternate Tahun 2011-2015	87
Tabel 2.70	Data Jumlah Restoran/Rumah Makan Per Kecamatan Kota Ternate Tahun 2014-2015	87
Tabel 2.71	Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan Kota Ternate Tahun 2014-2015	88
Tabel 2.72	Perkembangan Angka Kriminalitas Kota Ternate Tahun 2015	89
Tabel 2.73	Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Ternate Tahun 2013-2015	91
<b>BAB 3</b>		
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2012-2014	99
Tabel 3.2	Pertumbuhan Komponen PAD Kota Ternate Tahun 2012-2014	100
Tabel 3.3	Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Total PAD Kota Ternate Tahun 2012-2014	101



Tabel 3.4	Rasio Kemandirian Kota Ternate Tahun 2012-2014	103
Tabel 3.5	Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2012-2014	106
Tabel 3.6	Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2012–2014	107
Tabel 3.7	Proporsi Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2012–2014	108
Tabel 3.8	Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Ternate Tahun 2012 -2014	110
Tabel 3.9	Pertumbuhan Neraca Pemerintah Kota Ternate Tahun 2012-2014	112
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Ternate Tahun 2012-2014	116
Tabel 3.11	Persentase Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Ternate Tahun 2012 – 2014	117
Tabel 3.12	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Ternate Tahun 2013-2014	118
Tabel 3.13	Defisit Riil Anggaran Kota Ternate Tahun 2012-2014	119
Tabel 3.14	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Ternate Tahun 2012-2014	120
Tabel 3.15	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun 2017-2021	122
Tabel 3.16	Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2017-2021	123
Tabel 3.17	Proyeksi Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Ternate Tahun 2017-2021	124
Tabel 3.18	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Ternate Tahun 2017 – 2021	125

## **BAB 5**

Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2016-2021	177
-----------	---	-----

## **BAB 6**

Tabel 6.1	Keterkaitan Antara Misi, Tujuan, Sasaran dengan Strategi dan Arah Kebijakan Dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021	195
-----------	--	-----

## **BAB 7**

Tabel 7.1	Keterkaitan Antara Program Prioritas Dengan Target Sasaran, Kebijakan Umum dan Indikator Capaian Kinerja	210
-----------	--	-----

## **BAB 8**

Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Pagu Indikatif Kota Ternate 2016-2021	236
-----------	--	-----

## **BAB 9**

Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016-2021	353
-----------	---	-----

# BAB I. PENDAHULUAN



## 1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing *stakeholder* daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara berkeadilan, transparan, efisien, efektif dan akuntabel, dengan fokus utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut maka diperlukan suatu instrumen perencanaan yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta perumusan langkah-langkah dan tatacara, serta prioritas yang perlu mendapatkan perhatian berdasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

Berkaitan dengan tujuan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Sejalan dengan amanat tersebut di atas, dalam pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah pula ditentukan, bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Selanjutnya dalam pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga telah diamanatkan, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari (i)



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yaitu rencana pembangunan 20 (dua puluh) tahun daerah; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu rencana pembangunan 5 (lima) tahunan; dan (iii) rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD), yaitu rencana pembangunan tahunan. Selain itu, juga ada dokumen rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD), yaitu rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat daerah (Renja PD), yaitu rencana pembangunan tahunan perangkat daerah.

Terkait dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 telah menetapkan antara lain, bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih menyusun Dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis di daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD 5 (lima) tahun yang lalu.

Pemerintah Kota Ternate pada tanggal 9 Desember 2015 telah melaksanakan Pemiluakda serentak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Pemiluakda tersebut telah terpilih secara jujur, transparan, adil dan demokratis Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM sebagai Walikota Ternate dan H. Abdullah Tahir, SH sebagai Wakil Walikota Ternate untuk periode masa jabatan Tahun 2016-2021 dan telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Maluku Utara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Periodesasi Dokumen RPJMD Kota Ternate adalah Tahun 2016-2021 dan dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan (i) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam regulasi; (ii) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan regulasi; (iii) terjadi perubahan yang mendasar, antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,

pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan (iv) merugikan kepentingan nasional, yaitu bertentangan dengan kebijakan nasional.

Selanjutnya Rancangan Akhir RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Walikota dan Wakil Walikota Ternate dilantik. Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah (Renstra PD), dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) untuk 5 (lima) tahun kedepan dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk 5 (lima) tahun kedepan.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021, terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate, Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

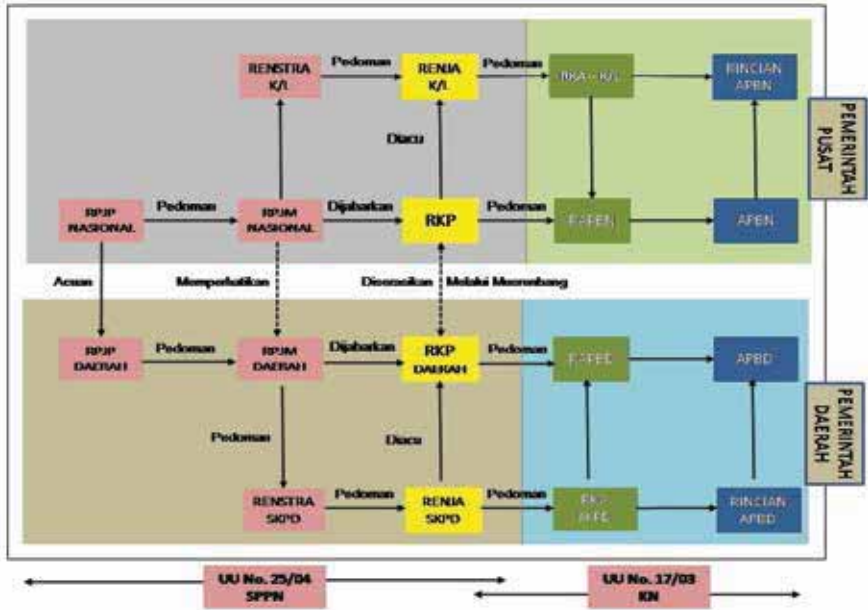
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 112); dan
33. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 113).

## **1.3. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

### **1.3.1. Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, telah dijadikan sebagai pedoman Pemerintah Kota Ternate dalam menyusun dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021. Dalam merumuskan kebijakan juga telah mengacu pada dokumen RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019, dokumen RTRW Kota Ternate Tahun 2012-2032, serta memperhatikan dokumen RPJMD dan RTRW Kabupaten/ Kota terdekat. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan Provinsi Maluku Utara dan rencana pembangunan Kabupaten/Kota terdekat lainnya. Dengan demikian, dokumen RPJMD Kota Ternate telah sinkron, selaras dan bersinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Untuk memberikan gambaran keterkaitan antara Perencanaan dengan Penganggaran dan dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016 - 2021 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dibawah ini disajikan gambar tentang bagan alur yang memperlihatkan keterkaitan dimaksud.



Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan dokumen RPJMD yang telah memuat visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk periode 2016-2021 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025, tahap berikutnya melakukan penyelarasan dan mensinkronkan dengan tujuan dan sasaran RPJMD dengan arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD untuk periode 5 (lima) tahunan ketiga (2015-2019) dan periode 5 (lima) tahunan keempat (2020-2025). Selanjutnya dokumen RPJMD Kota Ternate dijadikan sebagai landasan dalam perumusan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan seluruh Perangkat Daerah (Renstra PD), perumusan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perumusan kebijakan rencana perangkat daerah tahunan oleh seluruh Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

### 1.3.2. Keterkaitan dengan Penganggaran

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan tegas telah menetapkan, bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sementara itu, program prioritas daerah dan alokasi pagu anggaran

yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021, merupakan program dan anggaran yang masih bersifat indikatif dan untuk dapat dioperasional setiap tahunnya, maka perlu dijabarkan kedalam RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan daerah. Setelah dokumen RKPD dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota, selanjutnya dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), perumusan PPAS dan terakhir perumusan kebijakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Ternate tahunan untuk selama 5 (lima) tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

### **1.3.3. Keterkaitan dengan Evaluasi Hasil RPJMD Sebelumnya dan Dokumen KLHS**

Untuk menjamin adanya kesinambungan dalam perumusan kebijakan Dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 dan memuat visi, misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih, mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku Utara, mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019, maka perumusan berbagai kebijakan yang tertuang dalam Rancangan dokumen RPJMD ini, telah mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Ternate Tahun 2010-2015. Selanjutnya agar dalam mengimplementasikan RPJMD dapat sejalan dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kapasitas daya dukungnya, maka disinergikan dengan data dan informasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Dengan demikian, setiap perumusan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan, harus sudah bersinergi dengan data dan informasi tentang daya dukung sumber daya alam yang telah tersedia. Hal ini penting dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kepunahan. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah baik untuk 5 (lima) tahunan maupun tahunan sudah saatnya dipertimbangkan melalui pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan (*development sustainable*).

### **1.3.4. Keterkaitan dengan Pendekatan Perencanaan Pembangunan**

Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 dilakukan melalui pendekatan :

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi hingga tingkat nasional.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan amanat dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan ketentuan pada Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, sistematika penulisan dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

### Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Maksud serta Tujuan. Terkait dengan hal tersebut, maka sistematika penulisan Bab I RPJMD meliputi :

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penulisan;
- 1.3. Keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya;
- 1.4. Sistematika Penulisan;
- 1.5. Maksud dan Tujuan.

### Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menguraikan gambaran kondisi daerah dari Aspek Geografis dan Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka sistematika penulisan pada Bab II, meliputi:

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
  - 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah;
  - 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah;
  - 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana; dan
  - 2.1.4. Demografi.
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.
  - 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi;



- 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial; dan
- 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum.
  - 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib; dan
  - 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan.
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah.
  - 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah;
  - 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur;
  - 2.4.3. Fokus Iklim Investasi;
  - 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.

### **Bab III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Bab ini menguraikan hubungan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan hal tersebut, maka sistematika penulisan pada Bab III, meliputi:

- 3.1. Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu.
  - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Masa Lalu; dan
  - 3.1.2. Neraca Daerah.
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.
  - 3.2.1. Proporsi Kebutuhan Belanja Aparatur;
  - 3.2.2. Defisit Riil Anggaran Kota Ternate; dan
  - 3.2.3. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil.
- 3.3. Kerangka Pendanaan.
  - 3.3.1. Proyeksi Kerangka Pendanaan Berdasarkan Data Masa Lalu; dan
  - 3.3.2. Analisis Kerangka Pendanaan;

### **Bab IV. Analisis Isu-Isu Strategis**

Bab Ini Menguraikan Hubungan Antara Permasalahan Pembangunan dengan Isu-Isu Strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka sistematika penulisan pada Bab IV, meliputi:

- 4.1. Permasalahan Pembangunan.
  - 4.1.1. Urusan Wajib; dan
  - 4.1.2. Urusan Pilihan;
- 4.2. Isu-isu Strategis.
  - 4.2.1. Urusan Wajib; dan
  - 4.2.2. Urusan Pilihan;
- 4.3. Isu Lingkungan Strategis.
  - 4.3.1. Isu Strategis Lingkungan Internal;

- 4.3.2. Isu Strategis Lingkungan Eksternal; dan
- 4.3.3. Isu-isu Strategis Nasional dan Provinsi.

## **Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Bab ini menguraikan hubungan antara Visi dengan Misi, Tujuan dan Sasaran, meliputi :

- 5.1. Visi;
- 5.2. Misi; dan
- 5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.

## **Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini menguraikan hubungan antara Strategi dengan Arah Kebijakan, meliputi :

- 6.1. Strategi; dan
- 6.2. Arah Kebijakan.

## **Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**

Bab ini menguraikan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang bersifat indikatif, meliputi :

- 7.1. Kebijakan Umum; dan
- 7.2. Program Pembangunan Daerah.

## **Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kerangka Pendanaan**

Bab ini menguraikan tentang indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat indikatif.

## **Bab IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah**

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, meliputi :

- 9.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 9.2. Aspek Pelayanan Umum; dan
- 9.3. Aspek Daya Saing Daerah.

## **Bab X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan**

- 10.1. Pedoman Transisi;
- 10.2. Kaidah Pelaksanaan; dan
- 10.3. Penutup.

## 1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 adalah untuk menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, masyarakat, dunia usaha dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Ternate dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Ternate khususnya, serta masyarakat di kabupaten/kota terdekat lainnya se Provinsi Maluku Utara.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016 - 2021, antara lain :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar untuk perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta sebagai dasar penentuan prioritas program pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar proyeksi kemampuan riil kapasitas pendanaan tahunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah dari tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021;
5. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja kepala daerah, sebagai dasar penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah periode tahun 2016-2021;
6. Mendukung koordinasi untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah maupun antara Pemerintah Kota Ternate dengan Pemerintah Pusat dan antara Pemerintah Kota Ternate dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta menyediakan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Renstra PD, Renja PD sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing, sekaligus merupakan landasan dalam menentukan program-program unggulan yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;

7. Menjadi landasan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan dengan penganggaran serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan di Kota Ternate;
8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dalam menentukan program-program pembangunan yang ditindak lanjuti dengan kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator; dan
9. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka posisi sentral dalam dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021, selain menjadi sumber dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD), juga menjadi landasan dalam perumusan berbagai kebijakan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 5 (lima) tahunan (Renstra PD) dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan (Renja PD). Dalam perspektif perencanaan pembangunan demikian, maka akan terjamin bahwa antar dokumen perencanaan pembangunan dimaksud akan terjadi konsistensi, sinkronisasi, keselarasan dan sinergitas yang optimal yang berujung pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana dicita-citakan oleh seluruh masyarakat Kota Ternate yang tercermin dari Visi Pemerintah Kota Ternate.

## **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**



### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

#### **2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

##### **1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate, maka secara administrasi wilayah Kota Ternate telah menjadi bagian dari Provinsi Maluku Utara dan sejak itulah geliat berbagai aktivitas perekonomian, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mengalami peningkatan yang pesat. Status sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan/jasa di Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate dari sisi perekonomian menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan ini tercermin dari meningkatnya nilai PDRB Kota Ternate setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan, bahwa kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian.

Selain daripada itu, adanya investasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun kalangan swasta telah mampu memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian Kota Ternate. Kondisi umum daerah Kota Ternate dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek pencapaian sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga aspek tersebut yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Peningkatan status ini tidak terlepas dari perkembangan daerah ini dari berbagai aspek terutama aspek sosial kemasyarakatan dan aspek perkembangan ekonomi.

Pada awal pembentukan Kota Ternate terdiri dari 3 Kecamatan dengan 58 Desa/Kelurahan. Perkembangan dinamika pembangunan yang terjadi akibat interaksi secara sinergis antara Pemerintah Daerah dan masyarakat telah membawa dampak perubahan yang ditandai dengan perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang disamping pertimbangan rentang kendali pemerintahan, maka wilayah tertentu dimana perkembangannya dipandang memungkinkan untuk ditingkatkan status administrasinya seperti Pulau Moti, maka perlu

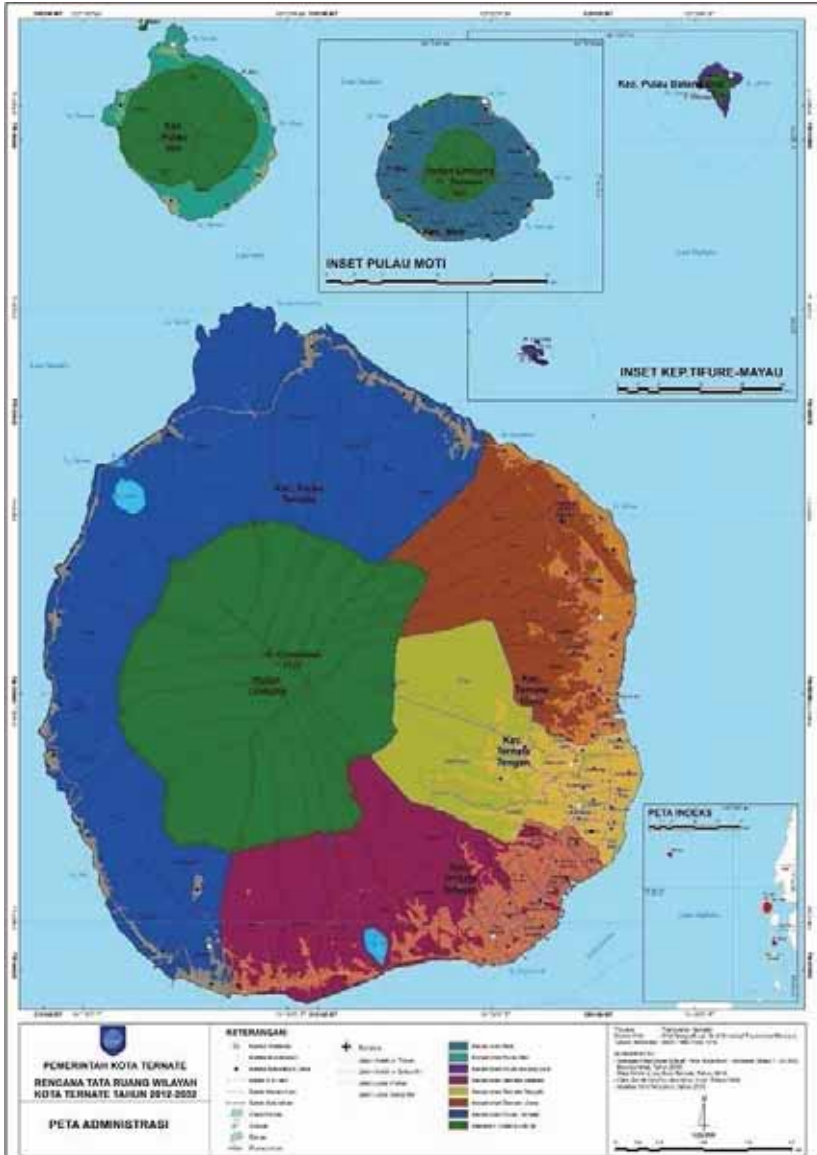
ditempuh langkah kebijakan untuk direalisasikan terbentuknya Kota Ternate sebagai salah satu Kota di Maluku Utara.

Sesuai dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Moti, Kecamatan Moti yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pulau Ternate telah dimekarkan menjadi Kecamatan baru dengan 4 (empat) Desa yang ada di Pulau Moti dimekarkan dan ditingkatkan statusnya menjadi 6 (enam) Kelurahan. Perkembangan lain yang dicapai dari segi administrasi pemerintahan adalah dimekarkannya Pulau Batang Dua menjadi kecamatan yang memiliki 6 kelurahan. Untuk melengkapi struktur pemerintahan Kota Ternate, maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Batang Dua.

Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelurahan Mado dan Tafraka dalam Kecamatan Pulau Ternate, maka Kelurahan Togolobe mekar menjadi Kelurahan Mado dan Togolobe sedangkan Kelurahan Dorari Isa mekar menjadi Kelurahan Tafraka dan Dorari Isa. Kemudian melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang pembentukan kecamatan Pulau Hiri, Kelurahan Mado, Tafraka, Dorari Isa, Togolobe, Tomajiko, dan Faudu yang sebelumnya termasuk di Kecamatan Pulau Ternate dimekarkan menjadi kecamatan tersendiri yaitu Kecamatan Pulau Hiri. Kota Ternate yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh laut, memiliki lima buah Pulau yang telah berpenghuni dan tiga pulau lainnya yang belum/tidak berpenghuni. Luas wilayah Kota Ternate seluruhnya adalah 5.709,58 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari luas wilayah daratan adalah 162,03 Km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut/perairan adalah 5.547,55 km<sup>2</sup>. Secara geografi Kota Ternate berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Maluku;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Halmahera; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku dan Pulau Sulawesi.

Gambaran umum tentang letak Kota Ternate dalam peta wilayah Provinsi Maluku Utara, dapat dilihat sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Sumber : Bappeda Kota Ternate, RTRW Kota Ternate Tahun 2012-2032

Gambar 2.1  
Peta Wilayah Administrasi Kota Ternate

Sementara itu, untuk mengetahui luasan setiap wilayah kecamatan di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Daratan Kota Ternate Menurut Kecamatan Tahun 2015**

No.	Nama Kecamatan	Luas Daratan	Persentase
		(Km <sup>2</sup> )	(%)
1	Pulau Ternate	37,23	22,98
2	Moti	24,80	15,31
3	Pulau Batang Dua	29,04	17,92
4	Pulau Hiri	6,70	4,14
5	Ternate Selatan	16,98	10,48
6	Ternate Tengah	10,85	6,70
7	Ternate Utara	14,38	8,87
8	Hutan Lindung	22,05	13,61
<b>Jumlah</b>		<b>162,03</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka, Tahun 2016

## 2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografi Kota Ternate terdiri dari 7 Kecamatan yang terbagi kedalam 77 Kelurahan, dimana 56 Kelurahan berklasifikasi Kelurahan Pantai dan 21 Kelurahan lainnya dalam klasifikasi Kelurahan Bukan Pantai. Sementara itu, dengan posisi geografis Kota Ternate yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan/laut, maka jarak tempuh antara Ibukota kecamatan dengan Ibukota Ternate sebagai berikut, dari Kota Ternate ke Jambula (Kecamatan Pulau Ternate) berjarak 10,1 km, dari Kota Ternate ke Moti Kota (Kecamatan Moti) berjarak 35,4 km, dari Kota Ternate ke Mayau (Kecamatan Pulau Batang Dua) berjarak 121,6 km, dari Kota Ternate ke Faudu (Kecamatan Pulau Hiri) berjarak 14,1 km, dari Kota Ternate ke Kalumata (Kecamatan Ternate Selatan) berjarak 4,9 km, dari Kota Ternate ke Salahuddin (Kecamatan Ternate Tengah) berjarak 1,7 km, dan dari Kota Ternate ke Dufadufa (Kecamatan Ternate Utara) berjarak 5,3 km.

### a. Posisi Astronomis

Secara astronomis, posisi Kota Ternate berada pada 0°25'41,82" - 1°21'21,78" Lintang Utara dan antara 126°7'32,14" - 127°26'23,12" Bujur Timur.

### b. Posisi Geostrategik

Dari aspek tinjauan geostrategik, Kota Ternate sebagai salah satu kota di wilayah timur Indonesia memiliki kekayaan berupa rempah-rempah yang melimpah. Kondisi kekayaan alam yang dimiliki Ternate tersebut merupakan salah satu daya tarik bangsa asing seperti Portugis dan Belanda untuk melakukan penjajahan di Maluku Utara khususnya Ternate. Letak Kota Ternate yang dikelilingi oleh lautan dan memiliki



fasilitas pelabuhan merupakan salah satu faktor pendukung bangsa Asing untuk menjajah wilayah ini.

c. **Kondisi Kawasan**

1) **Pesisir**

Sementara itu, beberapa wilayah pesisir yang dimiliki oleh Kota Ternate, diantaranya berada di Pulau Ternate dengan luas wilayah 111,80 Km<sup>2</sup>, Pulau Hiri dengan luas wilayah 12,40 km<sup>2</sup>, Pulau Moti dengan luas wilayah 24,60 km<sup>2</sup>, Pulau Mayau dengan luas wilayah 78,40 km<sup>2</sup>, Pulau Tifure dengan luas wilayah 22,10 km<sup>2</sup>, Pulau Maka dengan luas wilayah 0,50 km<sup>2</sup>, Pulau Mano dengan luas wilayah 0,50 km<sup>2</sup> dan Pulau Gurida dengan luas wilayah 0,55 km<sup>2</sup>.

2) **Pegunungan**

Secara umum, kondisi kawasan Kota Ternate terdiri dari beberapa Gunung yang masih aktif, diantaranya Gunung Gamalama yang berlokasi Pulau Ternate dengan ketinggian 1.025 m diatas permukaan laut dan Gunung Tuanane yang berlokasi di Pulau Moti dengan ketinggian 950 m diatas permukaan laut.

3) **Kepulauan**

Kota Ternate sebagai kota yang wilayahnya sebagian besar berupa pulau/ kepulauan, memiliki 8 pulau yang terdiri dari (i) Pulau Ternate; (ii) Pulau Hiri; (iii) Pulau Moti; (iv) Pulau Mayau (v) Pulau Tifure; (vi) Pulau Gurida; (vii) Pulau Maka; dan (viii) Pulau Mano. Dari 8 pulau dimaksud, 5 pulau telah berpenghuni, yaitu : pulau Ternate, pulau Hiri, pulau Moti, pulau Mayau, dan pulau Tifure. Sedangkan 3 pulau belum berpenghuni, yaitu (i) pulau Maka; (ii) Mano; dan (iii) Gurida.

### 3. **Kondisi Topografi**

Kondisi topografi sebagian besar lahan Kepulauan Ternate adalah berbukit-bukit dengan sebuah gunung berapi yang masih aktif dan terletak di tengah Pulau Ternate. Permukiman masyarakat secara intensif berkembang di sepanjang garis pantai kepulauan. Dari 5 (lima) pulau besar yang ada, umumnya masyarakat mengolah lahan perkebunan dengan produksi rempah-rempah sebagai produk unggulan dan perikanan laut yang diperoleh di sekitar perairan pantai. Pulau Ternate memiliki kelerengan fisik terbesar di atas 40% yang mengerucut ke arah pucak Gunung Gamalama, terletak di tengah-tengah pulau.

Di daerah pesisir rata-rata kemiringan adalah sekitar 2%-8%. Jenis tanah mayoritas adalah tanah Rogusal di Pulau Ternate, Pulau Moti dan Pulau Hiri. Sedangkan jenis tanah Rensika ada di Pulau Mayau, Pulau Tifure, Pulau Maka, Pulau Mano dan Pulau Gurida. Kondisi tersebut merupakan ciri tanah pulau vulkanis dan pulau karang. Kedalaman laut adalah bervariasi, pada beberapa lokasi di sekitar Pulau Ternate, terdapat tingkat kedalaman yang

tidak terlalu dalam, sekitar 10 meter sampai pada jarak sekitar 100 meter dari garis pantai, sehingga memungkinkan adanya peluang reklamasi. Tetapi pada bagian lain terdapat tingkat kedalaman yang cukup besar dan berjarak tidak jauh dari garis pantai yang ada.

#### **4. Kondisi Geologi**

Pulau Ternate sebuah pulau yang terbentuk karena proses pembentukan gunung api yang muncul dari dasar laut, sebagian berada di bawah muka laut dan sebagian lagi muncul di permukaan laut. Pulau-pulau lain yang merupakan bagian dari gunung ini adalah Pulau Hiri, terletak di sebelah Utara, Pulau Tidore dan Pulau Maitara, terletak bagian Selatan. Bentuk Pulau Ternate yang merupakan bagian dari sebuah gunung, maka secara umum morfologinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) satuan morfologi. Pembagian satuan morfologi tersebut sebagai berikut :

##### **a. Morfologi Kaki Gunung Gamalama**

Merupakan daerah kaki gunung api yang datar sehingga hampir datar, terletak di kaki Timur, Utara dan Selatan dari gunung Gamalama dan terhampar memanjang sejajar pantai. Dilihat dari bentuk pendataran pantai ini, proses awalnya adalah adanya proses erosi yang terjadi di permukaan tubuh gunung api tersebut, kemudian material yang tererosi diendapkan ke tempat yang kemiringan lerengnya agak landai, pada bagian tubuh gunung terjal material erosi akan masuk ke dalam laut sehingga terbentuk endapan. Kemiringan lereng gunung api ini sangat berpengaruh terhadap terbentuknya pedataran di Pulau Ternate yaitu yang paling luas adalah pedataran Timur sekarang menjadi pusat Kota Ternate, pedataran Selatan dan Utara yang relatif kecil.

##### **b. Morfologi Tubuh Gunung Gamalama**

Satuan ini merupakan bagian terbesar dari morfologi gunung api di Pulau Ternate, mulai dari kaki hingga tubuh pada elevasi 1.000 meter, dengan kemiringan lereng antara 8% - 40%. Di bagian Timur-Utara tubuh Gunung Gamalama kemiringan lereng relatif lebih landai dibandingkan di bagian Barat. Pada morfologi ini dijumpai 2 buah kaldera yang dikenal dengan Danau Tolire dan Laguna, hal ini menunjukkan bahwa Gunung Gamalama pernah terbentuk kawah-kawah lain selain di puncak gunung. Batuan pembentuk morfologi ini adalah endapan vulkanik yang berasal dari gunung api itu sendiri, yang terdiri dari breksi vulkanik, stufa dan pasir. Antara ketiga batuan tersebut dijumpai dalam keadaan selang seling.

### c. Morfologi Puncak Gunung Gamalama

Satuan ini merupakan bagian paling atas puncak gunung, pada elevasi di atas 1.000 meter dengan kemiringan lereng  $> 40\%$ , di daerah puncak memperlihatkan perpindahan titik kegiatan dari Selatan ke Utara. Menurut Bronto S, 1990, sejarah Gunung Gamalama awalnya dimulai terbentuknya pematang kawah terluar (tertua) berada di bagian Tenggara disebut Bukit Melayu. Kemudian pematang kawah tengah membuka ke arah Utara dikenal dengan nama Bukit Keramat atau Bukit Mediana (+1.669m), selanjutnya terbentuk kawah baru berada di bagian Utara berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 300 meter, puncak setinggi +1.715 m dikenal dengan nama Gunung Arfat atau Piek van Ternate.

Pulau Ternate dilihat dari stratigrafinya, tersusun oleh Gunung Api Holosen terdiri dari breksi vulkanik, lava andesit, pasir dan stufa.

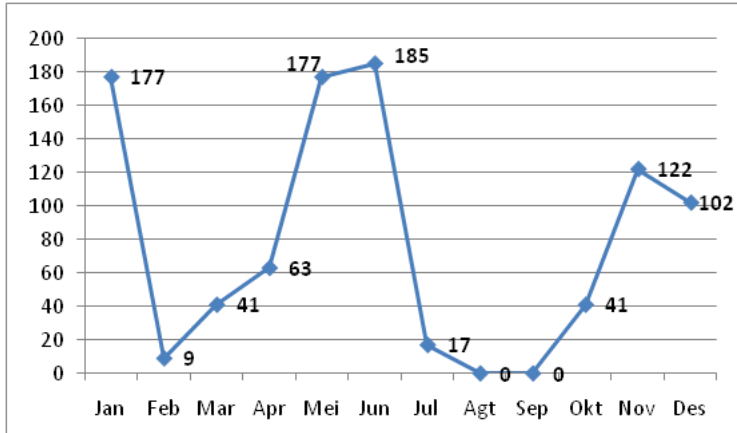
### 5. Kondisi Hidrologi

Dari aspek tinjauan hidrologi, Kota Ternate memiliki beberapa danau diantaranya adalah Laguna (Ngade) yang berlokasi di Pulau Ternate, Tolire Besar yang berlokasi di Pulau Ternate dan Tolire Kecil yang berlokasi di Pulau Ternate. Sedangkan beberapa pulau besar, sedang dan kecil yang menjadi bagian dari wilayah Kota Ternate adalah Pulau Ternate dengan luas wilayah 111,80 Km<sup>2</sup>, Pulau Hiri dengan luas wilayah 12,40 km<sup>2</sup>, Pulau Moti dengan luas wilayah 24,60 km<sup>2</sup>, Pulau Mayau dengan luas wilayah 78,40 km<sup>2</sup>, Pulau Tifure dengan luas wilayah 22,10 km<sup>2</sup>, Pulau Maka dengan luas wilayah 0,50 km<sup>2</sup>, Pulau Mano dengan luas wilayah 0,50 km<sup>2</sup> dan Pulau Gurida dengan luas wilayah 0,55 km<sup>2</sup>.

### 6. Kondisi Klimatologi

Kondisi umum sebagai kota yang wilayahnya dikelilingi oleh lautan, maka ada kecenderungan memiliki temperatur udara relatif tinggi. Kondisi tersebut juga ada kemiripan dengan ciri yang dirasakan di Kota Ternate, dimana berdasarkan data dan informasi dari Stasiun Meteorologi Babullah, rata-rata temperatur udara selama tahun 2014 dan tahun 2015 berkisar antara 27°C-28°C dengan suhu maksimum sebesar 32°C dan minimal 24°C. Pada tahun 2015 kelembaban udara bervariasi antara 72 persen sampai dengan 86 persen dengan rata-rata 84 persen. Curah hujan tertinggi tercatat 185 mm<sup>3</sup> pada bulan Juni dengan jumlah hari hujan sebanyak 127 hari dengan yang terbanyak pada bulan Januari yaitu sebanyak 18 hari dengan curah hujan sebesar 177 mm<sup>3</sup>.

Data dan informasi curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2015 di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana yang terdapat pada gambar 2.2 di bawah ini.



Gambar 2.2  
Data Curah Hujan Kota Ternate Tahun 2015

## 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dari tinjauan aspek potensi pengembangan wilayah, ada beberapa potensi yang dimiliki oleh Kota Ternate memiliki nilai ekonomis yang tinggi, diantaranya potensi tanaman perkebunan yang telah ada sejak zaman kolonial. Dulu kota Ternate terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Selanjutnya potensi tanaman pangan seperti jagung dan ubi kayu. Kedua jenis tanaman ini diminati oleh masyarakat Kota Ternate sebagai makanan utama selain nasi. Pada tahun 2015 luas panen jagung adalah 61,50 Ha yang berarti turun dari tahun 2014 dengan luas 120,30 Ha. Sedangkan untuk tanaman kacang tanah tahun 2015 memiliki luas panen 66 Ha, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2014 yang luas panennya 25,20 Ha. Karena kedua komoditi ini memiliki luas panen yang berbeda dari tahun 2014 maka produksinya pun mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Potensi wilayah berikutnya yaitu tanaman perkebunan antara lain adalah kelapa, cengkih dan pala. Berdasarkan data yang diterbitkan BPS tahun 2014, produksi perkebunan untuk kelapa 272 ton, cengkih 382 ton dan pala sebesar 1.407 ton. Demikian pula potensi peternakan, di mana kebutuhan daging sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga untuk memenuhinya pemerintah masih harus memasok pasokan daging dari luar wilayah Kota Ternate terutama dari Pulau Halmahera dan dari luar Maluku Utara, pada tahun 2015 populasi ternak di Kota Ternate yang paling banyak adalah Sapi dan Kambing dengan populasi sapi pada tahun 2015 sebanyak 2.184 ekor dan kambing 16.517 ekor. Potensi berikutnya yang dimiliki oleh Kota Ternate adalah perikanan. Sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, laut merupakan sumber penghidupan

yang menjanjikan. Banyak masyarakat Kota Ternate yang tinggal di pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu tradisi masyarakat Kota Ternate yang menjadikan ikan sebagai makanan pendamping nasi yang wajib dikonsumsi setiap hari, membuat nelayan menjadi salah satu mata pencaharian yang cukup menjanjikan.

Untuk mendukung pengembangan potensi perikanan, di Kota Ternate terdapat dua pelabuhan perikanan yaitu pelabuhan Perikanan Bastiong, Ternate Selatan dan pelabuhan perikanan Dufa-Dufa, Ternate Utara. Kedua pelabuhan ini memasok hampir sebagian besar kebutuhan ikan masyarakat Ternate. Berdasarkan data yang ada, produksi perikanan Kota Ternate tahun 2015 yang terbesar adalah kecamatan Ternate Utara yaitu sebesar 5.967 ton dan kecamatan Ternate Selatan sebesar 5.595 ton.

Sementara itu, sebagai kota yang mengusung moto sebagai kota jasa dan industri, industri yang berkembang di Kota Ternate adalah jenis industri kecil dan rumah tangga. Jenis industri ini cukup banyak di wilayah ini karena penggunaan teknologi yang relatif sederhana dan keterbatasan aspek permodalan. Meskipun jenis industri yang ada sebagian besar berskala kecil tapi cukup mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Ternate. Jenis industri yang berkembang di Kota Ternate adalah industri di bidang pangan, industri di bidang bangunan, industri bidang sandang dan kerajinan, serta industri bidang logam.

Dari data yang ada menunjukkan, bahwa pada tahun 2015 jumlah industri kecil yang bergerak di bidang pangan sebanyak 36 perusahaan dan menyerap tenaga kerja sebanyak 489 orang, di bidang bangunan terdapat 23 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 381 orang, di bidang sandang dan kerajinan terdapat 46 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 719 orang, serta di bidang industri logam terdapat 36 perusahaan yang menyerap 678 orang tenaga kerja.

Sementara itu, untuk mendorong tumbuhnya sektor perdagangan, Pemerintah Kota Ternate berusaha membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang perdagangan tersebut, sehingga sarana perdagangan pun setiap tahunnya semakin meningkat. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam sektor perdagangan, maka selain dari segi sarana perlu juga dibantu dari segi permodalan. Salah satu lembaga yang dapat membantu masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah dari segi permodalan yaitu koperasi. Jumlah koperasi dari tahun ke tahun semakin meningkat terutama untuk koperasi non KUD. Pada tahun 2015 jumlah KUD sebanyak 11 buah, jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah koperasi non KUD yang aktif hingga akhir tahun 2015 telah berkembang menjadi 296 buah koperasi non KUD.

### 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam didefinisikan sebagai perlindungan kawasan dengan tujuan untuk melindungi manusia dan aktivitas kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti, gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung berapi dan tsunami.

Berdasarkan data pada RTRW Kota Ternate Tahun 2012-2032, untuk mengidentifikasi kawasan rawan bencana di Ternate, perlu dilakukan pengamatan terhadap kondisi geologi yang menunjukkan adanya daerah rawan terhadap bencana, agar dapat ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk mencegah terjadinya kerugian yang besar akibat adanya bencana. Rencana kawasan rawan bencana Kota Ternate meliputi:

1. Kawasan rawan bencana gempa terdapat di seluruh wilayah Kota Ternate yaitu Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, dan Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua.
2. Kawasan rawan tanah longsor di Kota Ternate, terdapat pada Pulau Ternate dengan total luas 40,58 Ha di Kel. Afetaduma, Kel. Dorpedu, Kel. Togafu, Kel. Kalumata (rumah dinas walikota & galian C), Kel. Ngade, Kel. Tabona, Kel. Dufa-Dufa Bagian Barat, Kel. Akehuda Bgn Barat dan Kel. Kayu Merah Bagian Barat. Untuk Pulau Hiri dengan luas 6,4 Ha di Kel. Tafraka dan Kel. Mado-Faudu-Tomajiko.
3. Kawasan rawan banjir terdapat di Kelurahan Mangga Dua yaitu jalan Raya Mangga Dua kurang lebih 0,11 ha, Kelurahan Bastiong Talangame yaitu kawasan terminal dan pasar Bastiong kurang lebih 0,21 Ha, Kelurahan Bastiong Karance yaitu jalan Raya Bastiong dan jalan Pelabuhan Fery kurang lebih 0,45 Ha, Kelurahan Gamalama yaitu jalan Pahlawan Revolusi dan jalan Busoiri kurang lebih 1,25 ha, Kelurahan Jati yaitu jalan depan Hotel Amara kurang lebih 0,24 ha, Kelurahan Santiong yaitu di kawasan kuburan Cina kurang lebih 0,12 ha, Kelurahan Mangga Dua kurang lebih 0,04 ha.
4. Kawasan rawan bencana gunung berapi meliputi daerah rawan I, rawan II dan rawan III, yang meliputi :
  - 1) Kawasan rawan bencana terhadap aliran masa, berupa lahar/banjir, kemungkinan perluasan awan panas serta aliran lava dan rawan bencana terhadap hujan abu, tanpa memperhatikan arah tiupan angin dan kemungkinan lontaran batu (pijar) dengan radius 4,5 Km. Kawasan rawan bencana gunung berapi kategori rawan I terdapat di Kelurahan Dufa-dufa, Tabam, Tubo, Kulaba, Bula, Tobololo, Takome, Lotto, dan Kelurahan Togafo. Khusus untuk Kelurahan Kulaba, harus diwaspadai terhadap bahaya banjir pada musim penghujan. Disamping itu,

pemukiman yang juga harus waspada terhadap kemungkinan perluasan lahar adalah Kelurahan Taduma, Dorpedu, Kastela dan Kelurahan Toboko dengan luas kurang lebih 1.028,29 Ha.

- 2) Kawasan rawan bencana gunung berapi kategori rawan II terdapat di Sungai/ barangka tepatnya di Kelurahan Sulamadaha hingga bagian timur laut yang berbatasan dengan Sungai Togorara. Alur Sungai yang termasuk kedalam kawasan ini adalah Sungai Togorara, Sungai Kulaba, Sungai Sosoma, Sungai Ruba, Sungai Kelawa, Sungai Tareba, Sungai Piatoe, Sungai Taduma dan Sungai castela. Pemukiman yang mungkin terancam terhadap bahaya lahar adalah Kelurahan Tubo, Tafure, Kulaba, Tobololo, Takome dan Kelurahan Loto, rawan bencana terhadap lontaran batu (pijar), Hujan abu lebat adalah kelurahan Foramadiyahi, Marikurubu (Lingkungan Air Tege-Tege dan Lingkungan Tongole), Buku Bendera dan Kelurahan Moya dengan luas kurang lebih 1.525,18 Ha.
  - 3) Kawasan bencana III adalah kawasan yang letaknya terdekat dengan sumber bahaya dan sering terlanda awan panas, lontaran atau guguran batu (pijar) dan aliran lava. Berhubung sangat tinggi tingkat kewaspadaannya maka kawasan ini tidak diperkenankan untuk hunian tetap. Sebagian alur sungai utama yang termasuk ke dalam daerah ini dan merupakan sarana air untuk material letusan yang bersifat aliran adalah : Sungai Piatoe, Sungai Tareba dan Sungai Takome, sungai Sososma, Sungai Ruba, Sungai Kulaba, serta sungai Togorara.
5. Sedangkan untuk daerah sangat rawan terhadap material lontaran atau guguran batu (pijar), meliputi daerah puncak dengan radius 2,5 km dari pusat letusan (Kawah Gn. Arfat). Di dalam kawasan rawan bencana III ini tidak terdapat beberapa pemukiman penduduk, yaitu :
- 1) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami di sepanjang tepian pantai Kota Ternate;
  - 2) Kawasan rawan tsunami terdapat di Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, dan Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua.

#### **2.1.4. Demografi**

Dalam konteks pembangunan daerah, penduduk merupakan subyek dari pembangunan daerah. Dengan posisi itu, maka capaian hasil kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan harus dapat diukur dengan dampak yang diterima oleh masyarakat, yaitu meningkatnya kesejahteraan penduduk, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti kesehatan, pendidikan dan ketersediaan sarana bagi aktivitas baik sosial maupun ekonomi.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, sampai dengan tahun 2015 penduduk Kota Ternate telah mencapai 214.047 jiwa. Sedangkan kepadatannya telah mencapai 1.321,03 jiwa/km<sup>2</sup>. Ini berarti bahwa terjadi peningkatan kepadatan sebanyak 3,84 jiwa per km<sup>2</sup> bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2014 yang berjumlah 1.317,19 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebagian besar penduduk Kota Ternate tinggal di Pulau Ternate. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang terus mengalami peningkatan, maka tantangan utama yang harus dapat diatasi adalah mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk.

Perkembangan *sex ratio* penduduk telah mencapai 103,30. Ini berarti bahwa pada setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 104 orang laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak daripada penduduk perempuan. *Sex ratio* tertinggi berada pada kelompok umur 5-9 tahun (109,28), sedangkan *sex ratio* terendah berada pada kelompok umur di atas 75 tahun (72,21).

Jumlah penduduk Kota Ternate berdasarkan kecamatan sampai dengan akhir tahun 2015, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

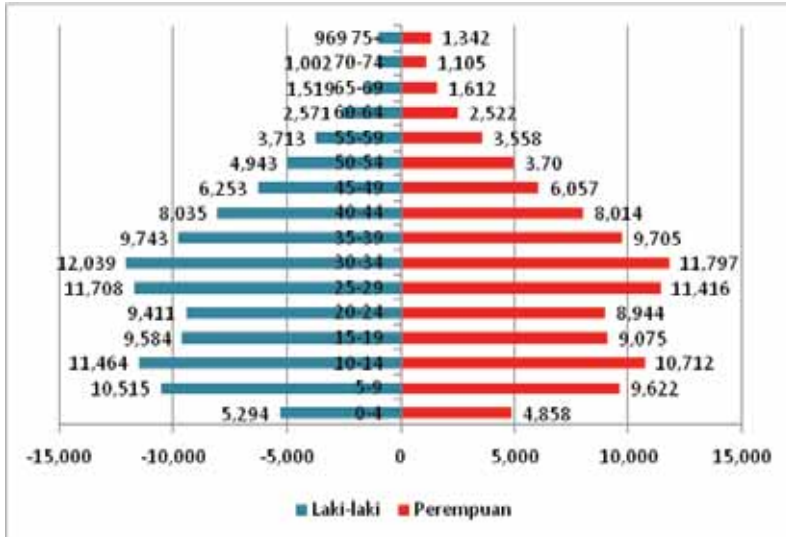
**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan**  
**Kota Ternate Tahun 2013-2015**

No.	Kecamatan	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Pulau Ternate	15.379	15.475	16.084
2	Moti	80.848	76.430	80.819
3	Pulau Batang Dua	52.097	50.265	50.723
4	Pulau Kota	5.097	5.028	4.915
5	Ternate Selatan	2.902	2.683	2.595
6	Ternate Tengah	63.914	60.639	55.984
7	Ternate Utara	2.908	2.905	2.927
<b>Jumlah</b>		<b>223.145</b>	<b>213.425</b>	<b>214.047</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, Tahun 2014-2016

Sedangkan data dan informasi tentang perkembangan penduduk berdasarkan karakteristik kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Ternate, dapat dilihat pada Gambar Piramida Penduduk di bawah ini.





Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, Tahun 2016

Gambar 2.3  
Piramida Penduduk Kota Ternate Tahun 2015

Berdasarkan data yang tersaji pada gambar 2.2 di atas dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Dasar piramida semakin mengecil, baik untuk laki-laki maupun perempuan yang memberikan gambaran bahwa angka kelahiran di Kota Ternate semakin menurun;
2. Untuk kelompok umur tertentu terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki;
3. Pada beberapa kelompok umur terlihat bentangan grafik yang melebar. Hal ini dipengaruhi oleh angka kelahiran yang relatif naik pada tahun 1982 s.d 1986 serta adanya mobilitas penduduk masuk pada kelompok usia tersebut;
4. Bagi penduduk usia reproduksi atau *Child Bearing Age* (15-49 tahun) pada umumnya presentase jumlah perempuan lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk laki-laki;
5. Untuk kelompok usia di atas 75 tahun jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki.

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), adalah seluruh nilai tambah barang dan jasa (komoditi) yang diproduksi di suatu wilayah domestik/regional tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor produksinya. Nilai Produk Domestik Regional Bruto dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu :

- a. Segi Produksi, merupakan jumlah nilai tambah bruto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Nilai tambah bruto yang terdiri dari biaya faktor produksi (upah/gaji, bunga netto, sewa tanah, keuntungan), penyusutan barang modal dan pajak tak langsung netto.
- b. Segi Pendapatan, merupakan balas jasa (pendapatan) yang diterima faktor-faktor produksi karena ikut sertanya dalam proses produksi dalam suatu wilayah, dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
- c. Segi Pengeluaran, merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, Pemerintah dan Lembaga Swasta Non Profit, pembentukan modal tetap, perubahan stok serta Ekspor Netto, biasanya dalam jangka waktu tertentu.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku merupakan penjumlahan/total nilai tambah dari barang dan jasa yang di produksi dan dinilai menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan. PDRB atas dasar harga konstan merupakan penjumlahan/total nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi dan dinilai menggunakan harga pada tahun dasar yaitu tahun 2010.

Perkembangan PDRB ADHB Kota Ternate sepanjang 4 (empat) tahun terakhir berkembang secara dinamis, dimana pada tahun 2012 masih sebesar Rp. 1.318.467.000.000, maka pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 5.422.279.000.000, meningkat di tahun 2014 PDRB mencapai angka Rp. 6.235.200.000.000, dan di akhir 2015 mencapai angka Rp. 7.091.790.000.000. Sementara itu PDRB ADHK sepanjang kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 berkembang secara dinamis, dimana PDRB Kota Ternate seri 2010 atas dasar harga konstan pada tahun 2013 sebesar 4.556,23 miliar rupiah meningkat pada tahun 2014 adalah sebesar 4.960,44 miliar rupiah dan meningkat pada tahun 2015 sebesar 5.351,91 miliar rupiah.

Selama tahun 2012-2015, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate pada tahun 2012 masih berada pada 8,09 persen, maka pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 7,65 persen dan pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 8,10 persen, tercatat sedikit melambat jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 8,87 persen.

Lima lapangan usaha kontributor PDRB terbesar berturut-turut adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (25,60%); administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib (17,49%); transportasi dan pergudangan (16,17%). Data selengkapnya disajikan pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha**  
**Kota Ternate Tahun 2012-2015**

URAIAN	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,75	4,69	4,42	4,16
Pertambangan dan Penggalian	0,06	0,06	0,06	0,07
Industri Pengolahan	3,66	3,54	3,55	3,51
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,08	0,10	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08
Konstruksi	7,18	6,74	6,72	6,77
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,30	24,73	24,93	25,60
Transportasi dan Pergudangan	15,35	15,93	16,25	16,17
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,14	1,12	1,12	1,04
Informasi dan Komunikasi	7,59	7,54	7,74	7,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,74	6,71	6,34	6,56
Real Estate	0,24	0,23	0,22	0,22
Jasa Perusahaan	0,79	0,78	0,76	0,74
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17,88	18,00	17,96	17,49
Jasa Pendidikan	4,93	4,73	4,67	4,81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,24	3,19	3,28	3,22
Jasa lainnya	1,96	1,86	1,80	1,86
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2013-2016

Sementara itu, pertumbuhan PDRB ADHK di Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4**
**Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010=100 Menurut Lapangan Usaha Kota Ternate Tahun 2012-2014**

URAIAN	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,81	3,32	1,89
Pertambangan dan Penggalian	10,17	5,60	7,31
Industri Pengolahan	4,07	5,51	9,26
Pengadaan Listrik dan Gas	5,24	4,00	28,94
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,05	6,53	9,89
Konstruksi	14,17	4,31	5,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,70	10,26	9,83
Transportasi dan Pergudangan	6,54	6,51	8,80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,91	6,08	8,66
Informasi dan Komunikasi	8,39	11,28	12,74
Jasa Keuangan dan Asuransi	16,28	6,83	3,87
Real Estate	7,50	4,60	6,70
Jasa Perusahaan	6,80	8,08	7,14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,30	7,50	9,50
Jasa Pendidikan	6,20	4,80	7,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,80	10,03	9,84
Jasa lainnya	6,00	5,00	7,00
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>8,09</b>	<b>7,65</b>	<b>8,87</b>

Sumber: BPS Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2013-2015

## 2. Laju Inflasi

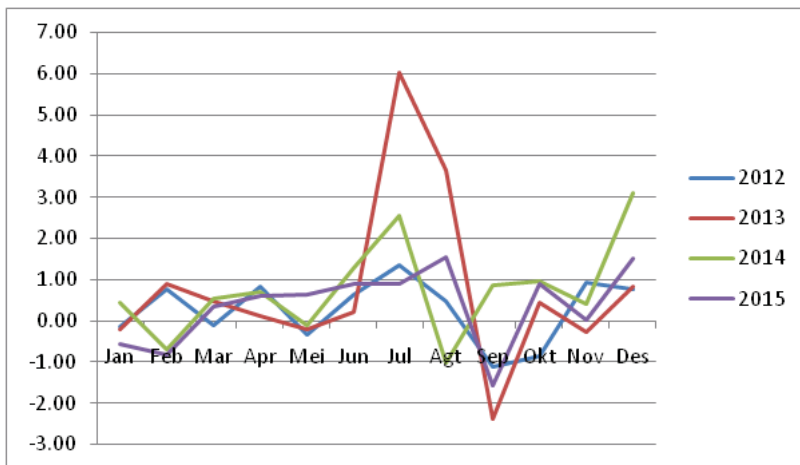
Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Apabila inflasi itu ringan justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Namun sebaliknya pada inflasi yang tinggi masyarakat menjadi tidak bersemangat untuk bekerja, menabung atau mengadakan investasi dan produksi yang disebabkan harga meningkat dengan cepat.

Besarnya inflasi suatu daerah dapat digambarkan dengan perkembangan indeks harga implisit PDRB (perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) setiap tahun dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Pergerakan inflasi tahunan (year on year) Kota Ternate

sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4,52 persen (turun dari tahun 2014 yang sebesar 9,34 persen).

Penurunan laju inflasi pada tahun 2015 secara kumulatif bersumber dari (i) kelompok bahan makanan dengan sumbangan inflasi sebesar 2,45 persen; (ii) kelompok makanan jadi, minuman dan rokok memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,63 persen; (iii) kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memberikan sumbangan sebesar 1,02 persen; (iv) kelompok sandang menyumbang sebesar 0,67 persen; (v) kelompok kesehatan menyumbang sebesar 0,05 persen; (vi) kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga menyumbang sebesar 0,17 persen; dan (vii) kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan memberikan sumbangan sebesar -0,47 persen.

Angka inflasi di Kota Ternate sepanjang kurun tahun 2012-2015, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kota Ternate Tahun 2013-2016.

Gambar 2.4  
Perkembangan Angka Inflasi Kota Ternate Tahun 2012-2015

### 3. Pertumbuhan PDRB Perkapita

PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun. Oleh karena itu, jika asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir ke luar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka nilai pendapatan regional

diasumsikan sama besar dengan nilai PDRB. Angka pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Sampai dengan akhir tahun 2015, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) masyarakat Kota Ternate telah mencapai sebesar 33,29 juta rupiah pertahun dan jika disandingkan dengan PDRB Perkapita ADHB tahun 2014 yang sebesar 30,1 juta rupiah pertahun, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) masyarakat Kota Ternate telah mencapai sebesar 25,13 juta rupiah pertahun dan jika disandingkan dengan PDRB Perkapita ADHK tahun 2014 yang sebesar 23,87 juta rupiah pertahun maka nilai ini mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan produktivitas yang tinggi pada sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Walaupun mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif besar, dengan data jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 214.047 jiwa, namun pendapatan perkapita tetap mampu tumbuh sebagai refleksi tingkat pendapatan penduduk di Kota Ternate.

Pendapatan perkapita yang mengalami kenaikan dan pertumbuhan ekonomi yang terus berada pada posisi positif pada tahun 2015, secara langsung telah berdampak pada perbaikan kemampuan atau daya beli masyarakat, yang berpengaruh terhadap permintaan kebutuhan akan barang dan jasa. Pemenuhan yang tidak berimbang dengan permintaan selama ini sangat berdampak pada terjadinya inflasi di Kota Ternate.

Nilai PDRB Perkapita Kota Ternate sepanjang kurun tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2.5**  
**Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Ternate Tahun 2013-2015 (2010 = 100)**

TAHUN	ADHB	ADHK
2013	26.739.949,7	22.480.448,8
2014	30.077.373,3	23.826.542,6
2015	33.295.245,3	25.126.731

Sumber : BPS Kota Ternate, Tahun 2014-2016

#### 4. Persentase Penduduk Miskin

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh Pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kota Ternate. Berbagai macam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan akan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran

kebutuhan minuman makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya penurunan angka kemiskinan di Kota Ternate, di mana pada tahun 2014 sebesar 3,16 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,24 persen. Sementara itu, sepanjang kurun waktu tahun 2015 walaupun belum dirilis oleh BPS Kota Ternate, tetapi dengan indikasi gairahnya aktivitas pekonomian termasuk perekonomian masyarakat dan derasnya arus investasi yang masuk ke Kota Ternate, maka adanya harapan angka kemiskinan diharapkan akan terus menurun.

Perkembangan persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6**  
**Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan**  
**Kota Ternate Tahun 2013-2015**

No.	Indikator	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk Miskin	6,61	3,24	3,16
2.	Persentase Penduduk Miskin	0,25	0,29	0,25
3.	P1	0,27	0,08	0,21
4.	P2	0,02	0,00	0,01
5.	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	418.472	434.061	-

Sumber : BPS Kota Ternate, Susenas Kota Ternate, Tahun 2014-2016

## 5. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Roda pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak pidana yang ditangani selama 1 tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka data dan informasi tentang jumlah tindak

pidana dan persentase penyelesaian yang dapat ditangani oleh Pemerintah Kota Ternate serta resiko penduduk dan selang waktu terjadi tindak pidana sepanjang kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Tindak Pidana dan Persentase Penyelesaian Tindak Pidana**  
**Menurut Kepolisian Resort di Kota Ternate Tahun 2013-2015**

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana
1	2013	477	64,5
2	2014	369	75
3	2015	237	48

Sumber: Kepolisian Resort Ternate, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2016

**Tabel 2.8**  
**Resiko Penduduk dan Selang Waktu Terjadi Tindak Pidana**  
**Kota Ternate Tahun 2013-2015**

No	Tahun	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana	Selang Waktu Terjadi Tindak Pidana
1	2013	-	28.37'39"
2	2014	198,7	23.44'14"
3	2015	127,6	36.57'36"

Sumber: Kepolisian Resort Ternate, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2016

## 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Data dan informasi tentang capaian kinerja pembangunan daerah dapat diukur antara lain pada capaian parameter Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dihitung dengan tiga indeks yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pendapatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kota Ternate, bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir IPM Kota Ternate bergerak kearah yang positif. Jika pada tahun 2013 IPM masih berada pada angka 76,69, maka pada tahun 2014 meningkat hingga mencapai angka 77,15 dan pada akhir tahun 2015 telah berada pada angka 77,64.



Nilai IPM ini merupakan yang tertinggi dari seluruh kabupaten/kota se Provinsi Maluku Utara. Dari hasil penghitungan IPM ini menunjukkan, bahwa program dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan selama ini khususnya di Bidang Pendidikan dan Kesehatan telah berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti yang tergambar pada angka Indeks Pembangunan Manusia tersebut. Selain itu terjadi kenaikan pada indeks pendapatan masyarakat, sebagaimana digambarkan oleh struktur PDRB, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun pendapatan perkapita yang menunjukkan adanya kenaikan daya beli masyarakat, hal ini sejalan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi.

## **2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

### **1. Pendidikan**

#### **a. Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan**

Angka melek huruf adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Sedangkan rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal Pendidikan merupakan kunci strategis dalam mempersiapkan terwujudnya peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada pada suatu wilayah. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan meningkatkan daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Mengukur kualitas penduduk suatu daerah dapat dilakukan dengan mengetahui tingkat kemampuan dalam setiap individu dalam mengakses ilmu pengetahuan dalam rangka memperluas cakrawala ilmu dan wawasan berfikir. Oleh karena itu, landasan dasar suatu masyarakat untuk dapat mengakses pengetahuan dimaksud dapat dilakukan antara lain dengan kemampuan baca-tulis yang dihitung dengan Angka Melek Huruf (AMH).

Perkembangan data dan informasi tentang Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Ternate tahun 2015 tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.9**  
**Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan**  
**Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kota Ternate Tahun 2015**

No	Uraian	2015
1	Angka Melek Huruf	96,00
2	Angka Harapan Lama Sekolah	15,05
3	Rata-rata lama Sekolah	11,12
4	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	
	- Tidak/Belum Tamat SD	2,78
	- Tamat SD/ sederajat	5,11
	- Tamat SMP/ sederajat	13,61
	- Tamat SMA/ sederajat	32,36
	- Tamat SMK	6,93
	- Tamat Diploma	1,66
	- Tamat Sarjana	9,46

Sumber: BPS Kota Ternate dan Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate, Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya peningkatan indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Angka Melek Huruf pada tahun 2015 sebesar 96,00 persen. Untuk Rata-rata Lama Sekolah, meningkat dari 11,11 tahun 2014 menjadi 11,12 tahun 2015 (setara kelas dua SMA). Begitu pula dengan Angka Harapan Lama Sekolah, meningkat dari 14,66 pada tahun 2014 menjadi 15,05 pada tahun 2015. Untuk Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan tidak terjadi perubahan yang signifikan di mana penduduk 15 tahun ke atas mayoritas lulusan SMA dan SMK. Sedikit sekali yang lulusan Diploma dan Tidak/Belum Tamat SD. Penduduk yang Tidak/Belum Tamat SD di isi oleh Lansia yang memang tidak/belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali, orang cacat ataupun orang yang tidak mampu membiayai pendidikan (faktor ekonomi).

#### **b. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

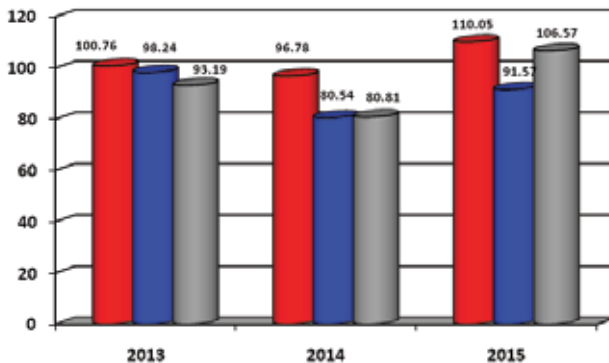
Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam menempuh pendidikan di jenjang tertentu. Perkembangan data dan informasi tentang APK Kota Ternate dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.10**  
**APK SD, SMP, SMA di Kota Ternate Tahun 2013-2015**

Uraian	2013	2014	2015
APK SD/MI Sederajat	100,76	96,78	110,05
APK SMP/MTs Sederajat	98,24	80,54	91,57
APK SMA/MA/SMK Sederajat	93,19	80,81	106,57

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka, Tahun 2014-2016

Dengan mencermati angka-angka yang terdapat pada tabel di atas, selanjutnya dirinci sebagaimana data yang tersaji pada gambar di bawah ini dimana terlihat, bahwa APK pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan, APK SMP/MTs juga mengalami peningkatan, demikian juga APK untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan.



Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2014-2016

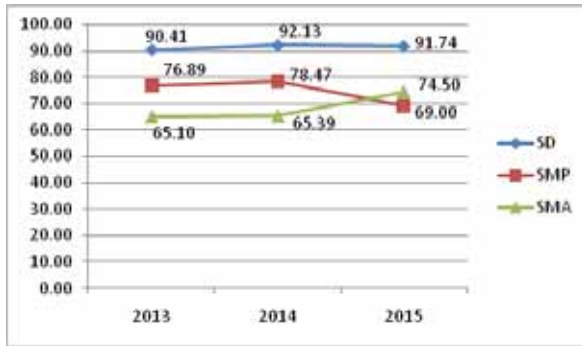
**Gambar 2.5**  
**Angka Partisipasi Kasar Kota Ternate Tahun 2013-2015**

### c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah jumlah siswa yang berusia pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat ke ikut sertaan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Data dan informasi tentang pertumbuhan Angka Partisipasi Murni (APM) yang disajikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir Kota Ternate adalah persentase perbandingan yang meliputi (i) jumlah penduduk usia 7-12 tahun dibandingkan dengan jumlah siswa usia 7-12 tahun yang bersekolah SD/

MI; (ii) jumlah penduduk usia 13-15 tahun dibandingkan dengan jumlah siswa usia 13-15 tahun yang bersekolah SMP/MTs; dan (iii) jumlah penduduk usia 16-18 tahun dibandingkan dengan jumlah siswa usia 16-18 tahun yang bersekolah SMA/SMK/MA.

Pertumbuhan Angka Partisipasi Murni selama 3 (tiga) tahun terakhir di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana grafik di bawah ini.



Sumber data : Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2014-2016

Gambar 2.6  
Pertumbuhan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Ternate Tahun 2013–2015

## 2. Kesehatan

### a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang menyebabkan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Sedangkan kematian bayi eksogen atau kematian *post neo-natal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal*

disebabkan oleh faktor *endogen* yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta kematian balita dapat diintervensi dengan mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak di bawah usia 5 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun.

Perkembangan data AKHB dalam 4 (empat) tahun terakhir di Kota Ternate dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.11**  
**Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Ternate Tahun 2012-2015**

Tahun	Jumlah Kematian Bayi Usia Dibawah 1 Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB	AKHB
2012	23	2.688	8,56	991,14
2013	34	2.703	12,58	987,42
2014	20	2.743	7,29	992,71
2015	15	4.166	3,60	996,40

Sumber : BPS Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2013-2016

## b. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka digunakan angka harapan hidup yang diterbitkan BPS.

Perkembangan data tentang Angka Harapan Hidup selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.12**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Ternate Tahun 2012-2015**

2012	2013	2014	2015
69,64	69,67	69,97	70,07

Sumber: BPS Kota Ternate, Susenas Kota Ternate Tahun 2013-2016

Dari data di atas terlihat, bahwa Angka Harapan Hidup Kota Ternate mengalami peningkatan, jika pada tahun 2012 Angka Harapan Hidup masih pada kisaran 69,64 tahun, maka pada tahun 2013 Angka Harapan Hidup meningkat menjadi 69,67 tahun, pada tahun 2014 Angka Harapan Hidup meningkat menjadi 69,67 tahun dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 70,07 tahun. Hal ini menandakan, bahwa program dan kegiatan bidang urusan kesehatan yang dilaksanakan dalam 4 (empat) tahun terakhir memberi manfaat bagi seluruh masyarakat di Kota Ternate.

### c. Persentase Balita Gizi Buruk

Demikian pula program dan kegiatan bidang urusan Gizi, dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah memberikan dampak yang membaik bagi pertumbuhan balita di Kota Ternate, walaupun masih terdapat kasus balita gizi buruk. Data tentang presentase pengurangan balita gizi buruk di Kota Ternate dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.13**  
**Pertumbuhan Persentase Balita Gizi Buruk Kota Ternate Tahun 2012-2014**

No	Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase (%)
1	2012	40	19.055	0,21
2	2013	60	15.285	0,39
3	2014	92	15.046	0,61

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Ternate, Tahun 2013-2015

## 3. Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan dapat dilihat dari jumlah tanah yang bersertifikat dan persentase bidang tanah yang sudah melaksanakan pendataan administrasi pertanahan. Sampai dengan akhir tahun 2014, banyaknya sertifikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional di Kota Ternate adalah (i) Sertifikat Hak Milik sebanyak 1.466; (ii) Sertifikat Hak Guna Bangunan sebanyak 109; dan (iii) Sertifikat Hak Pakai sebanyak 12.

## 4. Ketenagakerjaan

### a. Rasio Penduduk yang Bekerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Oleh karena itu, data dan informasi tentang rasio penduduk yang bekerja dalam konteks urusan ketenagakerjaan dapat dimaknai sebagai persentase jumlah penduduk yang bekerja dalam kurun waktu tertentu disandingkan dengan persentase jumlah total seluruh angkatan kerja dalam waktu yang sama di Kota Ternate.

Sepanjang tahun 2015 di Kota Ternate menurut Statistik Daerah Kota Ternate bahwa lebih dari separuh penduduk usia kerja di Ternate yaitu penduduk berusia 15 tahun keatas masuk dalam angkatan kerja. Hal ini terlihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2015 sebesar 61,17 persen, sedikit menurun dibandingkan tahun 2014. Dibandingkan tahun sebelumnya maka kondisi ketenagakerjaan di Ternate semakin membaik, terlihat dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang meningkat dari 91,28 persen menjadi 93,13 persen di tahun 2015. Bila dilihat dari penyerapan tenaga kerja maka sektor Jasa tampak mendominasi yaitu 77 persen diikuti oleh sektor industri yang mencapai 15 persen dan yang terendah sektor pertanian yaitu 8 persen.

Berdasarkan data dan informasi yang disajikan sebagaimana terdapat dalam gambar di atas dapat diketahui, bahwa pada satu sisi jumlah angkatan kerja meningkat yang dipicu oleh meningkatnya jumlah penduduk, namun pada sisi lain jumlah penduduk yang bekerja pun meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini memberi sinyal, bahwa sesungguhnya program/kegiatan bidang urusan yang dirumuskan telah dapat memberi dampak pada pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate.

### b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kemajuan perekonomian suatu daerah, ditandai pula dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru, karena salah satu indikator sosial untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam hal kesejahteraan penduduk adalah indikator ketenagakerjaan. Permasalahan penting dalam bidang ketenagakerjaan selain

keadaan tenaga kerja dan struktur ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran yang selama ini kita hadapi. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Selama rentang tahun 2014-2015 terjadi penurunan TPT di Kota Ternate, dari 8,72 persen pada tahun 2014 menjadi 6,87 persen di tahun 2015. Hal ini menjadi salah satu indikasi semakin baiknya lapangan usaha dalam menyerap ketersediaan tenaga kerja di Kota Ternate. Dari sisi jumlah orang yang bekerja juga terjadi peningkatan, di mana pada tahun 2014 sebanyak 85.232 orang menjadi 88.034 pada tahun 2015.

Di samping itu, bila kita melihat daya serap tenaga kerja pada beberapa sektor strategis, pada tahun 2015 cukup meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor industri meningkat dari 12.519 orang pada tahun 2014 menjadi 13.161 orang pada tahun 2015.

### 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah, dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan aspek kesenian dan keolahragaan yang berkembang di masyarakat. Selama kurun waktu tahun 2012-2014, jumlah grup kesenian di Kota Ternate tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Jika dalam tahun 2012 grup kesenian masih berjumlah 43 grup, maka pada tahun 2015 telah bertambah menjadi 51 grup kesenian. Demikian juga perkembangan museum, jika pada tahun 2012 masih belum terdapat, maka sampai dengan tahun 2015 telah menjadi 2 museum.

Data pertumbuhan selama 4 (empat) tahun terakhir di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.14**  
**Jumlah Group dan Museum Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Group Kesenian Per 10.000 penduduk	43	49	51	51
2	Jumlah Museum	0	0	2	2

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate, 2013-2016



Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keterampilan yang tinggi untuk memenangkan kompetisi di era persaingan bebas sebagai dampak dari globalisasi yang sudah di depan mata, maka Pemerintah Kota Ternate telah menindaklanjuti seruan tersebut diantaranya dengan mendorong dan mengembangkan olahraga dikalangan masyarakat. Pertumbuhan sarana olahraga dalam 4 (empat) tahun terakhir di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.15**  
**Sarana dan Prasarana Olah Raga Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Klub Olah Raga	98	98	98	98
2	Jumlah Gedung Olah Raga Per 10.000 penduduk	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ternate, 2013-2015

Dari sajian data tersebut pada tabel di atas terlihat, bahwa perkembangan jumlah klub olahraga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan, bahwa sesungguhnya Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat di Kota Ternate merespons dengan positif kebijakan pemerintah di bidang pengembangan olahraga dan sekaligus memberi gambaran, bahwa Pemerintah Kota Ternate menjabarkan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

## 2.3. Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

#### 1. Urusan Pendidikan

##### a. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/ MAN dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun, dengan kata lain Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM

melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MAN dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Dengan demikian penduduk Usia 7-24 Tahun menurut jenis kelamin, kelompok umur sekolah dan partisipasi sekolah di Kota Ternate tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.16**  
**Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin,**  
**Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah di Kota Ternate Tahun 2015**

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-laki			
7-12	0,50	99,50	0,00
13-15	0,00	100,00	0,00
16-18	0,00	87,39	12,61
19-24	0,00	47,02	52,98
7-24	0,17	77,89	21,94
Perempuan			
7-12	2	98	0
13-15	0	97	3
16-18	0	85	15
19-24	0	67	33
7-24	1	85	14
Laki-laki + Perempuan			
7-12	1	99	0
13-15	0	98	2
16-18	0	86	14
19-24	0	56	44
7-24	0	82	18

Sumber: BPS Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2016

## b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah merupakan hal yang penting karena merupakan tempat di mana terjadinya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Selain itu ketersediaan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi dan berkualitas merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di suatu wilayah. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pembangunan fisik melalui kegiatan pembangunan gedung baru, penambahan lokal, rehabilitasi ringan dan berat. Pembangunan fisik diikuti dengan peningkatan mutu tenaga pengajar dan penambahan jumlah tenaga pengajar.

**Tabel 2.17**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah**  
**Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI				
	Jumlah gedung sekolah	112	112	111	123
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21.462	21.462	21.462	24.224
	Rasio	191,63	191,63	193,35	196,94
2	SMP/MTs				
	Jumlah gedung sekolah	26	25	25	38
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.960	6.960	6.960	8.925
	Rasio	278,40	278,40	278,40	234,87
3	SMA/SMK/MA				
	Jumlah gedung sekolah	17	17	18	18
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-19 tahun	6.021	6.021	5.931	5.931
	Rasio	354,18	354,18	329,50	329,50

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2013-2016

## c. Rasio Guru terhadap Murid

Indikator rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan tertentu per 1.000 jumlah murid pendidikan dimaksud. Indikator rasio guru terhadap murid mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar berbanding jumlah murid di suatu jenjang pendidikan. Untuk mengetahui dan mengukur jumlah yang paling ideal antara jumlah murid untuk satu guru agar tercapai target kualitas pembelajaran, maka perlu dihitung persentase rasio perbandingan dimaksud, sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.18**  
**Rasio Guru Murid Kota Ternate Tahun 2012- 2015**

No.	Jenjang Pendidikan	TA. 2012	TA. 2013	TA. 2014	TA. 2015
1	SD/MI				
	Jumlah Guru	1.692	1.692	1.692	1.569
	Jumlah Murid	21.462	21.462	21.462	24.224
	Rasio	12,68	12,68	12,68	15,44
2	SMP/MTs				
	Jumlah Guru	623	623	623	784
	Jumlah Murid	6.960	6.960	6.960	8.925
	Rasio	11,17	11,17	11,17	11,38
3	SMA/SMK/MA				
	Jumlah Guru	558	558	596	596
	Jumlah Murid	6.021	6.021	5.931	5.931
	Rasio	10,79	10,79	9,95	9,95

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2013-2016

Selain jumlah sekolah sebagaimana telah dijelaskan di atas, sampai dengan akhir tahun 2015 di Kota Ternate juga tersedia sarana pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi sebanyak 6 buah Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta. 6 perguruan tinggi dimaksud yaitu : (i) Universitas Khairun; (ii) Institut Agama Islam Negeri Ternate; (iii) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara; (iv) AIKOM Ternate; (v) STIKIP; dan (vi) Politeknik Kemenkes Ternate dengan berbagai disiplin ilmu atau fakultas yang tersedia.

#### **d. Angka Putus Sekolah**

Tingkat keberhasilan Program Wajib Belajar 12 tahun salah satunya dapat diukur melalui Angka Putus Sekolah. Angka putus sekolah menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena alasan tertentu. Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah biasanya adalah alasan ekonomi atau ketidak mampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan sosial.

**Tabel 2.19**  
**Angka Putus Sekolah Kota Ternate Tahun 2012-2014**

No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
1	SD/MI	1,26	0,79	0,64
2	SMP/MTs	10,90	7,32	2,94
3	SMU/SMK/MAN	29,46	24,28	20,61

Sumber : BPS Kota Ternate, Susenas Tahun 2013-2015

## 2. Urusan Kesehatan

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu hal penting untuk ditingkatkan guna menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. Untuk itulah peran serta Pemerintah sangat diperlukan dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat semakin meningkat. Peran Pemerintah dalam pembangunan kesehatan menyangkut berbagai aspek seperti penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat baik menyangkut biaya maupun tempatnya. Selain itu, pemberdayaan kepada masyarakat untuk lebih memahami pola hidup sehat dan upaya menjaga kesehatan secara baik terus digalakkan oleh Pemerintah Daerah ini melalui Dinas Kesehatan.

Penyediaan fasilitas kesehatan umum seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, termasuk tenaga kesehatan baik dari segi jumlah maupun kualitas serta pusat pelayanan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Pemerintah Kota Ternate telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Ternate, di antaranya dengan membangun berbagai fasilitas kesehatan yang menyebar di setiap kecamatan. Sampai dengan tahun 2015 terdapat sejumlah fasilitas kesehatan antara lain, 7 buah Rumah Sakit, 2 buah Rumah Bersalin, 10 buah Puskesmas, 14 buah Puskesmas Pembantu, 15 buah Polindes, 176 buah Posyandu dan 10 Klinik/Balai Kesehatan. Selain fasilitas kesehatan yang tersedia, menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Ternate, jumlah dokter adalah 170 orang terdiri dari dokter spesialis sebanyak 29 orang, dokter umum 123 orang dan dokter gigi sebanyak 18 orang. Selain itu dilengkapi dengan tenaga kesehatan yaitu tenaga medis sebanyak 157 orang, perawat 296 orang, bidan 128 orang, tenaga farmasi 37 orang dan tenaga kesehatan lainnya sebanyak 269 orang.

### a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu, antara lain :

- 1) Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
- 2) Membudayakan NKKBS.
- 3) Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.

Terkait dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita di Kota Ternate sampai akhir tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada gambar di bawah ini.

**Tabel 2.20**  
**Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita**  
**Kota Ternate Tahun 2012-2014**

Uraian	2012	2013	2014
Jumlah Posyandu	176	176	176
Jumlah Balita	19.055	15.285	15.046
Rasio	9,24	11,51	11,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Ternate, Tahun 2013-2015

### b. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Perkembangan rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) kurun terhadap jumlah penduduk dalam kurun waktu tahun 2015 di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.21**  
**Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Ternate Tahun 2015**

No.	Uraian	Persentase	Jumlah
1	Rasio Puskesmas	0,12	10
2	Rasio Pustu	0,26	14
3	Poliklinik	0,19	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, Tahun 2016

Dari tabel di atas menunjukkan pembangunan sarana kesehatan dari tahun ke tahun meningkat. Hingga tahun 2015 semua Kecamatan di Kota Ternate telah terbangun puskesmas. Demikian juga peranan swasta dalam mendukung ketersediaan sarana penunjang kesehatan di Kota Ternate secara umum terus mengalami peningkatan.

### c. Fasilitas Kesehatan

Capaian indikator kinerja pelaksanaan urusan kesehatan di Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.22**  
**Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Ternate Tahun 2012-2015**

Tahun	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Balai Kes/ Klinik	Polindes
2012	8	3	9	144	10	7
2013	7	3	10	158	10	12
2014	7	3	10	176	10	15
2015	7	2	10	176	10	15

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2013-2016

### d. Rasio Tenaga Medis dan Non Medis Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Data perkembangan capaian indikator kinerja rasio tenaga medis dan non medis serta penyebaran dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi menurut sarana pelayanan kesehatan di Kota Ternate pada tahun 2015, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.23**  
**Perkembangan Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No.	Tenaga Pelayanan	2012	2013	2014	2015
1.	Dokter ahli	23	28	27	29
2.	Dokter Umum	47	73	87	123
3.	Dokter Gigi	13	18	18	18
4.	Perawat	230	234	229	296
5.	Pembantu Perawat	-	14	14	14
6.	Bidan PNS/PTT	37	37	37	128
7.	Pembantu Bidan	22	22	22	12

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2013- 2016

**Tabel 2.24**  
**Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi**  
**Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Ternate Tahun 2015**

No.	Unit Kerja	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi
1.	Puskesmas Siko	4	7	1
2.	Puskesmas Kalumpang	0	4	1
3.	Puskesmas Kota	0	5	2
4.	Puskesmas Kalumata	0	3	1
5.	Puskesmas Gambesi	0	3	1
6.	Puskesmas Sulamadaha	0	5	1
7.	Puskesmas Moti	0	5	2
8.	Puskesmas Mayau	0	1	0
9.	Puskesmas Hiri	0	1	1
10.	Puskesmas Jambula	0	2	1
11.	RSU Chasan Bosoirie	18	66	1
12.	RS. Tentara	1	4	1
13.	RS. Bhayangkara	0	2	2
14.	RS. Medika Harifalam	2	5	1
15.	RS. Islam Ternate	1	2	1
16.	RS. Dharma Ibu	1	4	1
17.	Klinik Ananda	1	2	0
18.	Klinik Permata Hati	1	1	0
19.	Diabetes Center	0	1	0
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>123</b>	<b>18</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2016



### e. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Ternate sepanjang kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.25**  
**Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) Menurut Tahun dan Penolong Proses Kelahiran di Kota Ternate Tahun 2013-2015**

Penolong Kelahiran	2013	2014	2015
Dokter	38,60	40,75	0
Bidan	54,69	50,26	30,90
Non Tenaga Kesehatan	6,71	8,99	7,87
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber :BPS KotaTernate, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2014-2016

## 3. Urusan Pekerjaan Umum

Jaringan transportasi baik darat, laut maupun mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan suatu wilayah, yaitu memberi kemudahan atau meningkatkan interaksi antar wilayah/pusat pelayanan. Dengan demikian akan diperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan kewilayahan (membuka keterisolasian dengan wilayah lainnya), karena hubungan antar wilayah yang semakin mudah akan mendorong pergerakan penduduk. Dengan terbukanya wilayah yang terisolasi, maka wilayah tersebut akan semakin berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

### a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Kondisi jaringan jalan di Kota Ternate kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.26**  
**Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (km)			
		2012	2013	2014	2015
1.	Aspal	103.028	103.028	232.480	117,46
2.	Kerikil	89.610	89.610	-	125,66
3.	Tanah	44.188	60.887	64.727	59,36
4.	Lainnya	17.136	-	-	6,21
	<b>Jumlah</b>	<b>253.962</b>	<b>253.962</b>	<b>297.207</b>	<b>308,69</b>
	<b>Kondisi Jalan</b>				
1.	Baik	119.187	119.187	151.07	152,25
2.	Sedang	47.481	47.481	43.94	56,30
3.	Rusak	24.314	24.314	35.10	43,23
4.	Rusak Berat	62.944	62.944	67.10	56,91
	<b>Jumlah</b>	<b>253.962</b>	<b>253.962</b>	<b>297.207</b>	<b>308,69</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2013- 2016

## b. Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Tempat merupakan bagian yang sangat penting untuk terciptanya kondusif Berdasarkan Sampai tahun 2015 jumlah sarana tempat ibadah yang ada di Kota Ternate tercatat 197 buah mesjid, 13 buah gereja protestan, 1 buah pura dan 1 buah wihara.

## c. Ketersediaan Air Bersih

Air digunakan manusia untuk mencuci, mandi, dan minum. Air bersih sangat mempengaruhi kesehatan manusia, ketersediaan air bersih sangat penting diperhatikan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Jika hanya mengandalkan air hujan saja tidak akan cukup memenuhi kebutuhan air manusia, oleh karena itu pengelolaan air yang baik dapat menjamin selalu tersedianya air bersih bagi masyarakat. Pemerintah Kota Ternate memiliki Perusahaan Daerah Air Minum untuk mengelola dan mendistribusikan air bersih ke masyarakat Kota Ternate.

Pada tahun 2015 jumlah pelanggan PDAM sebanyak 25.905 orang yang dibagi menjadi beberapa kategori yaitu rumah tangga, usaha, usaha non komersial, usaha sosial dan pelabuhan. sedangkan jumlah air yang disalurkan selama tahun 2015 sebanyak 8.492.101 m<sup>3</sup>.

**Tabel 2.27**  
**Presentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin**  
**dan Sumber Air Minum di Kota Ternate Tahun 2015**

No	Sumber Air Minum	Laki-laki	Perempuan
1	Air Dalam Kemasan	2,52	0,00
2	Air Isi Ulang	31,45	45,31
3	Leding	43,76	38,41
4	Pompa	2,93	6,50
5	Sumur Terlindung	14,60	5,00
6	Sumur Tidak Terlindung	0,88	0,00
7	Lainnya	3,85	4,77

Sumber : BPS Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2016

#### 4. Urusan Perumahan

Keberhasilan capaian kinerja pengelolaan urusan perumahan dapat diukur dengan beberapa indikator pencapaian tentang rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi.

Pada tahun 2015 masih terdapat rumah tangga dengan luas lantai kurang dari 20 m<sup>2</sup> sebanyak 12,62 persen atau terjadi sedikit kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu 11,39 persen.

Kondisi perumahan di Kota Ternate pada tahun 2015 relatif meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 terlihat dengan meningkatnya persentase kualitas perumahan yang dikuasai oleh rumah tangga. Sebanyak 99,54 persen rumah tangga memiliki lantai terluas bukan tanah dan persentase rumah tangga yang memiliki atap layak mencapai 100 persen. Demikian juga dengan rumah tangga yang memiliki dinding tembok mencapai 91,32 persen. Sebagai salah satu sumber kehidupan, air minum sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat. Akses terhadap air minum layak di Kota Ternate paling banyak menggunakan air ledeng meteran sebanyak 42,12 persen dan perlu diketahui sekitar 1,37 persen rumah tangga di Kota Ternate belum dapat menikmati air minum layak. Jumlah pelanggan listrik dan air bersih menurut pelanggan rumah tangga sebanyak 23.922 rumah tangga. Data dan informasi tentang capaian kinerja pengelolaan urusan perumahan tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.28**  
**Capaian Kinerja Pengelolaan Urusan Perumahan Kota Ternate Tahun 2015**

Kecamatan	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera				Jumlah	Rumah Tidak Layak Huni	Lingkungan Pemukiman Kumuh
		I	II	III	III+			
Pulau Ternate	284	920	2.291	278	13	3.786	50	Sedang : Kec. Pulau Ternate
Moti	34	661	424	19	0	1.138	64	Sedang : Kec. Moti
Batang Dua	36	147	519	5	0	707	10	Sedang : Kec. Batang Dua
Pulau Hiri	2	188	542	6	0	738	13	Ringan : Kec. Pulau Hiri
Ternate Selatan	67	178	13.671	2.409	75	16.400	47	Ringan : Kec. Ternate Selatan
Ternate Tengah	53	243	8.830	3.187	185	12.498	8	Sedang : Kec. Ternate Tengah
Ternate Utara	25	759	7.861	1.871	147	10.663	7	Sedang : Kec. Ternate Utara
<b>Ternate</b>	<b>501</b>	<b>3.096</b>	<b>34.138</b>	<b>7.775</b>	<b>420</b>	<b>45.930</b>	<b>199</b>	

Sumber data : BPS Kota Ternate dan Dinas Nakeras Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2016

## 5. Urusan Penataan Ruang

### a. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Data tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Ternate tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.29**  
**Ruang Terbuka Hijau Kota Ternate Tahun 2015**

No	Nama Taman	Jenis	Luas (M <sup>2</sup> )
1	Jalur Hijau Median Jalan Bandara	Jalur Hijau	985,13
2	Taman Madani	Taman Kota	976,86
3	Taman Hutan Kota Benteng Oranje	Hutan Kota	3.200,00
4	Taman Falajawa	Taman Kota	2.370,41
5	Taman Median Falajawa	Jalur Hijau	540,92
6	Taman Sunyie Parada	Taman Kota	950,00
7	Jalur Hijau Kawasan Reklamasi (Tapak I, II, III, I Plus)	Jalur Hijau	714,40
8	Taman Median Pasar Higienis	Jalur Hijau	223,20
9	Taman Nukila	Hutan Kota	4.241,00

**Tabel 2.29**  
**Ruang Terbuka Hijau Kota Ternate Tahun 2015 (lanjutan)**

No	Nama Taman	Jenis	Luas (M <sup>2</sup> )
10	Taman Skatepark	Taman Aktif	833,80
11	Taman Jalan Nukila	Taman Kota	85,00
12	Taman Jalan Stadion	Taman Kota	340,00
13	Taman Bundaran Jl. Ahmad Yani	Pulau Jalan	9,00
14	Taman Segitiga Depan Ex. Gubernur	Taman Kota	326,81
15	Taman Median Depan Al-Munawwar	Taman Kota	186,66
16	Taman Tugu Makugawene	Taman Kota	60,00
17	Taman Kayu Merah	Taman Kota	393,13
18	Jalur Hijau Median Ngade	Jalur Hijau	108,00
<b>Jumlah</b>			<b>32.527,50</b>

Sumber: Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate, Tahun 2016

#### **b. Izin Mendirikan Bangunan**

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Data tentang Izin Mendirikan Bangunan per Kecamatan di Kota Ternate tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.30**  
**Jumlah Bangunan Ber-IMB Kota Ternate Tahun 2015**

No.	Kecamatan	Jumlah Bangunan yang Memiliki IMB
1.	Ternate Selatan	176
2.	Ternate Tengah	85
3.	Ternate Utara	42
4.	Pulau Ternate	11
<b>Jumlah</b>		<b>314</b>

Sumber: Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate, Tahun 2016

## 6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah ditetapkan, bahwa Rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD. Tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah dimaksud harus saling terkait, selaras dan bersinergi. Oleh karena itu, dalam menyusun RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan dalam menyusun RKPD harus berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah, sedangkan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir dokumen perencanaan pembangunan Kota Ternate semakin berkualitas. Indikasi semakin berkualitasnya dokumen perencanaan dimaksud salah satunya dapat diukur dengan telah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ternate Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2011-2015, RTRW (Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah) Tahun 2012-2033 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016.

Indikasi lain yang dapat dijadikan ukuran semakin berkualitasnya dokumen perencanaan pembangunan, dapat diukur dengan telah tersedianya website Bappeda dengan alamat [www.bappeda.kota-terbate.go.id](http://www.bappeda.kota-terbate.go.id). Melalui media ini diharapkan masyarakat akan berpartisipasi memberikan masukan dan sekaligus koreksi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Data dan informasi tentang tersedianya dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota Ternate dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.31**  
**Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Ditetapkan**  
**dengan Perda dan Perkada Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Tahun	Dok RPJPD		Dok RPJMD		Dok. RKPD	
		Ada/ tdk	No./Tgl	Ada/ tdk	No./Tgl	Ada/ tdk	No./Tgl
1	2012	Ada	No. 39 Tahun 2012	Ada	No. 22 Tahun 2010 Tgl. 8 Nopember 2010	Ada	No. 7 Tahun 2011 Tgl. 27 April 2011
2	2013	Ada	No. 39 Tahun 2012	Ada	No. 22 Tahun 2010 Tgl. 8 Nopember 2010	Ada	No. 7 Tahun 2012 Tgl. 12 April 2012

**Tabel 2.31**  
**Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Ditetapkan**  
**Dengan Perda dan Perkada Kota Ternate Tahun 2012-2015 (lanjutan)**

No	Tahun	Dok RPJPD		Dok RPJMD		Dok. RKPd	
		Ada/ tdk	No./Tgl	Ada/ tdk	No./Tgl	Ada/ tdk	No./Tgl
3	2014	Ada	No. 39 Tahun 2012	Ada	No. 22 Tahun 2010 Tgl. 8 Nopember 2010	Ada	No. 11 Tahun 2013 Tgl. 22 April 2013
4	2015	Ada	No. 39 Tahun 2012	Ada	No. 22 Tahun 2010 Tgl. 8 Nopember 2010	Ada	No. 13 Tahun 2014 Tgl. 5 Mei 2014

Sumber : Bappeda Kota Ternate, Tahun 2013-2016

## 7. Urusan Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan dapat tidak terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuensi logis keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang terbaik.

Tumbuhnya kawasan bisnis baru yang didominasi oleh sektor Perdagangan dan peningkatan frekuensi penerbangan, pada tahun 2015 wilayah Maluku Utara dilayani oleh 4 maskapai penerbangan yang ada yaitu Lion Air/Wings Air, Sriwijaya Air, Garuda Indonesia, Express Air. Dengan jumlah rute penerbangan yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2015 jumlah frekuensi pesawat yang datang sebanyak 5.647 kali dan yang berangkat dari Bandara Sultan Babullah sebanyak 5.647 kali. Seiring dengan peningkatan jumlah pesawat yang data dimana penumpang yang berangkat dan berangkat, maka jumlah penumpang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan angkutan udara merupakan moda transportasi dengan beberapa keunggulan antara lain : cepat, harga bersaing serta lebih nyaman dibanding jenis angkutan lainnya, pada tahun 2015 jumlah penumpang yang datang sebanyak 282.314 orang, sedangkan jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara Sultan Babullah Ternate sebanyak 255.696 orang dan yang transit sebanyak 8.558 orang.

Berkembangnya sektor jasa dan sektor lainnya yang secara akumulasi telah membuat pertumbuhan ekonomi Kota Ternate berada pada posisi tertinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Pertumbuhan ini secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat.

### a. Rasio Ijin Trayek, Jumlah KIR, Biaya KIR

Data dan informasi tentang rasio ijin trayek, jumlah ujir kir angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum, biaya pengujian kelayakan angkutan umum dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kota Ternate selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.32**  
**Data Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kota Ternate Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Ijin Trayek	96	95	92	92
2	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	286	288	293	310
3	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit
4	Biaya Pengujian Kelayaan Angkutan Umum	150.000	150.000	150.000	150.000
5	Pemasangan Rambu	41	49	49	55

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Ternate, Tahun 2013-2016

### b. Jumlah Pelabuhan dan Terminal

Pelabuhan laut dan terminal angkutan umum dapat diartikan sebagai prasarana transportasi perairan jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi antar pulau dan antar tempat, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kapal dan kendaraan umum. Perkembangan data tentang jumlah pelabuhan laut dan terminal angkutan di Kota Ternate dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.33**  
**Jumlah Pelabuhan dan Terminal Angkutan Umum Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Pelabuhan Besar	1	1	1	1
2	Pelabuhan Kecil	4	4	5	5
3	Terminal Besar	1	1	1	1
4	Terminal Kecil	5	5	5	5
5	Terminal lainnya	6	6	6	6

Sumber: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Ternate Tahun 2016



### c. Jumlah Penumpang di Pelabuhan

Capaian kinerja jumlah penumpang naik dan turun di pelabuhan yang ada di Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.34**  
**Perkembangan Penumpang Naik dan Turun di Pelabuhan**  
**Kota Ternate Tahun 2012-2015 (Orang)**

Nama Pelabuhan	Tahun	Penumpang Turun	Penumpang Naik
Seluruh Pelabuhan Laut	2012	247.323	292.288
	2013	234.324	267.453
	2014	225.679	223.314
	2015	389.841	458.399

Sumber : Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ternate, Tahun 2013-2016

### d. Bongkar Muat Barang di Pelabuhan

Capaian kinerja bongkar muat barang di pelabuhan laut seluruh Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.35**  
**Bongkar/Muat Barang di Pelabuhan Kota Ternate Tahun 2012-2015 (M<sup>3</sup>)**

Nama Pelabuhan	Tahun	Bongkar	Muat
Seluruh Pelabuhan Laut	2012	271.629	153.465
	2013	818.677	167.727
	2014	1.045.994	127.724
	2015	768.941	138.975

Sumber : Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ternate, Tahun 2013-2016

## 8. Urusan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup yang lestari merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan di era otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### a. Persentase Penanganan Sampah

Persentase penanganan timbulan sampah di Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.36**  
**Persentase Penanganan Timbulan Sampah Kota Ternate Tahun 2012-2014**

No	Jenis Sampah	Tahun			Ket
		2012	2013	2014	
1	Sampah Organik, Sampah Non Organik (Sampah Guna Ulang/Sampah yang dapat digunakan Kembali, sampah daur ulang/sampah yang dapat didaur ulang, residu/sampah lainnya)	55,75	57,98	57,49	SNI : Timbulan Sampah 2,65 L/ Jiwa/Hr

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Ternate, Analisis Data Tahun 2015

### b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Syarat-syarat air minum layak minum berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara tersebut.

Data tentang persentase penduduk berakses air minum di Kota Ternate dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.37**  
**Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Ternate Tahun 2012-2014**

No	Jenis Air Minum	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Air PAM	26,23	27,55	29,34	42,12
2	Air tanah	33,33	33,33	32,62	17,26
3	Air hujan	21,01	20,23	19,11	4,01
4	Air mineral	8,43	8,01	9,54	35,08
5	lainnya	1,22	1,33	1,33	0,74

Sumber: BPS Kota Ternate, Tahun 2013-2016

### c. Penegakan Hukum Lingkungan

Data tentang penegakan hukum lingkungan di Kota Ternate tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.38**  
**Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kota Ternate Tahun 2015**

No	Jenis Peraturan	Tahun
		2015
1	Undang-Undang	-
2	Peraturan Pemerintah	-
3	Peraturan Daerah	-
4	Pengaduan	43
5	dll	-

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Ternate, Tahun 2016

## 9. Urusan Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan dapat dilihat dari jumlah tanah yang bersertifikat dan persentase bidang tanah yang sudah melaksanakan pendataan administrasi pertanahan. Sampai dengan akhir tahun 2014, banyaknya sertifikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional di Kota Ternate adalah (i) Sertifikat Hak Milik sebanyak 1.466; (ii) Sertifikat Hak Guna Bangunan sebanyak 109; dan (iii) Sertifikat Hak Pakai sebanyak 12.

## 10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Data tentang Rasio Penduduk Ber KTP, Rasio Bayi Berakte Kelahiran dan Rasio Pasangan Berakte Nikah (non Muslim) Kota Ternate Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.39**  
**Rasio Penduduk Ber KTP, Rasio Penduduk Berakte Kelahiran dan**  
**Rasio Pasangan Berakta Nikah Kota Ternate Tahun 2013-2015**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk		Jumlah Pernikahan (Non Muslim)	
		Ber KTP	Belum Ber KTP	Berakte	Tdk Berakte	Berakte	Tdk Berakte
1	2013	90.844	67.315	39.620	183.525	32	-
2	2014	96.334	55.069	58.615	194.430	45	-
3	2015	102.922	45.298	84.239	188.423	58	-

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, Tahun 2013-2015

## 11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan persentase angkatan kerja perempuan.

Jumlah perempuan bekerja di Lembaga Pemerintah, jumlah perempuan bekerja di lembaga swasta, jumlah kekerasan dalam rumah tangga dan persentase angkatan kerja perempuan di Kota Ternate Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.40**  
**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Kota Ternate Tahun 2014-2015**

No	Uraian	Tahun	
		2014	2015
1	Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah	3.506	3.557
2	Perempuan Bekerja di Lembaga Swasta	1.262	1.943
3	Kekerasan dalam Rumah Tangga	19	16
4	Persentase Angkatan Kerja Perempuan	50,74	51,06

Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan dan PA Kota Ternate, Tahun 2015-2016

Terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak, Pemerintah berupaya untuk memberikan hak yang sama dalam pembangunan melalui upaya kesetaraan gender. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 mengamanatkan, bahwa pengintegrasian isu gender dalam berbagai bidang pembangunan, pembentukan kelembagaan PUG serta dukungan pembiayaan pembangunan yang responsif gender.

## 12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pertumbuhan jumlah penduduk perlu mendapat perhatian karena jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan ketersediaan berbagai fasilitas penunjang kebutuhan mendasar dan juga kesempatan kerja akan menjadi permasalahan. Strategi yang dikembangkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yaitu dengan terus menggalakkan program Keluarga Berencana (KB), yang pada dasarnya bertujuan untuk menekan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk melalui upaya mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi KB.

Partisipasi masyarakat terhadap program KB di Kota Ternate dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat hasilnya, karena disamping memberikan dampak positif dalam hal menekan angka kelahiran, program KB juga cukup mempunyai andil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data, pada tahun 2015 kinerja pencapaian peserta KB aktif di Kota Ternate telah mencapai 75,52% dari total Pasangan Usia Subur (PUS), sedangkan pencapaian kinerja pada tahun 2014 adalah sebesar 51,34% dan tahun 2013 sebesar 68,83% dari total PUS. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Kota Ternate adalah Suntikan dan Implan.

Capaian Indikator Kinerja keberhasilan pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga kesejahteraan di Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat diukur dengan indikator kinerja sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.41**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana**  
**dan Keluarga Sejahtera di Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	4	4	3	3
2	Cakupan peserta KB aktif	24.604	21.626	21.491	24.136
3	Rasio akseptor KB	75	69,1	68,4	75,5
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.	4.628	5.666	3.597	3.227

Sumber : Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota Ternate, Tahun 2013-2016

### 13. Urusan Sosial

Penanganan PMKS di Kota Ternate dapat dilihat dari jumlah PMKS yang diberikan bantuan kebutuhan dasar. Pada tahun 2015 persentase PMKS yang mendapat bantuan pelayanan dasar sebesar 5,68 %. Capaian ini sangat kecil sekali untuk skala Kota.

**Tabel 2.42**  
**Pencapaian Kinerja Bidang Sosial di Kota Ternate Tahun 2014-2015**

No	Indikator	Capaian	
		2014	2015
Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
1	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	4.174	4.731
2	Persentase (%) PMKS Skala Kota Yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar.	3,19	5,68
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
1	Persentase (%) Panti Sosial skala Kota yang melaksanakan standar operasional pelayanan	66,66	66,66
2	Persentase (%) Panti Sosial skala Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	83,33	83,33
3	Sarana Sosial seperti Panti Asuhan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	12	12
Program Pembinaan Anak Terlantar			
1	Persentase (%) Pembinaan Anak Terlantar Skala Kota	10,90	9,49

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate, Tahun 2013-2016

## 14. Urusan Ketenagakerjaan

Konsep usia kerja yang digunakan dalam Sakernas adalah usia 15 tahun ke atas. Usia kerja ini dibagi ke dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang masuk kategori angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan yang masuk kategori bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang kegiatan sehari-harinya mengurus rumah tangga, sekolah dan kegiatan pribadi lainnya.

Yang dimaksud bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015, persentase penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 59,05 % sedangkan perempuan sebanyak 34,08%.

Penduduk yang mencari kerja/pengangguran sebanyak 4,24 % untuk laki-laki dan 2,64% untuk perempuan. Sedangkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja sebanyak 30,98% untuk laki-laki dan 69,02% untuk perempuan. Angka pengangguran pada tahun 2015 sedikit lebih kecil dibandingkan angka pengangguran pada tahun 2014 yaitu 8,72 persen pada tahun 2014 menjadi 6,87 persen di tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada ketersediaan lapangan pekerjaan terutama di sektor informal, selain itu iklim perekonomian di Kota Ternate yang semakin membaik membuat terciptanya banyak lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kota Ternate.

Penduduk Kota Ternate paling banyak bekerja di sektor jasa. Karena banyaknya lapangan usaha yang berada di sektor ini misalnya saja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bengkel, salon, dan sektor jasa lainnya. Sedangkan sektor yang paling sedikit digeluti oleh penduduk Ternate adalah sektor listrik, gas, dan air, karena potensi Kota Ternate di sektor ini tidak sebesar sektor lainnya. Angkatan kerja di Kota Ternate pada tahun 2015 sebagian masih berpendidikan SMP/MTs ke bawah, dengan persentase angkatan kerja golongan ini mencapai 25,79 persen. Angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMA/SMK/MAN 50,55 persen.

Perkembangan indikator ketenagakerjaan di Kota Ternate tahun 2013-2015 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.43**  
**Indikator Ketenagakerjaan Kota Ternate Tahun 2013-2015**

Indikator	2013	2014	2015
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	55,50	62,14	61,17
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,73	8,72	6,87

Sumber :BPS Kota Ternate, Statistik Daerah Kota Ternate Tahun 2016

## 15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Salah satu faktor yang memicu pertumbuhan perekonomian adalah meningkatnya peran serta masyarakat perekonomian masyarakat. Untuk mendongkrak peran masyarakat dimaksud salah satunya adalah dengan meningkatkan dan menguatkan lembaga perekonomian masyarakat melalui penguatan aspek permodalan koperasi. Jumlah koperasi dari tahun ke tahun semakin meningkat terutama untuk koperasi non KUD. Sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah KUD sebanyak 11 buah, jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah koperasi non KUD pada tahun 2015 sebanyak 296 unit, jumlah ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 289 unit dan pada tahun 2013 yang berjumlah 288 unit.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan urusan koperasi dan usaha kecil menengah secara umum antara lain :

- Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembinaan Koperasi dan UKM;
- Masih rendahnya tingkat kesadaran anggota dalam berkoperasi;
- Masih rendahnya kualitas sumber daya (jiwa wira usaha dan manajemen usaha);
- Masih rendahnya daya saing usaha koperasi di banding dengan pelaku ekonomi lainnya; dan
- Keterbatasan modal usaha.

Data pertumbuhan koperasi di Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2.44**  
**Persentase Koperasi Aktif Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah koperasi aktif	101	101	75	84
2	Jumlah koperasi	299	299	300	307
3	Persentase koperasi aktif	33,78	33,78	25,00	27,36

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, Tahun 2016

Data pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.45**  
**Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Usaha Mikro	3.859	5.519	6.822	7.601
2	Jumlah Usaha Kecil	2.472	2.801	3.466	3.518
3	Usaha Menengah	786	786	807	807
<b>Jumlah</b>		<b>7.117</b>	<b>9.106</b>	<b>11.095</b>	<b>11.926</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, Tahun 2016

## 16. Urusan Penanaman Modal

Berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten dan Kota, Pemerintahan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal. Kewenangan tersebut meliputi antara lain :

- Memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; dan

- d. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota.

Capaian kinerja urusan penanaman modal di Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.46**  
**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Pencari Kerja yang Terdaftar	2.868	2.784	2.267	1.303
2	Tenaga Kerja pada Perusahaan PMDN/PMA	2.416	3.153	3.664	2.267
3	Total Seluruh Perusahaan PMDN/PMA	153	410	191	141
4	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	15,79	7,69	19,18	16,07

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2013-2016*

## 17. Urusan Kebudayaan

Pembangunan urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; dan (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kebudayaan dapat diukur dengan indikator, melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta terpeliharanya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.47**  
**Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Ternate Tahun 2012-2014**

No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	4	5	5
2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	5	8	7
3	Jumlah Benda	-	-	-
4	Jumlah Situs	40	40	40

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate, Tahun 2013-2015

## 18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja milik pemda dan jumlah lapangan olahraga.

Data tentang bidang urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.48**  
**Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Organisasi Pemuda	17	17	17	17
2	Jumlah Organisasi Olahraga	24	26	26	32
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	8	8	6	9
4	Jumlah Kegiatan Olahraga	20	20	20	22
5	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja Milik Pemda	1	1	1	1
6	Jumlah Lapangan Olahraga	69	69	69	69

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ternate, Tahun 2013-2016

## 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Partisipasi masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga ataupun organisasi kemasyarakatan yang mendukung nasionalisme untuk pertahanan keamanan daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Gambaran umum kondisi politik dalam negeri pada tahun 2015 di Kota Ternate, sesuai data terjadi peningkatan kuantitatif dari tahun sebelumnya dimana tercatat sebanyak 12 kasus tawuran bahkan secara kualitatif diantaranya tercatat 3 kasus yang cukup menonjol yakni tawuran sengketa tapal batas dan tawuran antar warga / pemuda, dimana masalah terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dapat diatasi. Eskalasi kejadian pertikaian masyarakat/pemuda antar kampung di Kota Ternate pada tahun 2015 dapat dikatakan relatif mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya dan masih terdapatnya gangguan lain yakni maraknya peredaran Narkoba, minuman keras dan judi.

Kondisi keamanan, ketertiban dan situasi politik di Kota Ternate dalam tahun 2015 tercatat masih banyak aksi unjuk rasa dengan berbagai tuntutan yang dilakukan oleh kelompok pemuda dan mahasiswa maupun elemen masyarakat serta *stakeholder* lainnya dalam bentuk penyampaian aspirasi terhadap kebijakan publik, seperti kebijakan ekonomi terkait penataan pasar dan penertiban PKL, Kenaikan Harga BBM, masalah-masalah pendidikan, ekonomi, politik dan demokratisasi, hukum dan hak-hak azasi manusia termasuk KKN, masalah Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Oleh karena itu, dalam rangka terpeliharanya stabilitas daerah perlu tetap mendapat perhatian serta menjadi tanggung jawab semua pihak atau komponen masyarakat.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat diukur melalui indikator (i) kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; dan (ii) kegiatan pembinaan politik daerah. Data tentang pelaksanaan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Ternate tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.49**

**Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	1	1
2	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	1	1	1	1

Sumber: Badan Kesbangpolmas Kota Ternate, Tahun 2013-2016

## 20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Capaian Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Rasio jumlah polisi pamong praja per 1.000 penduduk, pos kamling per jumlah kelurahan dan jumlah linmas per 10.000 penduduk, dapat dilihat sebagaimana data yang disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.50**

**Rasio Jumlah Pol PP per 1.000 Penduduk dan Pos Kamling Per Jumlah Kelurahan dan Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Ternate Tahun 2013-2015**

No	Indikator	2013	2014	2015
1	Jumlah Polisi PP	326	339	379
	Jumlah Penduduk	223.145	213.425	214.047
	Rasio	0,15	0,16	0,18
2	Jumlah Pos Kamling	71	71	76
	Jumlah Kelurahan	77	77	77
	Rasio	0,92	0,92	0,99
3	Jumlah Linmas	100	85	85
	Jumlah Penduduk	223.145	213.425	214.047
	Rasio	0,04	0,04	0,04

Sumber: Badan Kesbangpollinmas dan Kantor Satpol PP Kota Ternate, Tahun 2014-2016

- b. Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi Pemerintah, penegakan perda, cakupan patroli petugas satpol PP, tingkat penyelesaian pelanggaran k-3, jumlah dan sistem informasi manajemen pemda, sebagaimana data yang disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.51**  
**Capaian Kinerja Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah	Ada	Ada	Ada
2	Penegakan Perda	87	83	90
3	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	31	35	33
4	Penyelesaian Pelanggaran K-3	48	50	37
5	Jumlah Petugas Linmas	100	85	85
6	Persentase sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan dalam kondisi baik.	77,16	73,27	74,18
7	Sistem Informasi Manajemen Pemda	42	42	42

Sumber : Badan Kesbangpollinmas dan Kantor Satuan Polisi PP Kota Ternate, Tahun 2014-2016

## 21. Urusan Ketahanan Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Oleh karena itu, ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak manapun.

Petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar. Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap negara atau daerah selalu termotivasi

untuk memiliki stok bahan pangan pokok dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan rakyatnya dalam jangka waktu tertentu.

Capaian indikator keberhasilan pelaksanaan urusan ketahanan pangan, dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain (i) regulasi ketahanan pangan; dan (ii) ketersediaan pangan utama, sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.52**  
**Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kota Ternate Tahun 2012-2014**

No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Regulasi Ketahanan Pangan	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada
2	Ketersediaan Pangan Utama	9.437.405 Kg	9.661.440 Kg	37.137.420 Kg

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ternate, Tahun 2013-2015

## 22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Salah satu lembaga pelayanan masyarakat yang terdekat dengan masyarakat adalah Posyandu. Keaktifan pelayanan yang dilaksanakan oleh Posyandu akan memberikan tingkat kepuasan terhadap layanan Pemerintah secara umum. Sebagai langkah nyata Pemerintah Kota Ternate dalam meningkatkan kapasitas para kader pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk melatih dan mengasah serta menguatkan wawasan dan kemampuan untuk menjadi kader pemberdayaan masyarakat.

Capaian indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain (i) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); (ii) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK; (iii) Jumlah PKK Aktif; (iv) Jumlah Posyandu Aktif; dan (v) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat.

Perkembangan data capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.53**  
**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	77	77	77	77
2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	58	58	58	58
3	Jumlah PKK Aktif	129	129	129	129
4	Jumlah Posyandu Aktif	176	176	176	176

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Ternate, Tahun 2013-2016

### 23. Urusan Statistik

Pada tahun 2015, kinerja makro urusan statistik telah menghasilkan beberapa buku/ dokumen yang menunjang perencanaan pembangunan, yaitu Buku Kota Ternate Dalam Angka tahun 2015, Buku Monografi tahun 2015 dan Profil Potensi Ekonomi Lokal Kota Ternate Tahun 2015. Dokumen-dokumen statistik tersebut untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pengukuran capaian indikator pelaksanaan urusan statistik, dapat juga diukur melalui capaian indikator kinerja (i) tersedianya buku "Kota Ternate Dalam Angka"; dan (ii) tersedianya buku "PDRB Kota Ternate", sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.54**  
**Capaian Kinerja Urusan Statistik Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Buku " Kota Ternate Dalam Angka"	1	1	1	1
2	Buku "PDRB Kota Ternate"	1	1	1	1

Sumber: Bappeda Kota Ternate Tahun 2013-2016



## 24. Urusan Kearsipan

Kearsipan sangat memegang peranan penting terkait dengan kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagi organisasi. Dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik, maka akan memudahkan pemimpin untuk menentukan kebijakan. Kearsipan itu sendiri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui sistem sentralisasi dimana semua arsip yang ada dari berbagai bidang (unit) disimpan dan dikelola pada satu ruangan tersendiri dan melalui sistem desentralisasi dimana arsip-arsip dibagi menurut bidangnya (unitnya) untuk kemudian disimpan dan dikelola oleh masing-masing unit pada ruangan khusus di tiap unit.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan kearsipan di Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat diukur melalui indikator (i) Pengelolaan arsip secara terpadu; dan (ii) Peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan, sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.55**  
**Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Daerah Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Pengelolaan Arsip Secara Terpadu	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	50 Orang	3 Kec	25 Orang	4 SKPD

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate, Tahun 2013-2016

## 25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pembangunan urusan informasi dan komunikasi ditandai melalui indikator pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, serta kerjasama informasi dan media massa. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah jaringan komunikasi; (ii) rasio warnet/wartel terhadap penduduk; (iii) jumlah surat nasional dan lokal; (iv) jumlah penyiaran radio/tv lokal; (v) jumlah website milik pemda; dan (vi) pameran/expo per tahun, sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.56**  
**Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	28	28	29	32
2	Rasio Warnet/Wartel terhadap Penduduk	23	30	30	30
3	Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal	N : 2 L : 4	N : 2 L : 4	N : 2 L : 4	N : 2 L : 4
4	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	R : 3 TV : 1	R : 3 TV : 1	R : 3 TV : 1	R : 3 TV : 1
5	Jumlah Web Site Milik Pemda	20	20	20	20
6	Pameran / Expo Per tahun	2	2	2	2

Sumber : Kota Ternate Dalam Angka, Tahun 2013-2016

## 26. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah perpustakaan; (ii) jumlah koleksi buku perpustakaan; dan (iii) jumlah pengunjung perpustakaan, sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.57**  
**Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Daerah Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Perpustakaan	101	101	101	101
2	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	1.330	846	578	1.052
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	9.800	12.964	13.106	13.322

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate, Tahun 2013-2016

## 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

### 1. Urusan Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang cukup potensial di wilayah Kota Ternate. Meskipun tidak memiliki lahan sawah, tetapi lahan tanaman bahan makanan

pokok lainnya seperti ubi kayu dan jagung relatif luas di wilayah ini. Selain itu tanaman perkebunan pun banyak diusahakan di Kota Ternate karena sejak zaman kolonial dulu kota Ternate terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Karena potensi pertanian inilah, maka pemerintah berusaha untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan agar sektor ini terus berkembang dan dapat mensejahterakan masyarakat yang mengusahakannya.

Sektor pertanian dapat dipahami dalam 2 (dua) pengertian, yaitu sektor pertanian dalam arti sempit dan sektor pertanian dalam arti luas. Sektor pertanian dalam arti luas merupakan salah satu potensi daerah Kota Ternate. Sektor ini merupakan salah satu sumber yang setiap tahun memberi kontribusi terhadap struktur PDRB Kota Ternate dan membuka lapangan bagi masyarakat. Kontribusinya terhadap sektor tenaga kerja sektor dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar 36,34 persen dari total angkatan kerja yang ada di Kota Ternate. Sektor pertanian dalam arti luas dapat meliputi, antara lain:

#### a. Sub Urusan Tanaman Pangan

Di Kota Ternate tanaman pangan yang memiliki luas lahan cukup besar yaitu jagung dan ubi kayu. Kedua jenis tanaman ini diminati oleh masyarakat Kota Ternate sebagai makanan utama selain nasi. Tahun 2015 luas panen jagung adalah 61,50 Ha yang berarti turun dari tahun 2014 dengan luas 120,30 Ha. Sedangkan untuk tanaman kacang tanah tahun 2015 memiliki luas panen 66 Ha, angka ini meningkat dibandingkan tahun tahun 2014 yang luas panennya 25,20 Ha. Dengan luas panen yang ada, namun produksi panen kedua tanaman tersebut bervariasi pada tahun 2014. Pada tahun 2014 produksi jagung sebesar 193,99 ton sedangkan pada tahun 2013 sebesar 222,23 ton. Untuk kacang tanah produksi tahun 2014 sebesar 14,53 ton meningkat dari tahun 2013 yang sebesar 12,98 ton.

Capaian kinerja dalam pengelolaan sub sektor tanaman pangan di Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.58**  
**Produksi Tanaman Pangan Kota Ternate Tahun 2012-2014**

No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Jagung (ton)	248,58	222,23	193,99
2	Ubi Kayu (ton)	1.592,53	1.375,70	1.430,47
3	Ubi Jalar (ton)	58,33	34,35	35,28
4	Kacang Tanah (ton)	12,64	12,98	14,53

Sumber: BPS Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka, Tahun 2013-2015

### **b. Sub Urusan Tanaman Perkebunan**

Tanaman perkebunan yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat Kota Ternate adalah Kelapa, Cengkik dan Pala. Tanaman perkebunan ini ada yang berumur puluhan tahun, karena sejak zaman penjajahan dahulu kala tanaman perkebunan ini memang sudah diusahakan oleh masyarakat Kota Ternate. Pada tahun 2014 produksi perkebunan untuk Cengkik 382 ton dan Pala sebesar 1,407 ton.

### **c. Sub Urusan Peternakan**

Populasi ternak di Kota Ternate belum banyak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging pemerintah masih harus memasok pasokan daging dari luar wilayah Kota Ternate terutama dari Pulau Halmahera dan dari luar Maluku Utara. Komoditi yang biasanya di pasok dari Pulau Halmahera adalah sapi dan kambing, sedangkan komoditi yang biasanya dipasok dari luar Maluku Utara adalah unggas khususnya ayam. Pada tahun 2015 populasi ternak di Kota Ternate yang paling banyak adalah Sapi dan Kambing. Meskipun begitu jumlah ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat Ternate akan daging. Populasi sapi pada tahun 2015 sebanyak 2.184 ekor dan kambing 16.517 ekor.

## **2. Urusan Kehutanan**

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki multifungsi bagi kehidupan manusia. Salah satu fungsi hutan sebagai penyangga air dan udara bagi ekosistem dipersyaratkan minimal 30% dari total hamparan darat. Hal ini telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan Kehutanan, dapat diukur melalui indikator (i) rehabilitasi hutan dan lahan kritis; (ii) kerusakan kawasan hutan; dan (iii) kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB.

Data dan informasi tentang (i) rehabilitasi hutan dan lahan kritis; (ii) kerusakan kawasan hutan; dan (iii) kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kota Ternate tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.59**  
**Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (ha)	320	91	6	145
2	Kerusakan Kawasan Hutan (ha)	250	355	3,55	306,01
3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	14,10	13,24	13,76	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ternate, Tahun 2013-2016

Sedangkan data tentang luas hutan di Kota Ternate berdasarkan fungsi hutan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.60**  
**Luas Hutan Berdasarkan Fungsi Hutan Kota Ternate Tahun 2015**

No	Fungsi Hutan	Luas Areal Hutan (Ha)
1	Hutan Lindung	4.392,01
2	Hutan Produksi Terbatas	-
3	Hutan Produksi	379,56
4	Hutan Produksi Konservasi	5.366,65
5	Areal Penggunaan Lain	5.981,30

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ternate, Tahun 2013-2016

### 3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Listrik sudah menjadi kebutuhan primer untuk saat ini, karena listrik sangat menunjang kegiatan sehari-hari manusia. Jika tidak ada listrik, maka aktivitas sehari-hari akan menjadi terhambat dan ruang gerak manusia pun menjadi terbatas. PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang mengurus pelistrikan setiap tahunnya selalu berupaya untuk memperluas jaringan agar seluruh pelosok di wilayah Indonesia dapat terlayani listrik. Namun kendala letak geografis serta sarana dan prasarana yang belum mendukung dapat menghambat proses perluasan jaringan listrik tersebut. Di Kota Ternate, dari 7 kecamatan hanya 4 kecamatan saja yang dapat teraliri listrik melalui jaringan PT PLN (Persero) sedangkan untuk Kecamatan Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua belum teraliri listrik jaringan PLN. Untuk ketiga wilayah tersebut ketersediaan listriknya dikelola sendiri, sehingga wilayah mereka teraliri listrik berkat usaha swadaya masyarakat setempat dengan bantuan mesin

dari swasta maupun dari PT PLN (Persero). Pada tahun 2015 jumlah mesin PT PLN (Persero) yang digunakan untuk membangkitkan listrik di Kota Ternate sebanyak 26 buah. Dengan 26 buah mesin tersebut daya mampu listrik yang dihasilkan sebesar 161.200.639 MWh dengan daya tersambung sebesar 155.462.925 MVA.

Capaian kinerja urusan energi dan sumber daya mineral di Kota Ternate sepanjang kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.61**  
**Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Ternate Tahun 2013-2015**

No	Uraian	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Kontribusi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap PDRB (%)	6,18	6,19	6,73

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Ternate Dalam Angka 2016

#### 4. Urusan Pariwisata

Capaian kinerja pengelolaan sektor pariwisata Kota Ternate selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kemajuan seiring dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana pariwisata, objek-objek wisata alam dan obyek-obyek wisata lainnya yang lebih bervariasi. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan pariwisata selama kurun tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.62**  
**Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kota Ternate Tahun 2011-2015**

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Mancanegara	Domestik	
2011	831	92.385	93.216
2012	911	111.712	112.623
2013	998	179.804	180.802
2014	1.029	199.907	200.936
2015	1.678	119.377	121.055

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Ternate Dalam Angka 2016

Berdasarkan data di atas terlihat, bahwa kunjungan wisatawan asing ke beberapa obyek wisata tumbuh secara fluktuatif. Sedangkan pertumbuhan kunjungan wisatawan domestik/ lokal relatif positif, dimana pada tahun 2011 wisatawan domestik yang berkunjung ke obyek wisata di Kota Ternate berjumlah 92.385 orang, mengalami pertumbuhan hingga menjadi 119.377 orang pada tahun 2015.

## 5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kota Ternate yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, merupakan sumber penghidupan yang menjanjikan. Banyak masyarakat Kota Ternate yang tinggal di pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu tradisi masyarakat Kota Ternate yang menjadikan ikan sebagai makanan pendamping nasi yang wajib dikonsumsi setiap hari, membuat nelayan menjadi salah satu mata pencaharian yang cukup menjanjikan. Untuk mendukung tercapainya kinerja pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dimaksud, maka Pemerintah Kota Ternate telah membangun dan mengembangkan 2 (dua) buah pelabuhan perikanan, yaitu pelabuhan Perikanan Bastiong, Ternate Selatan dan pelabuhan perikanan Dufa-Dufa, Ternate Utara. Kedua pelabuhan ini memasok hampir sebagian besar kebutuhan ikan masyarakat Ternate. Produksi perikanan Kota Ternate tahun 2015 yang terbesar adalah Kecamatan Ternate Utara yaitu sebesar 5.967 ton dan Kecamatan Ternate Selatan sebesar 5.595 ton.

Potensi perikanan tangkap paling besar di Kota Ternate terdapat di sebagian besar wilayah kecamatan di daerah Kepulauan. Di daerah kepulauan inilah kegiatan *illegal Fishing* dan penangkapan ikan menggunakan bom/bahan beracun paling banyak terjadi. Dalam kondisi awal permasalahan utama yang dihadapi di bidang perikanan adalah pencurian ikan oleh kapal asing, penggunaan alat tangkap yang dilarang, keterbatasan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), teknologi dan peralatan tangkap yang terbatas, zonasi budidaya yang belum jelas dan terbatasnya bibit/benur ikan yang ada di perairan Kota Ternate dan keterbatasan kapasitas, serta permodalan nelayan serta pembudidayaan ikan.

**Tabel 2.63**  
**Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2012	2013	2014	2015
1.	Perikanan Laut					
	Jumlah Tangkapan	Ton	18.465,70	19.298,30	22.906,86	25.814,85
	Jumlah Kapal Penangkap Ikan	Unit	2.546	2.717	3.645	2.603
	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	KK	2.610	2.868	2.282	4.195

**Tabel 2.63**  
**Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2012-2015 (lanjutan)**

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2012	2013	2014	2015
	Jumlah Nelayan	Jiwa	6.525	7.170	5.705	8.390
	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	Unit	2	2	2	2
2.	Perikanan Darat					
a	Kolam					
	Luas	Ha	216,25	216,25	0,3099	0.2090
	Produksi	Kg	3.120	3.700	11.943	12.643
b	Keramba					
	Luas	Ha	0	0	386	36
	Produksi	Ton	0	0	3.166	5.536

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, Tahun 2013-2016

## 6. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan mempunyai peran yang sangat dominan dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Ternate selama beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut terlihat dalam struktur PDRB Kota Ternate dimana dari tahun ke tahun sektor ini memberikan kontribusi terbesar dibanding sektor kegiatan lainnya. Ruang lingkup penjelasan urusan perdagangan, meliputi antara lain:

### a. Penyaluran Beras

Beras merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting karena dikonsumsi oleh masyarakat dalam jumlah banyak. Harga beras akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan lainnya, sehingga Pemerintah perlu mengontrol harga kebutuhan pokok ini, karena kenaikan harga beras yang tidak terkontrol dapat memicu kenaikan inflasi.

Perum Bulog Sub Divre Wilayah I Ternate merupakan lembaga Pemerintah yang bertugas antara lain untuk mengontrol harga dan pasokan beras di wilayah Kota Ternate. Pada tahun 2015 Perum Bulog Sub Divre Wilayah I Ternate mempunyai stok awal sebanyak 5.603.688 Kg beras, ditambah pemasukan selama tahun 2015 sebanyak 15.639.565 Kg beras sehingga menjadi 21.243.253 Kg beras, kemudian selama tahun 2015 Perum Bulog Sub Divre Wilayah I Ternate telah menyalurkan sebanyak 19.520.070 Kg beras sehingga stok akhir menjadi 1.723.183 Kg beras. Informasi mengenai stok beras dan penyalurannya oleh Perum Bulog Sub Divre Wilayah I Ternate.



## b. Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM)

Energi yang bersumber dari Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan pokok yang penting bagi masyarakat. Apalagi bagi masyarakat Kota Ternate yang pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya selalu meningkat. Pertamina UPPDN VIII Ternate memiliki tugas untuk menyalurkan dan menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Ternate.

Untuk mencukupi kebutuhan bahan bakar minyak di Kota Ternate, Pertamina UPPDN VIII Ternate memiliki tugas untuk menyalurkan dan menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Ternate. Sampai dengan akhir tahun 2014 Pertamina menyalurkan premium sebanyak 36.453 Kilo Liter, solar sebanyak 15.675 Kilo Liter dan Kerosene sebanyak 33.557 Kilo Liter.

## c. Sarana Perdagangan

Seiring dengan perkembangan perdagangan di Kota Ternate, maka Pemerintah selalu berusaha untuk memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana untuk menunjang perdagangan tersebut. Sarana perdagangan pun setiap tahunnya semakin meningkat. Mulai dari toko kelontong hingga mall mulai banyak bermunculan di wilayah Kota Ternate. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam sektor perdagangan, maka selain dari segi sarana perlu juga dibantu dari segi permodalan. Salah satu lembaga yang dapat membantu masyarakat terutama kalangan menengah kebawah dari segi permodalan yaitu koperasi. Jumlah koperasi dari tahun ke tahun semakin meningkat terutama untuk koperasi non KUD. Sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah KUD sebanyak 11 buah, jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah koperasi non KUD pada tahun 2015 sebanyak 296 unit, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 289 buah.

Capaian Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan perdagangan, dapat diukur melalui indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan perdagangan selama kurun tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.64**  
**Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	26 Kelompok	27 Kelompok	29 Kelompok	27 Kelompok

Sumber : Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, Tahun 2013-2016

## 7. Urusan Perindustrian

Industri yang berkembang di Kota Ternate adalah jenis industri kecil dan rumah tangga. Jenis industri ini cukup banyak di wilayah ini karena penggunaan teknologi yang relatif sederhana dan keterbatasan aspek permodalan. Meskipun jenis industri yang ada sebagian besar berskala kecil tapi cukup mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Ternate.

Salah sektor industri yang mendapat perhatian untuk terus dikembangkan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sub sektor industri kecil. Jenis industri yang berkembang di Kota Ternate adalah industri di bidang pangan, industri di bidang kimia dan bahan bangunan, industri bidang sandang, kulit dan kerajinan umum, serta industri bidang logam. Pada tahun 2015 jumlah perusahaan industri kecil yang bergerak di bidang pangan sebanyak 36 perusahaan dan menyerap tenaga kerja sebanyak 489 orang, di luar bidang pangan mencakup bidang kimia dan bahan bangunan, bidang sandang, kulit dan kerajinan umum serta di bidang industri logam terdapat 105 perusahaan yang menyerap 1.778 orang tenaga kerja.

Capaian kinerja urusan perindustrian di Kota Ternate tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.65**  
**Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kota Ternate Tahun 2015**

No	Jenis Kelompok Pelaku Usaha dan Pengrajin	Jumlah
1	Rumput Laut dan Pengolahan Ikan	24 Kelompok
2	Pengolahan Minyak Atsiri	5 Kelompok
3	Usaha Kue Kering	20 Kelompok
4	Pengrajin Sol Sepatu	13 Kelompok
5	Pengrajin Bambu	7 Kelompok
6	Pengrajin Batu Mulia	50 Kelompok

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, Tahun 2016

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi

yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Dalam implementasinya, daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kota Ternate dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah Kota Ternate. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari : Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Fokus Iklim Berinvestasi dan Fokus Sumber Daya manusia.

### **2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), adalah seluruh nilai tambah barang dan jasa (komoditi) yang diproduksi di suatu wilayah domestik/regional tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor produksinya. Nilai Produk Domestik Regional Bruto dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu :

1. Segi Produksi, merupakan jumlah nilai tambah bruto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Nilai tambah bruto yang terdiri dari biaya faktor produksi (upah/gaji, bunga netto, sewa tanah, keuntungan), penyusutan barang modal dan pajak tak langsung netto.
2. Segi Pendapatan, merupakan balas jasa (pendapatan) yang diterima faktor-faktor produksi karena ikut sertanya dalam proses produksi dalam suatu wilayah, dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
3. Segi Pengeluaran, merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, Pemerintah dan Lembaga Swasta Non Profit, pembentukan modal tetap, perubahan stok serta Ekspor Netto, biasanya dalam jangka waktu tertentu.

Saat ini Kota Ternate baru menghitung PDRB dari segi produksi saja. PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan/total nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi dan dinilai menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan. PDRB atas dasar harga konstan merupakan penjumlahan/total nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi dan dinilai menggunakan harga pada tahun dasar yaitu tahun 2010. Besarnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku di suatu wilayah memberikan gambaran potensi perekonomian wilayah tersebut. PDRB atas dasar harga berlaku Kota Ternate dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.

Pada tahun 2015 PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 7.200,4 Milyar yang perhitungannya sudah didasarkan pada tahun dasar 2010, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 sebesar Rp. 6.235,2 Milyar masih menggunakan tahun dasar 2000. Peningkatan ini menunjukkan bahwa terjadi perkembangan perekonomian Kota Ternate. Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah Kota Ternate.

Nilai pertumbuhan ekonomi dan PDRB di atas, sebagian besar disumbang oleh sektor-sektor ekonomi yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi total nilai PDRB Kota Ternate, khususnya di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Jasa dengan tidak mengesampingkan peran sektor lain seperti Pertanian, Industri Pengolahan yang telah berperan dengan optimal yang bersinergi dengan implementasi sejumlah program/kegiatan pendukung SKPD, sehingga mampu menciptakan nilai tambah pada barang dan jasa di sektor-sektor tersebut.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh kenaikan produksi barang dan jasa pada wilayah tersebut pada tahun tertentu. Jika kenaikan produksi barang dan jasa pada tahun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya maka dikatakan terjadi kenaikan pertumbuhan. Untuk menghindari pengaruh perubahan harga, maka pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan harga konstan. Dalam hal ini PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010.

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

### **Pengeluaran Konsumsi RT Pangan per Kapita**

Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan jenis pangan per

kapita sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.66**  
**Persentase Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota Ternate Tahun 2012-2015**

Uraian	2012	2013	2014	2015
Pengeluaran Pangan	43,09	43,31	41,84	44,02
Pengeluaran Non Pangan	56,91	56,69	58,16	55,98
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kota Ternate, Susenas Kota Ternate, Tahun 2013-2016

## 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, meliputi beberapa indikator antara lain terdiri dari:

### a. Indikator perhubungan

Indikator perhubungan meliputi antara lain data dan informasi tentang jumlah orang/ barang yang terangkut melalui Bandara, Pelabuhan dan Terminal di Kota Ternate selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.67**  
**Jumlah Barang yang Terangkut Melalui Bandara dan Pelabuhan di Kota Ternate Tahun 2013-2015 (dalam Ton)**

Uraian	Tahun	Bongkar	Muat
Bandara, Pelabuhan dan Terminal	2013	528.562	27.719
	2014	423.314	32.277
	2015	503.168	29.738

Sumber: BPS Kota Ternate, Tahun 2014- 2016

### b. Penataan Ruang

Indikator penataan ruang meliputi antara lain data dan informasi tentang (i) luas wilayah produktif; (ii) luas wilayah industri; dan (iii) luas wilayah perkotaan di Kota Ternate selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.68**  
**Persentase Luas Ruang Kota Ternate Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Luas Wilayah Produktif	87,55	87,54	87,54	87,54
2	Luas Wilayah Industri	0,05	0,05	0,05	0,05
3	Luas Wilayah Perkotaan	10,01	10,02	10,02	10,02

Sumber : Bappeda Kota Ternate, Tahun 2013-2015

### c. Fasilitas Bank Umum Menurut Status

Kontribusi kategori jasa keuangan (perbankan) dalam perekonomian Ternate relatif kecil yaitu 6,56 persen pada tahun 2015. Berikut ini jumlah Fasilitas Bank Umum Menurut Status di Kota Ternate selama tahun 2011-2015 dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.69**  
**Fasilitas Bank Menurut Status Di Kota Ternate Tahun 2011-2015**

Tahun	Bank Sentral	Bank Pemerintah	BPD	Bank Swasta	Jumlah
2015	1	4	1	13	19
2014	1	4	1	13	19
2013	1	4	1	12	18
2012	1	4	1	12	18

Sumber: BPS Kota Ternate, Statistik Daerah Kota Ternate Tahun 2016

### d. Restoran/Rumah Makan

Perkembangan restoran dan rumah makan per kecamatan di Kota Ternate sepanjang tahun 2014 dan tahun 2015 di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.70**  
**Data Jumlah Restoran/Rumah Makan Per Kecamatan Kota Ternate Tahun 2014-2015**

No	Kecamatan	2014	2015
1	Pulau Ternate	0	0
2	Moti	0	0
3	Pulau Batang Dua	0	0
4	Pulau Hiri	0	0

**Tabel 2.70**  
**Data Jumlah Restoran/Rumah Makan Per Kecamatan Kota Ternate**  
**Tahun 2014-2015 (lanjutan)**

No	Kecamatan	2014	2015
5	Ternate Selatan	10	10
6	Ternate Tengah	71	71
7	Ternate Utara	14	14
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>	<b>95</b>

#### e. Ketersediaan Hotel/Penginapan

Data dan informasi tentang jenis, kelas dan jumlah hotel/penginapan di Kota Ternate sepanjang tahun 2014 dan 2015, dapat dilihat pada data yang terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 2.71**  
**Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan Kota Ternate Tahun 2014-2015**

No	Kecamatan	Hotel		Kamar	
		2014	2015	2014	2015
1	Pulau Ternate	0	0	0	0
2	Moti	0	0	0	0
3	Pulau Batang Dua	0	0	0	0
4	Pulau Hiri	0	0	0	0
5	Ternate Selatan	18	19	458	448
6	Ternate Tengah	52	50	957	1.041
7	Ternate Utara	2	1	17	12
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>	<b>70</b>	<b>1.432</b>	<b>1.501</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2016

### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

#### 1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Ternate relatif rendah jika dibanding dengan beberapa kota terdekat. Perkembangan angka kriminalitas pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.72**  
**Perkembangan Angka Kriminalitas Kota Ternate Tahun 2015**

No.	Jenis Kriminal	Jumlah	No.	Jenis Kriminal	Jumlah
1	Pencurian	38	17	Persetubuhan di Bawah Umur	8
2	Penganiayaan	81	18	Pembunuhan	1
3	Pengeroyokan	45	19	KTI	0
4	Aniaya & Keroyok	5	20	Pengrusakan	3
5	KDRT	9	21	Pemalsuan Tanda Tangan	2
6	Aborsi	0	22	Membawa Lari Anak Gadis	0
7	Perjudian	28	23	Penelantaran Isteri	1
8	Pencabulan/ Asusila di Bawah Umur	10	24	Pencemaran Nama Baik (Media Sosial)	1
9	Penipuan	4	25	Pengancaman	1
10	Penggelapan	10	26	Pemerksaan	1
11	Penipuan dan Penggelapan	29	27	Curat	9
12	Kebakaran/ Pembakaran	5	28	Curat	0
13	Penyerobotan Tanah	3	29	Pemerksaan	1
14	Penghinaan	9	30	Korupsi	0
15	Curanmor	12	31	Temuan Mayat	1
16	Kekerasan Terhadap Anak	9	32	Narkoba	24

Sumber: Kepolisian Resort Kota Ternate Tahun 2013- 2016

#### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber utama data ketenagakerjaan yang digunakan BPS adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/ data yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Konsep usia kerja yang digunakan dalam Sakernas adalah usia 15 tahun ke atas. Usia kerja ini dibagi kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang masuk kategori angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan yang masuk kategori bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang kegiatan sehari-harinya mengurus rumah tangga, sekolah dan kegiatan pribadi lainnya. Yang dimaksud bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).



Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015, persentase penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 59,05 % sedangkan perempuan sebanyak 34,08 %. Penduduk yang mencari kerja/pengangguran sebanyak 4,24 % untuk laki-laki dan 2,64 % untuk perempuan. Sedangkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja sebanyak 30,98 % untuk laki-laki dan 69,02 % untuk perempuan. Angka pengangguran pada tahun 2015 sedikit lebih kecil dibandingkan angka pengangguran pada tahun 2014 yaitu 8,72 persen pada tahun 2014 menjadi 6,87 persen di tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada ketersediaan lapangan pekerjaan terutama di sektor informal, selain itu iklim perekonomian di kota Ternate yang semakin membaik membuat terciptanya banyak lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kota Ternate.

Penduduk Ternate paling banyak bekerja di sektor jasa. Karena banyaknya lapangan usaha yang berada di sektor ini misalnya saja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bengkel, salon, dan sektor jasa lainnya. Sedangkan sektor yang paling sedikit digeluti oleh penduduk Ternate adalah sektor listrik, gas, dan air, karena potensi kota Ternate di sektor ini tidak sebesar sektor lainnya.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Di samping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep

ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perkembangan rasio ketergantungan di Kota Ternate sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.73**  
**Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Ternate Tahun 2013-2015**

Uraian	2013	2014	2015
Penduduk Usia 0-14	57.170	58.604	60.082
Penduduk Usia 64+	5.244	5.381	5.518
Penduduk Usia 15-64	140.314	143.804	147.397
Rasio Ketergantungan	44,48	44,49	44,51

Sumber : BPS Kota Ternate, Sakernas Kota Ternate, Tahun 2014-2016



# BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN



Penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui pemberian otonomi yang luas dalam lingkungan strategis globalisasi, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terutama Daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

### **3.1. Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu**

Dalam kurun waktu tahun 2012 sampai tahun 2015, pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, telah mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat mendasar. Perubahan ini terkait dengan paket undang-undang keuangan negara yang dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan sampai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari paket undang-undang keuangan negara tersebut, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam tataran teknis pun terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

Terkait dengan terbitnya beberapa regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka fokus analisis terhadap keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu diterapkan prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan serta dapat di pertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Laporan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksud terdiri dari, laporan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 termasuk gambaran kondisi neraca daerah.

### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Masa Lalu**

Kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun yang lalu dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.

Landasan yang dijadikan acuan dalam perhitungan APBD pada 3 (tiga) tahun yang lalu, adalah proyeksi indikator makro ekonomi, antara lain terdiri dari (i) laju pertumbuhan ekonomi; (ii) kemiskinan dan pengangguran; (iii) pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan; (iv) daya saing daerah yang relatif masih belum maksimal; dan (v) pendapatan perkapita masyarakat dan laju inflasi lokal.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Ternate selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yang lalu dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan berbasis kinerja. Pendekatan ini diarahkan dan bertujuan untuk dapat menampung aspirasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Namun demikian, agar ada jaminan bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, efektif,

tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat dalam penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, untuk mencapai target-target sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam perumusannya memperhatikan beberapa faktor, diantaranya faktor keseimbangan antara pendapatan dengan belanja serta pembiayaan.

Proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate telah mengalami kemajuan yang cukup berarti setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate maupun program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada periode 2012-2014.

Oleh karena itu, perkembangan dari sisi pengelolaan keuangan daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pada Pemerintah Kota Ternate, dapat dijabarkan kedalam (i) perkembangan pendapatan daerah; (ii) perkembangan belanja daerah; dan (iii) perkembangan pembiayaan daerah. Uraian lebih lanjut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Pertumbuhan Pendapatan Daerah**

Data tentang pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah Pemerintah Kota Ternate dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 3.1 di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Ternate**  
**Tahun 2012-2014**

Uraian	2012		2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>585.401.542.000</b>	<b>574.247.672.931,00</b>	<b>648.213.367.000,00</b>	<b>646.442.436.395,00</b>	<b>754.743.993.000,00</b>	<b>772.685.702.473,44</b>
<b>1 Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>38.435.000.000</b>	<b>32.656.151.820,00</b>	<b>43.535.000.000,00</b>	<b>40.399.000.510,00</b>	<b>54.493.884.000,00</b>	<b>57.488.803.335,44</b>
1.1 Pajak Daerah	19.060.000.000	17.815.715.101,00	20.500.000.000,00	21.586.741.654,00	25.400.000.000,00	31.160.603.565,00
1.2 Retribusi Daerah	12.275.000.000	9.846.999.634,00	15.671.000.000,00	12.769.697.377,00	18.446.000.000,00	14.789.487.140,00
1.3 Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	500.000.000	292.560.386,00	500.000.000,00	365.392.583,00	500.000.000,00	765.132.728,00
1.4 Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.600.000.000	4.700.876.699,00	6.864.000.000,00	5.677.168.896,00	10.147.884.000,00	10.773.579.902,44
<b>2 Dana Perimbangan</b>	<b>495.331.085.000</b>	<b>490.595.760.732,00</b>	<b>547.345.576.000,00</b>	<b>548.415.040.476,00</b>	<b>630.640.109.000,00</b>	<b>641.592.436.975,00</b>
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	47.377.000.000	42.641.675.732,00	40.272.000.000,00	41.341.464.476,00	34.472.000.000,00	45.424.327.975,00
2.2 Dana Alokasi Umum	404.588.285.000	404.588.285.000,00	462.645.746.000,00	462.645.746.000,00	536.443.879.000,00	536.443.879.000,00
2.3 Dana Alokasi Khusus	43.365.800.000	43.365.800.000,00	44.427.830.000,00	44.427.830.000,00	59.724.230.000,00	59.724.230.000,00
<b>3 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>51.635.457.000</b>	<b>50.995.760.379,00</b>	<b>57.332.791.000,00</b>	<b>57.628.395.409,00</b>	<b>69.610.000.000,00</b>	<b>73.604.462.163,00</b>
3.1 Pendapatan Hibah	3.532.400.000	3.319.076.071,00	260.000.000,00	-	-	-
3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Propinsi lainnya	11.017.366.000	10.479.032.628,00	7.350.000.000,00	6.340.685.608,00	8.850.000.000,00	9.243.498.063,00
3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	37.085.691.000	37.197.651.680,00	49.722.791.000,00	51.240.275.000,00	60.500.000.000,00	64.309.914.000,00
3.4 Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah	-	-	-	47.434.801,00	260.000.000,00	51.050.100,00

Sumber: DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate, Tahun 2013-2015.



Dari tabel 3.1 diatas terlihat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terlihat, bahwa terjadi pertumbuhan yang fluktuatif dimana jika dalam tahun 2012 realisasi pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan target yang ditetapkan, demikian juga pertumbuhan pendapatan daerah dalam tahun 2013 realisasi pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan target pendapatan daerah. Namun dalam tahun 2014 walaupun relatif tidak terlalu besar, total realisasi pendapatan daerah melampaui target yang telah ditetapkan.

#### a. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Terkait dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Pusat telah menerbitkan regulasi yang mengatur mengenai komponen PAD. Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan, bahwa pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam merencanakan target pendapatan Daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, mempertimbangkan potensi yang belum dikelola secara maksimal, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah.

Perkembangan komponen pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dalam tabel 3.2 di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Pertumbuhan Komponen PAD Kota Ternate Tahun 2012-2014**

No	Tahun	Pajak Daerah (Rp.)	Retribusi Daerah (Rp.)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp.)	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	2012	17.815.715.101,00	9.846.999.634,00	292.560.386,00	4.700.876.699,00
2	2013	21.586.741.654,00	12.769.697.377,00	365.392.583,00	5.677.168.896,00
3	2014	31.160.603.565,00	14.789.487.140,00	765.132.728,00	10.773.579.902,44

Sumber: DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate, Tahun 2013-2015

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 3.2 di atas terlihat, bahwa secara umum realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari komponen pajak daerah lebih besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## b. Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana diketahui, bahwa totalitas pendapatan asli daerah terbentuk atas beberapa komponen pendapatan asli daerah yang dalam pengelolaannya masih dalam jangkauan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam meningkatkan komponen pembentukan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah telah merumuskan berbagai kebijakan yang kondusif dan sejalan dengan dinamika terkini yang berkembang di kalangan masyarakat umum, utama di dunia usaha/swasta.

Pertumbuhan berbagai komponen yang berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan PAD selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana data dan informasi yang terdapat pada tabel 3.3 di bawah ini.

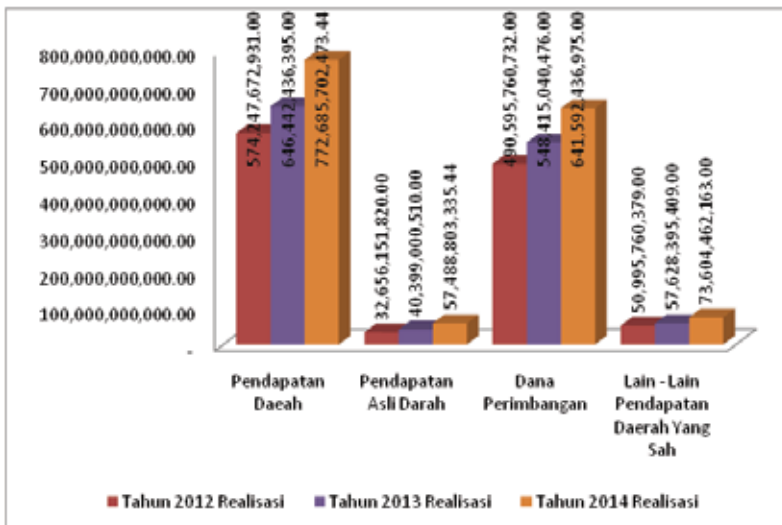
**Tabel 3.3**  
**Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD**  
**Kota Ternate Tahun 2012-2014**

No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
	<b>Pendapatan Daeah</b>	<b>574.247.672.931,00</b>	<b>646.442.436.395,00</b>	<b>772.685.702.473,44</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>32.656.151.820,00</b>	<b>40.399.000.510,00</b>	<b>57.488.803.335,44</b>
1.1	Pajak Daerah	17.815.715.101,00	21.586.741.654,00	31.160.603.565,00
1.2	Retribusi Daerah	9.846.999.634,00	12.769.697.377,00	14.789.487.140,00
1.3	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	292.560.386,00	365.392.583,00	765.132.728,00
1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.700.876.699,00	5.677.168.896,00	10.773.579.902,44
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>490.595.760.732,00</b>	<b>548.415.040.476,00</b>	<b>641.592.436.975,00</b>
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	42.641.675.732,00	41.341.464.476,00	45.424.327.975,00
2.2	Dana Alokasi Umum	404.588.285.000,00	462.645.746.000,00	536.443.879.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	43.365.800.000,00	44.427.830.000,00	59.724.230.000,00
<b>3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>50.995.760.379,00</b>	<b>57.628.395.409,00</b>	<b>73.604.462.163,00</b>
3.1	Pendapatan Hibah	3.319.076.071,00		
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Propinsi lainnya	10.479.032.628,00	6.340.685.608,00	9.243.498.063,00
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	37.197.651.680,00	51.240.275.000,00	64.309.914.000,00
3.4	Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah		47.434.801,00	51.050.100,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>574.247.672.931,00</b>	<b>646.442.436.395,00</b>	<b>772.685.702.473,44</b>

Sumber: DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate, Tahun 2013-2015

Dari tabel 3.3 di atas dapat diketahui, bahwa perkembangan komponen pendapatan asli daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) walaupun berkembang secara fluktuatif, namun kontribusinya terhadap total PAD dari tahun ke tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir tumbuh secara signifikan.

Gambaran tentang kontribusi komponen PAD terhadap total PAD dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada gambar 3.1 di bawah ini.



Sumber : DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate Tahun 2013-2015.

Gambar 3.1 Kontribusi Komponen PAD Terhadap Total PAD Kota Ternate Tahun 2012-2014

### c. Rasio Kemandirian Daerah

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah sepanjang kurun waktu itu. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui tingkat kontribusi realisasi PAD terhadap total APBD. Perkembangan DOFD Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel 3.4 di bawah ini.

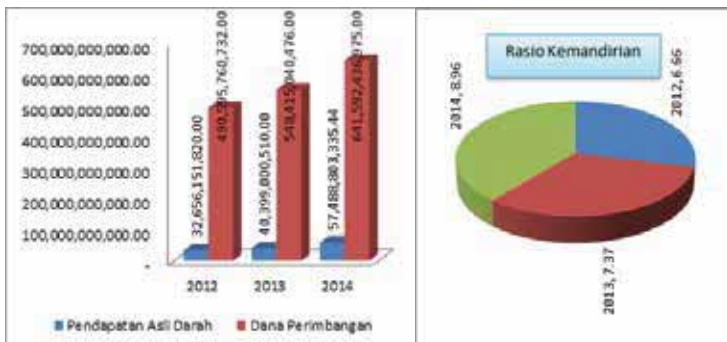
**Tabel 3.4**  
**Rasio Kemandirian Kota Ternate Tahun 2012-2014**

No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Pendapatan Asli Daerah	32.656.151.820,00	40.399.000.510,00	57.488.803.335,44
2	Dana Perimbangan	490.595.760.732,00	548.415.040.476,00	641.592.436.975,00
Rasio Kemandirian		6,66	7,37	8,96

Sumber: DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate, Tahun 2012-2014

Dari tabel di atas tampak, bahwa rasio kemandirian fiskal Kota Ternate walaupun masih sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan (APBN), yaitu rata-rata tumbuh sebesar 7,66 persen, namun perkembangannya setiap tahun persentase fiskal daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Ternate akan berusaha secara maksimal untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Karena semakin besar persentase rasio kemandirian daerah akan berdampak sangat signifikan terhadap kemandirian Pemerintahan Kota Ternate dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Ternate dan seluruh masyarakat di Provinsi Maluku Utara pada umumnya.

Perkembangan pendapatan asli daerah terhadap dana perimbangan yang bersumber dari dana pemerintah pusat di Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dalam gambar 3.2 di bawah ini.



Sumber : DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate Tahun 2013-2015.

**Gambar 3.2** Pertumbuhan Pendapatan Daerah Terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2012-2014

## 2. Pertumbuhan Belanja Daerah

Dalam pengelolaan belanja daerah Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud telah ditetapkan, bahwa komponen belanja daerah terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung, yaitu : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kelurahan, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kelurahan, serta Belanja Tidak Terduga.
- b. Belanja Langsung, yaitu: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dan mempertimbangkan adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menganulir beberapa peraturan daerah, yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pencapaian target penerimaan pendapatan asli daerah, terutama yang bersumber dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada sisi. Sementara pada sisi lain adanya upaya Pemerintah Kota dalam 5 (lima) tahun ke depan mengoptimalkan pembangunan berbagai infrastruktur untuk mendorong daya saing daerah, maka berbagai kebijakan yang akan ditempuh meliputi antara lain :

- a. Membangun data base yang handal terkait dengan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang potensinya belum dapat dikelola secara optimal. Hal ini penting dalam upaya membangun persaingan yang sehat diantara pelaku bisnis di dunia usaha, sehingga akan menghasilkan produk yang kompetitif dalam persaingan global;
- b. Mendata dan menggali berbagai potensi sumber pendapatan lain yang dapat diintensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka pencapaian target pendapatan asli daerah. Hal ini penting dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah;
- c. Melakukan telaah, kajian dimana porsi belanja tidak langsung perlu dilakukan rasionalisasi. Hal ini dalam upaya mengefisienkan belanja tidak langsung dan secara proporsional menaikan total besaran belanja langsung yang menyentuh kebutuhan masyarakat, yang dilakukan melalui

- prinsip anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
- d. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
  - e. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
  - f. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Ternate memberikan perhatian maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Daerah, termasuk investasi bidang pendidikan; dan
  - g. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah baik bersifat wajib maupun bersifat pilihan yang telah menjadi kewenangannya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan lebih lanjut tentang penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk belanja dalam rangka memenuhi kebutuhan yang meliputi :

- a. Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan di kelurahan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
- b. Penerimaan dana bagi hasil sumberdaya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- c. Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil Daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
- d. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai

- kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan Daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/*cost sharing* pada program/kegiatan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data tentang perkembangan belanja daerah, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung Pemerintah Kota Ternate sepanjang kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 3.5 di bawah ini.

**Tabel 3.5**  
**Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2012-2014**

No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>574.247.672.931,00</b>	<b>646.442.436.395,00</b>	<b>772.685.702.473,00</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>332.223.884.001,00</b>	<b>340.906.419.901,00</b>	<b>392.232.921.336,00</b>
1.1	Belanja Pegawai	318.834.554.081,00	328.381.845.261,00	371.948.003.366,00
1.2	Belanja Bunga	37.000.000,00	218.856.504,00	
1.3	Belanja Subsidi			
1.4	Belanja Hibah	1.900.000.000,00	4.739.102.000,00	5.300.000.000,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.379.286.050,00	1.922.121.596,00	4.799.967.700,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pro/Kabu/ Kota/Kelurahan			
1.7	Belanja Bantuan Keu Kpd Pro/Kab/ Kota & Kel	520.739.120,00	520.739.120,00	498.370.270,00
1.8	Belanja Tidak Terduga	6.552.304.750,00	5.123.755.420,00	9.686.580.000,00
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>235.348.354.472,00</b>	<b>303.469.642.787,00</b>	<b>338.428.828.394,00</b>
2.1	Pelanja Pegawai	35.584.124.162,00	50.907.858.540,00	55.442.192.082,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.145.237.706,00	125.479.190.612,00	133.797.205.425,00
2.3	Belanja/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial			133.797.205.425,00
2.4	Belanja Modal	102.618.992.604,00	127.082.593.635,00	149.189.430.887,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>567.572.238.473,00</b>	<b>644.376.062.688,00</b>	<b>730.661.749.730,00</b>
	<b>Surplus/ (Devisit)</b>	<b>6.675.434.458,00</b>	<b>2.066.373.707,00</b>	<b>42.023.952.743,00</b>

Sumber: DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate, Tahun 2013-2015.

Dengan mencermati data yang disajikan pada tabel 3.5 di atas tampak, bahwa pertumbuhan belanja daerah Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tumbuh secara signifikan. Dimana pada tahun 2012 total belanja Kota Ternate masih sebesar Rp. 574.247.672.931,00, maka pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar Rp. 646.442.436.395,00. Demikian juga total pertumbuhan belanja daerah Kota Ternate dalam Tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga menjadi sebesar Rp. 772.685.702.473,00.

### **Proporsi Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah**

Belanja tidak langsung daerah merupakan komponen belanja daerah yang diperuntukan untuk membiayai belanja yang diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan pagu anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan aparatur, seperti belanja pegawai, belanja diklat pegawai dan belanja bunga. Belanja tidak langsung tidak terkait secara langsung dengan pencapaian target kesejahteraan masyarakat. Perkembangan proporsi total belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah dan proporsi total belanja langsung terhadap total belanja daerah sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 3.6 di bawah ini.

**Tabel 3.6**  
**Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah**  
**Kota Ternate Tahun 2012–2014**

No	Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	Proporsi
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2012	313.374.517.144,00	574.247.672.931,00	54,57
2	2013	336.258.336.002,00	646.442.436.395,00	52,02
3	2014	400.388.318.551,00	772.685.702.473,00	51,82

Sumber: DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate, Tahun 2013-2015.

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 3.6 di atas tampak, bahwa proporsi belanja tidak langsung khususnya belanja untuk memenuhi kebutuhan pegawai Kota Ternate dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada total belanja pada tahun 2012 yang masih sebesar Rp. 313.374.517.144,00, pada tahun 2013 mengalami peningkatan hingga mencapai total sebesar Rp. 336.258.336.002,00 dan meningkat kembali secara signifikan hingga menjadi sebesar Rp. 400.388.318.551,00.



Pergerakan peningkatan total belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah Kota Ternate sepanjang kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada gambar 3.3 di bawah ini.



Sumber: DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate Tahun 2013-2015

**Gambar 3.3 Persentase Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2012–2014**

### Proporsi Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah

Belanja langsung daerah atau biasa dimaknai sebagai belanja modal, merupakan komponen yang sangat penting karena secara langsung terkait dengan upaya Pemerintah Kota Ternate dalam pemenuhan alokasi pagu anggaran yang dipergunakan membiayai belanja dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Perkembangan proporsi total belanja langsung terhadap total belanja daerah sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 3.7 di bawah ini.

**Tabel 3.7  
Proporsi Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah  
Kota Ternate Tahun 2012–2014**

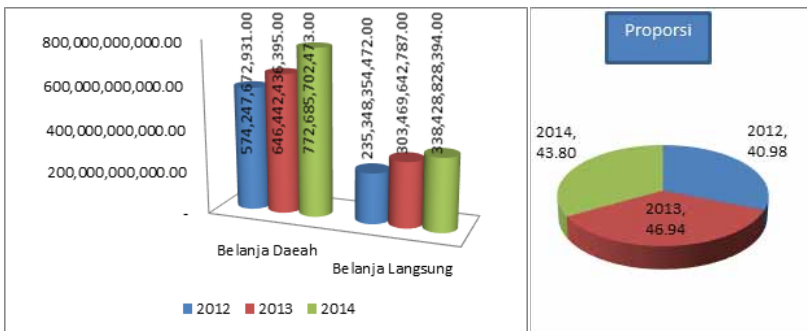
No	Tahun	Belanja Langsung	Total Belanja	Proporsi
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2012	235.348.354.472	574.247.672.931	40,98
2	2013	303.469.642.787	646.442.436.395	46,94
3	2014	338.428.828.394	772.685.702.473	43,80

Sumber: DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate Tahun 2013-2015

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 3.7 di atas dapat diketahui, bahwa proporsi belanja langsung Pemerintah Kota Ternate dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada total belanja langsung pada tahun 2012 yang masih sebesar Rp. 235.348.354.472, pada tahun 2013 mengalami peningkatan hingga mencapai total sebesar Rp. 303.469.642.787. Demikian juga total belanja langsung dalam tahun 2014 yang mengalami kenaikan hingga menjadi sebesar Rp. 338.428.828.394.

Dari data yang terdapat pada tabel tersebut dapat dimaknai, bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir Pemerintah Kota Ternate berusaha keras untuk dapat meningkatkan derajat dan taraf hidup masyarakatnya lebih sejahtera. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu target pencapaian misi dalam rangka meningkatkan target kinerja Pemerintahan Kota Ternate dimaksud, dapat dikorelasikan dengan data tentang total pagu anggaran yang teralokasi dalam belanja langsung daerah.

Pergerakan total alokasi pagu anggaran belanja langsung Pemerintah Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana data dan informasi pada gambar 3.4 di bawah ini.



Sumber: DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate Tahun 2013-2015

**Gambar 3.4 Persentase Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2012–2014**

### 3. Perkembangan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diarahkan untuk menutup selisih antara penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode

akuntansi serta untuk membentuk modal pemerintah guna mendorong terciptanya likuiditas keuangan daerah melalui kebijakan:

- Memprioritaskan pembiayaan pengeluaran terhadap sisa kurang perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- Melakukan pembiayaan atas pengeluaran investasi melalui kerja sama operasi dengan , BUMD dan Swasta di Daerah.

Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto yang harus digunakan untuk menutup defisit. Perkembangan realisasi dan perkiraan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Ternate tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 3.8 di bawah ini.

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan**  
**Kota Ternate Tahun 2012 -2014**

No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
	<b>Pembiayaan Daerah</b>			
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>(554.733.992,00)</b>	<b>(14.430.759540,00)</b>	<b>(17.900.126.387)</b>
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	(554.733.992,00)	(14.430.759540,00)	(17.900.126.387)
1.2	Pencairan Dana Cadangan			
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
.	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	(554.733.992,00)	(14.430.759.540,00)	(17.900.126.387)
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.750.000.000,00</b>	<b>5.579.600.000,00</b>	<b>5.750.000.000,00</b>
2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
2.2	Penyertaan Modal (Infestasi) Pemerintah Daerah	4.750.000.000,00	5.579.600.000,00	5.750.000.000,00
2.3	Pembayaran Pokok Utang			
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
2.5	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.750.000.000,00	5.579.600.000,00	5.750.000.000,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(5.304.733.992,00)</b>	<b>(20.010.359.540,00)</b>	<b>(23.650.126.387,00)</b>
<b>3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun</b>			
	Berkenaan (SILPA)	(14.416.677.770,00)	(17.822.064.283,00)	18.401.465.805,70

Sumber: DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate Tahun 2013-2015.

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3.8 di atas nampak terlihat, bahwa realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 secara fluktuatif mengalami perubahan. Jika dalam tahun 2012 total penerimaan pembiayaan tumbuh negatif sebesar Rp. (554,733,992,00), maka dalam tahun 2013 walaupun tumbuh negatif namun total pertumbuhan positif dimaksud mengalami penurunan jika dibandingkan dengan total pertumbuhan penerimaan pembiayaan pada tahun 2012. Sedangkan total penerimaan pembiayaan dalam tahun 2014 mengalami peningkatan/penurunan hingga menjadi sebesar Rp. (17,900,126,387).

Kemudian dari sisi pengeluaran pembiayaan, dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 total pengeluaran pembiayaan pergerakannya mengalami pasang surut, yaitu jika dalam tahun 2012 total pengeluaran pembiayaan masih sebesar Rp. 4.750.000.000, maka dalam tahun 2013 mengalami kenaikan hingga menjadi sebesar Rp. 5.579.600.000. Demikian juga total pengeluaran pembiayaan dalam tahun 2014 mengalami penurunan hingga mencapai angka sebesar Rp. 5.750.000.000.

### **3.1.2. Neraca Daerah**

Neraca Daerah adalah data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek) dan Ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Sejalan dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Perkembangan neraca daerah, khususnya tentang perkembangan aset lancar Pemerintah Kota Ternate dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan yang relatif signifikan. Jika dalam tahun 2012 total aset lancar sebesar Rp. 6.817.482.113,00, maka dalam tahun 2014 mengalami peningkatan secara signifikan, sehingga total aset lancar mencapai sebesar Rp. 34.339.222.817,70. Hal ini memberikan indikasi, bahwa Pemerintah Kota Ternate memiliki potensi yang cukup efektif dan efisien dalam mengelola aset lancar.

Sementara itu, dari sisi kewajiban jangka pendek dengan berbagai pihak dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jika dalam tahun 2012 kewajiban dengan pihak ketiga masih sebesar Rp. 14.905.680.015, maka dalam tahun 2013 kewajiban dengan pihak ketiga mengalami penurunan hingga total menjadi Rp. 454.863,00 dan dalam tahun 2014, kewajiban kepada pihak ketiga mengalami peningkatan kembali jika dibandingkan dengan tahun 2013 hingga menjadi Rp. 94.027.498,00. Penurunan kewajiban dengan pihak ketiga dari tahun ke tahun memberikan gambaran dan bermakna, bahwa manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin profesional dan dengan demikian penyelenggaraan pembangunan daerah di era otonomi daerah dapat dilaksanakan semakin mandiri sesuai aspirasi masyarakat.

Data dan informasi tentang pertumbuhan neraca daerah Pemerintah Kota Ternate dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 3.9 di bawah ini.

**Tabel 3.9**  
**Pertumbuhan Neraca Pemerintah Kota Ternate Tahun 2012-2014**

Uraian	Tahun 2012 (Rp.)	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2014 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>	<b>6.817.482.113,00</b>	<b>10.169.961.313,00</b>	<b>34.339.222.817,70</b>	<b>168</b>
Kas di Kas Daerah	18.629.306,00	11.519.434,00	17.808.241.082,70	77.208
Kas di Bendahara Pengeluaran	311.040.481,00	314.260.712,00	24.311.500,00	(45)
Kas di bendahara Penerimaan	-	9.400.000,00	50.648.336,00	-
Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	-	-	543.031.250,00	-
Piutang Pajak	3.297.382.225,00	31.017.900,00	5.354.562.799,00	8.482
Piutang Retribusi	-	-	62.027.629,00	-
Piutang Bagi Hasil	-	-	6.748.217.345,00	-
Piutang	948.953.380,00	6.149.976.101,00	-	498

Uraian	Tahun 2012 (Rp.)	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2014 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan
Persediaan	2.241.476.721,00	3.653.787.166,00	3.748.182.876,00	64
<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>21.957.284.151,00</b>	<b>37.212.066.015,00</b>	<b>51.339.750.575,39</b>	<b>88</b>
<b>Investasi Non Permanen</b>	<b>1.057.002.450,00</b>	<b>320.532.000,00</b>	<b>80.751.000,00</b>	-
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	80.751.000,00	-
Investasi Dana Bergulir	1.057.002.450,00	320.532.000,00	-	(120)
<b>Investasi Permanen</b>	<b>20.900.281.701,00</b>	<b>36.891.534.015,00</b>	<b>51.258.999.575,39</b>	<b>96</b>
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.900.281.701,00	36.891.534.015,00	51.258.999.575,39	96
<b>Aset Tetap</b>	<b>1.264.933.900.381,00</b>	<b>1.380.785.222.322,00</b>	<b>1.760.321.580.831,24</b>	<b>23</b>
Tanah	228.767.057.041,00	236.669.101.791,00	224.668.832.710,00	1
Peralatan dan mesin	100.290.716.639,00	116.753.271.980,00	158.519.231.922,50	34
Gedung dan bangunan	436.983.895.189,00	503.928.081.150,00	709.560.599.933,22	36
Jalan, irigasi, dan jaringan	418.504.231.276,00	461.830.900.957,00	580.690.956.520,52	23
Aset tetap lainnya	11.545.613.203,00	11.473.038.280,00	15.802.580.526,00	18
Konstruksi dalam pengerjaan	68.842.387.033,00	50.130.828.164,00	71.079.379.219,00	(6)
<b>Aset Lainnya</b>	<b>23.150.317.987,00</b>	<b>23.617.317.908,00</b>	<b>68.667.630.064,65</b>	<b>97</b>
Tuntutan Perbendaharaan	-	941.037.426,00	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-	664.601.671,00	-
Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	29.874.546.000,00	-
Aset tak berwujud	-	3.350.000.000,00	-	-
Aset lain-lainnya	23.150.317.987,00	19.326.280.482,00	38.128.482.393,65	32
<b>Jumlah Aset Daerah</b>	<b>1.316.858.984.632,00</b>	<b>1.451.784.567.558,00</b>	<b>1.914.668.184.288,98</b>	<b>26</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>14.905.680.015,00</b>	<b>18.147.844.429,00</b>	<b>454.863,00</b>	<b>(28)</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>14.905.680.015,00</b>	<b>18.147.844.429,00</b>	<b>454.863,00</b>	<b>(28)</b>
Utang perhitungan pihak ketiga	14.743.468.952,00	18.147.844.429,00	454.863,00	(27)
Utang Jangka Pendek Lainnya	162.211.063,00	-	-	-
<b>Ekuitas Dana</b>	<b>1.301.953.304.617,00</b>	<b>1.433.636.723.129,00</b>	<b>1.914.667.729.425,98</b>	<b>27</b>
<b>Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>(8.088.197.902,00)</b>	<b>(7.977.883.116,00)</b>	<b>34.338.767.954,70</b>	<b>(267)</b>
SILPA	(14.416.677.770,00)	(17.822.064.283,00)	18.401.465.805,70	(78)
Pendapatan yang Ditangguhkan	2.878.605,00	9.400.000,00	24.311.500,00	306
Cadangan Piutang	4.246.335.605,00	6.180.994.001,00	12.164.807.773,00	94

Uraian	Tahun 2012 (Rp.)	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2014 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan
Cadangan persediaan	2.241.476.721,00	3.653.787.166,00	3.748.182.876,00	64
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(162.211.063,00)	-	-	-
<b>Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>1.310.041.502.519,00</b>	<b>1.441.614.606.245,00</b>	<b>1.880.328.961.471,28</b>	<b>25</b>
Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	21.957.284.151,00	37.212.066.015,00	51.339.750.575,39	88
Diinvestasikan dalam aset tetap	1.264.933.900.381,00	1.380.785.222.322,00	1.760.321.580.831,24	23
Diinvestasikan dalam aset lainnya	23.150.317.987,00	23.617.317.908,00	68.667.630.064,65	97
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.316.858.984.632,00</b>	<b>1.451.784.567.558,00</b>	<b>1.914.668.184.288,98</b>	<b>26</b>

Sumber: DPKAD Kota Ternate, Neraca Daerah Kota Ternate Tahun 2013-2015.

## 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan, evaluasi sampai pada pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah menyampaikan pertanggung jawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Terkait dengan hal tersebut, maka data yang dianalisis dan disajikan sebagai informasi awal dalam menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu adalah data APBD yang telah diaudit oleh BPK.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disusun, disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kota Ternate. Demikian juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip dasar pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan secara terukur, efisiensi dan efektif, serta transparansi dan akuntabilitas baik dari sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah maupun Pembiayaan dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

### 3.2.1. Proposisi Kebutuhan Belanja Aparatur

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jenis belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga; dan
2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja PD yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

#### 1. Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Selanjutnya dalam tabel di bawah disajikan data dan informasi tentang realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Ternate dalam kurun waktu tahun 2012-2014. Sedangkan di bawahnya penjelasan tentang data dan informasi persentase proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Ternate Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, yang memuat data dan informasi tentang total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dalam kurun waktu tahun 2012-2014 dan total pengeluaran (belanja dan pembiayaan pengeluaran) dalam kurun waktu tahun 2012-2014.



**Tabel 3.10**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kota Ternate Tahun 2012-2014**

No	Uraian	2012	2013	2014
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>361.273.652.796</b>	<b>386.587.729.942</b>	<b>582.643.845.370</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	191.415.758.918	204.879.114.302	308.904.573.996
2	Belanja Tambahan Penghasilan	116.976.297.117	125.203.903.185	188.775.017.442
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	46.081.571.591	49.322.749.739	74.365.915.962
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah			
5	Belanja Hibah	1.900.000.000	4.739.102.000	5.300.000.000
6	Belanja Bantuan Sosial	4.379.286.050	1.922.121.596	4.799.967.700
7	Belanja Bantuan Keuangan	520.739.120	520.739.120	498.370.270
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>235.348.354.472</b>	<b>303.469.642.787</b>	<b>338.428.828.394</b>
1	Belanja Honorarium PNS	16.474.384.813	50.907.858.540	55.442.192.082
2	Belanja Uang Lembur	11.767.417.724	15.173.482.139	16.921.441.420
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	7.060.450.634	9.104.089.284	10.152.864.852
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	21.181.351.902	27.312.267.851	30.458.594.555
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.706.967.089	6.069.392.856	6.768.576.568
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	32.948.769.626	42.485.749.990	47.380.035.975
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16.474.384.813	21.242.874.995	23.690.017.988
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.153.206.937	1.487.001.250	1.658.301.259
9	Belanja Perjalanan Dinas	80.724.486	104.090.087	116.081.088
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas			
11	Belanja Pemulangan Pegawai			
12	Belanja Modal (kantor, mobil dinas, mebelair, peralatan dan perlengkapan)	54.130.121.529	69.798.017.841	77.838.630.531

Sumber: DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate, Tahun 2013-2015

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 3.10 di atas dapat diketahui, bahwa total belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur sepanjang kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan, yaitu dari Rp. 361.273.652.796,- pada tahun 2012, menjadi sebesar Rp. 386.587.729.942,- pada tahun 2013 dan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp.582.643.845.370,- pada tahun 2014. Peningkatan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, didorong oleh semakin meningkatnya belanja untuk (i) peningkatan belanja gaji dan tunjangan pegawai karena adanya penambahan pegawai baru dan pembayaran tunjangan jabatan

terkait dengan adanya penyesuaian tunjangan jabatan pada beberapa pejabat di Pemerintah Kota Ternate; (ii) adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur; (iii) adanya peningkatan belanja untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur: dan (iv) terjadi peningkatan pemenuhan kebutuhan belanja untuk kepentingan pelayanan publik, seperti belanja yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai/ aparatur lainnya, seiring dengan adanya kebijakan pemerintah pusat dalam penerimaan pegawai baru di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

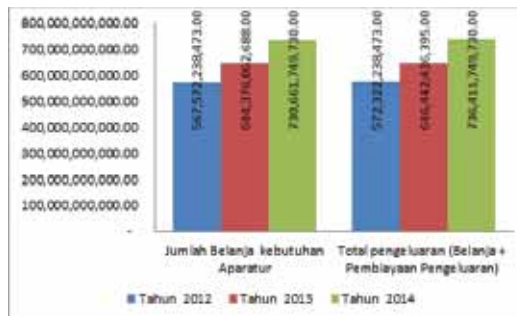
Dengan demikian, jika dianalisis dari aspek proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total APBD selama 3 (lima) tahun yang lalu, dapat disajikan sebagaimana data yang terlihat pada tabel 3.11 di bawah ini.

**Tabel 3.11**  
**Persentase Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kota Ternate Tahun 2012 – 2014**

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2012	567.572.238.473,00	572.322.238.473,00	99,17
2	Tahun 2013	644.376.062.688,00	646.442.436.395,00	99,68
3	Tahun 2014	730.661.749.730,00	736.411.749.730,00	99,22

Sumber: DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate, Tahun 2013-2015

Gambaran tentang persentase proporsi belanja Pemerintah Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada gambar 3.5 di bawah ini.



Sumber: DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate, Tahun 2013-2015.

**Gambar 3.5** **Persentase Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kota Ternate Tahun 2012-2014**

## 2. Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat, serta Prioritas Utama

Belanja periodik, wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kota Ternate, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Kota Ternate, yaitu antara lain untuk belanja urusan pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Terkait dengan kewajiban Pemerintah Kota Ternate sebagaimana telah diuraikan di atas, maka besaran total pengeluaran periodik yang bersifat wajib dan mengikat, serta prioritas utama sepanjang tahun 2013 dan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 3.12 di bawah ini.

**Tabel 3.12**  
**Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**  
**Kota Ternate Tahun 2013-2014**

No	Uraian	Tahun		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>420.978.330.665,00</b>	<b>465.875.153.131,00</b>	<b>90,36</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	379.405.757.226,00	427.638.664.005,00	88,72
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH			
3	Belanja Bunga	218.856.504,00		
4	Belanja Bagi Hasil	41.353.716.935,00	38.236.489.126,00	108,15
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>50.907.858.540,00</b>	<b>55.442.192.082,00</b>	<b>91,82</b>
1	Belanja Honorarium PNS Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis.	50.907.858.540,00	55.442.192.082,00	91,82
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	-	-	-
4	Belanja Sewa Gedung Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-
<b>C</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-
<b>TOTAL (A+B+C)</b>		<b>471.886.189.205,00</b>	<b>521.317.345.213,00</b>	<b>90,52</b>

Sumber: DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate, Tahun 2012- 2015

Uraian lebih lanjut tentang tentang total pengeluaran periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama Pemerintah Kota Ternate dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

### 3.2.2. Defisit Riil Anggaran Kota Ternate

Analisis terhadap defisit riil anggaran Kota Ternate dilakukan dalam rangka untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Perkembangan defisit riil anggaran Kota Ternate dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 3.13 di bawah ini.

**Tabel 3.13**  
**Defisit Riil Anggaran Kota Ternate Tahun 2012-2014**

No	Uraian	Tahun 2012 (Rp.)	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2014 (Rp.)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	574,486,330,945.00	646,699,626,570.00	772,962,110,479.94
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah	583,598,274,273.00	644,511,331,313.00	730,910,518,287.24
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	(5,304,733,992.00)	(20,010,359,540.00)	(23,650,126,387.00)
	<b>Defisit riil</b>	<b>(14,416,677,770.00)</b>	<b>(17,822,064,283.00)</b>	<b>18,401,465,805.70</b>

Sumber: DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate, Tahun 2013-2015

### 3.2.3. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis terhadap sumber penutup defisit riil dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Kota Ternate. Gambaran tentang pertumbuhan komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kota Ternate dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dalam dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 3.14 di bawah ini.

**Tabel 3.14**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Kota Ternate Tahun 2012-2014**

No.	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil		
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	(554,733,992.00)	(14,430,759,540.00)	(17,900,126,387.00)
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

Sumber: DPKAD Kota Ternate, Realisasi APBD Kota Ternate, Tahun 2013-2015.

### 3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Kota Ternate untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kapasitas riil keuangan daerah dimaksud merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serat prioritas utama lainnya.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

- Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan, sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin Pemerintahan Kota Ternate.
- Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.

- e. Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

### **3.3.1. Proyeksi Kerangka Pendanaan Berdasarkan Data Masa Lalu**

Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak positif dan daya ungkit yang signifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kota Ternate dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan data dan informasi kerangka pendanaan masa lalu, maka disusun kerangka pendanaan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang meliputi data dan informasi tentang proyeksi total pendapatan daerah dan proyek total belanja daerah dan proyeksi total pembiayaan daerah, sebagaimana tersaji pada tabel-tabel dibawah ini, yaitu Tabel 3.15 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun 2017-2021. Tabel 3.16 Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2017-2021 dan Tabel 3.17 Proyeksi Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Ternate Tahun 2017-2021.

**Tabel 3.15**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Proyek/Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.025.172.234.630,00</b>	<b>1.151.415.500.708,76</b>	<b>1.277.658.766.787,20</b>	<b>1.403.902.032.865,64</b>	<b>1.530.145.298.944,08</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>91.668.408.986,32</b>	<b>108.758.211.811,76</b>	<b>125.848.014.637,20</b>	<b>142.937.817.462,64</b>	<b>160.027.620.288,08</b>
1.1	Pajak Daerah	50.308.327.387,00	59.882.189.298,00	69.456.051.209,00	79.029.913.120,00	88.603.775.031,00
1.2	Retribusi Daerah	18.829.066.666,00	20.848.856.429,00	22.868.646.192,00	24.888.435.955,00	26.908.225.718,00
1.3	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.564.613.018,00	1.964.353.163,00	2.364.093.308,00	2.763.833.453,00	3.163.573.598,00
1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.966.401.915,32	26.062.812.921,76	31.159.223.928,20	36.255.634.934,64	41.352.045.941,08
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>827.947.229.973,00</b>	<b>921.124.626.472,00</b>	<b>1.014.302.022.971,00</b>	<b>1.107.479.419.470,00</b>	<b>1.200.656.815.969,00</b>
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	53.590.054.973,00	57.672.918.472,00	61.755.781.971,00	65.838.645.470,00	69.921.508.969,00
2.2	Dana Alokasi Umum	684.040.145.000,00	757.838.278.000,00	831.636.411.000,00	905.434.544.000,00	979.232.677.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	90.317.030.000,00	105.613.430.000,00	120.909.830.000,00	136.206.230.000,00	151.502.630.000,00
<b>3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>105.556.595.671,00</b>	<b>121.532.662.425,00</b>	<b>137.508.729.179,00</b>	<b>153.484.795.933,00</b>	<b>169.460.862.687,00</b>
3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Propinsi lainnya	15.049.122.973,00	17.951.935.428,00	20.854.747.883,00	23.757.560.338,00	26.660.372.793,00
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	90.449.192.000,00	103.518.831.000,00	116.588.470.000,00	129.658.109.000,00	142.727.748.000,00
3.4	Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah	58.280.698,00	61.895.997,00	65.511.296,00	69.126.595,00	72.741.894,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.025.172.234.630,32</b>	<b>1.151.415.500.708,76</b>	<b>1.277.658.766.787,20</b>	<b>1.403.902.032.865,64</b>	<b>1.530.145.298.944,08</b>

**Tabel 3.16**  
**Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Proyeksi/Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	<b>BELANJA</b>	1.025.487.078.299,82	1.151.749.562.209,76	1.278.012.046.119,70	1.404.274.530.029,64	1.530.537.013.939,58
1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	692.163.270.692,00	752.222.152.338,00	812.281.033.984,00	872.339.915.630,00	932.398.797.276,00
1.1	Belanja Pegawai	524.304.457.563,00	572.637.354.342,00	620.970.251.121,00	669.303.147.900,00	717.636.044.679,00
1.2	Belanja Barang	150.427.724.651,00	158.737.334.264,00	167.046.943.877,00	175.356.553.490,00	183.666.163.103,00
1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
1.5	Belanja Hibah	6.421.796.000,00	6.982.694.000,00	7.543.592.000,00	8.104.490.000,00	8.665.388.000,00
1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.555.659.908,00	13.433.506.012,00	16.311.352.116,00	19.189.198.220,00	22.067.044.324,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	453.632.570,00	431.263.720,00	408.894.870,00	386.526.020,00	364.157.170,00
2	<b>Belanja Langsung</b>	193.372.605.741,72	215.469.443.143,96	237.566.280.546,20	259.663.117.948,44	281.759.955.350,68
2.1	Belanja Tanah	25.195.815.154,00	31.989.428.756,00	38.783.042.358,00	45.576.655.960,00	52.370.269.562,00
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	17.369.785.153,00	14.991.221.759,00	12.612.658.365,00	10.234.094.971,00	7.855.531.577,00
2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	47.917.520.559,28	46.317.240.549,04	44.716.960.538,80	43.116.680.528,56	41.516.400.518,32
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.492.874.800,44	119.221.821.579,92	137.950.768.359,40	156.679.715.138,88	175.408.661.918,36
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.396.610.075,00	2.949.730.500,00	3.502.850.925,00	4.055.971.350,00	4.609.091.775,00
3	<b>Belanja Tak Terduga</b>	18.812.229.160,00	23.375.053.740,00	27.937.878.320,00	32.500.702.900,00	37.063.527.480,00
	Belanja Tak Terduga	18.812.229.160,00	23.375.053.740,00	27.937.878.320,00	32.500.702.900,00	37.063.527.480,00
	<b>JUMLAH</b>	904.348.105.593,72	991.066.649.221,96	1.077.785.192.850,20	1.164.503.736.478,44	1.251.222.280.106,68
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	90.848.525.983	127.072.056.072	163.295.586.161	199.519.116.249	235.742.646.338



Sedangkan untuk menutup defisit anggaran bila ternyata total realisasi belanja daerah ternyata lebih besar dari pendapatan daerah, maka solusi yang digunakan adalah melalui mekanisme pembiayaan. Proyeksi jumlah pembiayaan daerah sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.17**  
**Proyeksi Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Ternate Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Proyeksi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	(24.838.860.081)	(28.308.226.928)	(31.777.593.775)	(35.246.960.622)	(38.716.327.469)
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	(24.838.860.081)	(28.308.226.928)	(31.777.593.775)	(35.246.960.622)	(38.716.327.469)
1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	6.090.800.000	6.261.200.000	6.431.600.000	6.602.000.000	6.772.400.000
2.1	Penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah	6.090.800.000	6.261.200.000	6.431.600.000	6.602.000.000	6.772.400.000
2.2	Pembayaran pokok hutang	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>		(30.929.660.081)	(34.569.426.928)	(38.209.193.775)	(41.848.960.622)	(45.488.727.469)
SILPA		90.848.525.983	127.072.056.072	163.295.586.161	199.519.116.249	235.742.646.338

### 3.3.2. Analisa Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Data kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan untuk membiayai pembangunan, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel 3.18 di bawah ini.

**Tabel 3.18**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Ternate Tahun 2017 – 2021**

No.	Uraian	Proyeksi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pendapatan	1.025.487.078.300	1.151.749.562.210	1.278.012.046.120	1.404.274.530.030	1.530.537.013.940
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	90.848.525.983	127.072.056.072	163.295.586.161	199.519.116.249	235.742.646.338
	<b>Total penerimaan</b>	<b>1.045.047.347.151</b>	<b>1.171.889.232.584</b>	<b>1.298.731.118.016</b>	<b>1.425.573.003.449</b>	<b>1.552.414.888.881</b>
	Dikurangi:	-	-	-	-	-
4.	Belanja untuk memenuhi kebutuhan Aparatur dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	438.607.029.242	593.756.285.367	370.944.023.933	577.109.367.450	677.328.136.112
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>606.440.317.909</b>	<b>710.945.208.651</b>	<b>780.979.366.698</b>	<b>848.463.735.799</b>	<b>875.086.952.769</b>

Setelah diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk selama 5 (lima) tahun ke depan, tahap berikutnya adalah rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dengan penjelasan sebagai berikut :

### **1. Prioritas I (Utama)**

Prioritas I (utama) merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*). Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2. Prioritas II**

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan, bersifat mendukung program prioritas utama. Disamping itu Program Prioritas II berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan masing-masing Perangkat Daerah.

### **3. Prioritas III**

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan kelurahan, serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan kebutuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

## BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS



**S**alah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan adalah melakukan analisis terhadap berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu. Dengan demikian, maka melalui analisis yang mendalam terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi, akan dapat ditemui kenali dan ditentukan berbagai isu-isu strategis dalam upaya pemecahan permasalahan pembangunan dimaksud, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan rumusan isu-isu strategis dalam upaya memecahkan permasalahan pembangunan, terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan. Dari identifikasi permasalahan, akan didapat berbagai isu strategis yang pemecahannya memerlukan berbagai langkah pendekatan yang terintegrasi satu dengan yang lain. Untuk menentukan suatu masalah menjadi isu strategis, dapat dilakukan antara lain melalui tahapan diskusi kelompok (FGD) oleh para pemangku kepentingan. Melalui metodologi identifikasi permasalahan pembangunan yang komprehensif diharapkan menghasilkan sejumlah isu-isu strategis bersifat prioritas. Isu-isu strategis yang bersifat prioritas dimaksud, dapat dijadikan sebagai dasar dalam perumusan dan menentukan program prioritas baik yang terkait dengan pencapaian target Visi dan Misi maupun terkait dengan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

### 4.1. Permasalahan Pembangunan

Secara umum, permasalahan pembangunan dapat diartikan adalah perbedaan yang terjadi antara capaian kinerja yang dapat dicapai pada akhir perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD pada akhir perodesasi perencanaan jangka menengah. Timbulnya permasalahan pembangunan daerah, secara umum disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kekuatan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, adanya faktor kelemahan yang tidak diantisipasi dan diatasi secara dini serta dicarikan solusinya, serta adanya

peluang yang belum teridentifikasi dan dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman yang belum dapat dipetakan sejak awal, sehingga permasalahan pembangunan tidak dijadikan sebagai point penting yang harus mendapatkan perhatian dalam perumusan dokumen rencana pembangunan daerah.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka permasalahan pembangunan di Kota Ternate dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu secara garis besar dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut :

### **1. Permasalahan Sumber Daya Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- a. Profesionalitas serta kompetensi aparatur birokrasi, relatif belum memadai sehingga belum mampu secara merata dan adil mendorong program dan kebijakan bagi kemandirian daerah, menjamin kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan utilitas lainnya;
- b. Mentalitas aparatur cenderung berorientasi proyek (*project oriented*) ketimbang berorientasi program. Kelemahan ini berimplikasi pada perencanaan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor relatif belum integratif dan sinergi, selanjutnya berimplikasi pada belum terpenuhinya azas efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran secara patut, dan memberikan kemanfaatan yang luas serta berkeadilan kepada masyarakat;
- c. Belum efektifnya akses partisipasi publik yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjamin akuntabilitas serta transparansi kebijakan anggaran (*clean governance*) sebagai implementasi prinsip-prinsip *good governance*;
- d. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih dan utilitas lainnya. Keluhan utamanya berkaitan dengan kepastian waktu, biaya dan tempat;
- e. Belum terintegrasinya sistem pelayanan publik sehingga menimbulkan biaya tinggi akibat faktor ketidakpastian pelayanan;
- f. Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas serta kurangnya akses publik dalam perumusan kebijakan pembangunan kota; dan
- g. Pergeseran paradigma Pemerintah bukan lagi sebagai penguasa tetapi sebagai pelayan rakyat. Karena itu tugas camat/lurah mengikuti tugas walikota sebagai pelayan rakyat. Berdaya-tidaknya kecamatan/kelurahan sangat tergantung pada pelimpahan wewenang oleh walikota. Besaran kewenangan kecamatan sangat ditentukan oleh urusan yang dilimpahkan oleh walikota.

## 2. Permasalahan Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan

- a. Tidak seimbang pertumbuhannya antar wilayah, terutama wilayah Utara dan Selatan Ternate, termasuk wilayah Kecamatan di luar pulau Ternate, seperti Moti, Hiri dan Batang Dua. Kesenjangan pembangunan antar wilayah ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi masyarakatnya;
- b. Belum sinerginya kegiatan ekonomi perkotaan dengan kegiatan ekonomi kelurahan, sehingga wilayah luar cenderung mengalami dampak penurunan pertumbuhan (*backwash effects*);
- c. Kurangnya akses masyarakat, terutama pelaku usaha jasa konstruksi terhadap proyek pemerintah akibat terjadinya praktek mafia ekonomi dan monopoli kepada beberapa pengusaha. Sulitnya pengusaha kecil, petani, nelayan dan koperasi mendapat sumber permodalan dan pendampingan manajemen pengembangan usaha;
- d. Informasi potensi dan peluang usaha belum optimal dipromosikan, padahal Kota Ternate sebagai kota perdagangan dan jasa utama di Maluku Utara memiliki peluang Investasi yang cukup tinggi; dan
- e. Akses usaha yang belum merata, dan rendahnya produktifitas ketenagakerjaan. Ketergantungan terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar adalah situasi rentan terhadap kemandirian ekonomi rakyat.

## 3. Permasalahan Penataan Kawasan Perkotaan

- a. Tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk baik akibat penambahan penduduk alamiah maupun akibat urbanisasi sehingga melahirkan kawasan pemukiman kumuh dan kemiskinan kota;
- b. Karena keterbatasan lahan kota dan inkonsistensi kebijakan penataan ruang membuat terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran baik di wilayah pesisir pantai maupun kawasan hutan lindung;
- c. Belum terintegrasinya keruangan (*spatial integration*) secara seimbang pada setiap simpul strategis wilayah perkotaan;
- d. Belum tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) bagi warga kota akibat kebijakan komersialisasi kawasan perkotaan serta desain tata ruang yang belum memihak kebutuhan publik;
- e. Kurangnya ruang untuk memwadahi kegiatan PKL yang menimbulkan marginalisasi sektor informal dari sistem ekonomi perkotaan secara *integrative*;
- f. Terabaikannya potensi kawasan pesisir pantai dengan tidak tersedianya prasarana dan sarana kelautan yang berakibat pada menurunnya aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai;

- g. Belum mandiri dan terarahnya pembangunan Kota Baru, sehingga mengakibatkan masyarakat pada kawasan sekitar membangun pemukimannya tanpa memperhatikan penataan wilayah dan kawasan yang sesuai dengan konsep penataan ruang; dan
- h. Kesemerawutan kota, akibat pertumbuhan kendaraan bermotor tanpa diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur jalan dan regulasi yang sering tidak konsisten. Minimnya lahan parkir menjadi penyebab utama kemacetan di beberapa pusat perdagangan. Ruang publik bagi pejalan kaki tidak lagi berfungsi karena difungsikan bagi PKL.

#### **4. Permasalahan Banjir, Sampah dan pengelolaan Lingkungan Hidup**

- a. Menurunnya kualitas fisik lingkungan perkotaan, sebagai implikasi dari eksploitasi pembangunan, serta pengelolaan kawasan yang tidak diikuti dengan penataan ruang yang baik dan konsisten;
- b. Penataan drainase dan pengelolaan persampahan yang belum memadai;
- c. Minimnya Kesadaran warga terhadap lingkungan hidup yang baik menimbulkan masalah banjir, sanitasi yang buruk dan terjadinya abrasi pada wilayah pantai; dan
- d. Kebijakan pemerintah kota yang belum memperhatikan daya dukung lingkungan dalam pembangunan perkotaan.

#### **5. Permasalahan Sosial Budaya dan Keagamaan**

- a. Masih rendahnya kesadaran budaya hidup toleran masyarakat terutama dalam hal penutupan jalan untuk acara-acara tertentu;
- b. Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat;
- c. Fenomena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga (KDRT), maraknya kasus pemerkosaan dan meningkatnya angka perceraian di Kota Ternate adalah fenomena yang harus menjadi perhatian kita semua. Fenomena PSK di Kota Ternate adalah penyakit sosial yang berhubungan erat dengan kehidupan ekonomi dan isu moralitas. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh kaum wanita dan terpinggirkan peran wanita dalam pembangunan seperti, masih bias gender dalam penerimaan pegawai, promosi jabatan dan diskriminasi dalam dunia kerja. Fenomena ini tidak lagi menjadi isu domestik perempuan tetapi isu mendasar pembangunan Kota Ternate ke depan;
- d. Belum sinerginya integrasi sosial masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi yang lebih luas dan efektif dalam membuat kebijakan publik yang menyangkut masyarakat;

- e. Penanganan masalah sosial budaya yang terkait dengan masalah kemiskinan perkotaan, gesekan kepentingan antar masyarakat dan antar kampung;
- f. Makin menjauhnya sebagian besar masyarakat dari nilai adat budaya lokal, termasuk pemaknaan atas adat *se ator* sebagai sumber nilai dan etos sosial, yang terbukti ampuh menjadi nilai identitas masyarakat Ternate pada masa kejayaannya;
- g. Berkurangnya perhatian dan kesadaran pemerintah daerah, dan *stakeholder* di daerah, untuk melakukan rekonstruksi nilai budaya dan kearifan lokal;
- h. Belum maksimalnya peran lembaga keagamaan serta perhatian yang hanya fokus pada sarana prasarana tanpa penguatan basis nilai relegiusitas semakin menjauhkan warga dari nilai-nilai agama; dan
- i. Masih tingginya angka buta baca Al-Quran di Kota Ternate.

## 6. Permasalahan Keuangan dan Kemandirian Fiskal

- a. Kurangnya kemandirian fiskal Kota Ternate. Hal ini tergambar dari masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap total belanja dalam APBD. Ketimpangan fiskal yang tinggi menunjukkan belum optimalnya kinerja sektor ekonomi sehingga kontribusi pendapatan pajak dan retribusi belum signifikan dalam Pendapatan Daerah Kota Ternate; dan
- b. APBD dibuat seringkali lebih berpihak kepada penentu kebijakan daripada kepentingan rakyat. Kurangnya alokasi anggaran untuk belanja Modal (investasi), padahal belanja modal ini penting bagi stimulus ekonomi kota di masa yang akan datang, terutama infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik, air minum dan transportasi.

## 7. Permasalahan Pertumbuhan Ekonomi Makro Daerah yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level makro ternyata tidak diikuti pada ekonomi riil di level mikro. Fenomena kemiskinan dan pengangguran adalah gambaran tidak terkoneksi antara gambaran makro ekonomi dan kehidupan ekonomi masyarakat secara umum. Inflasi yang masih cukup tinggi telah menurunkan pendapatan riil warga dan pada akhirnya menurunkan daya beli. Kurangnya akses sumberdaya ekonomi dan belum meratanya pembangunan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka dalam 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kota Ternate bertekad akan menggali secara maksimal berbagai potensi pendapatan asli daerah yang selama ini belum dikelola secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif dan efisien, adil dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **8. Permasalahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan**

- a. Masih belum tertatanya birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, responsif, partisipatif, efektif, efisien, adil, demokratis dan akuntabel;
- b. Belum terselenggaranya pelayanan publik yang profesional, yang dapat dimaknai pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah dan murah; dan
- c. Belum terselenggaranya pemerintahan yang diorientasikan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kota Ternate dan umumnya masyarakat Provinsi Maluku Utara.

## **9. Permasalahan Pembangunan Berbasis Kepulauan yang Berkelanjutan**

Kota Ternate yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Ternate, Provinsi Maluku Utara, secara geografis masuk ke dalam rumpun daerah kepulauan dimana wilayahnya sebagian besar berupa pulau/kepulauan yang dikelilingi oleh perairan (laut). Dengan karakteristik wilayah yang demikian, maka porsi program dan pagu anggaran untuk mempercepat pembangunan di wilayah pulau/kepulauan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan akan diberi porsi yang lebih besar dibandingkan pembangunan di wilayah daratan.

Pendekatan pembangunan berkelanjutan telah secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan berdimensi kepulauan, maka pembangunan pada wilayah pulau-pulau terpencil, terbelakang dan terisolir yang relatif belum dapat tersentuh secara maksimal pada 5 (lima) tahun yang lalu, dalam pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan didorong untuk mendapatkan porsi pembangunan berbagai infrastruktur yang memadai, sehingga pada akhir periodesasi perencanaan pembangunan jangka menengah, yaitu tahun 2021, telah dapat sejajar dengan wilayah lainnya di Kota Ternate. Namun hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan wilayah pulau/kepulauan terpencil/ tertinggal/ terbelakang perlu secara konsistensi mengedepankan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan kapasitas dan daya dukung sumber daya alam tetap dapat terjaga kuantitas dan kualitasnya.

Dengan langkah kebijakan tersebut, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan, diharapkan akan tumbuh berbagai produk unggulan yang berasal dari potensi sumber daya kelautan dan perikanan di pulau/kepulauan. Terkait dengan hal tersebut, maka pembangunan sarana dan prasarana moda transportasi laut yang dapat terintegrasi dengan sasaran prioritas nasional seperti poros maritim dan program prioritas tol laut dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai program prioritas dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021.

Dengan demikian, maka perumusan kebijakan dan program yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah ke depan, fokus pada upaya untuk menjawab permasalahan pembangunan di wilayah kepulauan dan sekaligus dapat diselaraskan, serta bersinergi dengan program prioritas pemerintah pusat, seperti program pembangunan poros maritim nasional. Hal ini sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Konsekuensi yang timbul dari target sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan proporsi alokasi pagu anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan wilayah perairan perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan. Pembangunan yang lebih fokus ke wilayah perairan, diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor kelautan dan perikanan yang sampai saat belum dapat dikelola secara optimal. Sektor lain yang juga diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor baik dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA) adalah sektor pariwisata, khususnya wisata laut yang diharapkan akan memberikan solusi ganda terhadap problem sosial, seperti lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, angka kemiskinan dan tumbuhnya perekonomian masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial.

## **10. Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Permasalahan di bidang sumber daya manusia, antara lain (i) masih kurangnya kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai kebutuhan; (ii) rendahnya angka partisipasi sekolah baik pada tingkat dasar dan menengah, utamanya pada tingkat pendidikan tinggi; (iii) rendahnya rata-rata lama sekolah; (iv) rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan; dan (v) rendahnya partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang lebih tinggi.

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia, berkorelasi secara signifikan terhadap angka pengangguran, tumbuhnya kriminalitas, meningkatnya kemiskinan dan terjadinya ketimpangan sosial lainnya, seperti tumbuhnya penyakit sosial di masyarakat (Pekat), tumbuhnya para penyandang masalah sosial (pengguna Narkoba, pengemis dan gelandangan).

b. Sumber Daya Alam

Dari hasil telaah dan dianalisis terhadap data dan informasi yang ada telah memberi informasi, bahwa Kota Ternate memiliki potensi keanekaragaman sumber daya perairan, hutan dan laut yang belum dikelola secara terintegrasi untuk dikembangkan menjadi produk unggulan. Terkait dengan itu, maka penyelamatan ekosistem perairan, laut dan hutan secara bersinergi menjadi bagian integral dalam mewujudkan daya saing daerah Kota Ternate.

Kota Ternate sebagai daerah kepulauan dan wilayah pesisir yang panjang memiliki karakteristik yang menonjol yaitu : Tangkapan air yang terbatas dan sumber daya/cadangan air tawar yang sangat rendah, peka dan rentan terhadap tekanan (*stressor*) dari pengaruh eksternal baik alami maupun kegiatan manusia, memiliki sejumlah besar jenis-jenis (organisme) endemik dan keanekaragaman hayati yang tipikal dan bernilai tinggi.

Potensi sumberdaya alam (SDA) yang dimiliki Kota Ternate dapat dikelompokkan ke dalam; (a) sumberdaya lahan, (b) sumberdaya air, (c) sumberdaya tambang, (d) sumberdaya hutan, yang belum dikelola secara optimal, bahkan terhadap potensi yang telah dikelola belum menerapkan prinsip-prinsip keterpaduan dan keberlanjutan, sehingga sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, pembangunan bidang sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup di Kota Ternate perlu diarahkan pada optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan SDA dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan keterpaduan sektoral dan ekologi, yang diikuti dengan penegakan hukum dan hak-hak rakyat secara partisipatif, agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara adil dan berkesinambungan bagi masyarakat dan mendukung terselenggaranya pembangunan daerah serta pengendalian dampak lingkungan.

## 11. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, adalah belum terintegrasinya data dasar mengenai obyek dan subyek pajak daerah, retribusi

daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sehingga proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sesuai perencanaan dan penganggaran tahunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, belum dapat dihitung secara akurat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian juga, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk belanja daerah yang belum optimal, seperti masih besarnya proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur (belanja tidak langsung), dibandingkan dengan proporsi untuk belanja yang dimanfaatkan untuk belanja pelayanan kepada masyarakat (belanja langsung). Sementara itu, terkait dengan akuntabilitas, agar publikasi informasi keuangan daerah oleh seluruh perangkat daerah perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 394, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan berikutnya, terkait dengan tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang juga perlu ditingkatkan.

## **12. Permasalahan Implementasi dan Penegakan Regulasi Daerah**

Produktivitas kajian peraturan daerah yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan sesuai kebutuhan/tuntutan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Demikian pula penegakan hukum untuk kasus-kasus sengketa, seperti sengketa lahan, alih fungsi peruntukan lahan dan kajian-kajian produk hukum lainnya, seperti surat edaran kepala daerah, surat edaran kepala perangkat daerah dan surat kesepakatan bersama (MoU) dengan lembaga lain, seperti DPRD, perlu lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

## **13. Permasalahan Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha**

Seiring semakin transparannya pengelolaan keuangan daerah pada satu sisi. Pada sisi lain kerjasama antara daerah dalam rangka mengembangkan kemampuan daya saing daerah yang bersangkutan, sejauh ini masih belum optimal. Kerangka kerja sama antara daerah dan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, belum dapat diimplementasikan secara konkrit, masih ditemui berbagai kendala. Dengan demikian, Kesepakatan dan Kesepahaman (*MoU/Memorandum of Understanding*) yang telah disepakati oleh berbagai pihak, terhenti pada tataran administratif, tidak ada implementasinya.

- 14. Permasalahan Sinergitas Antara Lembaga Eksekutif Dengan Lembaga DPRD**  
Implementasi kerjasama (kesepakatan) antara perangkat daerah dengan DPRD masih perlu dioptimalkan. Sinergi program dan kegiatan sektor, lintas sektor maupun kewilayahan termasuk sinergitas administrasi data dan pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi program/kegiatan, belum dapat diwujudkan secara maksimal. Demikian juga kerjasama dengan DPRD pada ranah legislasi, pengawasan dan penganggaran perlu dioptimalkan, sehingga fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis kinerja dapat diwujudkan.
- 15. Permasalahan Keterbukaan Informasi Publik, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan**

Pelibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan transparansi informasi dan kemudahan akses publik masih perlu ditingkatkan, karena belum semua perangkat daerah menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan data dokumen rencana kerja dan dokumen anggaran secara periodik, mudah diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Penanganan tindak lanjut aduan masyarakat sebagai wujud *monitoring* dan evaluasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat, belum optimal. Pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan dan kualitas dengar pendapat publik (*public hearing*) yang diadakan oleh DPRD dalam pembahasan Perda non APBD dan RAPBD masih perlu ditingkatkan.

- 16. Permasalahan Manajemen Kepegawaian dan Penataan Organisasi**  
Penempatan aparatur secara proporsional berdasarkan kebutuhan organisasi juga masih bermasalah. Proporsi penempatan pegawai di suatu kecamatan dan kelurahan agar dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi unggulan yang dimiliki dan kondisi keamanan, kenyamanan dan ketentraman. Penerapan manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan serta kesetaraan dan kesejahteraan perlu dioptimalkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

## **17. Permasalahan Tanggap Darurat Bencana**

Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari kepulauan, maka perlu dilakukan langkah antisipasi sejak dini terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan longsor, serta gelombang pasang yang diprediksi dapat menimbulkan tsunami. Oleh karena itu, kegiatan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui berbagai metode, di antaranya: sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat dan aparaturnya yang bertugas untuk itu, serta pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana bencana yang diperlukan. Oleh karena itu, agar dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Langkah selanjutnya adalah kegiatan yang berorientasi pada mitigasi bencana, seperti: identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta penetapan sistem peringatan dini. Demikian pula kesiapan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi bencana, masih perlu ditingkatkan. Terkait dengan hal dimaksud, maka personil Satpol PP, Linmas, dan tenaga relawan perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya terkait dengan tanggap darurat bencana. Sarana dan prasarana yang terkait dengan teknologi informasi dan persandian juga perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

## **18. Permasalahan Terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah**

Dalam Pasal 260 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditegaskan, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dimaksud adalah Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda). Dengan tugas Bappeda yang semakin berat namun strategis dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, tentu membawa konsekuensi logis, yaitu semakin strategis dan beratnya tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengawal untuk menjamin kualitasnya dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.

Intinya, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Ternate kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, maka Bappeda dituntut dapat berperan untuk menjamin terjadinya keselarasan, konsistensi dan mensinergikan, serta mengharmonisasikan berbagai target program, indikator sasaran kinerja baik untuk jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan daerah yang telah ditetapkan antara dokumen perencanaan kota dengan provinsi dan antara kota dengan target pembangunan prioritas nasional.

Dengan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, maka berbagai permasalahan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana telah diuraikan di atas secara bertahap mulai dapat diminimalisir, sehingga akan menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas yang pada akhirnya akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat dari setiap aktivitas pembangunan dapat merasakan manfaatnya.

Selain permasalahan pembangunan yang bersifat struktural sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam pelaksanaan pembangunan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun bersifat pilihan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu, dapat diuraikan sebagai berikut :

## **4.1.1. Urusan Wajib**

### **1. Urusan Pendidikan**

Permasalahan pembangunan antara lain : (i) kualitas *output* pendidikan yang masih rendah sehingga belum mampu menjawab kesempatan kerja yang tersedia; (ii) belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mudah, murah, berkualitas dan merata, terutama masyarakat yang berada di Kecamatan Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua; (iii) kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan dasar dan menengah; (iv) masih adanya disparitas mutu pendidikan antara negeri dan swasta; (v) rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru; (vi) kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar; (vii) belum meratanya sebaran tenaga pendidik terhadap kebutuhan sekolah; (viii); masih tinggi anak putus sekolah pada jejang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MAN; dan (ix) belum optimalnya penerapan manajemen pendidikan di sekolah.

## 2. **Urusan Kesehatan**

Permasalahan pembangunan antara lain (i) belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang mudah, murah, berkualitas dan merata, terutama masyarakat yang berada di Kecamatan Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua; (ii) komersialisasi kesehatan ini ditandai dengan mahalnya biaya kesehatan akibat pelayanan rumah sakit yang belum profesional akibat praktek dokter ahli lebih memilih berpraktek di Rumah sakit swasta atau klinik ketimbang melayani pasien di RSUD; (iii) manajemen pelayanan rumah sakit yang belum mengakomodasi masyarakat miskin (Jamkesda) dan pemegang Askes; (iv) masih ditemukannya balita gizi buruk; (v) masih belum optimalnya dukungan manajemen untuk peningkatan pelayanan kesehatan; dan (vi) masih tingginya angka kematian bayi akibat masalah gizi selama kehamilan. (vii) masih rendahnya rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita; (viii) masih rendahnya rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu); dan (ix) masih rendahnya ketersediaan tenaga dokter spesialis dan tenaga medis.

## 3. **Urusan Pekerjaan Umum**

Permasalahan pembangunan antara lain (i) masih panjangnya jalan yang berlapiskan kerikil dan tanah; (ii) belum optimalnya kondisi jalan nasional dan jalan provinsi di Kota Ternate; (iii) masih panjangnya jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat; (iv) masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi perairan yang menghubungkan antar wilayah kepulauan dan antara wilayah kepulauan dengan wilayah daratan; (v) masih rendahnya kualitas bangunan fisik pelabuhan-pelabuhan perintis; dan (vi) masih adanya jalan yang dilalui roda dua dalam kondisi rusak dan rusak berat.

## 4. **Urusan Perumahan Rakyat**

Permasalahan pembangunan urusan perumahan rakyat antara lain (i) masih belum optimalnya capaian target pembangunan rumah layak huni; (ii) masih rendahnya kualitas sanitasi perumahan; dan (iii) masih adanya rumah tidak layak huni.

## 5. **Urusan Penataan Ruang**

Permasalahan pembangunan antara lain (i) belum optimalnya implementasi dokumen RTRW dalam perencanaan pembangunan; (ii) belum terwujudnya kerjasama antar daerah di bidang penataan ruang; (iii) masih rendahnya persentase ruang terbuka hijau; (iv) belum adanya regulasi pada kawasan strategis cepat tumbuh; dan (v) masih rendahnya persentase bangunan yang ber IMB.



## **6. Urusan Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan urusan perencanaan pembangunan antara lain (i) masih belum berkualitasnya data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan yang berkualitas di Kota Ternate; (ii) masih adanya dokumen perencanaan pembangunan yang kurang sinkron, tidak konsisten dan tidak selaras, serta tidak bersinergi antara dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan dokumen perencanaan pembangunan Kota Ternate; (iii) masih rendahnya kapasitas dan kompetensi, serta masih rendahnya kuantitas sumberdaya manusia di bidang perencanaan; dan (iv) masih adanya penetapan dokumen perencanaan yang tidak tepat waktu.

## **7. Urusan Perhubungan**

Permasalahan pembangunan urusan perhubungan, antara lain (i) masih terbatasnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas (ii) masih terbatas jumlah pelabuhan besar; (iii) masih kurangnya fasilitas kelengkapan jalan serta sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; (iii) masih kurangnya data dan informasi untuk perencanaan dan peningkatan moda transportasi perairan; (iv) masih rendahnya kuantitas dan kualitas transportasi laut; dan (v) masih terbatasnya terminal besar antar kota.

## **8. Urusan Lingkungan Hidup**

Permasalahan pembangunan antara lain (i) masih tingginya eksploitasi sumber daya alam; (ii) masih banyak usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan/atau usaha/kegiatan yang telah mempunyai dokumen lingkungan namun belum membuat laporan pemantauan; (iii) masih belum optimalnya pengelolaan persampahan; (iv) masih adanya penduduk belum berakses air minum; dan (v) belum optimalnya penegakan hukum lingkungan hidup.

## **9. Urusan Pertanahan**

Permasalahan pembangunan bidang urusan pertanahan, antara lain (i) masih adanya kepemilikan tanah yang belum bersertifikat; (ii) masih rendahnya sertifikat tanah hak guna pakai.

## **10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

Permasalahan pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil, antara lain (i) masih rendahnya pemahaman penduduk mengenai pentingnya dokumen kependudukan; (ii) masih adanya bayi lahir tanpa akte kelahiran; (iii) masih adanya

keterlambatan penduduk dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil; (iv) belum optimalnya pemanfaatan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) untuk peningkatan pelayanan prima; dan (v) masih adanya pernikahan yang tidak dilengkapi akte nikah.

### **11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain (i) masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga swasta, politik, dan organisasi kemasyarakatan; (ii) masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan (iii) masih rendahnya persentase angkatan kerja perempuan.

### **12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Permasalahan pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, antara lain (i) masih rendahnya MOP dan banyaknya *unmet need*; (ii) kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); (iii) adanya kecenderungan peningkatan perkawinan pertama wanita usia muda; dan (iv) masih besarnya rata-rata jumlah anak per keluarga.

### **13. Urusan Sosial**

Permasalahan pembangunan urusan sosial, antara lain (i) masih tingginya jumlah PMKS; (ii) belum optimalnya penanganan PMKS; (iii) masih terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial; dan (iv) masih belum tersedianya data yang akurat dan terkini tentang jumlah PMKS.

### **14. Urusan Ketenagakerjaan**

Permasalahan pembangunan urusan ketenagakerjaan, antara lain (i) masih kecilnya laju penyerapan tenaga kerja; (ii) masih rendahnya kualitas tenaga kerja atau minimnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja; dan (iii) masih tingginya persentase pengangguran terbuka.

### **15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Permasalahan pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, antara lain (i) masih rendahnya tingkat kesadaran anggota dalam berkoperasi; (ii) masih rendahnya kualitas sumber daya (jiwa wirausaha dan manajemen usaha); (iii) masih rendahnya daya saing usaha koperasi dibanding dengan pelaku ekonomi lainnya; dan (iv) keterbatasan modal usaha.

## **16. Urusan Penanaman Modal**

Permasalahan pembangunan urusan penanaman modal, antara lain (i) masih rendahnya promosi potensi investasi daerah; (ii) masih rendahnya persentase tenaga kerja pada PMA; dan (iii) belum berfungsinya secara optimal pelayanan melalui PTSP.

## **17. Urusan Kebudayaan**

Permasalahan pembangunan urusan kebudayaan, antara lain (i) masih kurangnya frekuensi dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya; (ii) kurang terpromosikannya budaya lokal; (iii) kurangnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; dan (iv) kurangnya pelestarian seni dan budaya tradisional.

## **18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Permasalahan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga, antara lain (i) masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung prestasi olahraga; (ii) masih kurangnya penggerakan potensi dan sumber daya kepemudaan dan olahraga yang ada di masyarakat; (iii) masih terbatasnya gelanggang/balai remaja milik pemerintah; dan (iv) masih kurangnya pembinaan terhadap potensi olahraga yang ada.

## **19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Permasalahan pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, antara lain (i) masih kurangnya jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; dan (ii) masih kurangnya pendidikan politik kepada masyarakat.

## **20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

Permasalahan pembangunan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, antara lain (i) masih belum adanya kesesuaian penempatan dan promosi dalam jabatan dengan kompetensi dan prestasi kerja; (ii) masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur, terutama di kecamatan-kecamatan dan kelurahan; (iii) masih belum terpenuhinya rasio jumlah polisi pamong praja; (iv) masih rendahnya penegakan peraturan daerah; (v) belum maksimalnya pelaksanaan SOP; (vi) belum maksimalnya pelaksanaan ketatalaksanaan perangkat daerah; (vii) masih rendahnya rasio jumlah tenaga linmas; dan (viii) masih terbatasnya jumlah poskamling.

## **21. Urusan Ketahanan Pangan**

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Ketahanan Pangan dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (i) belum adanya regulasi tentang ketahanan pangan; (ii) ketergantungan bahan pangan dari luar daerah yang masih besar; (iii) belum optimalnya pencapaian skor pola pangan harapan; (iv) sering terjadi fluktuasi harga dari berbagai komoditas di Kota Ternate.

## **22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain (i) masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan kelurahan dalam mengelola administrasi baik tentang keuangan, program dan kegiatan; (ii) masih kurangnya bimbingan, asistensi dan supervisi dalam menumbuh kembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat; dan (iii) kurang optimalnya kader pemberdayaan masyarakat di masing-masing Kelurahan.

## **23. Urusan Statistik**

Permasalahan pembangunan urusan statistik, antara lain (i) masih adanya perbedaan data dan informasi antara perangkat daerah dengan data dan informasi yang bersumber dari BPS.

## **24. Urusan Kearsipan**

Permasalahan pembangunan urusan kearsipan, antara lain (i) masih belum terpadunya pengelolaan kearsipan; dan (ii) masih terbatasnya jumlah tenaga di bidang kearsipan.

## **25. Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan pembangunan urusan komunikasi dan informatika, antara lain (i) masih terbatas rendahnya rasio warnet terhadap jumlah penduduk; (ii) masih terbatas radio dan TV lokal; (iii) masih terbatasnya jumlah pameran/expo pembangunan.

## **26. Urusan Perpustakaan**

Permasalahan pembangunan urusan perpustakaan, antara lain (i) masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan; (ii) masih rendahnya minat baca masyarakat; (iii) masih kurangnya jumlah perpustakaan; dan (iv) masih terbatasnya jumlah buku di setiap perpustakaan.

## 4.1.2. Urusan Pilihan

### 1. Urusan Pertanian

Permasalahan pembangunan urusan pertanian, antara lain (i) masih belum optimalnya pengelolaan potensi tanaman pangan; (ii) masih belum optimalnya pengelolaan potensi tanaman perkebunan; (iii) masih belum optimalnya pengelolaan potensi peternakan; dan (iv) belum maksimalnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB.

### 2. Urusan Kehutanan

Permasalahan pembangunan urusan kehutanan, antara lain (i) masih adanya lahan kritis yang belum direhabilitasi; (ii) semakin bertambahnya luasan kawasan hutan lindung yang rusak; dan (iii) belum maksimalnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB.

### 3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral, antara lain (i) masih kurangnya cakupan bina penambangan rakyat; dan (ii) belum maksimalnya kontribusi sektor energi dan pertambangan terhadap PDRB.

### 4. Urusan Pariwisata

Permasalahan pembangunan urusan pariwisata, antara lain (i) belum optimalnya penataan objek wisata sebagai sebuah destinasi; (ii) belum terintegrasinya objek wisata dengan komponen pendukung lainnya; (iii) belum optimalnya promosi pariwisata; (iv) masih belum maksimalnya jumlah kunjungan wisata; dan (v) masih belum maksimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

### 5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan urusan kelautan dan perikanan, antara lain (i) masih rendahnya kapasitas dan keterampilan SDM pengelolaan sektor kelautan dan perikanan; (ii) masih terbatasnya teknologi untuk mengelola potensi sektor kelautan dan perikanan; (iii) masih kurangnya akses permodalan; (iv) kurang optimalnya kelembagaan perikanan; (iv) masih terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di bidang perikanan; (v) masih rendahnya kesadaran akan pentingnya perencanaan pembangunan yang berwawasan kepulauan.

## 6. Urusan Perdagangan

Permasalahan pembangunan urusan perdagangan, antara lain (i) masih kurangnya cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal; dan (ii) masih belum maksimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

## 7. Urusan Perindustrian

Permasalahan pembangunan urusan perindustrian, antara lain (i) masih kurangnya cakupan bina kelompok pengrajin; dan (ii) masih belum maksimalnya kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB.

## 4.2. Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggung-jawabkan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika isu strategis baik internal maupun eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun ke depan, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Pemerintah daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman yang berasal dari internal maupun eksternal. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif dan terencana. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian dalam merumuskan isu-isu strategis adalah hasil telaahan dan analisis terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta kebijakan

pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD). Data dan informasi yang dapat dijadikan isu strategis, jika setiap isu strategis :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Langkah lain yang juga dapat dijadikan sebagai metode dalam penentuan isu-isu strategis, yaitu *Forum Group Discussion* (FGD) yang melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman dalam merumuskan atau memahami isu-isu strategis perencanaan pembangunan daerah. FGD diarahkan untuk memilih kategori isu dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisis dan telaah terhadap data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Ternate dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu, maka secara garis besar telah dapat dipetakan berbagai isu-isu strategis, antara lain sebagai berikut :

1. Keterbatasan lahan perkotaan.
2. Ketidakseimbangan pertumbuhan antara kawasan (konsentrasi sentral jasa perdagangan dan pemukiman hanya di pusat kota).
3. Masih terdapat kawasan rawan bencana yang bersifat musiman (karakteristik geografis Kota Ternate sebagai wilayah rawan bencana).
4. Masih adanya keterisolasian wilayah kepulauan sebagai akibat dari belum meratanya infrastruktur.
5. Tingkat kepadatan lalu lintas yang terus meningkat.
6. Pengendalian ruang dan lingkungan serta kesadaran masyarakat yang belum optimal.
7. Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi.
8. Lapangan kerja yang masih terbatas dan angka pengangguran yang relatif masih tinggi.
9. Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas.
10. Tingkat inflasi yang masih tinggi sebagai akibat dari adanya sejumlah kebutuhan pokok di pasok dari luar.
11. Karakteristik, identitas, dan icon kota yang belum menonjol.

12. Pertumbuhan sektor informal yang terus meningkat belum diimbangi dengan sarana dan prasarana pendukung.
13. Belum adanya pemerataan serta pembangunan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah.
14. Adanya sejumlah sektor strategis yang memiliki potensi belum dikelola secara optimal seperti sektor perikanan, perdagangan pariwisata, dan jasa.
15. Sumber daya aparatur birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung.
16. Masih minimnya ruang publik dan kawasan perindustrian.
17. Adanya potensi ekonomi lokal di bidang kerajinan lokal dan kuliner yang belum terwadahi dan diberdayakan secara optimal.
18. Masih rentannya konflik antar masyarakat (tawuran dan perkelahian antar kampung).
19. Masih terdapat degradasi budaya dan sosial di masyarakat.
20. Masih adanya permasalahan kebutuhan dasar air bersih dan kelistrikan di perkotaan dan di kepulauan.
21. Pertumbuhan ekonomi dan investasi Kota Ternate yang cukup potensial belum mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya dalam upaya mencapai visi dan misi serta untuk menjawab permasalahan perkotaan dan isu strategis Kota Ternate 5 Tahun ke depan, maka dirumuskan 10 (sepuluh) program prioritas, sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Perkotaan, Pengendalian Tata Ruang Berbasis Lingkungan serta Penataan Kawasan Rawan Bencana.
2. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan Serta Pemberdayaan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
3. Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Revitalisasi Cagar Budaya serta Infrastruktur Pendukung Untuk Mendorong Ternate Sebagai Icon Kota Religius, Kota Pariwisata Unggulan dan Kota Pusaka Dunia Berbasis Sejarah Budaya dan Bahari.
4. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan Berbasis Maritim dan Pesisir.
5. Mewujudkan Konektivitas Lintas Wilayah Terdekat, Mendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Ketahanan Pangan.
6. Pembangunan Kota Baru Wilayah Selatan sebagai Kawasan Penyangga Dalam Rangka Keseimbangan dan Pemerataan Pertumbuhan Pembangunan Antar Kawasan.
7. Pengembangan dan Pemetaan Kawasan Strategis Sentra Ternate Utara, Tengah, Selatan dan Pulau Berbasis Potensi dan Karakteristik Wilayah.
8. Peningkatan dan Pemerataan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Murah dan Berkualitas.



9. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Mengedepankan Akuntabilitas dan Percepatan Akses Pelayanan di Bidang Perizinan serta Mengerahkan Birokrasi yang Inovatif Berbasis Investasi dan Entrepreneur.
10. Penyediaan dan Konservasi Air Baku.

Berdasarkan hasil telaah dan analisis data dan informasi yang ada, maka isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar maupun pilihan pada Pemerintah Kota Ternate sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2021, adalah sebagai berikut :

### **4.2.1. Urusan Wajib**

#### **1. Urusan Pendidikan**

Isu-isu strategis urusan pendidikan, adalah (i) rendahnya kualitas sumber daya manusia; (ii) rendahnya kompetensi tenaga pendidikan; (iii) masih adanya disparitas antar lembaga pendidikan antara negeri dengan swasta; (iv) belum semua tenaga pendidik telah bersertifikasi; dan (v) belum optimalnya penerapan manajemen pendidikan di sekolah.

#### **2. Urusan Kesehatan**

Isu-isu strategis urusan kesehatan, adalah (i) rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat; (ii) masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat; (iii) masih rendahnya kuantitas tenaga medis dan non medis; (iv) belum tersedianya data terkait dengan jumlah penduduk yang bermasalah dengan kesehatan; dan (v) penerapan manajemen bidang kesehatan yang belum optimal.

#### **3. Urusan Pekerjaan Umum**

Isu-isu strategis urusan pekerjaan umum, adalah (i) belum optimalnya ketersediaan infrastruktur yang dapat memperpendek rentang kendali antar kecamatan dan antar kelurahan; (ii) masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur perairan; dan (iii) masih kurangnya moda transportasi perairan.

#### **4. Urusan Perumahan**

Isu-isu strategis urusan perumahan, adalah (i) masih adanya rumah penduduk yang tidak layak huni; dan (ii) masih kurangnya ruang terbuka untuk aktivitas publik.

## 5. **Urusan Penataan Ruang**

Isu-isu strategis urusan penataan ruang, adalah (i) kurangnya sosialisasi perda RTRW; (ii) belum optimalnya penegakan hukum perda tata ruang; dan (iii) belum tersedianya media informasi penataan ruang melalui peta digital dan peta analog.

## 6. **Urusan Perencanaan Pembangunan**

Isu-isu strategis urusan perencanaan pembangunan, adalah (i) belum berkualitasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan (ii) masih rendahnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia di bidang perencanaan.

## 7. **Urusan Perhubungan**

Isu-isu strategis urusan perhubungan, adalah (i) belum lengkapnya sarana dan prasarana lalu lintas; dan (ii) perlu disusun *blue print* pembangunan transportasi laut secara terpadu.

## 8. **Urusan Lingkungan Hidup**

Isu-isu strategis urusan lingkungan hidup, adalah (i) perlu ada penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup; dan (ii) perlunya meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## 9. **Urusan Pertanahan**

Isu-isu strategis urusan pertanahan, adalah (i) perlu dilakukan pemutahiran data pertanahan; dan (ii) perlu dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pertanahan.

## 10. **Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Isu-isu strategis urusan kependudukan dan pencatatan sipil, adalah (i) perlu dilakukan sosialisasi undang-undang tentang kependudukan; dan (ii) perlu pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) untuk peningkatan pelayanan prima.

## 11. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Isu-isu strategis urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adalah (i) masih rendahnya kapasitas dan kompetensi perempuan; dan (ii) perlunya penegakan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

## **12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Isu-isu strategis urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, adalah (i) perlu dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya keluarga berencana; (ii) perlu ada penambahan tenaga relawan; dan (iii) belum optimalnya pembinaan Balita, Remaja, Dewasa dan Lansia dalam upaya peningkatan Keluarga Sejahtera.

## **13. Urusan Sosial**

Isu-isu strategis urusan sosial, adalah (i) masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; (ii) masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial; dan (iii) masih belum tersedianya data yang akurat dan terkini tentang jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

## **14. Urusan Ketenagakerjaan**

Isu-isu strategis urusan ketenagakerjaan, adalah (i) masih rendahnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja; dan (ii) kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap regulasi tentang ketenagakerjaan.

## **15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Isu-isu strategis urusan koperasi dan usaha kecil menengah, adalah (i) masih kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah; dan (ii) masih rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi untuk berkompetisi dalam penyediaan barang dan jasa.

## **16. Urusan Penanaman Modal**

Isu-isu strategis urusan penanaman modal, adalah (i) kurangnya promosi potensi investasi daerah; dan (ii) pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) belum optimal.

## **17. Urusan Kebudayaan**

Isu-isu strategis urusan kebudayaan, adalah (i) masih rendahnya alokasi pagu anggaran; (ii) kurangnya promosi budaya lokal; dan (iii) kurangnya pelestarian seni dan budaya lokal untuk pengembangan pariwisata.

## **18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Isu-isu strategis urusan kepemudaan dan olahraga, adalah (i) masih terbatasnya penyelenggaraan event olahraga dan kepemudaan; (ii) masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olah raga; dan (iii) masih kurangnya pembinaan terhadap olahraga berprestasi.

## **19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Isu-isu strategis urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, adalah (i) masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara terhadap organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat; dan (ii) masih rendahnya pendidikan politik kepada masyarakat oleh partai politik.

## **20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

Isu-isu strategis urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, adalah (i) masih belum adanya kesesuaian penempatan dan promosi dalam jabatan dengan kompetensi dan prestasi kerja; (ii) masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur di kecamatan-kecamatan dan di kelurahan; (iii) masih belum terpenuhinya rasio jumlah polisi pamong praja; (iv) masih rendahnya penegakan peraturan daerah; (v) belum diterapkannya konsep kelompok budaya kerja (KBK) dalam mengatasi permasalahan kinerja aparatur.

## **21. Urusan Ketahanan Pangan**

Isu-isu strategis urusan ketahanan pangan, adalah (i) masih belum adanya regulasi tentang ketersediaan, kecukupan, stabilitas, aksesibilitas, kualitas, kuantitas, keterjangkauan serta keamanan pangan secara berkesinambungan; (ii) masih belum stabil dan sering terjadi fluktuasi stok cadangan pangan dan pengendalian harga daerah.

## **22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Isu-isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, adalah (i) masih rendahnya pemahaman sumber daya aparatur pemerintahan kelurahan tentang program dan kegiatan; dan (ii) terbatasnya kualitas dan kuantitas kader di lapangan.

## **23. Urusan Statistik**

Isu-isu strategis urusan statistik, adalah masih terbatasnya kualitas dan kuantitas data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

## **24. Urusan Kearsipan**

Isu-isu strategis urusan kearsipan, adalah (i) terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja bidang kearsipan.

## **25. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Isu-isu strategis urusan komunikasi dan informatika, adalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya untuk menunjang kinerja bidang komunikasi dan informatika.

## **26. Urusan Perpustakaan**

Isu-isu strategis urusan perpustakaan adalah (i) masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana/prasarana untuk meningkatkan kinerja bidang perpustakaan; dan (ii) perlu peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang perpustakaan.

## **4.2.2. Urusan Pilihan**

### **1. Urusan Pertanian**

Isu-isu strategis urusan pertanian, adalah (i) masih adanya alih fungsi pemanfaatan lahan pertanian; (ii) terjadinya fluktuasi iklim yang tidak bisa diprediksi; (iii) masih belum maksimalnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

### **2. Urusan Kehutanan**

Isu-isu strategis urusan kehutanan, adalah (i) masih rendahnya penegakan hukum; dan (ii) masih maksimalnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB.

### **3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Isu-isu strategis urusan energi dan sumber daya mineral, adalah (i) masih rendahnya kapasitas listrik terpasang untuk penerangan; dan (ii) masih belum maksimalnya kontribusi sektor energi dan pertambangan terhadap PDRB.

### **4. Urusan Pariwisata**

Isu-isu strategis urusan pariwisata, adalah (i) masih kurangnya promosi bidang pariwisata; (ii) belum maksimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

### **5. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Isu-isu strategis urusan kelautan dan perikanan, adalah (i) terbatasnya kapasitas sumber daya dan sarana/prasarana bidang kelautan dan perikanan; (ii) belum adanya mekanisme permodalan untuk pengembangan potensi kelautan dan perikanan; (iii) perlu adanya komitmen meningkatkan alokasi pagu anggaran untuk pengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan (iv) belum sinerginya perencanaan pembangunan wilayah kepulauan dengan daratan.

## 6. **Urusan Perdagangan**

Isu-isu strategis urusan perdagangan, adalah (i) masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan bidang perdagangan; dan (ii) masih belum maksimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

## 7. **Urusan Perindustrian**

Isu-isu strategis urusan perindustrian, adalah (i) belum terpetakannya kawasan untuk pengembangan industri; (ii) masih belum maksimalnya kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB.

# 4.3. **Isu Lingkungan Strategis**

## 4.3.1. **Isu Strategis Lingkungan Internal**

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan, isu strategis lingkungan internal merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk diuraikan. Berbagai isu strategis lingkungan internal, akan menjadi masukan untuk menetapkan rumusan kebijakan yang perlu dimasukkan ke dalam dokumen RPJMD, beserta tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dicapai sampai dengan akhir perodesasi perencanaan.

Sementara dalam konteks program, isu strategis lingkungan internal akan menjadi masukan untuk menetapkan judul program prioritas yang terkait dengan pencapaian target visi, misi dan judul program prioritas terkait dengan pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan setiap SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pulau dan gugusan kepulauan, maka program prioritas yang juga mendesak dan perlu mendapatkan pertimbangan dan perhatian, adalah program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, di antaranya program prioritas yang terkait dengan pengembangan Poros Maritim.

Isu strategis lingkungan internal di Pemerintah Kota Ternate terkait dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, meliputi antara lain (i) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien, efektif, transparan dan

akuntabel; (ii) mengelola aparatur supaya agar dapat bekerja lebih profesional, kompetitif dan akuntabel; (iii) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan porsi belanja langsung untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel; dan (iv) tata kelola pemerintahan yang berkualitas, sehingga dalam memberikan pelayanan dapat cepat, tepat, mudah dan murah.

### **4.3.2. Isu Strategis Lingkungan Eksternal**

Isu strategis lingkungan eksternal dapat datang dari berbagai dinamika, baik adanya kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Terlepas dari berbagai bentuknya, setiap isu harus dapat dicarikan solusinya, terutama solusi dalam bentuk program/kegiatan. Isu strategis lingkungan eksternal, disamping dapat dipandang sebagai kendala/tantangan dalam pengembangan institusi, juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk pengembangan berbagai potensi unggulan daerah.

Oleh karena itu, setiap rumusan kebijakan yang akan dituangkan dan ditetapkan ke dalam rancangan dokumen RPJMD untuk 5 (lima) tahun ke depan, harus dapat dan sejalan dengan dinamika perkembangan isu strategis lingkungan eksternal yang terjadi. Dengan pola berpikir dan pola tindak yang demikian sistematis, diharapkan setiap kebijakan yang dijadikan sebagai landasan untuk penetapan program dan alokasi pagu anggaran indikatif dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, akan konsisten, selaras, bersinergi dan harmonis antara realisasi kebutuhan masyarakat, serta antar dokumen perencanaan pembangunan.

Terkait dengan hal tersebut, maka isu lingkungan strategis eksternal yang perlu direspon dan disikapi secara bijaksana adalah :

#### **1. Integrasi Pasar Bebas (AFTA) dan (MEA)**

Sesuai dengan kesepakatan di antara negara-negara se-Asia, bahwa sejak akhir tahun 2015 diberlakukan kerjasama AFTA dan MEA. Dengan demikian, Kota Ternate sebagai salah satu wilayah di gugusan nusantara, suka tidak suka sejak dini harus sudah membangun dan mempersiapkan berbagai infrastruktur baik yang bersifat fisik dan non fisik yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengan integrasi perekonomian dimaksud.

Oleh karena itu, berbagai langkah dan pertimbangan yang perlu ditanamkan sejak dini dalam menghadapi integrasi pasar bebas dimaksud, antara lain (i) memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi untuk mencintai dan mendukung produk dalam

negeri; (ii) mengupayakan standarisasi dan sertifikasi keterampilan yang dipersyaratkan untuk kompetisi pasar tenaga kerja; dan (iii) meningkatkan arus investasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi produk unggulan ke pasar-pasar di ASEAN; dan (iv) meningkatkan kuantitas dan kualitas promosi kunjungan wisata, terutama wisata laut yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

## 2. *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Isu strategis internasional yang relevan pada sebagian besar perencanaan pembangunan daerah adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang setelah berakhir periode kegiatannya akan dilanjutkan pada laporan panel tingkat tinggi (*High-Level Panel of Eminent Persons/HLPEP*) dengan lima pergeseran transformatif seperti:

- a. Mengakhiri kelaparan dan kemiskinan;
- b. Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- c. Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan *growth* dengan pembangunan berkelanjutan;
- d. Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi publik yang efektif dan akuntabel; dan
- e. Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain.

Kesepakatan global *Sustainable Development Goals (SDGs)*, merupakan langkah untuk melanjutkan berbagai program yang telah dilaksanakan dalam agenda MDG's. Indikator target yang ingin dicapai dalam kesepakatan tersebut, adalah tetap terjaganya iklim yang kondusif. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dan program-program prioritas yang akan ditetapkan dalam RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, harus dalam kerangka konsepsi pembangunan berkelanjutan.

### 4.3.3. Isu-isu Strategis Nasional dan Provinsi

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan nasional menjadi isu nasional yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi arah pembangunan Kota Ternate pada masa mendatang. Dokumen perencanaan tingkat nasional akan menjadi salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus terintegrasi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan baik regional maupun nasional.



## 1. Isu-isu Strategis RPJM Nasional Tahun 2015-2019

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih pada periode tahun 2015-2019, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima (5) tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan Visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 adalah:

### **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi dalam rangkaian dalam bait-bait kata secara implisit memiliki makna yang sangat strategis dalam mewujudkan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Makna dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. **Gotong Royong**, merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja. Kekuatan rakyat adalah Gotong Royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.
- b. **Berdaulat**, adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
- c. **Kemandirian**, memiliki makna antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.
- d. **Berkepribadian**, harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian

dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perlu ditempuh melalui rumusan Misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional; dan
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya dalam upaya mencapai visi dan misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional tersebut, dirumuskanlah kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

## **2. Isu-isu Strategis RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019**

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, agar terjadi sinkronisasi dalam menetapkan berbagai isu strategis mulai dari tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten/kota secara sinergitas dan merupakan bagian penting dalam perumusan kebijakan yang dituangkan ke dalam dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021, maka hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian adalah terkait dengan target pencapaian Visi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019, yaitu :

### **“Maluku Utara Cinta 2019”**

Selanjutnya, berdasarkan data dan informasi yang telah diintegrasikan menjadi isu-isu penting ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019, antara lain sebagai berikut :

**a. Isu-isu Strategis Global**

- 1) Perubahan iklim dan bencana alam;
- 2) Terorisme global;
- 3) Perdagangan bebas;
- 4) Demokrasi dan HAM; dan
- 5) *Trafficking*; dan
- 6) *Sustainable Development Goals* (SDGs).

**b. Isu-isu Strategis Daerah**

- 1) Tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah belum efektif dan efisien;
- 2) Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
- 3) Terbatasnya infrastruktur dasar;
- 4) Belum optimalnya pelayanan pendidikan;
- 5) Belum optimalnya pelayanan kesehatan;
- 6) Masih rendahnya ketahanan pangan daerah;
- 7) Belum optimalnya iklim usaha dan investasi;
- 8) Belum berkembangnya budaya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi;
- 9) Rendahnya daya saing ekonomi daerah dan komoditas keunggulan daerah;
- 10) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, serta daya dukung pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan terluar dan terdepan;
- 11) Ketimpangan antar wilayah;
- 12) Belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai kehidupan umat beragama;
- 13) Belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- 14) Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.



## BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



**K**ota Ternate merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Maluku Utara yang memiliki berbagai sumber daya alam dan beranekaragam kebudayaan masyarakat yang cukup kental dan berkarakter kuat. Oleh karena itu, potensi-potensi tersebut merupakan salah satu modal berharga bagi setiap pelaksana pembangunan daerah untuk memulai rangkaian program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan rakyat akan terbangun secara konsisten dan merata jika segenap insan di Kota Ternate berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kemampuan dirinya untuk mandiri sekaligus membangun daya saing daerah, sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menggapai cita-citanya yakni meningkatnya taraf kehidupan keluarga secara sosial ekonomi dalam masyarakat.

Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan memerlukan kebijakan dan peran Pemerintah yang kuat dan efektif dalam mengatur jalannya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan perencanaan yang efektif dengan partisipasi para pelaku pembangunan secara terkoordinir. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa polarisasi rumusan konsep perencanaan pembangunan difokuskan pada penguatan peran Pemerintah Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, visi dan misi kepala daerah terpilih dijabarkan secara mendetail ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya. Penjabaran tersebut dilakukan dengan memperhatikan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, serta menyelaraskan, mensinergikan dan mengharmonisasikannya dengan sasaran dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sebagai penjabaran dari NAWA CITA.

## 5.1. Visi

Memasuki periode pembangunan jangka menengah kepala daerah yang baru, Pemerintah Kota Ternate dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki visi pembangunan yang merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya. Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kota Ternate. Selain itu, visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan jangka menengah dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kota Ternate, rencana pembangunan daerah memiliki fokus pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan wilayah secara berkesinambungan dan konsisten. Hal ini dikarenakan masih adanya pulau-pulau terpencil, tertinggal dan terencil, maupun pelosok-pelosok lainnya di Kota Ternate yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih maksimal lagi, sehingga secara merata dapat dijangkau untuk menikmati hasil pembangunan daerah, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, perhatian penuh pemerintah daerah bagi peningkatan kualitas aksesibilitas wilayah menjadi salah satu pondasi utama dalam perumusan perencanaan pembangunan Kota Ternate dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Demikian pula, keseimbangan pembangunan daerah baik dari segi sosial budaya, perekonomian, hingga lingkungan hidup juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam rangkaian pembangunan Kota Ternate. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pembangunan di Kota Ternate lebih diarahkan pada model pembangunan horizontal dimana pelaksanaan pembangunan di setiap bidang pembangunan akan memiliki porsi yang proporsional dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan mempertimbangkan masih adanya kesenjangan antara pembangunan di wilayah daratan dengan berbagai kebutuhan infrastruktur pembangunan di wilayah kepulauan. Melalui pendekatan pembangunan yang demikian, diharapkan akan tercipta suatu keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, sosial dan keseimbangan antar dan antara wilayah, serta mendorong terwujudnya kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial.

Memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai data dan informasi, serta fakta empirik di lapangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dalam rangka mewujudkan janji-janji politik Walikota dan Wakil Walikota terpilih ketika masa kampanye terdahulu, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan di Kota Ternate,

maka untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate dalam 5 (lima) tahun ke depan, maka Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate sepanjang kurun waktu tahun 2016-2021 yaitu:

**“TERWUJUDNYA TERNATE MENJADI KOTA BERBUDAYA,  
AGAMAI, HARMONIS, MANDIRI, BERKEADILAN  
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

Untuk mencapai target Visi Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan diperlukan dukungan berbagai instrumen lainnya sebagai modal pembangunan. Dukungan modal pembangunan dimaksud merupakan dimensi yang saling terkait antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Dukungan berbagai dimensi dapat berupa :

1. Dukungan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pembangunan daerah sepanjang tahun 2016-2021 melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dari berbagai macam profesi, suku, agama dan nilai-nilai kearifan lokal lainnya yang hidup dan berkembang di Kota Ternate. Targetnya adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera, yaitu bebas dari kemiskinan, menurunnya angka pengangguran, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, menurunnya angka kriminalitas dan terbukanya lapangan kerja baru untuk meningkatkan kesejahteraan;

2. Dukungan Sumber Daya Alam

Pelaksanaan pembangunan daerah sepanjang kurun waktu tahun 2016-2021 di Kota Ternate sangat membutuhkan dan memanfaatkan berbagai jenis sumber daya alam. Sumber daya alam apapun jenisnya, memiliki keterbatasan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pembangunan daerah yang dilaksanakan jika tidak dikendalikan dalam kurun waktu tertentu pasti akan menurunkan daya dukung ekosistem, yang pada waktunya akan merusak kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi yang saling menguntungkan. Pada satu sisi pembangunan di Kota Ternate dalam rangka mewujudkan Visi, Misi kepala daerah terpilih sebagai implementasi dari janji politiknya untuk mensejahterakan masyarakat dapat diwujudkan. Pada sisi lain, kualitas ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjadi aset Pemerintah Kota Ternate tidak punah, sehingga kelestarian lingkungan hidup tidak mengalami kepunahan dan rusak, maka pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan harus berbasiskan pada pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan



### 3. Modal Sosial

Pelaksanaan pembangunan daerah sepanjang kurun waktu tahun 2016-2021 di Kota Ternate dilakukan melalui pendekatan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang sejak dahulu. Output dari pembangunan daerah tidak saja dinilai dalam dimensi fisik, tetapi juga dalam dimensi non fisik (sosial). Maknanya, pendekatan pembangunan tidak hanya diukur dengan nilai fisik semata, tetapi juga nilai-nilai sosial yang relevan dengan kondisi dan situasi lokal. Melalui perspektif pendekatan pembangunan tersebut, maka capaian target utama dari pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ternate, selain menambah berbagai fasilitas publik dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana publik untuk mewujudkan pelayanan yang optimal kepada publik, juga pelaksanaan pembangunan daerah sesungguhnya diarahkan dalam upaya memperkuat nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai adat istiadat lokal yang selama ini terbukti telah berkontribusi terhadap terciptanya kondisi sosial yang semakin kondusif dan terbangunnya kelembagaan masyarakat yang semakin kuat dan mandiri.

Berlandaskan pada 3 (tiga) modal pembangunan sebagaimana telah diuraikan di atas, diharapkan target utama pembangunan di Kota Ternate yaitu meningkatkan pembangunan daerah berdimensi pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan dapat dicapai secara optimal. Jika keseluruhan target capaian indikator pembangunan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diimplementasikan akan secara optimal, maka berbagai aspek ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kota Ternate dapat diraih. Capaian indikator ukuran keberhasilan pembangunan daerah di Kota Ternate dalam 5 (lima) tahun ke depan, dapat diukur antara lain :

1. Kota Ternate masuk dalam 3 (tiga) besar kekuatan ekonomi di Provinsi Maluku Utara;
2. Terwujudnya kualitas hidup modern yang merata, yang capaiannya diukur dengan pencapaian prestasi sebagai peringkat pertama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se Provinsi Maluku Utara; dan
3. Menurunnya angka kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas dalam upaya mendorong tumbuhnya perekonomian makro daerah secara merata dan adil.

Visi, selain memiliki target sebagaimana telah diuraikan di atas, juga secara implisit mempunyai makna. Jika dibedah dari berbagai perspektif dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, maka makna dari setiap kata dalam Visi “Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan”, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Kalimat Terwujudnya**, memiliki makna, bahwa segala sesuatu yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021, harus dapat direalisasikan secara maksimal dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk dapat merealisasikannya perlu dilakukan melalui bekerja keras, kerja cerdas dan kerja bersinergitas baik oleh seluruh aparaturnya pemerintah Kota Ternate mulai dari tingkat kota, kecamatan sampai tingkat kelurahan. Bahkan sampai pada struktur pemerintahan yang terendah yaitu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), serta partisipasi dan dukungan/dorongan dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan menetapkan kata “bekerja” sebagai titik fokus target capaian kinerja pemerintahan 5 (lima) tahun mendatang, serta didukung oleh berbagai elemen masyarakat yang bahu membahu, diharapkan tujuan dan sasaran akhir kinerja di bawah kendali kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate akan tercapai secara optimal.
2. **Kalimat Berbudaya**, bahwa kebijakan pemerintahan maupun perilaku masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat *se ator* sebagai sumber nilai yang terbukti ampuh menjadi spirit sosial dan spirit moral Moloku Kie Raha pada masa kejayaannya. Hal ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap nilai budaya dan adat *se ator* dengan mengupayakan pelestariannya, sekaligus menjadikannya sistem nilai yang membentuk kesadaran sosial yang diharapkan terefleksi dalam perilaku sosial masyarakat.
3. **Kalimat Agamais**, adalah upaya menciptakan serta menumbuhkan kesadaran keberagaman dan spiritualitas di dalam masyarakat yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia remaja, yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk modernitas upaya mewujudkan masyarakat bermartabat, berakhlak, berbudi pekerti luhur, toleran, penuh belas kasih, yang menempatkan nilai keberagaman sebagai basis moral yang membentuk kesadaran sosial dan tercermin dalam kehidupan sosial yang santun, religius, aman dan tentram.
4. **Kalimat Harmonis**, artinya mengupayakan terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan sosial dan lingkungan fisik perkotaan, melalui tata ruang perkotaan terpadu, serasi, nyaman dan sehat, yang mampu mengakomodasi dinamika ekonomi, sosial budaya, dan politik secara seimbang melalui ketersediaan ruang publik yang representatif bagi seluruh masyarakat tanpa kesan pengabaian dan diskriminasi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kota Ternate,

terpeliharanya persatuan dan kesatuan, meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan dalam pembauran, semangat persaudaraan, sikap toleran baik antar umat beragama, antar etnik, maupun antar kelompok.

- 5. Kalimat Mandiri**, dalam kamus bahasa Indonesia, Kata Mandiri dapat mengandung beberapa pengertian, yaitu **Pertama**, kata mandiri dapat dimaknai sebagai sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. **Kedua**, kata mandiri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kondisi dan situasinya, tanpa meminta atau tergantung pada orang lain. Dengan demikian, kata Mandiri dapat diartikan, bahwa seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak/keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan/perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya. **Ketiga**, kata mandiri dapat juga diterjemahkan sebagai kondisi psikologis dan mentalis seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi manfaat atau keuntungannya, maupun segi-segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar berhasil sesuai keinginan dirinya maka diperlukan adanya kemandirian yang kuat. Sedangkan makna **Keempat**, kata mandiri dapat diartikan sebagai suatu perasaan otonomi, sehingga pengertian perilaku mandiri adalah suatu kepercayaan diri sendiri, dan perasaan otonomi diartikan sebagai perilaku yang terdapat dalam diri seseorang yang timbul karena kekuatan dorongan dari dalam tidak karena terpengaruh oleh orang lain.

Dari berbagai dimensi pemahaman tersebut, maka kata Mandiri mengandung makna, menjadikan Ternate Kota Jasa dan Perdagangan sebagai pusat perekonomian Maluku Utara, melalui penataan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, kompetitif, dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai, kepastian hukum, kemudahan investasi. Sekaligus mendorong kreativitas dan produktivitas melalui pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah agar lebih produktif dan berdaya saing, yang diarahkan pada kemandirian ekonomi masyarakat.

- 6. Kalimat Berkeadilan**, artinya mewujudkan prinsip persamaan hak warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supermasi hukum,

perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan publik di semua bidang yang diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak rakyat, serta kualitas pelayanan publik, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, teratasinya masalah perkotaan seperti kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral, serta pemberdayaan masyarakat hingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*).

7. **Kalimat Berwawasan Lingkungan**, artinya mengupayakan penataan pembangunan perkotaan yang seluruh arah perkembangannya didasarkan pada keasrian dan keaslian potensi lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya, dengan memperhatikan keseimbangan ekologis. Hal ini diarahkan pada upaya revitalisasi lingkungan fisik perkotaan dan lingkungan hidup yang hijau, asri, nyaman, dan sehat melalui penataan yang padu dan serasi antara lingkungan hidup dan lingkungan sosial, yang diharapkan memberi ketenangan, kenyamanan dan kedamaian kepada warga masyarakat, sekaligus mengupayakan pelestarian ekologi pantai, dan menghindari kecenderungan eksploitasi lingkungan fisik dan ekologi pantai sebagai dampak pengembangan *water front city*, dan perilaku masyarakat yang relatif belum ramah lingkungan.

## 5.2. Misi

Secara umum, Misi dapat dirumuskan sebagai suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi, juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the chosen track*) bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi para pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat dari setiap hasil pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan rumusan visi pembangunan Kota Ternate sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan Misi pembangunan daerah jangka menengah Kota Ternate dalam tahun 2016-2021 ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Membangun Ternate yang Mandiri Adil dan Sejahtera;
2. Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Berbudaya dan Agamais;
3. Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan;
4. Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim; dan
5. Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Membangun Ternate yang Mandiri Adil dan Sejahtera**

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan antara lain membuka keterisolasian, membuka berbagai jaringan sampai ke pelosok-pelosok daerah, mengurangi angka pengangguran dan membuka lapangan kerja baru, membangun dan mengembangkan berbagai jaringan infrastruktur, membangun sektor pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan membangun berbagai fasilitas kesehatan untuk meningkatkan usia harapan hidup masyarakat, serta mengurangi balita kurang gizi, terutama mereka yang tinggal di Kecamatan Moti, Kecamatan Pulau Hiri dan Kecamatan Pulau Batang Dua. Jika tujuan-tujuan ini berhasil, maka peringkat daya saing Kota Ternate akan semakin meningkat yang pada akhirnya akan mengundang investor untuk berinvestasi ke Kota Ternate.

Namun dalam beberapa kasus tujuan pembangunan yang demikian mulia, tidak dapat terealisasi secara optimal. Hasil pembangunan belum secara merata, adil dan transparan dapat menyentuh serta dinikmati oleh masyarakat secara proporsional. Hal ini terkait dengan adanya berbagai kendala, di antaranya kendala geografi, kendala transportasi, kendala budaya kerja dan etos kerja, kendala perencanaan dan penganggaran, serta kendala-kendala sosial lainnya. Oleh karena itu, agenda kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam melaksanakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan diarahkan dalam upaya memecahkan berbagai kendala dimaksud. Jika berbagai kendala tersebut dapat diatasi, maka pembangunan yang dilaksanakan di masa mendatang akan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata dan adil untuk meningkatkan kesejahteraannya.

### **2. Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Berbudaya dan Agamais**

Pendekatan pembangunan daerah yang semata-mata mengejar capaian target pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur daerah, serta meningkatkan pendapatan daerah saja tanpa mempertimbangkan pendekatan sosial budaya, kadang tidak dapat mencapai target utama dari pembangunan daerah itu sendiri, yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Untuk melakukan sebuah perubahan, perlu ada pembangunan di berbagai sektor. Namun pembangunan itu sendiri tidak harus menjauhkan masyarakat dari budaya yang turun temurun telah hidup dimasyarakat dan diyakini sebagai sebuah nilai sosial yang harus dipatuhi dan dijalankan.

Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun tahun 2016-2021 ke depan disamping dilakukan melalui beberapa pendekatan dan inovasi baru, juga

dalam rangka melanjutkan berbagai target yang belum dapat dicapai secara maksimal di periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Pendekatan inovasi baru dalam pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan adalah pembangunan yang berdimensi pada upaya pelestarian budaya lokal dan kearifan lokal, serta pendekatan yang berdimensi religius yaitu pembangunan daerah yang berdimensi agamais. Pembangunan daerah melalui pendekatan agamais, hakekatnya adalah pembangunan daerah yang dilakukan tidak semata-mata dalam upaya mencapai kenikmatan dan kesejahteraan dunia semata, tetapi pembangunan yang bersendikan pada aqidah agama dalam upaya pencapaian kebahagiaan akherat kelak.

Pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan budaya dan agamais, diharapkan akan dapat merubah karakter para penyelenggara pembangunan itu sendiri untuk bekerja dengan penuh kesungguhan dan dengan kejujuran, sehingga pada akhirnya akan terbangun suatu budaya kerja yang agamais, yakni birokrasi yang dalam melaksanakan pekerjaannya : (i) tidak KKN; (ii) tidak ada pelanggaran hukum; (iii) semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik; (iv) perijinan cepat dan mudah serta tidak ada *overlap*; (v) komunikasi dengan publik berjalan baik; (vi) penggunaan anggaran efisien dan efektif; (vii) produktivitas meningkatkan kuantitas dan kualitasnya; dan (viii) hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **3. Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan**

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dalam jumlah yang memadai. Ketersediaan infrastruktur yang handal akan mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. Dampak positif yang paling penting dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas adalah masuknya investor untuk berinvestasi di Kota Ternate. Jika sampai dengan akhir periode pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu, pembangunan berbagai infrastruktur masih belum dapat memenuhi sesuai kebutuhan masyarakat yang berdomisili di wilayah terisolir dan terbelakang dan tertinggal dan terpencil, sehingga berbagai potensi unggulan di setiap wilayah belum dapat dikelola secara maksimal dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita penduduk, maka pembangunan berbagai infrastruktur yang menunjang tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat dalam 5 (lima) tahun ke depan akan ditingkatkan dan disebar secara merata, adil dan proporsional.

Tersebar nya infrastruktur secara merata keseluruh wilayah di Kota Ternate secara proporsional, diharapkan akan mendorong tumbuh nya berbagai aktivitas, perekonomian, perdagangan, keuangan dan jasa lainnya. Tersebar nya secara merata dan proporsional infrastruktur, diharapkan akan menunjang kualitas dan kuantitas pelayanan publik seperti: penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan mengurangi terjadinya kesenjangan sosial antar wilayah, serta antar wilayah perkotaan itu sendiri.

#### **4. Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim**

Kota Ternate, secara geografi kewilayahan merupakan kota yang sebagian besar wilayah nya berupa perairan. Dengan kondisi tersebut, maka pembangunan yang dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan fokus pada pembangunan bernuansa pesisir dalam rangka mendorong terwujud nya pembangunan poros maritim dunia. Kota Ternate sebagai salah satu kota maritim yang berada di ujung timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan agenda besar pembangunan poros maritim dunia.

Jika dalam pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu di Kota Ternate belum secara maksimal mengkonsentrasikan berbagai sumber daya untuk pembangunan pesisir dan maritim, maka di masa mendatang pembangunan terkait dengan pesisir dalam rangka membangun sinergi dengan pembangunan tol laut dan poros maritim sebagai telah ditetapkan sebagai sasaran prioritas nasional, akan lebih di optimalkan. Dengan konsep pendekatan pembangunan tersebut diharapkan akan memberi dampak positif terhadap percepatan pembangunan Kota Ternate sebagai pusat pertumbuhan perekonomian di Provinsi Maluku Utara, dan sekaligus memberi dampak ganda terhadap pertumbuhan perekonomian kabupaten/kota lainnya di lingkup Provinsi Maluku Utara.

#### **5. Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari**

Kota Ternate yang sebagian besar wilayah nya dikelilingi perairan, belum secara optimal mengelola potensi unggulan perairan sebagai salah satu produk unggulan yang memiliki nilai tambah ekonomis yang tinggi. Dengan karakteristik demikian, maka pengelolaan potensi unggulan perairan berbasis wisata bahari, diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah yang signifikan untuk membiayai belanja pembangunan daerah. Demikian pula potensi kekayaan dan keragaman budaya yang ada di Kota Ternate yang selama ini belum dioptimalkan dalam pengelolaannya

dalam menambah pendapatan asli daerah, perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius lagi.

Berdasarkan data dan fakta empirik di lapangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan yang selaras dengan prioritas sasaran nasional dan target prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate, maka dalam upaya percepatan pembangunan Kota Ternate akan dilakukan melalui pendekatan berbasis budaya, sejarah dan wisata bahari.

### 5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan, bahwa tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kota Ternate dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja *'impact'* yang saling terhubung dimana sasaran makro merupakan lagging indicator yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung



keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah Kota Ternate.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kota Ternate terkait dengan pernyataan misi untuk kurun waktu pembangunan daerah periode tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Misi 1 : Membangun Ternate Yang Mandiri, Adil dan Sejahtera**

Untuk mencapai target Misi 1 yaitu “Membangun Ternate yang mandiri adil dan sejahtera”, maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur yang ada di setiap wilayah;
- b. Merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara transparan, adil dan proporsional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas masyarakat di bidang pelayanan sosial dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas masyarakat di bidang perekonomian dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat; dan
- e. Mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan untuk mendukung peningkatan daya saing pemerintah Kota Ternate.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka rumusan sasaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemetaan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur yang ada di setiap wilayah;
- b. Menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara transparan, adil dan proporsional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya aktivitas pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, tata ruang dan terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Memfasilitasi tumbuhnya berbagai aktivitas masyarakat di bidang perdagangan, perindustrian serta usaha kecil dan menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. Menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar wilayah perkotaan untuk mendukung peningkatan daya saing pemerintah Kota Ternate.

## 2. Misi 2 : Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Berbudaya dan Agamais

Untuk mencapai target Misi 2 yaitu “Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Berbudaya dan Agamais”, maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menata kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya, serta sebagai kota yang agamais;
- b. Melindungi berbagai nilai budaya lokal yang beraneka ragam, termasuk benda-benda kuno dan situs-situs bersejarah agar tidak punah;
- c. Menjaga dan mempertahankan predikat Kota Ternate sebagai kota yang agamais;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan dan keaneka ragaman budaya lokal di Kota Ternate agar tercipta ketentraman dan ketertiban umum untuk meningkatkan daya saing daerah; dan
- e. Membangun berbagai fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi pariwisata budaya dan pariwisata religi.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka rumusan sasaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tertatanya kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya lokal, serta sebagai kota yang agamais;
- b. Terlindunginya berbagai nilai budaya lokal yang beraneka ragam, termasuk benda-benda kuno dan situs-situs bersejarah agar tidak punah;
- c. Terjaganya dan terpeliharanya predikat Kota Ternate sebagai kota yang agamais;
- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan dan keaneka ragaman budaya lokal di Kota Ternate agar tercipta ketentraman dan ketertiban umum untuk meningkatkan daya saing daerah;
- e. Terbangunnya berbagai fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi pariwisata budaya dan pariwisata religi.

## 3. Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan

Untuk mencapai target Misi 3 yaitu “Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan”, maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Membangun infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara;
- b. Membangun dan mengembangkan berbagai infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan;

- c. Meningkatkan aktivitas perekonomian, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal;
- d. Melakukan pendataan terhadap tanah-tanah milik masyarakat yang akan terkena pembangunan berbagai infrastruktur;
- e. Menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya; dan
- f. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan angka kriminalitas, serta masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka rumusan sasaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terbangunnya berbagai infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara;
- b. Terbangunnya dan berkembangnya berbagai infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan;
- c. Meningkatnya aktivitas perekonomian makro daerah, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal;
- d. Terdatanya tanah-tanah milik masyarakat yang akan terkena pembangunan berbagai infrastruktur;
- e. Tumbuh dan berkembangnya jiwa wirausaha di kalangan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya; dan
- f. Terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan angka kriminalitas, serta masalah kesejahteraan sosial lainnya.

#### **4. Misi 4 : Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim**

Untuk mencapai target Misi 4 yaitu “Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim”, maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mempromosikan potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut dan poros maritim dunia;
- c. Membangun wilayah pesisir di Kota Ternate yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk kaum perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan;

- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah;
- f. Meningkatkan kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk peningkatan kesejahteraannya; dan
- g. Merumuskan kembali kebijakan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate tersebut di atas, maka rumusan sasaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terpromosikannya potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut dan poros maritim dunia;
- c. Terbangunnya wilayah pesisir di Kota Ternate yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;
- d. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat termasuk kaum perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan;
- e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah;
- f. Meningkatnya kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraannya; dan
- g. Terumuskannya kebijakan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.

#### **5. Misi 5 : Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari**

Untuk mencapai target Misi 5 yaitu “Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari”, maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Menciptakan Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- b. Mempromosikan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;

- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Kota Ternate dalam upaya mewujudkan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- d. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah;
- e. Mempermudah berbagai perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate;
- f. Meningkatkan daya saing Pemerintah Kota Ternate di bidang pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pariwisata bahari.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate tersebut di atas, maka rumusan sasaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terciptanya Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- b. Terpromosikannya Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Kota Ternate dalam upaya mewujudkan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- d. Menjadikannya sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah;
- e. Mempermudah berbagai perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate;
- f. Meningkatnya daya saing Pemerintah Kota Ternate di bidang pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pariwisata bahari.

Untuk menggambar keterkaitan antara Visi, Misi dengan Tujuan dan sasaran dalam rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016-2021, dapat disajikan sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2016-2021**

Tujuan	Target Sasaran Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Misi 1 : Membangun Ternate Yang Mandiri Adil dan Sejahtera</b>					
	<b>Visi : "Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamis, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan"</b>					
	<b>Sasaran</b>					
Melakukan pemetaan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur yang ada di setiap wilayah.	Pemetaan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur yang ada di setiap wilayah.	Pemetaan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur yang ada di setiap wilayah.	Pemetaan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur yang ada di setiap wilayah.	Pemetaan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur yang ada di setiap wilayah.	Pemetaan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur yang ada di setiap wilayah.	Pemetaan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur yang ada di setiap wilayah.
Merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara transparan, adil dan proporsional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara transparan, adil dan proporsional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara transparan, adil dan proporsional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara transparan, adil dan proporsional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara transparan, adil dan proporsional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara transparan, adil dan proporsional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara transparan, adil dan proporsional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Visi : "Terwujudnya Temate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan"		Target Sasaran Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan		Sasaran				
Mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas masyarakat di bidang pelayanan sosial dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya aktivitas pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, tata ruang dan terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya aktivitas pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, tata ruang dan terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya aktivitas pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, tata ruang dan terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya aktivitas pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, tata ruang dan terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya aktivitas pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, tata ruang dan terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya aktivitas pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, tata ruang dan terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas masyarakat di bidang perekonomian dan usaha kecil dan menengah serta dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat.	Memfasilitasi tumbuh berbagai aktivitas masyarakat di bidang perdagangan, perindustrian dan menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Memfasilitasi tumbuh berbagai aktivitas masyarakat di bidang perdagangan, perindustrian dan menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Memfasilitasi tumbuh berbagai aktivitas masyarakat di bidang perdagangan, perindustrian dan menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Memfasilitasi tumbuh berbagai aktivitas masyarakat di bidang perdagangan, perindustrian dan menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Memfasilitasi tumbuh berbagai aktivitas masyarakat di bidang perdagangan, perindustrian dan menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Memfasilitasi tumbuh berbagai aktivitas masyarakat di bidang perdagangan, perindustrian dan menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Visi : "Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan"		Target Sasaran Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Sasaran						
Tujuan						
Mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar wilayah perkotaan untuk mendukung peningkatan daya saing pemerintah Kota Ternate.	Menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar wilayah perkotaan untuk mendukung peningkatan daya saing pemerintah Kota Ternate.	Menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar wilayah perkotaan untuk mendukung peningkatan daya saing pemerintah Kota Ternate.	Menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar wilayah perkotaan untuk mendukung peningkatan daya saing pemerintah Kota Ternate.	Menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar wilayah perkotaan untuk mendukung peningkatan daya saing pemerintah Kota Ternate.	Menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar wilayah perkotaan untuk mendukung peningkatan daya saing pemerintah Kota Ternate.	Menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar wilayah perkotaan untuk mendukung peningkatan daya saing pemerintah Kota Ternate.
<b>Misi 2 : Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Berbudaya dan Agamais</b>						
Menata kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya, serta sebagai kota yang agamais.	Tertatanya kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya lokal, serta sebagai kota yang agamais.	Tertatanya kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya lokal, serta sebagai kota yang agamais.	Tertatanya kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya lokal, serta sebagai kota yang agamais.	Tertatanya kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya lokal, serta sebagai kota yang agamais.	Tertatanya kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya lokal, serta sebagai kota yang agamais.	Tertatanya kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya lokal, serta sebagai kota yang agamais.
Melindungi berbagai nilai budaya lokal yang beraneka ragam, termasuk benda-benda kuno dan situs-situs bersejarah agar tidak punah.	Terlindunginya berbagai nilai budaya lokal yang beraneka ragam, termasuk benda-benda kuno dan situs-situs bersejarah agar tidak punah.	Terlindunginya berbagai nilai budaya lokal yang beraneka ragam, termasuk benda-benda kuno dan situs-situs bersejarah agar tidak punah.	Terlindunginya berbagai nilai budaya lokal yang beraneka ragam, termasuk benda-benda kuno dan situs-situs bersejarah agar tidak punah.	Terlindunginya berbagai nilai budaya lokal yang beraneka ragam, termasuk benda-benda kuno dan situs-situs bersejarah agar tidak punah.	Terlindunginya berbagai nilai budaya lokal yang beraneka ragam, termasuk benda-benda kuno dan situs-situs bersejarah agar tidak punah.	Terlindunginya berbagai nilai budaya lokal yang beraneka ragam, termasuk benda-benda kuno dan situs-situs bersejarah agar tidak punah.
Menjaga dan mempertahankan predikat Kota Ternate sebagai kota yang agamais.	Terjaganya dan terpeliharanya predikat Kota Ternate sebagai kota yang agamais.	Terjaganya dan terpeliharanya predikat Kota Ternate sebagai kota yang agamais.	Terjaganya dan terpeliharanya predikat Kota Ternate sebagai kota yang agamais.	Terjaganya dan terpeliharanya predikat Kota Ternate sebagai kota yang agamais.	Terjaganya dan terpeliharanya predikat Kota Ternate sebagai kota yang agamais.	Terjaganya dan terpeliharanya predikat Kota Ternate sebagai kota yang agamais.



Tujuan		Target Sasaran Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<p>Visi : "Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamis, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan"</p>						
<p>Sasaran</p>						
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan dan keaneka ragam budaya lokal di Kota Ternate agar tercipta ketertarikan dan ketertiban umum untuk meningkatkan daya saing daerah.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan dan keaneka ragam budaya lokal di Kota Ternate agar tercipta ketertarikan dan ketertiban umum untuk meningkatkan daya saing daerah.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan dan keaneka ragam budaya lokal di Kota Ternate agar tercipta ketertarikan dan ketertiban umum untuk meningkatkan daya saing daerah.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan dan keaneka ragam budaya lokal di Kota Ternate agar tercipta ketertarikan dan ketertiban umum untuk meningkatkan daya saing daerah.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan dan keaneka ragam budaya lokal di Kota Ternate agar tercipta ketertarikan dan ketertiban umum untuk meningkatkan daya saing daerah.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan dan keaneka ragam budaya lokal di Kota Ternate agar tercipta ketertarikan dan ketertiban umum untuk meningkatkan daya saing daerah.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan dan keaneka ragam budaya lokal di Kota Ternate agar tercipta ketertarikan dan ketertiban umum untuk meningkatkan daya saing daerah.
Membangun berbagai fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi pariwisata budaya dan pariwisata religi.	Terbangunnya berbagai fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi pariwisata budaya dan pariwisata religi.	Terbangunnya berbagai fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi pariwisata budaya dan pariwisata religi.	Terbangunnya berbagai fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi pariwisata budaya dan pariwisata religi.	Terbangunnya berbagai fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi pariwisata budaya dan pariwisata religi.	Terbangunnya berbagai fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi pariwisata budaya dan pariwisata religi.	Terbangunnya berbagai fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi pariwisata budaya dan pariwisata religi.
<p>Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan</p>						
Membangun infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara.	Terbangunnya berbagai infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara.	Terbangunnya berbagai infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara.	Terbangunnya berbagai infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara.	Terbangunnya berbagai infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara.	Terbangunnya berbagai infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara.	Terbangunnya berbagai infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara.

Tujuan		Target Sasaran Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<p>Visi : "Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan"</p>						
<p>Sasaran</p>						
<p>Membangun dan mengembangkan berbagai infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan.</p>	<p>Terbangunnya dan berkembangnya berbagai infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan.</p>	<p>Terbangunnya dan berkembangnya berbagai infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan.</p>	<p>Terbangunnya dan berkembangnya berbagai infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan.</p>	<p>Terbangunnya dan berkembangnya berbagai infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan.</p>	<p>Terbangunnya dan berkembangnya berbagai infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan.</p>	<p>Terbangunnya dan berkembangnya berbagai infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan.</p>
<p>Meningkatkan aktivitas perekonomian, perdagangan, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal.</p>	<p>Meningkatnya aktivitas perekonomian makro daerah, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal.</p>	<p>Meningkatnya aktivitas perekonomian makro daerah, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal.</p>	<p>Meningkatnya aktivitas perekonomian makro daerah, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal.</p>	<p>Meningkatnya aktivitas perekonomian makro daerah, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal.</p>	<p>Meningkatnya aktivitas perekonomian makro daerah, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal.</p>	<p>Meningkatnya aktivitas perekonomian makro daerah, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal.</p>
<p>Melakukan pendataan terhadap tanah-tanah milik masyarakat yang akan terkena pembangunan berbagai infrastruktur.</p>	<p>Terdatanya tanah-tanah milik masyarakat yang akan terkena pembangunan berbagai infrastruktur.</p>	<p>Terdatanya tanah-tanah milik masyarakat yang akan terkena pembangunan berbagai infrastruktur.</p>	<p>Terdatanya tanah-tanah milik masyarakat yang akan terkena pembangunan berbagai infrastruktur.</p>	<p>Terdatanya tanah-tanah milik masyarakat yang akan terkena pembangunan berbagai infrastruktur.</p>	<p>Terdatanya tanah-tanah milik masyarakat yang akan terkena pembangunan berbagai infrastruktur.</p>	<p>Terdatanya tanah-tanah milik masyarakat yang akan terkena pembangunan berbagai infrastruktur.</p>

Visi : "Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan"						
Target Sasaran Tahun						
Tujuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasaran						
Menumbuhkan jiwa wirusaha dikalangan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.	Tumbuh dan berkembangnya jiwa wirusaha dikalangan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.	Tumbuh dan berkembangnya jiwa wirusaha dikalangan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.	Tumbuh dan berkembangnya jiwa wirusaha dikalangan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.	Tumbuh dan berkembangnya jiwa wirusaha dikalangan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.	Tumbuh dan berkembangnya jiwa wirusaha dikalangan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.	Tumbuh dan berkembangnya jiwa wirusaha dikalangan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.
Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan angka kriminalitas, serta masalah kesejahteraan sosial lainnya.	Tenciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan angka kriminalitas, serta masalah kesejahteraan sosial lainnya.	Tenciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan angka kriminalitas, serta masalah kesejahteraan sosial lainnya.	Tenciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan angka kriminalitas, serta masalah kesejahteraan sosial lainnya.	Tenciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan angka kriminalitas, serta masalah kesejahteraan sosial lainnya.	Tenciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan angka kriminalitas, serta masalah kesejahteraan sosial lainnya.	Tenciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan angka kriminalitas, serta masalah kesejahteraan sosial lainnya.
<b>Misi 4 : Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim</b>						
Mempromosikan potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.	Terpromosikannya potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.	Terpromosikannya potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.	Terpromosikannya potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.	Terpromosikannya potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.	Terpromosikannya potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.	Terpromosikannya potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Visi : "Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan"						
Sasaran		Target Sasaran Tahun				
Tujuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut dan poros maritim dunia.	Meningkatnya kualitas pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut dan poros maritim dunia.	Meningkatnya kualitas pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut dan poros maritim dunia.	Meningkatnya kualitas pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut dan poros maritim dunia.	Meningkatnya kualitas pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut dan poros maritim dunia.	Meningkatnya kualitas pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut dan poros maritim dunia.	Meningkatnya kualitas pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut dan poros maritim dunia.
Membangun wilayah pesisir di Kota Ternate yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.	Terbangunnya wilayah pesisir di Kota Ternate yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.	Terbangunnya wilayah pesisir di Kota Ternate yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.	Terbangunnya wilayah pesisir di Kota Ternate yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.	Terbangunnya wilayah pesisir di Kota Ternate yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.	Terbangunnya wilayah pesisir di Kota Ternate yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.	Terbangunnya wilayah pesisir di Kota Ternate yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk kaum berdomisili di wilayah pesisir dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat termasuk kaum berdomisili di wilayah pesisir dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat termasuk kaum berdomisili di wilayah pesisir dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat termasuk kaum berdomisili di wilayah pesisir dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat termasuk kaum berdomisili di wilayah pesisir dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat termasuk kaum berdomisili di wilayah pesisir dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat termasuk kaum berdomisili di wilayah pesisir dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.



Visi : "Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan"		Target Sasaran Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasaran							
Tujuan		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah.
Meningkatkan kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk peningkatan kesejahteraan.	Meningkatkan kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan.	Meningkatkan kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan.	Meningkatkan kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan.	Meningkatkan kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan.	Meningkatkan kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan.	Meningkatkan kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan.	Meningkatkan kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan.
Merumuskan kembali kebijakan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.	Merumuskannya kebijakan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.	Terumuskannya kebijakan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.	Terumuskannya kebijakan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.	Terumuskannya kebijakan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.	Terumuskannya kebijakan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.	Terumuskannya kebijakan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.	Terumuskannya kebijakan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.

Tujuan	Sasaran			
	2016	2017	2018	2019
	<p>Visi : "Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan"</p> <p>Target Sasaran Tahun</p>			
	<p>Misi 5 : Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari</p>			
Menciptakan Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Terciptanya Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Terciptanya Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Terciptanya Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Terciptanya Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.
Mempromosikan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Terciptanya Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Terciptanya Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Terciptanya Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Terciptanya Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Kota Ternate dalam upaya mewujudkan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Kota Ternate dalam upaya mewujudkan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Kota Ternate dalam upaya mewujudkan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Kota Ternate dalam upaya mewujudkan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Kota Ternate dalam upaya mewujudkan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.
Menjadikan sektor pariwisata salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.	Menjadikannya sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.	Menjadikannya sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.	Menjadikannya sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.	Menjadikannya sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

Visi: "Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan"		Target Sasaran Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan		Sasaran				
Mempermudah berbagai perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota ternate.	Mempermudah berbagai perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate.	Mempermudah berbagai perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate.	Mempermudah berbagai perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate.	Mempermudah berbagai perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate.	Mempermudah berbagai perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate.	Mempermudah berbagai perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate.
Meningkatkan daya saing Pemerintah Kota Ternate di bidang pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pariwisata bahari.	Meningkatnya daya saing Pemerintah Kota Ternate di bidang pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pariwisata bahari.	Meningkatnya daya saing Pemerintah Kota Ternate di bidang pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pariwisata bahari.	Meningkatnya daya saing Pemerintah Kota Ternate di bidang pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pariwisata bahari.	Meningkatnya daya saing Pemerintah Kota Ternate di bidang pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pariwisata bahari.	Meningkatnya daya saing Pemerintah Kota Ternate di bidang pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pariwisata bahari.	Meningkatnya daya saing Pemerintah Kota Ternate di bidang pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pariwisata bahari.

## BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



**S**ebelum diuraikan lebih lanjut mengenai strategi, maka hal penting yang perlu dipahami bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintahan Kota Ternate untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Melalui parameter tertentu, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategi” dalam menjamin, bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Sedangkan perencanaan merupakan terjemahan dari visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang dapat dioperasionalkan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, maka dianggap strategis. Rumusan strategi dan arah kebijakan bertujuan untuk memberikan rujukan supaya dalam merumuskan capaian target kinerja pembangunan, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus melalui pendekatan komprehensif.

Oleh karena itu, perlu ada penjelasan tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai visi dan misi melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategis dilakukan dari waktu ke waktu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, maka arah kebijakan akan mengarahkan langkah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai dan sekaligus memberi pedoman, pada



rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2016 sampai dengan 2021 sebagai periodisasi dari dokumen RPJMD Kota Ternate.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Ternate. Strategi harus dijadikan salah satu landasan yang amat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. dengan demikian rumusan strategi dapat berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kota Ternate menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Terkait dengan pembangunan daerah telah digariskan, bahwa apa yang menjadi visi-misi daerah harus selaras dengan visi-misi pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 dan sejalan pula dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019. Sementara itu, Visi dan Misi Pemerintahan Kota Ternate Tahun 2016-2021 sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan oleh seluruh *stakeholder* adalah "Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan". Visi dimaksud selanjutnya telah dijabarkan ke dalam misi Pemerintahan Kota Ternate untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Membangun Ternate yang Mandiri Adil dan Sejahtera;
2. Membangun Kota Ternate sebagai Kota Berbudaya dan Agamais;
3. Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan;
4. Membangun Kota Ternate sebagai Kota Pesisir dan Maritim; dan
5. Membangun Kota Ternate sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan mempedomani rumusan keterkaitan antara visi dan misi dengan rumusan tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, maka rumusan strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021, yang merupakan penjabaran dari setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Dalam perumusan strategi didasarkan pada kriteria (i) Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; (ii) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; dan (iii) Mengevaluasi berbagai

faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun Kota Ternate diselaraskan dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Ternate untuk periode 5 (lima) tahun ketiga, yaitu tahun 2016-2021 dan periode 5 (lima) tahun keempat yaitu tahun 2021-2025. Dengan menterpadukan kedua periodisasi ketiga dan keempat 5 (lima) tahunan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang tersebut, maka rumusan strategis dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 dijadikan sebagai landasan oleh seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, yaitu dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (rencana 5 tahunan PD), dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah (Renja PD).

## 6.1. Strategi

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 dengan target capaian semaksimal mungkin untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat sejajar dengan sumber daya manusia kabupaten/kota lainnya baik di lingkup Provinsi Maluku Utara maupun dengan kabupaten/kota lainnya di tingkat regional.

## 6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, adalah (i) memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu; (ii) dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat; (iii) membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan (iv) mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah dalam merumuskan arah kebijakan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun. Setelah sasaran dan target

kinerja telah dapat dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun. Setelah isu strategis telah dapat diidentifikasi dan dirumuskan, langkah berikutnya yaitu merumuskan draft arah kebijakan, menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan langkah terakhir yang sangat penting dan menentukan dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan adalah memutuskan arah kebijakan.

Berkaitan dengan langkah-langkah tersebut di atas, dan dalam upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2016-2021, maka rumusan strategi dan arah kebijakan terkait dengan pencapaian target kinerja misi dirumuskan sebagai berikut :

## **1. Misi 1 : Membangun Ternate yang Mandiri Adil dan Sejahtera**

### **a. Rumusan Strategi**

Untuk mendorong tercapainya target Misi 1 “Membangun Ternate yang Mandiri Adil dan Sejahtera”, maka strateginya dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendataan terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Infrastruktur di setiap Wilayah;
- 2) Melakukan konsultasi publik secara transparan, adil terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat;
- 3) Meningkatkan aktivitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Perumahan, Tata Ruang dan Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- 4) Meningkatkan berbagai aktivitas masyarakat di bidang Perdagangan, Perindustrian serta Usaha Kecil dan Menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- 5) Memfasilitasi meningkatnya sarana/prasarana di Kelurahan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar kelurahan dengan perkotaan.

### **b. Rumusan Arah Kebijakan**

Rumusan arah kebijakan yang ditempuh dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai target strategi ditetapkan pada Misi 1 sebagai berikut :

- 1) Membangun dan meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur secara Adil dan Mandiri untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat;
- 2) Melakukan Konsultasi Publik, Forum SKPD dan Musrenbang untuk Sinkronisasi dan Keselarasan program/pagu Indikatif antar Dokumen Perencanaan;

- 3) Membangun berbagai aktivitas untuk Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Perumahan, Tata Ruang dan terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- 4) Membangun berbagai aktivitas Masyarakat di bidang Perdagangan, Perindustrian serta Usaha Kecil dan menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; dan
- 5) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas sarana/prasarana di Kelurahan dalam rangka mengurangi Kesenjangan.

## **2. Misi 2 : Membangun Kota Ternate sebagai Kota Berbudaya dan Agamais**

### **a. Rumusan Strategi**

Untuk mendorong tercapainya target Misi 2 “Membangun Kota Ternate sebagai Kota Berbudaya dan Agamais”, maka strateginya dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Mengembalikan Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki Kekayaan dan Keragaman Budaya lokal, serta sebagai Kota yang Agamais;
- 2) Penegakan hukum untuk melindungi nilai Budaya lokal yang beranekaragam, benda-benda kuno, situs-situs bersejarah agar tidak punah;
- 3) Mendorong terpeliharanya predikat Kota Ternate sebagai kota yang Agamais;
- 4) Mendorong terlaksananya pengelolaan kekayaan dan keaneka-ragaman budaya lokal dan ketentraman, serta ketertiban umum; dan
- 5) Menambah berbagai fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi Pariwisata Budaya dan Pariwisata Religi.

### **b. Rumusan Arah Kebijakan**

Rumusan arah kebijakan yang ditempuh dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk mencapai target strategi pada Misi 2 ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Merancang kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman Budaya lokal, serta sebagai kota yang Agamais;
- 2) Penerbitan Perda tentang nilai budaya lokal yang beraneka ragam, benda-benda kuno, situs-situs Bersejarah agar tidak punah;
- 3) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas berbagai Keagamaan;
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan dan Keanekaragaman Budaya lokal dan Ketentraman, serta Ketertiban umum; dan
- 5) Membangun dan mengembangkan fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi Pariwisata Budaya dan Pariwisata Religi.

### **3. Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan**

#### **a. Rumusan Strategi**

Untuk mendorong tercapainya target Misi 3 “Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan”, maka strateginya dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Menambah Infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai Kota Jasa dan Perdagangan di Provinsi Maluku Utara;
- 2) Memfasilitasi berkembangnya berbagai Infrastruktur secara Merata dan Adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan;
- 3) Mendorong tumbuhnya Perekonomian Makro Daerah, perdagangan, Perindustrian, Pariwisata dan Usaha Kecil dan menengah Masyarakat lokal;
- 4) Melakukan pendataan terhadap tanah-tanah milik Masyarakat yang akan terkena Pembangunan;
- 5) Mendorong Tumbuh dan berkembangnya jiwa wirusaha di kalangan Masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya; dan
- 6) Mendorong terciptanya lapangan kerja baru bagi Masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan angka kriminalitas, serta masalah kesejahteraan sosial lainnya.

#### **b. Rumusan Arah Kebijakan**

Rumusan arah kebijakan yang ditempuh dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai target strategi pada Misi 3 ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Membangun Infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai Kota Jasa dan Perdagangan di Provinsi Maluku Utara;
- 2) Membangun dan mengembangkan infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan;
- 3) Memfasilitasi tumbuhnya perekonomian makro daerah, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal;
- 4) Pembangunan data base mengenai tanah-tanah berbasis teknologi informasi;
- 5) Membangun dan meningkatkan kapasitas balai-balai pelatihan wirausaha; dan
- 6) Meningkatkan promosi investasi untuk terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan angka kriminalitas, serta masalah Kesejahteraan Sosial lainnya.

#### 4. Misi 4 : Membangun Kota Ternate sebagai Kota Pesisir dan Maritim

##### a. Rumusan Strategi

Untuk mendorong tercapainya target Misi 4 “Membangun Kota Ternate sebagai Kota Pesisir dan Maritim”, maka strateginya dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi berkembangnya potensi unggulan di Wilayah Pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah;
- 2) Menyusun *design* besar pengelolaan Wilayah Pesisir dalam mendukung Integrasi Pembangunan Tol Laut dan Poros Maritim Dunia;
- 3) Penyusunan pedoman pengelolaan Wilayah Pesisir yang Berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;
- 4) Memfasilitasi meningkatnya partisipasi masyarakat dan perempuan dalam pengelolaan potensi unggulan bidang Kelautan dan Perikanan;
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Infrastruktur Laut, Darat dan Udara dalam mendukung pengelolaan potensi Wilayah Pesisir sebagai Potensi Unggulan Daerah;
- 6) Mendorong minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraannya; dan
- 7) Terumuskan kebijakan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis Wilayah Pesisir.

##### b. Rumusan Arah Kebijakan

Rumusan arah kebijakan yang ditempuh dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai target strategi pada Misi 4 ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan potensi unggulan di Wilayah Pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Membangun kerjasama untuk tersusunnya *design* besar pengelolaan Wilayah Pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan Tol Laut dan Poros Maritim Dunia;
- 3) Penerbitan Perda tentang pengelolaan Wilayah Pesisir yang Berbasis Lingkungan Hidup berkelanjutan;
- 4) Meningkatnya partisipasi Masyarakat perempuan dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan;
- 5) Pembangunan dan mengembangkan Infrastruktur Laut, Darat dan Udara dalam pengelolaan Potensi Wilayah Pesisir sebagai potensi unggulan Daerah;
- 6) Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraannya; dan

- 7) Merumuskan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.

## **5. Misi 5 : Membangun Kota Ternate sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari**

### **a. Rumusan Strategi**

Untuk mendorong tercapainya target Misi 5 “Membangun Kota Ternate sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari”, maka strateginya dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Membangun Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- 2) Meningkatkan promosi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- 3) Memfasilitasi terbangunnya Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari di Provinsi Maluku Utara;
- 4) Mendorong berkembangnya sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah;
- 5) Menyederhanakan proses perijinan di bidang pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate; dan
- 6) Membangun sistem berbasis teknologi informasi yang handal dan mudah diakses publik.

### **b. Rumusan Arah Kebijakan**

Rumusan arah kebijakan yang ditempuh dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai target strategi ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Membangun berbagai fasilitas publik di Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- 2) Membangun infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektor pariwisata;
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kunjungan wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari di Provinsi Maluku Utara;
- 4) Mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah;
- 5) Menambah fasilitas publik di bidang perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate; dan
- 6) Pengadaan perangkat teknologi informasi yang handal dan mudah diakses publik.

**Tabel 6.1**  
**Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dengan Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahunan				
				2016	2017	2018	2019	2020
				<b>Misi 1 : Membangun Ternate yang Mandiri Adil dan Sejahtera</b>				
1	Melakukan pemetaan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur dan infrastruktur yang ada di setiap wilayah	Terpetakannya kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur yang ada di setiap wilayah.	Melakukan pendataan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur di setiap wilayah.	Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara adil dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara adil dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara adil dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara adil dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2	Merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara transparan, adil dan proporsional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Tersusunnya rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara transparan, adil dan proporsional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Melakukan konsultasi publik secara transparan, adil terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.	Melakukan konsultasi publik forum SKPD dan Musrenbang untuk sinkronisasi dan keselarasan program/ pagu indikatif antar dokumen perencanaan.	Melakukan konsultasi publik forum SKPD dan Musrenbang untuk sinkronisasi dan keselarasan program/ pagu indikatif antar dokumen perencanaan.	Melakukan konsultasi publik forum SKPD dan Musrenbang untuk sinkronisasi dan keselarasan program/ pagu indikatif antar dokumen perencanaan.	Melakukan konsultasi publik forum SKPD dan Musrenbang untuk sinkronisasi dan keselarasan program/ pagu indikatif antar dokumen perencanaan.	Melakukan konsultasi publik forum SKPD dan Musrenbang untuk sinkronisasi dan keselarasan program/ pagu indikatif antar dokumen perencanaan.
3	Mendorong kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan sosial dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Tumbuhnya aktivitas pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, tata ruang dan ketertarikan masyarakat dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatkan aktivitas pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, tata ruang dan ketertarikan masyarakat dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Membangun sebagai aktivitas untuk pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, tata ruang dan ketertarikan masyarakat dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Membangun sebagai aktivitas untuk pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, tata ruang dan ketertarikan masyarakat dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Membangun sebagai aktivitas untuk pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, tata ruang dan ketertarikan masyarakat dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Membangun sebagai aktivitas untuk pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, tata ruang dan ketertarikan masyarakat dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Membangun sebagai aktivitas untuk pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, tata ruang dan ketertarikan masyarakat dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2016	2017	2018	2019	2020
4	Mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas masyarakat di bidang perdagangan, perindustrian serta usaha kecil dan menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Tumbuhnya berbagai aktivitas masyarakat di bidang perdagangan, perindustrian serta usaha kecil dan menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Meingkatkan berbagai aktivitas masyarakat di bidang perdagangan, perindustrian serta usaha kecil dan menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Membangun berbagai aktivitas masyarakat di bidang perdagangan, perindustrian serta usaha kecil dan menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Membangun berbagai aktivitas masyarakat di bidang perdagangan, perindustrian serta usaha kecil dan menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Membangun berbagai aktivitas masyarakat di bidang perdagangan, perindustrian serta usaha kecil dan menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Membangun berbagai aktivitas masyarakat di bidang perdagangan, perindustrian serta usaha kecil dan menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Membangun berbagai aktivitas masyarakat di bidang perdagangan, perindustrian serta usaha kecil dan menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
				Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan.
5	Mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan untuk mendukung peningkatan daya saing Pemerintah Kota Ternate.	Menurunnya kesenjangan antar wilayah perkotaan untuk mendukung peningkatan daya saing Pemerintah Kota Ternate.	Memfasilitasi sarana/prasarana dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan.
<b>Misi 2 : Membangun Kota Ternate sebagai Kota Berbudaya dan Agamis</b>								
1	Menata kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya, serta sebagai kota yang agamis.	Tertatanya kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya lokal, serta sebagai kota yang agamis.	Mengembalikan Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya lokal, serta sebagai kota yang agamis.	Merancang kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya lokal, serta sebagai kota yang agamis.	Merancang kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya lokal, serta sebagai kota yang agamis.	Merancang kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya lokal, serta sebagai kota yang agamis.	Merancang kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya lokal, serta sebagai kota yang agamis.	Merancang kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya lokal, serta sebagai kota yang agamis.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahunan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Melindungi berbagai nilai budaya lokal yang beraneka ragam, termasuk benda-benda kuno dan situs-situs bersejarah agar tidak punah.	Terlindunginya berbagai nilai budaya lokal yang beraneka ragam, termasuk benda-benda kuno dan situs-situs bersejarah agar tidak punah.	Penegakan hukum untuk melindungi nilai budaya lokal yang beraneka ragam, benda-benda kuno, situs-situs bersejarah agar tidak punah.	Penerbitan Perda tentang nilai budaya lokal yang beraneka ragam, benda-benda kuno, situs-situs bersejarah agar tidak punah.	Penerbitan Perda tentang nilai budaya lokal yang beraneka ragam, benda-benda kuno, situs-situs bersejarah agar tidak punah.	Penerbitan Perda tentang nilai budaya lokal yang beraneka ragam, benda-benda kuno, situs-situs bersejarah agar tidak punah.	Penerbitan Perda tentang nilai budaya lokal yang beraneka ragam, benda-benda kuno, situs-situs bersejarah agar tidak punah.	Penerbitan Perda tentang nilai budaya lokal yang beraneka ragam, benda-benda kuno, situs-situs bersejarah agar tidak punah.	
3	Mempaja dan mempertahankan predikat Kota Ternate sebagai kota yang agamais.	Terjagatnya dan terpilihanya predikat Kota Ternate sebagai kota yang agamais.	Mendorong terpilihanya predikat Kota Ternate sebagai kota yang agamais.	Penerbitan Perda tentang nilai budaya lokal yang beraneka ragam, benda-benda kuno, situs-situs bersejarah agar tidak punah.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sebagai keagamaan.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sebagai keagamaan.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sebagai keagamaan.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sebagai keagamaan.	
4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan dan keanekaragaman budaya lokal di Kota Ternate agar tercipta ketentraman dan ketertiban umum untuk meningkatkan daya saing daerah.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan dan keanekaragaman budaya lokal di Kota Ternate agar tercipta ketentraman dan ketertiban umum untuk meningkatkan daya saing daerah.	Mendorong terlaksananya pengelolaan kekayaan dan keanekaragaman budaya lokal dan ketentraman, serta ketertiban umum.	Meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan dan keanekaragaman budaya lokal dan ketentraman, serta ketertiban umum.	Meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan dan keanekaragaman budaya lokal dan ketentraman, serta ketertiban umum.	Meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan dan keanekaragaman budaya lokal dan ketentraman, serta ketertiban umum.	Meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan dan keanekaragaman budaya lokal dan ketentraman, serta ketertiban umum.		
5	Membangun berbagai fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi parawisata budaya dan pariwisata religi.	Terbangunnya berbagai fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi parawisata budaya dan pariwisata religi.	Menambah berbagai fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi parawisata budaya dan pariwisata religi.	Membangun dan mengembangkan fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi pariwisata budaya dan pariwisata religi.	Membangun dan mengembangkan fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi pariwisata budaya dan pariwisata religi.	Membangun dan mengembangkan fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi pariwisata budaya dan pariwisata religi.	Membangun dan mengembangkan fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi pariwisata budaya dan pariwisata religi.		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan</b>								
1	Membangun infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara.	Terbangunnya berbagai infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara.	Memambah rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara.	Membangun infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara.	Membangun infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara.	Membangun infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara.	Membangun infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara.	Membangun infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara.
2	Membangun dan mengembangkan berbagai infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan.	Terbangunnya dan berkembangnya berbagai infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan.	Memfasilitasi berkembangnya berbagai infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan.	Membangun dan mengembangkan infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan.	Membangun dan mengembangkan infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan.	Membangun dan mengembangkan infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan.	Membangun dan mengembangkan infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan.	Membangun dan mengembangkan infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar perkotaan.
3	Meningkatkan aktivitas perekonomian, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal.	Meningkatnya aktivitas perekonomian makro daerah, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal.	Mendorong tumbuhnya perekonomian makro daerah, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal.	Memfasilitasi tumbuhnya perekonomian makro daerah, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal.	Memfasilitasi tumbuhnya perekonomian makro daerah, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal.	Memfasilitasi tumbuhnya perekonomian makro daerah, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal.	Memfasilitasi tumbuhnya perekonomian makro daerah, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal.	Memfasilitasi tumbuhnya perekonomian makro daerah, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahunan				
				2016	2017	2018	2019	2020
4	Melakukan pendataan terhadap tanah milik masyarakat yang akan terkena pembangunan sebagai infrastruktur.	Terdatanya tanah-tanah milik masyarakat yang akan terkena pembangunan sebagai infrastruktur.	Melakukan pendataan terhadap tanah-tanah milik masyarakat yang akan terkena pembangunan.	Pembangunan data base mengenai tanah-tanah berbasis teknologi informasi.	Pembangunan data base mengenai tanah-tanah berbasis teknologi informasi.	Pembangunan data base mengenai tanah-tanah berbasis teknologi informasi.	Pembangunan data base mengenai tanah-tanah berbasis teknologi informasi.	Pembangunan data base mengenai tanah-tanah berbasis teknologi informasi.
5	Menumbuhkan jiwa wirusaha di kalangan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.	Tumbuh dan berkembangnya jiwa wirusaha di kalangan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.	Mendorong tumbuh dan berkembangnya jiwa wirusaha di kalangan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.	Membangun dan meningkatkan kapasitas balai-balai pelatihan wirusaha.	Membangun dan meningkatkan kapasitas balai-balai pelatihan wirusaha.	Membangun dan meningkatkan kapasitas balai-balai pelatihan wirusaha.	Membangun dan meningkatkan kapasitas balai-balai pelatihan wirusaha.	Membangun dan meningkatkan kapasitas balai-balai pelatihan wirusaha.
6	Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan masalah kesejahteraan sosial lainnya.	Terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan masalah kesejahteraan sosial lainnya.	Mendorong terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan masalah kesejahteraan sosial lainnya.	Meningkatkan promosi investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka kriminalitas, serta masalah kesejahteraan sosial lainnya.	Meningkatkan promosi investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan masalah kesejahteraan sosial lainnya.	Meningkatkan promosi investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan masalah kesejahteraan sosial lainnya.	Meningkatkan promosi investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan masalah kesejahteraan sosial lainnya.	Meningkatkan promosi investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan masalah kesejahteraan sosial lainnya.

No	Tujuan	Arah Kebijakan					Strategi	Arah Kebijakan Tahunan				
		Sasaran	2016	2017	2018	2019		2020	2021			
<b>Misi 4 : Membangun Kota Ternate sebagai Kota Pesisir dan Maritim</b>												
1	Mempromosikan potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.	Terpromosikannya potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.	Memfasilitasi berkembangnya potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.	Mengembangkan potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.	Mengembangkan potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.	Mengembangkan potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.	Mengembangkan potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.	Mengembangkan potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.	Mengembangkan potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.	Mengembangkan potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.	Mengembangkan potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.	
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut dan poros maritim dunia.	Meningkatnya kualitas pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut dan poros maritim dunia.	Menyusun design besar pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut dan poros maritim dunia.	Membangun kerjasama untuk tersusunnya <i>design</i> besar pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut & poros maritim dunia.	Membangun kerjasama untuk tersusunnya design besar pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut & poros maritim dunia.	Membangun kerjasama untuk tersusunnya design besar pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut & poros maritim dunia.	Membangun kerjasama untuk tersusunnya design besar pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut & poros maritim dunia.	Membangun kerjasama untuk tersusunnya design besar pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut & poros maritim dunia.	Membangun kerjasama untuk tersusunnya design besar pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut & poros maritim dunia.	Membangun kerjasama untuk tersusunnya design besar pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut & poros maritim dunia.	Membangun kerjasama untuk tersusunnya design besar pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut & poros maritim dunia.	
3	Membangun wilayah pesisir di Kota Ternate yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.	Terbangunnya wilayah pesisir di Kota Ternate yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.	Penyusunan pedoman pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.	Penerbitan Perda tentang pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis lingkungan hidup berkelanjutan.	Penerbitan Perda tentang pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis lingkungan hidup berkelanjutan.	Penerbitan Perda tentang pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis lingkungan hidup berkelanjutan.	Penerbitan Perda tentang pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis lingkungan hidup berkelanjutan.	Penerbitan Perda tentang pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis lingkungan hidup berkelanjutan.	Penerbitan Perda tentang pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis lingkungan hidup berkelanjutan.	Penerbitan Perda tentang pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis lingkungan hidup berkelanjutan.	Penerbitan Perda tentang pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis lingkungan hidup berkelanjutan.	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahunan				
				2016	2017	2018	2019	2020
4	Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk kaum terdomisili di wilayah pesisir dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam partisipasi termasuk kaum terdomisili di wilayah pesisir dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.	Memfasilitasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kesempatan pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.
5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah.	Membangun dan mengembangkan infrastruktur laut, darat dan udara dalam pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah.	Membangun dan mengembangkan infrastruktur laut, darat dan udara dalam pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah.	Membangun dan mengembangkan infrastruktur laut, darat dan udara dalam pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah.	Membangun dan mengembangkan infrastruktur laut, darat dan udara dalam pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah.	Membangun dan mengembangkan infrastruktur laut, darat dan udara dalam pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah.
6	Meningkatkan kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk peningkatan kesejahteraan.	Meningkatnya kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan.	Mendorong minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan.	Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan.	Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan.	Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan.	Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan.	Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan.



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2016	2017	2018	2019	2020
7	Merumuskan kembali kebijakan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.	Terumuskannya kebijakan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.	Terumuskan kebijakan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.	Merumuskan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.	Merumuskan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.	Merumuskan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.	Merumuskan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.	Merumuskan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.
<b>Misi 5 : Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari</b>								
1	Menciptakan Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Terciptanya Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Membangun Kota Ternate sebagai destinasi wisata sejarah dan wisata bahari.	Membangun berbagai fasilitas publik di Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Membangun berbagai fasilitas publik di Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Membangun berbagai fasilitas publik di Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Membangun berbagai fasilitas publik di Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Membangun berbagai fasilitas publik di Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.
2	Mempromosikan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Terpromosikannya Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Meningkatkan promosi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Membangun infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektor pariwisata.	Membangun infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektor pariwisata.	Membangun infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektor pariwisata.	Membangun infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektor pariwisata.	Membangun infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektor pariwisata.
3	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Kota Ternate dalam upaya mewujudkan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Kota Ternate dalam upaya mewujudkan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari.	Memfasilitasi terbangunnya Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari di Provinsi Maluku Utara.	Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kunjungan wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari di Provinsi Maluku Utara.	Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kunjungan wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari di Provinsi Maluku Utara.	Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kunjungan wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari di Provinsi Maluku Utara.	Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kunjungan wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari di Provinsi Maluku Utara.	Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kunjungan wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari di Provinsi Maluku Utara.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
4	Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.	Menjadikannya sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.	Mendorong berkembangnya sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.	Mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.	Mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.	Mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.	Mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.	Mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.	
5	Mempermudah berbagai perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate.	Mempermudah berbagai perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate.	Menyederhanakan proses perijinan di bidang pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate.	Menambah fasilitas publik di bidang perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate.	Menambah fasilitas publik di bidang perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate.	Menambah fasilitas publik di bidang perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate.	Menambah fasilitas publik di bidang perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate.	Menambah fasilitas publik di bidang perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate.	
6	Meningkatkan daya saing Pemerintah Kota Ternate di bidang pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pariwisata bahari.	Meningkatnya daya saing Pemerintah Kota Ternate di bidang pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pariwisata bahari.	Membangun sistem berbasis teknologi informasi yang handal dan mudah diakses publik.	Pengadaan perangkat teknologi informasi yang handal dan mudah diakses publik.	Pengadaan perangkat teknologi informasi yang handal dan mudah diakses publik.	Pengadaan perangkat teknologi informasi yang handal dan mudah diakses publik.	Pengadaan perangkat teknologi informasi yang handal dan mudah diakses publik.	Pengadaan perangkat teknologi informasi yang handal dan mudah diakses publik.	



# BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



## 7.1. Kebijakan Umum

**P**erumusan Kebijakan Umum pembangunan daerah bertujuan agar program-program pembangunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, rumusan kebijakan umum pembangunan daerah sejalan dan saling melengkapi dengan rumusan arah kebijakan sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan kebijakan umum dalam upaya pencapaian visi dan misi terkait dengan program prioritas dimaksud.

Program prioritas Walikota ditetapkan sesuai dengan janji Walikota dan Wakil Walikota selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Program prioritas yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016–2021 sebagai perwujudan dari janji-janji Walikota dan Wakil Walikota Ternate terpilih kepada seluruh masyarakat Kota Ternate, adalah sebagai berikut :

### 1. **Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Perkotaan, Pengendalian Tata Ruang Berbasis Lingkungan Serta Penataan Kawasan Rawan Bencana**

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut diatas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Menata pemanfaatan tata ruang kota sesuai peruntukannya dengan tetap menjaga kapasitas daya dukung ruang yang tersedia;
- 2) Menerbitkan berbagai regulasi terkait tata ruang sebagai upaya untuk pengendalian pemanfaatan tata ruang sebagai implementasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate Tahun 2012-2032;
- 3) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari berbasis pada

- konsepsi pembangunan berkelanjutan;
- 4) Penyusunan peta mitigasi bencana alam secara terpadu dalam rangka mengantisipasi bencana alam;
  - 5) Sosialisasi peta mitigasi bencana alam secara terpadu dalam rangka mengantisipasi bencana alam;
  - 6) Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan logistik bencana alam; dan
  - 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas relawan untuk membantu evakuasi bencana alam.

## **2. Program Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan Serta Pemberdayaan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan**

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut di atas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kota untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya perekonomian makro daerah melalui pengembangan sektor jasa, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah untuk menopang perekonomian masyarakat;
- 2) Membangun dan memperkuat kelembagaan perekonomian masyarakat berbasis pengelolaan potensi lokal secara terpadu;
- 3) Merumuskan dan menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung penguatan kelembagaan perekonomian masyarakat, terutama di daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil;
- 4) Membuka berbagai akses kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dalam upaya untuk memperkuat permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
- 5) Pembangunan dan penyebaran berbagai infrastruktur pelayanan dasar masyarakat dalam upaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.

## **3. Program Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Revitalisasi Cagar Budaya Serta Infrastruktur Pendukung Untuk Mendorong Ternate Sebagai Icon Kota Religius, Kota Pariwisata Unggulan dan Kota Pusaka Dunia Berbasis Sejarah Budaya dan Bahari**

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut di atas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:



- 1) Melakukan pendataan terhadap berbagai jenis cagar budaya sebagai kekayaan budaya lokal untuk menjadi bagian dari pengembangan sektor pariwisata di Kota Ternate;
- 2) Membangun dan mengembangkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam upaya penguatan nilai keagamaan dan promosi sektor pariwisata sebagai komoditi unggulan lokal;
- 3) Membangun dan mengembangkan infrastruktur kota untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis sejarah budaya dan pariwisata bahari; dan
- 4) Membangun pusat informasi daerah sebagai upaya untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata Kota Ternate.

#### **4. Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan Berbasis Maritim dan Pesisir**

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut diatas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan berbagai infrastruktur di wilayah kepulauan untuk mendukung sektor maritim dan pembangunan wilayah pesisir;
- 2) Pengembangan dan peningkatan nilai tambah ekonomi produk unggulan wilayah pesisir dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir;
- 3) Membangun berbagai infrastruktur kelautan dalam upaya membangun konektivitas program poros maritim terpadu; dan
- 4) Membangun dan mengintegrasikan infrastruktur dasar wilayah kepulauan berbasis maritim dan pesisir.

#### **5. Program Mewujudkan Konektivitas Lintas Wilayah Terdekat, Mendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Ketahanan Pangan**

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut di atas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan berbagai infrastruktur untuk mendukung konektivitas lintas wilayah dalam rangka pengembangan ekonomi terpadu berbasis ketahanan pangan;
- 2) Memperkuat perekonomian daerah dalam rangka mendukung konektivitas lintas wilayah berbasis ketahanan pangan;
- 3) Mewujudkan ketersediaan pangan utama masyarakat dalam upaya membangun ketahanan pangan;

- 4) Membangun dan memperkuat fondasi perekonomian masyarakat dalam upaya menyiapkan pengembangan ekonomi terpadu berbasis ketahanan pangan; dan
- 5) Merumuskan dan menerbitkan berbagai regulasi daerah dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi terpadu.

#### **6. Program Pembangunan Kota Baru wilayah Selatan sebagai Kawasan Penyangga Dalam Rangka Keseimbangan dan Pemerataan Pertumbuhan Pembangunan Antar Kawasan**

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut di atas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan dan mengembangkan berbagai infrastruktur dalam pembangunan kota baru di wilayah selatan sebagai kawasan penyangga keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar kawasan;
- 2) Merumuskan dan menyiapkan berbagai regulasi daerah untuk mendukung tumbuhnya kota baru di selatan sebagai kawasan penyangga;
- 3) Meningkatkan promosi dan sosialisasi pengembangan kota baru di wilayah selatan sebagai kawasan penyangga; dan
- 4) Melakukan pengendalian tata ruang pada kota baru di wilayah selatan sebagai kawasan penyangga.

#### **7. Program Pengembangan dan Pemetaan Kawasan Strategis Sentra Ternate Utara, Tengah, Selatan dan Pulau Berbasis Potensi dan Karakteristik Wilayah**

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut di atas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan dan pengembangan kawasan strategis di wilayah utara, tengah dan selatan sesuai karakteristik wilayahnya;
- 2) Membangun dan mengembangkan berbagai infrastruktur untuk pengembangan kawasan strategis di wilayah utara, tengah dan selatan;
- 3) Merumuskan dan menerbitkan berbagai regulasi daerah yang mendukung iklim investasi pada kawasan strategis di wilayah utara, tengah dan selatan; dan
- 4) Mengendalikan pemanfaatan tata ruang pada kawasan strategis di wilayah utara, tengah dan selatan.

## **8. Program Peningkatan dan Pemerataan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Murah dan Berkualitas**

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut diatas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar yang terjangkau oleh masyarakat;
- 2) Menambah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang terlibat dalam pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat;
- 3) Mendata dan memetakan jumlah penduduk yang masih memerlukan pelayanan dasar yang dapat dijangkau; dan
- 4) Menyediakan berbagai dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

## **9. Program Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dengan Mengedepankan Akuntabilitas dan Percepatan Akses Pelayanan di Bidang Perizinan serta Mengerahkan Birokrasi yang Inovatif Berbasis Investasi dan Entrepreneur**

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut di atas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menerbitkan berbagai regulasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan akuntabilitas dan percepatan akses pelayanan dibidang perijinan;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur yang terlibat dalam pemberian pelayanan di bidang perijinan;
- 3) Meningkatkan pengetahuan sumber daya aparatur melalui lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dalam upaya mengembangkan inovasi berbasis investasi dan entrepreneur; dan
- 4) Menambah dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis investasi dan entrepreneur.

## **10. Program Penyediaan dan Konservasi Air Baku**

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut di atas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendataan mengenai jumlah kebutuhan air bersih untuk masyarakat;

- 2) Pembangunan jaringan pipa air bersih sampai ke rumah penduduk;
- 3) Menambah kapasitas jaringan air baku sesuai kebutuhan; dan
- 4) Membangun berbagai infrastruktur air bersih.

Selanjutnya untuk mengetahui keterkaitan antara target sasaran program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Ternate terpilih dengan rumusan kebijakan umum yang ditempuh untuk mencapai target sasaran dimaksud, dapat dilihat sebagaimana data dan informasi yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1 Keterkaitan Antara Program Prioritas Dengan Target Sasaran, Kebijakan Umum dan Indikator Capaian Umum dan Indikator Capaian Kinerja**

No	Program Prioritas	Target Sasaran Program	Kebijakan Umum	Indikator Capaian Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Perkotaan, Pengendalian Tata Ruang Berbasis Lingkungan Serta Penataan Kawasan Rawan Bencana	Meningkatnya dan meratanya pembangunan infrastruktur perkotaan, serta terkendalinya pemanfaatan tata ruang yang berbasis lingkungan hidup dalam upaya mendukung tertatanya kawasan rawan bencana.	1. Menata pemanfaatan tata ruang kota sesuai peruntukannya dengan tetap menjaga kapasitas daya dukung ruang yang tersedia;	Bertambahnya jumlah ruang yang tertata berbasis lingkungan hidup pada kawasan rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda</li> <li>BPBD</li> <li>Dinas Tata Kota dan Pertamanan</li> <li>BLH</li> <li>Dinas Kebersihan</li> <li>Kantor Pemadam Kebakaran</li> <li>SKPD Lainnya sesuai Tupoksi</li> </ul>
			2. Memberikan berbagai regulasi terkait tata ruang sebagai upaya untuk pengendalian pemanfaatan tata ruang sebagai implementasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate Tahun 2012-2032;		
2	Program Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan Serta Pemberdayaan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Terbangunnya dan meratanya infrastruktur jasa dan perdagangan, serta meningkatnya keberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam upaya menumbuhkan perekonomian rakyat.	3. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestasi berbasis pada konsepsi pembangunan berkelanjutan;	Bertambahnya jumlah koperasi, usaha kecil dan menengah yang aktif dalam upaya menumbuhkan perekonomian rakyat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>Dinas Pasar</li> <li>SKPD Lainnya sesuai Tupoksi</li> </ul>
			4. Penyusunan peta mitigasi bencana alam secara terpadu dalam rangka mengantisipasi bencana alam;		
			5. Sosialisasi peta mitigasi bencana alam secara terpadu dalam rangka mengantisipasi bencana alam;		
			6. Mengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan logistik bencana alam; dan		
			7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas relawan untuk membantu evakuasi bencana alam.		
			1. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kota untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya perekonomian makro daerah melalui pengembangan sektor jasa, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah untuk menopang perekonomian masyarakat;		

No	Program Prioritas	Target Sasaran Program	Kebijakan Umum	Indikator Capaian Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			<p>2. Membangun dan memperkuat kelembagaan perekonomian masyarakat berbasis pengelolaan potensi lokal secara terpadu;</p> <p>3. Merumuskan dan menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung penguatan kelembagaan perekonomian masyarakat, terutama di daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil;</p> <p>4. Membuka berbagai akses kepada koperasi, usaha kecil dan menengah modalan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan</p> <p>5. Pembangunan dan penyebaran berbagai infrastruktur pelayanan dasar masyarakat dalam upaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.</p>		
3	<p>Program Penguatan nilai-nilai Keagamaan dan Revitalisasi Cagar Budaya serta Infrastruktur Pendukung untuk Mendorong Ternate Sebagai Icon Kota Religius, Kota Pariwisata Unggulan dan Kota Pusaka Dunia Berbasis Sejarah, Budaya dan Bahari</p>	<p>Menguatnya nilai-nilai keagamaan dan revitalisasinya cagar budaya serta infrastruktur pendukung untuk mendorong Ternate sebagai icon kota religius, kota pariwisata unggulan dan kota pusaka dunia berbasis sejarah, budaya dan bahari</p>	<p>1. Melakukan pendataan terhadap berbagai jenis cagar budaya sebagai kekayaan budaya lokal untuk menjadi bagian dari pengembangan sektor pariwisata di Kota Ternate;</p> <p>2. Membangun dan mengembangkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam upaya penguatan nilai keagamaan dan promosi sektor pariwisata sebagai komoditi unggulan lokal;</p> <p>3. Membangun dan mengembangkan infrastruktur kota untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis sejarah budaya dan pariwisata bahari; dan</p> <p>4. Membangun pusat informasi daerah sebagai upaya untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata Kota Ternate.</p>	<p>Terbangunnya Icon Kota Ternate sebagai kota pariwisata religius, kota pusaka dunia yang berbasis sejarah budaya dan bahari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>• Sekretariat Daerah</li> <li>• Dinas Pendidikan Nasional</li> <li>• SKPD Lainnya sesuai Tupoksi</li> </ul>



No	Program Prioritas	Target Sasaran Program	Kebijakan Umum	Indikator Capaian Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	<p>Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan Berbasis Maritim dan Pesisir</p>	<p>Meningkatnya dan meratanya pembangunan infrastruktur dasar wilayah maritim dan pesisir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun dan mengembangkan berbagai infrastruktur di wilayah kepulauan untuk mendukung sektor maritim dan pembangunan wilayah pesisir;</li> <li>Pengembangan dan peningkatan nilai tambah ekonomi produk unggulan wilayah pesisir dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir;</li> <li>Membangun berbagai infrastruktur kelautan dalam upaya membangun konektivitas program poros maritim terpadu, dan</li> <li>Membangun dan mengintegrasikan infrastruktur dasar wilayah kepulauan berbasis maritim dan pesisir.</li> </ol>	<p>Meningkatnya dan meratanya jumlah infrastruktur dasar di wilayah kepulauan berbasis maritim dan pesisir</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan</li> <li>Kantor Kecamatan</li> <li>SKPD Lainnya sesuai Tupoksi</li> </ul>
5	<p>Program Mewujudkan Konektivitas Lintas Wilayah Terdekat, Mendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Ketahanan Pangan</p>	<p>Terwujudnya konektivitas lintas wilayah terdekat dalam upaya mendukung berkembangnya kawasan Ekonomi Terpadu berbasis ketahanan pangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun dan mengembangkan berbagai infrastruktur untuk mendukung konektivitas lintas wilayah dalam rangka pengembangan ekonomi terpadu berbasis ketahanan pangan;</li> <li>Memperkuat perekonomian daerah dalam rangka mendukung konektivitas lintas wilayah berbasis ketahanan pangan;</li> <li>Mewujudkan ketersediaan pangan utama masyarakat dalam upaya membangun ketahanan pangan;</li> <li>Membangun dan memperkuat fondasi perekonomian masyarakat dalam upaya menyiapkan pengembangan ekonomi terpadu berbasis ketahanan pangan; dan</li> <li>Merumuskan dan menerbitkan berbagai regulasi daerah dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi terpadu.</li> </ol>	<p>Terbangunnya konektivitas lintas wilayah terdekat untuk mendukung aktivitas di kawasan Ekonomi Terpadu berbasis ketahanan pangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian dan Kehutanan</li> <li>BP4K</li> <li>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</li> <li>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>SKPD Lainnya sesuai Tupoksi</li> </ul>

No	Program Prioritas	Target Sasaran Program	Kebijakan Umum	Indikator Capaian Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6	<p>Program Pembangunan Kota Baru Wilayah Selatan Sebagai Kawasan Penyangga Dalam Rangka Keseimbangan dan Pemerataan Pertumbuhan Pembangunan Antar Kawasan</p>	<p>Terbangunnya kota baru di wilayah selatan sebagai kawasan penyangga dalam rangka keseimbangan dan pemerataan pertumbuhan pembangunan antar kawasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan dan mengembangkan berbagai infrastruktur dalam pembangunan kota baru di wilayah selatan sebagai kawasan penyangga keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar kawasan;</li> <li>Merumuskan dan menyiapkan berbagai regulasi daerah untuk mendukung tumbuhnya kota baru di selatan sebagai kawasan penyangga;</li> <li>Meningkatkan promosi dan sosialisasi pembangunan kota baru di wilayah selatan sebagai kawasan penyangga; dan</li> <li>Melakukan pengendalian tata ruang pada kota baru di wilayah selatan sebagai kawasan penyangga.</li> </ol>	<p>Terwujudnya pembangunan kota baru di wilayah selatan sebagai kawasan penyangga dalam rangka keseimbangan dan pemerataan pertumbuhan pembangunan antar kawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>Dinas Tata Kota dan Pertamanan</li> <li>Kantor Kecamatan</li> <li>Dinas Tenaga Kerja dan Sosial</li> <li>SKPD Lainnya sesuai Tupoksi</li> </ul>
7	<p>Program Pengembangan dan Pemetaan Kawasan Strategis Sentra Ternate Utara, Tengah, Selatan dan Pulau Berbasis Potensi dan Karakteristik Wilayah</p>	<p>Berkembangnya dan meratanya infrastruktur di kawasan strategis sentra ternate utara, tengah, selatan dan pulau berbasis potensi dan karakteristik wilayah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan pengembangan kawasan strategis di wilayah utara, tengah dan selatan sesuai karakteristik wilayahnya;</li> <li>Membangun dan mengembangkan berbagai infrastruktur untuk pengembangan kawasan strategis di wilayah utara, tengah dan selatan;</li> <li>Merumuskan dan memberikan berbagai regulasi daerah yang mendukung iklim investasi pada kawasan strategis di wilayah utara, tengah dan selatan; dan</li> <li>Mengendalikan pemanfaatan tata ruang pada kawasan strategis di wilayah utara, tengah dan selatan.</li> </ol>	<p>Bertambahnya jumlah berbagai infrastruktur di kawasan strategis sentra ternate utara, tengah, selatan dan pulau berbasis potensi dan karakteristik wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>Dinas Tata Kota dan Pertamanan</li> <li>BP2TSP</li> <li>Kantor Kecamatan</li> <li>SKPD Lainnya sesuai Tupoksi</li> </ul>
8	<p>Program Peningkatan dan Pemerataan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Murah dan Berkualitas</p>	<p>Meningkatnya dan meratanya akses pelayanan dasar masyarakat dibidang Pendidikan dan Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar yang terjangkau oleh masyarakat;</li> <li>Menambah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang terlibat dalam pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat;</li> </ol>	<p>Meningkatnya dan meratanya kualitas pelayanan dasar masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pendidikan Nasional</li> <li>Sanggar Kegiatan Belajar</li> <li>Balai Bahasa Daerah</li> <li>Dinas Kesehatan</li> </ul>

No	Program Prioritas	Target Sasaran Program	Kebijakan Umum	Indikator Capaian Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9	<p>Program Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dengan Mengembangkan Akuntabilitas dan Percepatan Akses Pelayanan di Bidang Perizinan Serta Mengarahkan Birokrasi yang Inovatif Berbasis Investasi dan Entrepreneur</p>	<p>Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan akuntabilitas dan percepatan akses pelayanan di bidang perizinan serta mengarahkan birokrasi yang inovatif berbasis investasi dan entrepreneur</p>	<p>3. Mendata dan memetakan jumlah penduduk yang masih memerlukan pelayanan dasar yang dapat dijangkau; dan 4. Menyediakan berbagai dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.</p> <p>1. Merumuskan dan menerbitkan berbagai regulasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan akuntabilitas dan percepatan akses pelayanan di bidang perizinan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur yang terlibat dalam pemberian pelayanan di bidang perizinan; 3. Meningkatkan pengetahuan sumber daya aparatur melalui lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dalam upaya mengembangkan inovasi berbasis investasi dan entrepreneur; dan 4. Menambah dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis investasi dan entrepreneur.</p>	<p>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk percepatan akses pelayanan di bidang perizinan serta mengarahkan birokrasi yang inovatif berbasis investasi dan entrepreneur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Olah Raga</li> <li>Kantor Pemberdayaan Perempuan dan PA</li> <li>SKPD Lainnya sesuai Tupoksi</li> </ul>
10	<p>Program Penyediaan dan Konservasi Air Baku</p>	<p>Terbangunnya jaringan dan tersedianya Air Baku yang berkualitas bagi masyarakat</p>	<p>1. Melakukan pendataan mengenai jumlah kebutuhan air bersih untuk masyarakat; 2. Pembangunan jaringan pipa air bersih sampai kerumah penduduk; 3. Menambah kapasitas jaringan air baku sesuai kebutuhan; dan 4. Membangun berbagai infrastruktur air bersih.</p>	<p>Bertambahnya masyarakat yang dapat mengkonsumsi air bersih</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>PDAM Kota Ternate</li> <li>SKPD Lainnya sesuai Tupoksi</li> </ul>

## 7.2. Program Pembangunan Daerah

Beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan sepanjang kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, baik yang terkait dengan pencapaian target Visi dan Misi, maupun terkait dengan pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan mengikat, dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Program-program Terkait Dengan Urusan Wajib, terdiri dari :

#### a. Urusan Pendidikan :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Program Peningkatan dan Pemerataan Akses Pelayanan Pendidikan yang Murah dan Berkualitas
- 6) Program Penguatan Nilai Nilai Keagamaan dan Revitalisasi Cagar Budaya Serta Infrastruktur Pendukung Untuk Mendorong Ternate Sebagai Icon Kota Religius, Kota Pariwisata Unggulan dan Kota Pusaka Dunia Berbasis Sejarah, Budaya dan Bahari
- 7) Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 8) Program Wajib Belajar Sembilan Tahun
- 9) Program Pendidikan Menengah
- 10) Program Pendidikan Non Formal
- 11) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 12) Program Pengembangan Budaya Baca
- 13) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 14) Program Penyediaan Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar
- 15) Program Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar
- 16) Program Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama
- 17) Program Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Atas
- 18) Program Penyediaan Biaya Operasional & Adm Balai Bahasa Daerah

#### Sub Urusan Pendidikan, Sanggar Kegiatan Belajar :

- 1) Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Program Pendidikan Non Formal

**b. Urusan Kesehatan :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Program Peningkatan dan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan yang Murah dan Berkualitas
- 5) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 7) Program Pengawasan Obat dan Makanan
- 8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- 11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 13) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- 14) Program Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
- 15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- 16) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- 17) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

**c. Urusan Pekerjaan Umum :**

- 1) Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Perkotaan, Pengendalian Tata Ruang Berbasis Lingkungan serta Penataan Kawasan Rawan Bencana
- 2) Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan Serta Pemberdayaan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
- 3) Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan Berbasis Maritim dan Pesisir
- 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 7) Program Pembangunan Jaringan Jalan
- 8) Program Pembangunan Jembatan
- 9) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- 10) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

- 11) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 12) Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- 13) Program Penyediaan dan Konservasi Air Baku
- 14) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Air Minum
- 15) Program Penyediaan Perumahan
- 16) Program Pelestarian dan Pengembangan Kota Pusaka
- 17) Program Pengembangan Kota Hijau
- 18) Program Pengendalian Banjir
- 19) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 20) Program UPTD Pemeliharaan dan Pengujian
- 21) Program Penanganan Pemukiman Kumuh Perkotaan

**d. Urusan Perumahan :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian dan Keuangan
- 6) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

**e. Urusan Penataan Ruang :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- 6) Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Perkotaan, Pengendalian Tata Ruang Berbasis Lingkungan serta Penataan Kawasan Rawan Bencana
- 7) Program Perencanaan Tata Ruang
- 8) Program Pemanfaatan Ruang
- 9) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 10) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

**f. Urusan Perencanaan Pembangunan :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Pembangunan Kota Baru Wilayah Selatan Sebagai Kawasan Penyangga Dalam Rangka Keseimbangan dan Pemerataan Pertumbuhan Pembangunan Antar Kawasan
- 7) Pengembangan dan Pemetaan Kawasan Strategis Sentra Ternate Utara, Tengah, Selatan dan Pulau Berbasis Potensi dan Karakteristik Wilayah
- 8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 9) Program Kerjasama Pembangunan Daerah
- 10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 11) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
- 12) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- 13) Program Pengembangan Data dan Informasi

**g. Urusan Perhubungan :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 7) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- 8) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 9) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- 10) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- 11) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- 12) Program Keselamatan Pelayaran dan Kepelabuhanan

**h. Urusan Lingkungan Hidup :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
- 7) Program Penyediaan dan Konservasi Air Baku
- 8) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 9) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 10) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
- 11) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- 12) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

**Sub Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Kebersihan) :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi (Air limbah dan Persampahan)
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

**i. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5) Program Peningkatan Mutu Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**j. Urusan Penanaman Modal :**

- 1) Program Pengembangan Investasi Daerah
- 2) Program Peningkatan Jumlah Investor dan Investasi
- 3) Program Pembangunan Data Base Produk Unggulan Daerah

**k. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran





- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- 5) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 6) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 7) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

**I. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Program Keluarga Berencana
- 6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- 7) Program Pelayanan Kontrasepsi
- 8) Program Pembinaan Peserta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
- 9) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

**m. Urusan Sosial :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Program Perencanaan
- 6) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- 7) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 8) Program Pembinaan Anak Terlantar
- 9) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- 10) Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo

- 11) Program Pembinaan Eks Penyandang Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
- 12) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

**n. Urusan Ketenagakerjaan :**

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

**o. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :**

- 1) Program Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan Serta Pemberdayaan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
- 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- 6) Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Kondusif
- 7) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 8) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah
- 9) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

**p. Urusan Ketahanan Pangan :**

- 1) Program Mewujudkan Konektivitas Lintas Wilayah Terdekat, Mendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Ketahanan Pangan
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan

**q. Urusan Kebudayaan :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

- 6) Program Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Revitalisasi Cagar Budaya serta Infrastruktur Pendukung untuk Mendorong Ternate sebagai Icon Kota Religius, Kota Pariwisata Unggulan dan Kota Pusaka Dunia Berbasis Sejarah, Budaya dan Bahari
- 7) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

**r. Urusan Kepemudaan dan Olahraga :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- 5) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- 6) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 7) Program Pembinaan Kebijakan Manajemen Olahraga
- 8) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
- 9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

**s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 6) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 8) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- 9) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
- 10) Program Pendidikan Politik

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Perkotaan, Pengendalian Tata Ruang Berbasis Lingkungan Serta Penataan Kawasan Rawan Bencana
- 7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
- 8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- 9) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam

**Sub Urusan Kesbangpol, Satuan Pol-PP :**

- 1) Program Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Capaian Kinerja Keuangan
- 6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 7) Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 8) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

**t. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kepegawaian, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :**

**Sekretariat Daerah :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- 6) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 7) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- 8) Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Pembinaan Media
- 9) Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan
- 10) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
- 11) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 12) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan



- 13) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 14) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

**Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6) Program Pendidikan Kedinasan

**Dinas Pendapatan Daerah :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
- 7) Program Peningkatan Pencapaian PAD
- 8) Program Intensifikasi Pajak Daerah
- 9) Program Ekstensifikasi Pajak Daerah

**Inspektorat Daerah :**

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

**Sekretariat DPRD :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

**Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dengan Mengedepankan Akuntabilitas dan Percepatan Akses Pelayanan di Bidang Perizinan Serta Mengerahkan Birokrasi Yang Inovatif Berbasis Investasi dan Entrepreneur
- 5) Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
- 6) Program Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- 7) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 8) Program Penataan dan Penyempurnaan dan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 9) Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi

**Kecamatan Ternate Utara :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 4) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
- 5) Program Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
- 6) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 7) Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama

**Kecamatan Ternate Selatan :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 4) Program Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



- 6) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 7) Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 8) Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

**Kecamatan Ternate Tengah :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- 6) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 7) Program Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Kehidupan Beragama

**Kecamatan Pulau Ternate :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 7) Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan

**Kecamatan Moti :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 7) Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan

**Kecamatan Pulau Batang Dua :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 7) Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan

**Kecamatan Pulau Hiri :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- 5) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 6) Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan
- 7) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

**Badan Kepegawaian Daerah :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Pegawai
- 4) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- 7) Program Pendidikan Kedinasan
- 8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 9) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

**u. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur





- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 5) Program Penyusunan Data Base Kelurahan
  - 6) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
  - 7) Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat
  - 8) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - 9) Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna
- v. Urusan Komunikasi dan Informatika :**
- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  - 2) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
  - 3) Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah
  - 4) Program Penyediaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat
- w. Urusan Statistik :**
- 1) Program Pengembangan Data dan Informasi
- x. Urusan Pertanahan :**
- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dengan Mengedepankan Akuntabilitas dan Percepatan Akses Pelayanan di Bidang Perizinan Serta Mengerahkan Birokrasi Yang Inovatif Berbasis Investasi dan Entrepreneur
- y. Urusan Kearsipan :**
- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian dan Keuangan
  - 5) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
  - 6) Program Peningkatan Kualitas Layanan Kearsipan
- z. Urusan Perpustakaan :**
- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

## **2. Program-program Terkait dengan Urusan Pilihan, Terdiri dari :**

### **a. Urusan Pertanian :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
- 7) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- 8) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
- 9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- 10) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 11) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

### **Sub Urusan Pertanian, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 6) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
- 7) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
- 8) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- 9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- 10) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

### **b. Urusan Kehutanan :**

- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- 4) Program Pembinaan Industri Hasil Hutan
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan

**c. Urusan Pariwisata :**

- 1) Program Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Revitalisasi Cagar Budaya serta Infrastruktur Pendukung untuk Mendorong Ternate sebagai Icon Kota Religius, Kota Pariwisata Unggulan dan Kota Pusaka Dunia Berbasis Sejarah, Budaya dan Bahari
- 2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Sarana Pariwisata

**d. Urusan Kelautan dan Perikanan :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Program Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Revitalisasi Cagar Budaya serta Infrastruktur Pendukung untuk Mendorong Ternate sebagai Icon Kota Religius, Kota Pariwisata Unggulan dan Kota Pusaka Dunia Berbasis Sejarah, Budaya dan Bahari
- 6) Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan Berbasis Maritim dan Pesisir
- 7) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 8) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 9) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran
- 10) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 11) Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
- 12) Program Pengawasan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan

**e. Urusan Perdagangan :**

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 3) Program Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan serta Pemberdayaan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
- 4) Program Pembinaan Pedagang

**Sub Urusan Perdagangan, Pasar :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- 5) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- 6) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

**f. Urusan Perindustrian :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
- 5) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensi
- 6) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- 7) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

## BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN



**M**engacu pada arsitektur perencanaan pembangunan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode, dan sebaliknya menjadi operasional pada periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan.

Indikasi rencana program prioritas Kota Ternate berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah, sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam

kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat daerah di atas, maka program pembangunan yang menjadi prioritas dalam 5 (lima) tahun disusun berdasarkan program prioritas dan beserta pagu indikatif pelaksanaannya. Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD Kota Ternate tahun 2016-2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8.1 di bawah ini.



**Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Pagu Indikatif Kota Ternate 2016-2021**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja						
				Tahun 2017		Tahun 2018				
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib</b>							
<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Urusan Pendidikan</b>				<b>79,387,387,227</b>		<b>87,562,091,595</b>	
1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi perkantoran	20%	20%	6,100,000,000	20%	6,841,760,000	
1	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya peningkatan cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	20%	20%	2,932,984,000	20%	3,289,634,854	
1	1	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	40 Org	40 Org	274,792,000	40 Org	308,206,707	
1	1	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terciptanya kinerja system pengembangan pelaporan dan capaian kinerja keuangan	1 Dok	1 Dok	229,928,000	1 Dok	257,887,245	
1	1	5	Program Peningkatan dan Pemerataan Akses Pelayanan Pendidikan Yang Murah dan Berkualitas	Angka Partisipasi Kasar : 1. SD/MI; 2. SMP/MTs; 3. SMA/SMK/MA	20%	106 SD, 13 SMP, 100 Siswa dan 25 Tenaga Pendidik	19,961,200,000	106 SD, 13 SMP, 100 Siswa dan 25 Tenaga Pendidik	19,961,200,000	
1	1	6	Program Penguatan Nilai Nilai Keagamaan dan Revitalisasi Cagar Budaya Serta Infrastruktur Pendukung Untuk Mendorong Ternate Sebagai Icon Kota Religius, Kota Pariwisata Unggulan dan Kota Pusaka Dunia Berbasis Sejarah, Budaya dan Bahari	Terciptanya kualitas nilai-nilai keagamaan, Revitalisasi Cagar Budaya Ketersediaan Infrastruktur untuk mendorong Ternate menjadi Pusat Peradaban Dunia yang Religius		400 Siswa, 80 Santri dan 106 SD	2,200,000,000	400 Siswa, 80 Santri dan 106 SD	2,200,000,000	
1	1	7	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Cakupan Angka Partisipasi PAUD.	50%	50%	2,452,121,000	50,50%	2,750,298,914	

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	
	96,730,840,012		97,114,508,237		102,596,642,111			Dinas Pendidikan Nasional
20%	7,673,718,016	20%	8,606,842,127	20%	3,601,405,721			
20%	3,689,654,453	20%	4,138,316,434	20%	4,641,535,713			
40 Org	345,684,643	45 Org	387,719,895	46 Org	434,866,635			
1 Dok	289,246,334	1 Dok	324,418,688	1 Dok	363,868,000			
106 SD, 13 SMP, 100 Siswa dan 25 Tenaga Pendidik	19,961,200,000	106 SD, 13 SMP, 100 Siswa dan 25 Tenaga Pendidik	19,961,200,000	106 SD, 13 SMP, 100 Siswa dan 25 Tenaga Pendidik	19,961,200,000			
400 Siswa, 80 Santri dan 106 SD	2,200,000,000	420 Siswa, 80 Santri dan 106 SD	2,300,000,000	420 Siswa, 80 Santri dan 106 SD	2,300,000,000			
51,00%	3,084,735,261	52,23%	3,459,839,069	52,50%	3,880,555,500			





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	8	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	APM : 1. SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MAN. 2. Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MAN; 3. Angka melanjutkan : SD/MI/SMP/MTs, SMA/SMK/MAN; 4. Angka putus sekolah : SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MAN;	95%	95,43%	28,030,560,000	96,12%	32,655,076,096
1	1	9	Program Pendidikan Menengah	Cakupan Angka Partisipasi pendidikan menengah	80,12%	80,12%	2.703.056.000	82.02%	3.031.747.610
1	1	10	Program Pendidikan Non Formal	Peningkatan sarana prasarana pembelajaran PAUD, Paket A, Paket B dan Paket C meningkat.	20%	20%	846,808,000	20%	949,779,853
1	1	11	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru dengan kualifikasi S 1/D4.	63,25%	63,25%	1,659,968,000	63,25%	1,861,820,109
1	1	12	Program Pengembangan Budaya Baca	Cakupan Angka Melek Huruf.	20%	20%	280,400,000	20%	314,496,640
1	1	13	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Rasio sekolah/ murid SD/MI, SMP/ MTs, SMA/SMK/ MAN; 2. Rasio Guru/ Murid SD/MI, SMP/ MTs, SMA/SMK/ MAN.	20%	20%	5,067,856,000	20%	5,684,107,290
1	1	14	Program Penyediaan Biaya Operasional Uptd Pendidikan Dasar	Terciptanya kinerja operasional UPTD Pendidikan Dasar	20%	20%	1,830,534,198	20%	2,053,127,157

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
96,80%	37,841,933,349	97,26%	33,659,512,445	97,95%	40,184,509,158			
82,50%	3.400.408.119	85,07%	3.813.897.746	85,27%	4.277.667.712			
20%	1,065,273,083	20%	1,194,810,290	20%	1,340,099,221			
67%	2,088,217,434	71,24%	2,342,144,674	80%	2,626,949,466			
20%	352,739,431	20%	395,632,546	20%	443,741,464			
20%	6,375,294,736	20%	7,150,530,576	20%	8,020,035,094			
20%	2,302,787,419	20%	2,582,806,369	20%	2,896,875,624			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	15	Program Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar	Terciptanya kinerja operasional Sekolah Dasar	20%	20%	1,121,600,000	20%	1,257,986,560
1	1	16	Program Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama	Terciptanya kinerja operasional Sekolah Menengah Pertama	20%	20%	2,018,880,000	20%	2,264,375,808
1	1	17	Program Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Atas	Terciptanya kinerja operasional Sekolah Menengah Atas	20%	20%	3,252,640,000	20%	3,648,161,024
1	1	18	Program Penyediaan Biaya Operasional & Adm Balai Bahasa Daerah	Terciptanya kinerja operasional Balai Bahasa Daerah	20%	20%	1,127,116,029	20%	1,264,173,338
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>Sub Urusan Pendidikan, Sanggar Kegiatan Belajar</b>				<b>1,378,614,640</b>		<b>1,546,254,181</b>
1	1	1	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Peningkatan kinerja operasional administrasi perkantoran	20%	20%	410,225,200	20%	460,108,584
1	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	20%	20%	487,896,000	20%	547,224,154
1	1	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terciptanya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	Dokumen	5,608,000	Dokumen	6,289,933
1	1	4	Program Pendidikan Non Formal	Peningkatan Pendidikan Non Formal	20%	20%	474,885,440	100%	532,631,510
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Urusan Kesehatan</b>				<b>34,426,099,436</b>		<b>38,022,676,027</b>
1	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya peningkatan kinerja operasional adm. perkantoran	20%	20%	5,250,735,050	100%	5,636,227,603

Target Kinerja									
Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab	
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
20%	1,410,957,726	20%	1,582,530,185	20%	1,774,965,856				
20%	2,539,723,906	20%	2,848,554,333	20%	3,194,938,540				
20%	4,091,777,405	20%	4,589,337,537	20%	5,147,400,981				
20%	1,417,896,816	20%	1,590,313,069	20%	1,783,695,138				
	<b>1,734,278,689</b>		<b>1,945,166,977</b>		<b>2,181,699,281</b>			<b>Sanggar Kegiatan Belajar</b>	
20%	516,057,788	20%	578,810,415	20%	649,193,762				
20%	613,766,611	20%	688,400,631	20%	772,110,147				
Dokumen	7,054,789	Dokumen	7,912,651	Dokumen	8,874,829				
20%	597,399,501	20%	670,043,280	20%	751,520,543				
	<b>41,646,111,422</b>		<b>46,354,302,265</b>		<b>60,863,011,881</b>			<b>Dinas Kesehatan</b>	
20%	6,053,475,691	20%	6,505,318,888	100%	6,994,864,003				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	15 Org	20 Org	248,400,000	20 Org	278,100,000
1	2	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terciptanya peningkatan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	Dokumen	38,500,000	Dokumen	42,350,000
1	2	4	Program Peningkatan dan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan Yang Murah dan Berkualitas	Terbangunnya Rumah Sakit Daerah	0	50%	3,600,000,000	20%	1,500,000,000
1	2	5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah persediaan obat dan tersedianya obat dan perbekalan kesehatan bagi pasien Umum, RS dan Jamkesda.	20%	20%	3,611,843,400	20%	4,048,709,500
1	2	6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	20%	20%	2,773,100,000	20%	3,109,700,000
1	2	7	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Terciptanya pengawasan obat dan makanan	20%	20%	214,951,000	20%	240,742,700
1	2	8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	20%	20%	678,700,000	20%	761,200,000
1	2	9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	20%	20%	614,724,000	20%	759,996,100
1	2	10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan rumah tangga ber-pola hidup bersih dan sehat	20%	20%	678,568,000	20%	759,996,100
1	2	11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	20%	20%	2,249,839,076	20%	2,171,442,984

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	
22 Org	310,200,000	25 Org	347,600,000	30 org	389,400,000			
Dokumen	40,505,000	Dokumen	51,243,500	Dokumen	56,387,850			
10%	750,000,000	10%	750,000,000	10%	750,000,000			
20%	4,525,115,100	20%	5,005,842,000	20%	5,599,239,800			
20%	3,488,760,000	20%	3,912,700,000	20%	4,389,000,000			
20%	269,628,700	20%	282,750,000	20%	316,308,800			
20%	853,600,000	20%	948,000,000	20%	1,073,600,000			
20%	851,195,699	20%	953,339,162	20%	1,067,739,885			
20%	851,195,699	20%	963,339,162	20%	1,0667,739,885			
20%	2,114,687,285	20%	2,076,456,012	20%	2,058,051,611			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	12	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan rumah yang memenuhi sanitasi dasar	20%	20%	289,850,000	20%	325,160,000
1	2	13	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	20%	20 %	185,064,000	20%	207,567,782
1	2	14	Program Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya	20%	20%	14,356,100,000	20%	16,101,800,000
1	2	15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	20%	20%	296,102,400	20%	332,108,429
1	2	16	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1. Angka Kematian Ibu (per 1000 KH); 2. Angka Kematian Bayi (per 1000 KH).	20%	20%	647,724,000	20%	726,486,468
1	2	17	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	Peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan daerah	20%	20%	2,291,898,510	20%	2,521,088,361
<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Urusan Pekerjaan Umum</b>				<b>153,728,468,848</b>		<b>207,014,436,043</b>
1	3	1	Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Perkotaan, Pengendalian Tata Ruang Berbasis Lingkungan Serta Penataan Kawasan Rawan Bencana	Reklamasi dan Penataan Kalumata	-	4 Ha	46,800,000,000	4 Ha	46,800,000,000
1	3	2	Program Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan serta Pemberdayaan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Terbangunnya Ternate Elektronik Centre (TEC)	0	30 %	8.100.000.000	30 %	8.100.000.000

Target Kinerja									
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab	
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
20%	364,650,000	20%	408,980,000	20%	389,400,000				
20%	232,808,025	20%	261,117,481	20%	292,869,366				
20%	18,059,800,000	20%	20,255,400,000	20%	22,719,400,000				
20%	339,464,239	20%	417,787,968	20%	468,513,986				
20%	814,828,067	20%	913,911,175	20%	1,024,928,087				
20%	2,476,197,917	20%	3,050,516,917	20%	3,355,568,608				
	<b>228,882,600,098</b>		<b>248,854,476,270</b>		<b>209,693,210,544</b>			<b>Dinas Pekerja an Umum</b>	
4 Ha	46,800,000,000	4 Ha	46,800,000,000	4 Ha	46,800,000,000				
30 %	8.100.000.000	10 %	2,700,000,000	0	0				





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	3	Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan Berbasis Maritim dan Pesisir	Terbangunnya Infrastruktur Perkoataan pada Kawasan Hiri dan Moti	6 Km	5 Km	4,780.000.000	5 Km	4,780.000.000
1	3	4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya peningkatan kinerja penyelenggaraan dan pelayanan tata administrasi perkantoran yang tertib, teratur dan lancar serta dapat dipertanggung jawabkan dalam 1 tahun	100 %	20 %	3,546,816,504	20 %	3,978,109,391
1	3	5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas kantor yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100 %	20 %	2,804,000,000	20 %	3,144,966,400
1	3	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dalam 1 tahun	100 %	20 %	179,258,419	20 %	201,056,243
	3	7	Program pembangunan jaringan jalan	Cakupan Jalan dalam kondisi baik	319,7 km	24,06 Km	42,103,120,588	2,93 Km	47,222,860,052
	3	8	Program pembangunan jembatan	Cakupan jembatan dalam kondisi baik.	82 unit	4 Unit	2,400,000,000	4 Unit	2,400,000,000
1	3	9	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Cakupan saluran Drainase /Gorong-Gorong Kondisi Baik	48.361 m	8.644 m	6,482,847,204	1.051 m	7,271,161,424
1	3	10	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Cakupan turap/ talud/bronjong dalam kondisi baik	4.280 m	5.663 m	15,858,034,629	689 m	17,786,371,640

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
5 Km	4,780,000,000	5 Km	4,780,000,000	5 Km	4,780,000,000			
20 %	4,461,847,493	20 %	5,004,408,148	20 %	5,612,944,179			
20 %	3,527,394,314	20 %	3,956,325,463	20 %	4,437,414,639			
20 %	225,504,682	20 %	252,926,051	20 %	283,681,859			
3,28 Km	52,965,159,834	3,68 Km	59,405,723,270	4,13 Km	66,629,459,220			
4 Unit	2,400,000,000	4 Unit	2,400,000,000	4 Unit	2,400,000,000			
1.179 m	8,155,334,653	1.322 m	9,147,023,347	1.483 m	10,259,301,385			
772 m	19,949,194,432	867 m	22,375,016,474	971 m	25,095,818,478			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	11	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	171,59 km	7,7 km	13,478,153,918	0,94 km	15,117,097,435
1	3	12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Cakupan ketersediaan sumber daya air	860 m	160 m	8.690.000.000	370 m	10.148.000.000
1	3	13	Program Penyediaan dan Konservasi Air Baku	Cakupan ketersediaannya air baku	28 titik	3Titik	2,084,740,352	3 titik	2,338,244,779
1	3	14	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Air Minum	Cakupan pelayanan air bersih	1.067,2 m3	300 m <sup>3</sup>	1,543,183,924	200 m <sup>3</sup>	1,730,835,089
				Cakupan pengendalian air limbah	26 unit	8 unit	3,200,000,000	8 unit	3,200,000,000
1	3	15	Program Penyediaan Perumahan	Berkurangnya rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan bangunan	3.007 Unit	600 unit	3,000,000,000	600 unit	3,000,000,000
1	3	16	Program Pelestarian dan pengembangan Kota Pusaka	Terpeliharanya jumlah kawasan pusaka	1 Benteng	1 Benteng	7.500.000.000	1 Benteng	7.500.000.000
1	3	17	Program Pengembangan Kota Hijau	Tercapainya luasan ruang terbuka hijau	500 Ha	100 Ha	1.000.000.000	100 Ha	1.000.000.000
1	3	18	Program Pengendalian Banjir	Menurunya titik daerah genangan	2 ttk	3 ttk	4,371,926,525	3 ttk	4,903,552,790
1	3	19	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Penyiapan lahan dan pembangunan kawasan cepat tumbuh	145.000 m <sup>2</sup>	40.000 m <sup>2</sup>	43,731,386,785	35.000 m <sup>2</sup>	38,990,180,800
1	3	20	Program UPTD Pemeliharaan dan Pengujian	Ketersediaan peralatan Lab. Guna menjaga mutu infrastruktur yang terbangun	4 unit	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000
				Meningkatnya kecakapan dalam pemanfaatan/ penggunaan alat Lab	0 org	3 org	45.000.000	2 org	30.000.000

Target Kinerja									
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab	
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18		19
1,05 km	16,955,336,483	1,18 km	19,017,105,399	1,32 km	21,329,585,416				
410 m	11.740.000.000	365 m	12.040.000.000	425 m	12.876.000.000				
3 titik	2,622,575,344	3 titik	2,941,480,506	3 titik	3,299,164,535				
200 m <sup>3</sup>	1,941,304,635	150 m <sup>3</sup>	2,177,367,279	150 m <sup>3</sup>	2,442,135,140				
6 unit	2,400,000,000	6 unit	2,400,000,000	5 unit	2,400,000,000				
600 unit	3,000,000,000	600 unit	3,000,000,000	607 unit	3,035,000,000				
1 Benteng	7.500.000.000	1 Benteng	7.500.000.000	1 Benteng	7.500.000.000				
100 Ha	1.000.000.000	100 Ha	1.000.000.000	100 Ha	1.000.000.000				
2 ttk	5,499,824,810	2 ttk	6,168,603,507	2 ttk	6,918,705,693				
35.000 m <sup>2</sup>	49,049,123,418	35.000 m <sup>2</sup>	55,013,496,826	0	0				
1 unit	150.000.000	0	0	0	0				
2 org	30.000.000	3 org	45.000.000	0	0				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	21	Program Penanganan Pemukiman Kumuh Perkotaan	Cakupan Lingkungan Pemukiman Kumuh	61 Hektar	48 Hektar	250.000.000	36 Hektar	250.000.000
<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Urusan Perumahan</b>				<b>3.049.252.636</b>		<b>5.557.208.893</b>
1	4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya anggaran serta sarana pendukung pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20 %	1.051.104.636	20 %	1.178.918.960
1	4	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase menurunnya keluhan mengenai Saarana dan Prasarana Aparatur untuk kelancaran kegiatan operasional di dalam & luar kantor	100%	15 %	500.540.000	15 %	600.000.000
1	4	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase menurunnya keluhan mengenai kualitas sumber daya aparatur Pemadam Kebakaran yang Handal dan Profesional	2 org	4 org	52.000.000	6 org	78.000.000
1	4	4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kinerja	0 pasang	78 pasang	140.000.000	78 pasang	150.000.000
1	4	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Pencapaian dan Keuangan	Meningkatnya Penyusunan LAKIP dan LPPD Kantor	9 buku	9 buku	5.608.000	9 buku	6.289.933
1	4	6	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan layanan bencana kebakaran dan bencana alam lainnya	250 org	250 org	1.300.000.000	250 org	3.544.000.000

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	
24 Hektar	250.000.000	12 Hektar	250.000.000	0 Hektar	250.000.000			
	<b>6.167.330.294</b>		<b>7.724.976.858</b>		<b>8.328.279.643</b>			<b>Dinas Pemadam Kebakaran</b>
20 %	1.000.000.000	20 %	1.483.064.207	20 %	1.663.404.814			
25 %	104.000.000	25 %	2.380.000.000	20 %	2.700.000.000			
8 org	160.000.000	10 org	130.000.000	12 org	156.000.000			
78 pasang	7.054.789	78 pasang	180.000.000	78 pasang	200.000.000			
9 buku	3.574.000.000	9 buku	7.912.651	9 buku	8.874.829			
250 org	3.574.000.000	250 org	3.544.000.000	250 org	3.600.000.000			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja						
				Tahun 2017		Tahun 2018				
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	5		<b>Urusan Penataan Ruang</b>				<b>16,347,906,398</b>		<b>13,703,783,047</b>	
1	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kelancaran Program Administrasi Perkantoran	100 %	20 %	1.079.192.800	20 %	1.122.892.800	
1	5	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	20 %	1.185.000.000	20 %	565.000.000	
1	5	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Berkakaian	100 %	33,3 %	25.000.000	33,3 %	52.500.000	
1	5	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	100 %	20 %	283.040.000	20 %	318.420.000	
1	5	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan	3 dokumen	3 dokumen	5.500.000	3 dokumen	6.000.000	
1	3	6	Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Perkotaan, Pengendalian Tata Ruang Berbasis Lingkungan Serta Penataan Kawasan Rawan Bencana	Tertatanya kota berbasis lingk, Perda RDTRK dan PZ serta Forum Komunitas Hijau dan Pedestrian	0	12 Bulan, 1 Dokumen, 500 orang dan 3 lokasi	2,322,300,000	12 Bulan, Sosialisasi Perda dan 2400 Kantong Sampah	1,152,300,000	
1	5	7	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Dokumen RDTR yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	1.600.000.000	6 Dokumen	1.700.000.000	
1	5	8	Program Pemanfaatan Ruang	Cakupan Luas Wilayah Produktif	100 %	24 %	6,731,985,598	22 %	7,550,595,047	
1	5	9	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan luas wilayah produktif, luas wilayah perkotaan, wilayah industri dan wilayah banjir	100 %	18 %	2.603.400.000	28 %	2.788.400.000	

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
	13,731,935,405		15,312,915,089		16,328,438,415			
20 %	1.165.592.800	20 %	1.207.792.800	20 %	1.251.492.800			Dinas Tata Kota dan Pertanian
20 %	580.000.000	20 %	745.000.000	20 %	570.000.000			
33,3 %	30.000.000	0	0	0	0			
20 %	353.800.000	20 %	389.180.000	20 %	389.180.000			
3 dokumen	6.500.000	3 dokumen	7.000.000	3 dokumen	7.500.000			
12 Bulan, dan 2400 Kantong Sampah	1,002,300,000	12 Bulan, Pengaadaan Perda dan 2400 Kantong Sampah	1,152,300,000	12 Bulan, 1 lokasi dan 2400 Kantong Sampah	1,652,300,000			
4 Dokumen	1.100.000.000	4 Dokumen	1.050.000.000	1 Dokumen	400.000.000			
19 %	8,468,747,405	17 %	9,498,547,089	18 %	10,653,570,415			
18 %	2.643.400.000	18 %	2.693.400.000	18 %	2.698.400.000			





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5	10	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase bangunan ber IMB	100 %	20 %	512.488.000	20 %	512.488.000
<b>1</b>	<b>6</b>		<b>Urusan Perencanaan Pembangunan</b>				<b>10,784,855,826</b>		<b>11,735,494,294</b>
1	6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya peningkatan kinerja operasional administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	1,392,955,998	12 bulan	1,562,339,447
1	6	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	1 Tahun	691,581,458	1 Tahun	775,677,763
1	6	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16 orang	20 orang	271,944,000	20 orang	305,012,390
1	6	4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	22 Orang	22 Orang	314,904,240	25 Orang	353,196,596
1	6	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan	2 Laporan	2 Laporan	21,454,081	2 Laporan	24,062,897
1	6	6	Program Pembangunan Kota Baru dan Pemerataan Pertumbuhan Pembangunan Antar Kawasan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sosialisasi RTRW	-	1 Dokumen	500,00,000	Sosialisasi 2 Kec	200,000,000
1	6	7	Program Pengembangan dan Pemetaan Kawasan Strategis Sentra Ternate Utara, Tengah, Selatan dan Pulau Berbasis Potensi dan Karakteristik Wilayah	Review Dokumen Perencanaan	-	1 Dokumen Review RTRW	500,000,000	1 Dokumen Pemetaan Potensi Ekonomi Lokal	300.000.000

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
20 %	517.488.000	20 %	522.488.000	20 %	527.488.000			
	<b>12,925,521,888</b>		<b>14,560,665,242</b>		<b>16,250,990,452</b>			<b>Bappeda</b>
12 bulan	1,752,319,924	12 bulan	1,892,505,518	12 bulan	2,043,905,959			
1 Tahun	870,000,180	1 Tahun	975,792,201	1 Tahun	1,094,448,533			
20 orang	329,413,382	20 orang	355,766,452	22 orang	384,227,768			
25 Orang	396,145,302	28 Orang	444,316,570	30 Orang	479,861,896			
2 Laporan	26,988,946	2 Laporan	30,270,802	2 Laporan	33,951,731			
Sosialisasi 3 Kec	300,000,000	Sosialisasi 1 Kec	150,000,000	Sosialisasi 1 Kec	200,000,000			
	-			Peninjauan - Kembali RTRW	200,000,000			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6	8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	7 Proses Perencanaan dan 10 Dokumen	8 Keg Proses Perencanaan dan 9 Dokumen	3,799,009,852	8 Keg Proses Perencanaan dan 10 Dokumen	4,260,969,450
1	6	9	Program Kerjasama Pembangunan Daerah	Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Daerah	3 Lembaga	3 Lembaga	336,480,000	3 Lembaga	377,395,968
1	6	10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2 kali pelaksanaan Survey dan Monitoring	2 kali Survey dan Monitoring	560,852,867	2 kali Survey dan Monitoring	629,052,575
1	6	11	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	2 kali pelaksanaan Survey dan Monitoring	2 kali Survey dan Monitoring	1,171,022,022	2 kali Survey dan Monitoring	1,313,418,300
1	6	12	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Praswil dan SDA	2 kali pelaksanaan Survey dan Monitoring	2 kali Survey dan Monitoring	1,348,106,252	2 kali Survey dan Monitoring	1,512,035,973
1	6	13	Program Pengembangan Data dan Informasi	Tersedianya Data dan Informasi	2 Penerapan Informasi	2 Penerapan Informasi	376,545,056	2 Penerapan Informasi	422,332,935
<b>1</b>	<b>7</b>		<b>Urusan Perhubungan</b>				<b>15.075.654.702</b>		<b>15.060.080.852</b>
1	7	1	Program Pelayanan Adminstarasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100 %	20 %	3.119.061.448	20 %	3.337.395.749
1	7	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100 %	20 %	384.610.345	20 %	411.533.070
1	7	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin ASN	100 %	25 %	384.062.500	24 %	160.946.000
1	7	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan SDM Aparatur, Fisik,-Mental Aparatur Terjaga	10 org	2 org	28.000.000	2 org	28.000.000

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
8 Keg Proses Perencanaan dan 10 Dokumen	4,779,103,335	10 Keg Proses Perencanaan dan 10 Dokumen	5,360,242,301	10 Keg Proses Perencanaan dan 10 Dokumen	6,012,047,765			
3 Lembaga	423,287,318	3 Lembaga	474,759,056	3 Lembaga	532,489,757			
2 kali Survey dan Monitoring	705,545,369	2 kali Survey dan Monitoring	791,339,685	2 kali Survey dan Monitoring	887,566,591			
2 kali Survey dan Monitoring	1,473,129,965	2 kali Survey dan Monitoring	1,652,262,569	2 kali Survey dan Monitoring	1,853,177,697			
2 kali Survey dan Monitoring	1,695,899,547	2 kali Survey dan Monitoring	1,902,120,932	2 kali Survey dan Monitoring	2,133,418,837			
3 Penerapan Informasi	473,688,620	3 Penerapan Informasi	531,289,156	3 Penerapan Informasi	595,893,918			
	<b>16.447.765.825</b>		<b>18.058.029.562</b>		<b>19.391.854.772</b>			<b>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>
20 %	3.571.013.452	20 %	3.820.984.393	20 %	4.088.453.301			
20 %	440.340.385	20 %	471.164.211	20 %	504.145.706			
15 %	230.016.220	25 %	400.163.635	11 %	160.946.000			
2 org	28.000.000	2 org	28.000.000	2 org	28.000.000			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya LAKIP	5 Buku	5 Buku	5.000.000	5 Buku	5.000.000
1	7	6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terciptanya keamanan dan tersedianya fasilitas pelabuhan	6 unit	5 unit	504.089.486	4 unit	554.498.434
1	7	7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Minimalisir tingkat kecelakaan; Terciptanya ketertaturan lalu lintas; penagihan retribusi berjalan baik	100 %	20 %	927.414.422	20 %	1.020.155.864
1	7	8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Objek retribusi bertambah	20 unit	20 unit	384.167.069	20 unit	422.583.776
1	7	9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terlayannya perhubungan laut	6 unit	7 unit	6.622.947.341	7 unit	7.285.242.075
1	7	10	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Keamanan dan Ketertiban meningkat; meningkatnya pemahaman ttg UU; Terciptanya keteraturan lalu lintas	100%	20 %	409.421.540	20 %	450.363.694
1	7	11	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	kendaraan wajib uji berkala dan teridentifikasi kendaraan wajib uji	100 %	20 %	133.487.850	20 %	142.832.000
1	7	12	Program Keselamatan Pelayaran dan Kepelabuhanan	Kelayakan perlengkapan kapal ; Meningkatkan keselamatan pelayaran; Pengawasan dan pengendalian	100 %	20 %	325.178.671	20 %	347.941.178
<b>1</b>	<b>8</b>		<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>				<b>3,279,100,362</b>		<b>3,672,438,961</b>
1	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	20 %	516.582.042,00	20 %	579.398.418,31

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	
5 Buku	5.000.000	5 Buku	5.000.000	5 Buku	5.000.000			
5 unit	609.948.278	6 unit	670.943.106	5 unit	738.037.416			
20 %	1.122.171.451	20 %	1.234.388.596	20 %	1.357.827.455			
20 unit	464.842.153	20 unit	511.326.369	20 unit	562.459.006			
8 unit	8.013.766.282	10 unit	8.815.142.911	7 unit	9.696.657.202			
20 %	495.400.063	20 %	544.940.070	20 %	599.434.077			
20 %	152.830.239	20 %	163.528.356	20 %	174.975.341			
20 %	372.297.060	20 %	398.357.855	20 %	426.242.904			
	<b>4,113,067,538</b>		<b>4,606,682,554</b>		<b>5,159,667,752</b>			
20 %	649.853.265,97	20 %	728.875.423,12	20 %	817.506.674,57			Badan Lingkungan Hidup



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur BLH Kota Ternate	100 %	47 %	159.379.360,00	27 %	178.759.890,18
1	8	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dibidang lingkungan hidup	6 org	10 org	147.873.600,00	5 org	165.855.029,76
1	8	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	3 Dokumen	3 Dokumen	6.126.000,00	3 Dokumen	6.870.921,60
1	8	5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan	144 unit	126 unit & 1 Dokumen	182.040.000,00	126 unit	204.176.064,00
1	8	6	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup di Kota Ternate	100 %	25 %	965.968.560,00	25 %	1.083.430.336,90
1	8	7	Program Penyediaan dan Konservasi Air Baku	Bertambahnya Jumlah Sumur Resapan dan Biopori	21 unit sumur resapan dan 540 titik biopori	25 unit sumur resapan dan 500 titik biopori	250.000.000	25 unit sumur resapan dan 500 titik biopori	275.000.000
1	8	8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya Kegiatan perlindungan dan peningkatan kualitas dan kuantitas cadangan air tanah Kota Ternate	100 %	39 %	523.978.800,00	17 %	587.694.622,08
1	8	9	Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100 %	20 %	224.320.000,00	20 %	251.597.312,00
1	8	10	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Terlaksananya Kegiatan pengelolaan dan rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	1 Kali kegiatan Bio-monitoring	2 Kali kegiatan Bio-monitoring	33.648.000,00	2 Kali kegiatan Bio-monitoring	37.739.596,80

Target Kinerja									
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab	
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
12 %	200.497.092,82	7 %	224.877.539,31	7 %	252.222.648,09				
7 org	186.023.001,38	6 org	208.643.398,35	6 org	234.014.435,59				
3 Dokumen	7.706.425,67	3 Dokumen	8.643.527,03	3 Dokumen	9.694.579,91				
126 unit	229.003.873,38	126 unit	256.850.744,39	126 unit	288.083.794,90				
25 %	1.215.175.465,86	13 %	1.362.940.802,51	13 %	1.528.674.404,10				
25 unit sumur re-sapan dan 500 titik biopori	302,500,000	25 unit sumur re-sapan dan 500 titik biopori	332,750,000	25 unit sumur re-sapan dan 500 titik biopori	366,025,000				
13 %	659.158.288,12	13 %	739.311.935,96	100 %	829.212.267,37				
20 %	282.191.545,14	20 %	316.506.037,03	20 %	354.993.171,13				
3 Kali kegiatan Bio-monitoring	42.328.731,77	3 Kali kegiatan Bio-monitoring	47.475.905,55	3 Kali kegiatan Bio-monitoring	53.248.975,67				





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan				Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja			
							Tahun 2017		Tahun 2018	
							Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	8	11	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Meminimalisasi Tingkat Polusi Kota Ternate	1 Kali Pengukuran	1 Kali Pengukuran	67.296.000,00	2 Kali Pengukuran	75.479.193,60	
1	8	12	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Tercukupinya rasio RTH Kota Ternate	100 %	26 %	201.888.000,00	16 %	226.437.580,80	
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>Sub Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Kebersihan)</b>				<b>14.598.373.810</b>		<b>15.973.779.045</b>	
1	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20 %	912.508.075	20 %	1.023.469.057	
1	8	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	13 %	75.147.200	22 %	84.285.100	
1	8	3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi (Air limbah dan persampahaan)	Persentase pengurangan sampah di perkotaan, Persentase pengangkutan sampah, Persentase pengoperasian TPA dan Persentase penduduk yang terlayani air limbah domestik	100 %	28 %	13.545.110.535	16 %	14.739.734.955	
1	8	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	0 orang	5 org	60.000.000	9 org	120.000.000	
1	8	5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	3 dokumen	3 dokumen	5.608.000	3 dokumen	6.289.933	
<b>1</b>	<b>9</b>		<b>Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil</b>				<b>2.443.775.728</b>		<b>2.740.938.856</b>	
1	9	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan Penerbitan Akta Pencatatan sipil	20%	20%	862,858,096	20%	967,781,640	

Target Kinerja									
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab	
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2 Kali Pengukuran	84.657.463,54	2 Kali Pengukuran	94.951.811,11	2 Kali Pengukuran	106.497.951,34				
16 %	253.972.390,63	26 %	284.855.433,33	16 %	319.493.854,02				
	<b>17.978.383.619</b>		<b>20.332.416.552</b>		<b>22.826.022.709</b>			<b>Dinas Kebersihan</b>	
20 %	1.147.922.895	20 %	1.287.510.319	20 %	1.444.071.573				
18 %	94.534.168	19 %	106.029.522	28 %	118.922.712				
18 %	16.548.871.767	16 %	18.690.964.060	23 %	20.954.153.595				
14 org	180.000.000	19 org	240.000.000	24 org	300.000.000				
3 dokumen	7.054.789	3 dokumen	7.912.651	3 dokumen	8.874.829				
	<b>3,074,237,020</b>		<b>3,448,064,243</b>		<b>3,867,348,855</b>				
20%	1,085,463,888	20%	1,217,456,297	20%	1,365,498,982			<b>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	9	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan administrasi kependudukan dan operasional perkantoran	20%	20%	173,848,000	20%	194,987,917
1	9	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersusunnya LAKIP dan LPP bidang kependudukan dan pencatatan Sipil	2 Dok	2 Dok	14,580,800	2 Dok	16,353,825
1	9	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, pelaksana pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta di Spot layanan administrasi kependudukan online		50 Orang	141,904,832	52 Orang	159,160,460
1	9	5	Program Peningkatan Mutu Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas dan Mutu layanan penerbitan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan		1 Lap	1,250,584,000	1 Lap	1,402,655,014
<b>1</b>	<b>10</b>		<b>Urusan Penanaman Modal</b>				<b>1,500,000,000</b>		<b>1,575,000,000</b>
1	10	1	Program Pengembangan Investasi Daerah	Terlaksananya Pengembangan Investasi Daerah		20 %	500,000,000	20 %	525,000,000
1	10	2	Program Peningkatan Jumlah Investor dan Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor		20 %	500,000,000	20 %	525,000,000
1	10	3	Program Pembangunan Data Base Produk Unggulan Daerah	Tersusunnya Data dan Informasi serta Kebijakan pengembangan cluster		20 %	500,000,000	20 %	525,000,000

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
20%	218,698,447	20%	245,292,179	20%	275,119,708			
2 Dok	18,342,450	2 Dok	20,572,892	2 Dok	23,074,556			
54 Orang	178,514,371	56 Orang	200,221,719	59 Orang	224,568,680			
1 Lap	1,573,217,864	1 Lap	1,764,521,156	1 Lap	1,979,086,929			
	<b>1,650,000,000</b>		<b>1,725,000,000</b>		<b>1,800,000,000</b>			<b>BP2TSP</b>
20 %	550,000,000	20 %	575,000,000	20 %	600,000,000			
20 %	550,000,000	20 %	575,000,000	20 %	600,000,000			
20 %	550,000,000	20 %	575,000,000	20 %	600,000,000			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja						
				Tahun 2017		Tahun 2018				
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	11		<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				<b>1,486,125,033</b>		<b>1,609,765,238</b>	
1	11	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	378,108,000	20%	409,410,733	
1	11	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor	20%	20%	25,875,000	20%	31,765,423	
1	11	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP	2 Dok	2 Dok	16,168,800	2 Dok	16,918,926	
1	11	4	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan keserasian kebijakan anak dan perempuan	20%	20%	120,011,200	20%	134,604,562	
1	11	5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	20%	20%	422,843,200	20%	474,260,933	
1	11	6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan & Anak dari Tindakan Kekerasan	20%	20%	161,688,000	20%	169,189,261	
1	11	7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan/ swasta	20%	20%	361,430,833	20%	405,380,823	

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	
	<b>1,863,744,600</b>		<b>2,099,922,846</b>		<b>2,326,195,498</b>			<b>Kantor Pem-berdayaan Perempuan dan Perlindu-ngan Anak</b>
20%	490,979,078	20%	572,453,334	20%	623,551,659			
20%	39,823,910	20%	45,818,200	20%	54,199,727			
2 Dok	17,760,267	2 Dok	18,703,916	2 Dok	19,762,312			
20%	150,972,477	20%	169,330,730	20%	189,921,347			
20%	531,931,062	20%	596,613,880	20%	669,162,128			
20%	177,602,675	20%	187,039,160	20%	197,623,122			
20%	454,675,131	20%	509,963,626	20%	571,975,203			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja						
				Tahun 2017		Tahun 2018				
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	12		<b>Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>				<b>2,868,592,944</b>		<b>3,217,413,846</b>	
1	12	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	1,031,468,224	20%	1,156,894,760	
1	12	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor	20%	20%	121,132,800	20%	135,862,548	
1	12	3	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang berkompeten	20%	20%	93,092,800	20%	104,412,884	
1	12	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP			43,462,000		48,746,979	
1	12	5	Program Keluarga Berencana	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif		100 Orang	1,151,658,880	100 Orang	1,291,700,600	
1	12	6	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun		65 Orang	50,472,000	65 Orang	56,609,395	
1	12	7	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat		500 Allseptor	56,080,000	500 Allseptor	62,899,328	
1	12	8	Program Pembinaan Peserta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan anggota sejahtera yang ber KB	80 Kelompok	80 Kelompok	212,431,040	80 Kelompok	238,262,654	

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	
	3,608,651,369		4,047,463,375		4,539,634,923			Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
20%	1,297,573,163	20%	1,455,358,059	20%	1,632,329,599			
20%	152,383,434	20%	170,913,260	20%	191,696,312			
20%	117,109,491	20%	131,350,005	20%	147,322,166			
	54,674,612		61,323,045		68,779,927			
100 Orang	1,448,771,393	100 Orang	1,624,941,994	100 Orang	1,822,534,941			
65 Orang	63,493,098	65 Orang	71,213,858	65 Orang	79,873,464			
500 Allseptor	70,547,886	500 Allseptor	79,126,509	500 Allseptor	88,748,293			
80 Kelom-pok	267,235,393	80 Kelom-pok	299,731,217	80 Kelom-pok	336,178,533			





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12	9	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		15 Orang	108,795,200	15 Orang	122,024,696
<b>1</b>	<b>13</b>		<b>Urusan Sosial</b>				<b>5,418,505,680</b>		<b>6,077,395,970</b>
1	13	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	960,370,000	20%	1,077,150,992
1	13	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya ketersediaan sarana & prasarana penunjang operasional kantor	20%	20%	656,136,000	20%	735,922,138
1	13	3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan kapasitas SDM aparatur yang berkompeten	20%	20%	102,962,880	20%	115,483,166
1	13	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP	2 Dokumen	2 Dokumen	8,972,800	2 Dokumen	10,063,892
1	13	5	Program Perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan	7 Dokumen	7 Dokumen	190,672,000	7 Dokumen	213,857,715
1	13	6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya	Meningkatnya taraf hidup masyarakat miskin, adat terpencil, dan penyandang masalah sosial	150 KK	161 KK	807,552,000	181 KK	905,750,323
1	13	7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	PMKS Yang Tertangani (orang)	20 KK	60 KK	616,880,000	69 KK	691,892,608
1	13	8	Program Pembinaan Anak Terlantar	Mengurangi jumlah anak terlantar	15 Orang	123 Orang	616,880,000	138 Orang	691,892,608

Target Kinerja								
Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
15 Orang	136,862,899	15 Orang	153,505,428	15 Orang	172,171,688			
	<b>6,816,407,322</b>		<b>7,645,282,449</b>		<b>8,574,948,799</b>			
20%	1,208,132,553	20%	1,355,041,471	20%	1,519,814,514			Dinas Tena- ga Kerja dan Sosial
20%	825,410,270	20%	925,780,158	20%	1,038,355,026			
20%	129,525,919	20%	145,276,271	20%	162,941,866			
2 Dokumen	11,287,662	2 Dokumen	12,660,241	2 Dokumen	14,199,727			
7 Dokumen	239,862,813	7 Dokumen	269,030,131	7 Dokumen	301,744,195			
203 KK	1,015,889,563	228 KK	1,139,421,733	255 KK	1,277,975,416			
78 KK	776,026,749	87 KK	870,391,602	98 KK	976,231,221			
155 Orang	776,026,749	174 Orang	870,391,602	195 Orang	976,231,221			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	13	9	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatnya pemberdayaan terhadap penyandang cacat dan trauma	15 Orang	39 Orang	196,280,000	44 Orang	220,147,648
1	13	10	Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo	Meningkatnya pelayanan terhadap lansia dan anak yatim piatu	6 Panti	20 Panti	201,888,000	23 Panti	226,437,581
1	13	11	Program Pembinaan Eks Penyandang Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya )	Persentase penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	10 Orang	27 Orang	134,592,000	30 Orang	150,958,387
1	13	12	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin	75 Lembaga	185 Lembaga	925,320,000	207 Lembaga	1,037,838,912
<b>1</b>	<b>14</b>		<b>Urusan Ketenagakerjaan</b>				<b>2,656,312,198</b>		<b>2,979,319,762</b>
1	14	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang memenuhi kompetensi	5 Lembaga	2 Lembaga	44,864,000	3 Lembaga	50,319,462
1	14	2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang Ditempatkan	603 Orang	2000 Orang	783,240,198	2020 Orang	878,482,207
1	14	3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	152 Perusahaan	360 Perusahaan	1,828,208,000	410 Perusahaan	2,050,518,093
<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>				<b>3,413,685,313</b>		<b>7,745,741,137</b>
1	15	1	Program Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan serta Pemberdayaan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan permodalan bagi UMKM,</li> <li>Bantuan Peralatan dan kemasan.</li> <li>pelatihan Kewirausahaan</li> <li>Peserta pameran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 UMKM,</li> <li>- 5 Klp.</li> <li>- 50 Peserta</li> <li>- 12 UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 UMKM,</li> <li>- 5 Klp.</li> <li>- 70 Peserta</li> <li>- 12 UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 300,000,000</li> <li>- 200,000,000</li> <li>- 105,160,680</li> <li>- 200,000,000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 45 UMKM,</li> <li>- 7 Klp.</li> <li>- 70 Peserta</li> <li>- 14 UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 350,000,000</li> <li>- 235,411,539</li> <li>- 105,160,680</li> <li>- 235,000,000</li> </ul>

Target Kinerja									
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab	
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
49 Orang	246,917,602	55 Orang	276,942,782	62 Orang	310,619,025				
25 Panti	253,972,391	28 Panti	284,855,433	32 Panti	319,493,854				
34 Orang	169,314,927	38 orang	189,903,622	42 Orang	212,995,903				
233 Lem- baga	1,164,040,124	261 Lem- baga	1,305,587,403	293 Lem- baga	1,464,346,831				
	<b>3,341,605,045</b>		<b>3,747,944,218</b>		<b>4,203,694,235</b>				
3 Lembaga	56,438,309	4 Lembaga	63,301,207	4 Lembaga	70,998,634			Dinas Tena- ga Kerja dan Sosial	
2030 Orang	985,305,643	2040 Orang	1,105,118,809	2050 Orang	1,239,501,256				
459 Perusa- haan	2,299,861,093	515 Perusa- haan	2,579,524,202	578 Perusa- haan	2,893,194,345			Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah	
	<b>4,246,931,259</b>		<b>4,890,264,502</b>		<b>5,411,473,465</b>				
- 100 UMKM, - 7 Klp. - 70 Peserta - 17 UMKM	- 500,000,000 - 303,453,800 - 111,700,000 - 250,000,000	- 100 UMKM, - 15 Klp. - 70 Peserta - 20 UMKM	- 550,000,000 - 307,520,503 - 120,000,000 - 287,500,000	- 150 UMKM, - 15 Klp. - 70 Peserta - 20 UMKM	- 700,000,000 - 320,000,000 - 170,000,000 - 287,500,000				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	15	2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20 %	754,047,313	20 %	799,639,157
1	15	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya dukungan sarana dan prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Unit Pembangunan Pagar Gedung Kantor.72 m<sup>2</sup></li> <li>- Pengadaan 35 unit perlengkapan gedung kantor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan 30 Unit perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>- Pemeliharaan berkala gedung kantor 400 m<sup>2</sup></li> <li>- Pemeliharaan 1 unit kendaraan roda 4</li> <li>- Peralatan gedung kantor 12 unit</li> <li>- Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor 20 unit</li> <li>- Pengadaan 4 unit Kendaraan dinas operasional roda 2</li> </ul>	377,830,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unit pembangunan gedung kantor 400 m<sup>2</sup></li> <li>- Pemeliharaan 1 unit gedung kantor 400 m<sup>2</sup></li> <li>- Berkala 1 unit kendaraan operasional roda 4</li> <li>- Berkala peralatan gedung kantor 12 unit</li> <li>- Berkala peralatan dan perlengkapan kantor 20 unit</li> <li>- Berkala gedung lainnya (PKL) 1 unit</li> <li>- Rehabilitasi berat sedang gedung pasar tradisional 1 unit</li> </ul>	4,382,830,801

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
20 %	896,875,278	20 %	1,005,935,312	20 %	1,128,257,046			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan perlengkapan gedung kantor 31 unit</li> <li>- Berkala gedung kantor 400 m<sup>2</sup></li> <li>- Berkala kendaraan dinas operasional 1 unit</li> <li>- Berkala peralatan gedung kantor 12 unit</li> <li>- Berkala peralatan dan perlengkapan kantor 20 unit</li> <li>- Berkala gedung lainnya 2 unit</li> </ul>	362,087,026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan perlengkapan gedung kantor 35 unit</li> <li>- Berkala gedung kantor 400 m<sup>2</sup></li> <li>- Berkala kendaraan dinas operasional 1 unit</li> <li>- Berkala peralatan gedung kantor 12 unit</li> <li>- Berkala peralatan dan perlengkapan kantor 20 unit</li> <li>- Berkala gedung lainnya (PKL) dan pasar tradisional 2 unit</li> <li>- Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 ,4 unit</li> </ul>	556,116,809	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Pengadaan perlengkapan gedung kantor 35 unit</li> <li>- Berkala gedung kantor 400 m<sup>2</sup></li> <li>- Berkala kendaraan dinas operasional roda 4, 1 unit</li> <li>- Berkala peralatan gedung kantor 12 unit</li> <li>- Berkala peralatan dan perlengkapan kantor 20 unit</li> <li>- Berkala gedung lainnya (PKL) dan Pasar tradisional 2 unit</li> </ul>	485,500,613			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	15	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya SDM Aparatur	12 org	6 org	60,566,400	7 org	67,931,274
1	15	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatkan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan yg akuntabel	3 dokumen	3 dokumen	15,000,000	3 dokumen	15,000,000
1	15	6	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Kondusif	Terwujudnya produk UMKM yang berdaya saing	20 Peserta UMKM, 300 data UMKM, 6 Dokumen Laporan Monev	20 Peserta UMKM, 500 data UMKM, 12 Dokumen Laporan Monev	110,000,000	20 Peserta UMKM, 700 data UMKM, 12 Dokumen Laporan Monev	115,000,000
1	15	7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Terciptanya pengembangan UMKM		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi permodalan 8 UMKM Temu Jejaring,</li> <li>- 15 peserta kegiatan pengembangan incubator dan bisnis</li> <li>- 15 peserta pelatihan HAKI,</li> <li>- 25 Peserta pelatihn Manajemnn Pengolahan Koperasi</li> </ul>	315,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi permodalan 8 UMKM Temu Jejaring,</li> <li>- 15 peserta kegiatan pengembangan incubator dan bisnis</li> <li>- 15 peserta pelatihan HAKI,</li> <li>- 25 Peserta pelatihn Manajemnn Pengolahan Koperasi</li> </ul>	355,000,000

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
7 org	76,191,717	7 org	85,456,630	7 org	95,848,156			
3 dokumen	15,000,000	3 dokumen	15,000,000	3 dokumen	15,000,000			
25 Peserta UMKM,1000 data UMKM, 12 Dokumen Laporan Monev	135,000,000	25 Peserta UMKM,15000 data UMKM, 12 Dokumen Laporan Monev	140,000,000	25 Peserta UMKM,15000 data UMKM, 12 Dokumen Laporan Monev	140,000,000			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi permodalan 8 UMKM Temu Jejaring,</li> <li>- 15 peserta kegiatan pengembangan incubator dan bisnis</li> <li>- 15 peserta pelatihan HAKI,</li> <li>- 25 Peserta pelatihn Manajemn Pengolahan Koperasi</li> </ul>	365,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi permodalan 8 UMKM Temu Jejaring,</li> <li>- 15 peserta kegiatan pengembangan incubator dan bisnis</li> <li>- 15 peserta pelatihan HAKI,</li> <li>- 25 Peserta pelatihn Manajemn Pengolahan Koperasi</li> </ul>	447,500,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi permodalan 8 UMKM Temu Jejaring,</li> <li>- 15 peserta kegiatan pengembangan incubator dan bisnis</li> <li>- 15 peserta pelatihan HAKI,</li> <li>- 25 Peserta pelatihn Manajemn Pengolahan Koperasi</li> </ul>	491,422,996			





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	15	8	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah	Terciptanya jaringan kerja sama dengan pihak ketiga	7 org Peserta KSP/USP, Penilaian 35 Koperasi sehat	20 org peserta sosialisasi KUMKM, 40 org peserta Temu koordinasi, 2 kali Lap. Monev dana Pemerintah, 5 UMKM yg difasilitasi sarana Produksi, 20 UMKM yg difasilitasi pd temu mitra, 25 org Peserta, 7 org Peserta KSP/USP, 35 Koperasi	380,540,160	25 org peserta sosialisasi KUMKM, 40 org peserta Temu koordinasi, 2 kali Lap. Monev dana Pemerintah, 7 UMKM yg difasilitasi sarana Produksi, 20 UMKM yg difasilitasi pd temu mitra, 37 org Peserta, 8 org Peserta KSP/USP, 37 Koperasi	416,133,843
1	15	9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	- Tercapainya JML Koperasi Aktif - Tercapainya JML Koperasi sehat - Tercapainya Peringkat Koperasi Tingkat Nasional	- 89 Koperasi - 25 Koperasi - 2 Koperasi	- 95 Koperasi - 30 Koperasi - 1 Koperasi	595,540,160	102 Koperasi, 36 Koperasi, 1 Koperasi	668,633,843
<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Urusan Ketahanan Pangan</b>				<b>1,445,128,000</b>		<b>1,495,135,565</b>
1	16	1	Program Mewujudkan Konektivitas Lintas Wilayah Terdekat, Mendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Ketahanan Pangan	Peningkatan Luas tanam: - Cabe - Bawang Rapat Koordinasi		15 Ha 15 Ha 1 kali	750,000,000 300,000,000 25,000,000	15 Ha 15 Ha 1 kali	750,000,000 300,000,000 30,000,000

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
27 org peserta sosialisasi KUMKM, 45 org peserta Temu koordinasi, 2 kali Lap. Monev dana Pemerintah, 8 UMKM yg difasilitasi sarana Produksi, 25 UMKM yg difasilitasi pd temu mitra, 40 org Pserta, 8 org Peserta KSP/USP, 37 Koperasi	480,311,719	35 org peserta sosialisasi KUMKM, 45 org peserta Temu koordinasi, 2 kali Lap. Monev dana Pemerintah, 10 UMKM yg difasilitasi sarana Produksi, 27 UMKM yg difasilitasi pd temu mitra, 40 org Pserta, 10 org Peserta KSP/USP, 40 Koperasi	531,617,624	50 org peserta sosialisasi KUMKM, 50 org peserta Temu koordinasi, 2 kali Lap. Monev dana Pemerintah, 10 UMKM yg difasilitasi sarana Produksi, 40 UMKM yg difasilitasi pd temu mitra, 40 org Pserta, 12 org Peserta KSP/USP, 45 Koperasi	631,222,327			
110 Koperasi, 41 koperasi, 1 Koperasi	751,311,719	119 Koperasi, 46 koperasi, 1 koperasi	843,617,624	129 koperasi, 53 koperasi, 2 koperasi	946,722,327			
	<b>1.550.616.049</b>		<b>1.312.234.961</b>		<b>1.635.738.732</b>			
15 Ha 15 Ha 1 kali	750,000,000 300,000,000 35,000,000	15 Ha 15 Ha 1 kali	750,000,000 300,000,000 40,000,000	15 Ha 15 Ha 1 kali	750,000,000 300,000,000 50,000,000			<b>Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan</b>



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16	2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Tercapainya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (KRPL) 2 Klp - Lomba Cipta Menu Bergizi, Beragam, seimbang dan Aman ( B2SA) 7 klp.	- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (KRPL) 6 klp. - Pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) 1 Klp. - Manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan pangan 12 bln. - Lomba Cipta Menu Bergizi, Beragam, seimbang dan Aman ( B2SA) 7 Tim - Pameran gelar pangan Nusantara 1 Tim - Pemandangan Pengembangan Desa mandiri Organik berbasis komoditas perkebunan 25 Ha	370,128,000	- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (KRPL) 4 Klp. - Pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) 1 Klp - Manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan pangan 12 Bln. - Lomba Cipta Menu Bergizi, Beragam, seimbang dan Aman ( B2SA) 7 Tim. - Pameran gelar pangan Nusantara 1 Tim - Pemandangan Pengembangan Desa mandiri Organik berbasis komoditas perkebunan 25 Ha	415,135,565
1	17		<b>Urusan Kebudayaan</b>				<b>4,722,300,000</b>		<b>5,317,380,000</b>

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (KRPL) 4 Klp.</li> <li>- Pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) 1 Klp</li> <li>- Manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan pangan 12 Bln.</li> <li>- Lomba Cipta Menu Bergizi, Beragam, seimbang dan Aman ( B2SA) 7 Tim.</li> <li>- Pameran gelar pangan Nusantara 1 Tim</li> <li>- Pendampingan Pengembangan Desa mandiri Organik berbasis komoditas perkebunan 25 Ha</li> </ul>	465,616,049	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (KRPL) 4 Klp.</li> <li>- Pengembangan pangan pangan pokok lokal (MP3L) 1 Klp</li> <li>- Manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan pangan 12 Bln.</li> <li>- Lomba Cipta Menu Bergizi, Beragam , seimbang dan Aman ( B2SA) 7 Tim.</li> <li>- Pameran gelar pangan Nusantara 1 Tim</li> <li>- Pendampingan Pengembangan Desa mandiri Organik berbasis komoditas perkebunan 25 Ha</li> </ul>	522,234,961	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (KRPL) 4 Klp.</li> <li>- Pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) 1 Klp</li> <li>- Manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan pangan 12 Bln.</li> <li>- Lomba Cipta Menu Bergizi, Beragam , seimbang dan Aman ( B2SA) 7 Tim.</li> <li>- Pameran gelar pangan Nusantara 1 Tim</li> <li>- Pendampingan Pengembangan Desa mandiri Organik berbasis komoditas perkebunan 25 Ha</li> </ul>	585,738,732			
	<b>5,063,468,000</b>		<b>5,388,064,800</b>		<b>5,619,001,280</b>			<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20 %	951.800.000	20 %	1.046.980.000
1	17	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	21 %	325.000.000	18 %	324.500.000
1	17	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian Seragam Hari-Hari Tertentu	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0	100 pasang	50.000.000
1	17	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tersedianya sumber daya pegawai yang kompeten	0 orang	10 orang	204.000.000	11 orang	224.400.000
1	17	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersedianya capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja SKPD	laporan pertanggung jawaban SKPD	3 Dokumen	7.500.000	3 Dokumen	7.500.000
1	17	6	Program Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Revitalisasi Cagar Budaya serta Infrastruktur Pendukung untuk Mendorong Ternate sebagai Icon Kota Religius, Kota Pariwisata Unggulan dan Kota Pusaka Dunia Berbasis Sejarah, Budaya dan Bahari	Penyelenggaraan festival/event seni dan budaya	3 event	6 event	650.000.000	6 event	895.000.000
1	17	7	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100 %	21 %	2.584.000.000	23 %	2.769.000.000
<b>1</b>	<b>18</b>		<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>				<b>4,003,297,470</b>		<b>4,490,098,442</b>
1	18	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	736,325,914	20%	825,863,145

Target Kinerja									
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab	
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18		19
20 %	1.151.678.000	20 %	1.266.845.800	20 %	1.393.530.380				
21 %	356.950.000	18 %	392.645.000	21 %	431.909.500				
0	0	0	0	100 pasang	50.000.000				
8 orang	246.840.000	9 orang	271.524.000	10 orang	298.676.400				
3 Dokumen	7.500.000	3 Dokumen	7.500.000	3 Dokumen	7.500.000				
6 event	720.000.000	6 event	960.000.000	6 event	740.000.000				
19 %	2.580.500.000	19 %	2.489.550.000	19 %	2.697.385.000				
	<b>5,036,094,412</b>		<b>5,648,483,493</b>		<b>6,335,339,085</b>				
20%	926,288,103	20%	1,038,924,736	20%	1,165,257,984				<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor	20%	20%	132,348,800	20%	148,442,414
1	18	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang berkompeten	20%	20%	64,492,000	20%	72,334,227
1	18	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP	20%	20%	11,216,000	20%	12,579,866
1	18	5	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Pemberian Penghargaan dan Dana Kesejahteraan Serta Penyusunan Data Base Pemuda	20%	20%	123,376,000	20%	138,378,522
1	18	6	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Seleksi Calon PSP3 Tingkat Kota, Calon Paskibraka, Calon Bhakti Pemuda Antar Provinsi Tingkat Kota		250 Orang	242,016,356	300 Orang	271,445,545
1	18	7	Program Pembinaan Kebijakan Manajemen Olahraga	Fasilitas Atlit Pelatih Pada Kejuaraan Regional Nasional/ Internasional, Kegiatan LPI, Turnamen Halesigi, Senam SKJ, Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Kompetensi Usia 18 Tahun, Fasilitas Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Kegiatan Olahraga Memeriahkan HUT Kota Ternate, Pembinaan Sekolah Sepak Bola, Seleksi Popda	20%	20%	168,240,000	20%	188,697,984

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
20%	166,493,012	20%	186,738,562	20%	209,445,971			
20%	81,130,069	20%	90,995,486	20%	102,060,537			
20%	14,109,577	20%	15,825,302	20%	17,749,659			
20%	155,205,350	20%	174,078,320	20%	195,246,244			
350 Orang	304,453,323	370 Orang	341,474,847	380 Orang	382,998,188			
20%	211,643,659	20%	237,379,528	20%	266,244,878			





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18	8	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terciptanya penataan sarana dan prasarana olahraga guna mendukung prestasi olahraga dan memasyarakatkan olahraga	20%	20%	2,200,018,400	20%	2,467,540,637
1	18	9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Fasilitas Penyedia Sarana Prasarana Pemuda Kota	20%	20%	325,264,000	20%	364,816,102
1	19	1	<b>Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>				<b>4,391,448,148</b>		<b>4,925,448,244</b>
1	19	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	576,698,029	20%	646,824,510
1	19	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor	20%	20%	1,002,347,237	20%	1,124,232,661
1	19	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas	20%	20%	87,710,242	20%	98,375,807
1	19	4	Program Peningkatan Pengembangan Sestim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP	2 Dok	2 Dok	16,028,640	2 Dok	17,977,722
1	19	5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang diberi pembinaan tentang penanganan gangguan konflik sosial		12 Kelurahan	459,856,000	19 Kelurahan	515,774,490
1	19	6	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penurunan Konflik Sosial Masyarakat		7 Kecamatan	123,376,000	7 Kecamatan	138,378,522

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	
20%	2,767,593,579	20%	3,104,132,958	20%	3,481,595,526			
20%	409,177,740	20%	458,933,754	20%	514,740,098			
	<b>5,524,382,749</b>		<b>6,196,147,690</b>		<b>6,949,599,250</b>			<b>Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</b>
20%	725,478,370	20%	813,696,540	20%	912,642,039			
20%	1,260,939,353	20%	1,414,269,578	20%	1,586,244,759			
20%	110,338,305	20%	123,755,443	20%	138,804,105			
2 Dok	20,163,813	2 Dok	22,615,733	2 Dok	25,365,806			
20 Kelurahan	578,492,668	22 Kelurahan	648,837,376	30 Kelurahan	727,736,001			
7 Kecamatan	155,205,350	7 Kecamatan	174,078,320	7 Kecamatan	195,246,244			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19	7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan pembauran kebangsaan lintas pemuda agama dan paguyuban		34 Paguyuban	650,528,000	34 Paguyuban	729,632,205
1	19	8	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Terlaksananya Pelatihan deteksi dini bagi masyarakat		100 Orang	566,408,000	100 Orang	635,283,213
1	19	9	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Pembinaan dan penanggulangan Miras dan Narkoba		4 Kecamatan	67,296,000	4 Kecamatan	75,479,194
1	19	10	Program Pendidikan Politik	Jumlah parpol yang melakukan pembinaan dalam kesadaran berdemokrasi yang baik		12 Parpol	841,200,000	13 Parpol	943,489,920
<b>1</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>				<b>5,837,546,176</b>		<b>6,330,808,748</b>
1	19	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	20 %	1.183.807.076	20 %	1.327.758.017
1	19	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100 %	23 %	167.679.200	16 %	188.068.991
1	19	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian Seragam Hari-Hari Tertentu	80 pasang	80 pasang	84.120.000	80 pasang	94.348.992
1	19	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	2 orang	2 orang	25.000.000	2 orang	25.000.000
1	19	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen laporan Keuangan dan Capaian Kinerja Keuangan	3 dokumen	3 dokumen	22.432.000	3 dokumen	25.159.731

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
34 Pa-guyuban	818,355,481	34 Pa-guyuban	917,867,507	34 Pa-guyuban	1,029,480,196			
150 Orang	712,533,651	200 Orang	799,177,743	250 Orang	896,357,757			
4 Keca-matan	84,657,464	4 Keca-matan	94,951,811	4 Keca-matan	106,497,951			
13 Parpol	1,058,218,294	13 Parpol	1,186,897,639	13 Parpol	1,331,224,392			
	<b>6,672,828,409</b>		<b>7,167,102,021</b>		<b>7,697,551,664</b>			<b>Badan Penangu-langan Bencana Daerah</b>
20 %	1.489.213.392	20 %	1.670.301.740	20 %	1873410432			
23 %	210.938.180	16 %	236.588.263	23 %	265.357.395			
80 pasang	105.821.829	80 pasang	118.689.764	80 pasang	133.122.439			
2 orang	25.000.000	2 orang	25.000.000	2 orang	25.000.000			
3 dokumen	28.219.155	3 dokumen	31.650.604	3 dokumen	35.499.317			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19	6	Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Perkotaan, Pengendalian Tata Ruang Berbasis Lingkungan Serta Penataan Kawasan Rawan Bencana	Terbangunnya Talud Penahan Tanah/Longsor dan Tersusunnya dan Sosialisasi Peta Mitigasi Bencana	150 M'	250 M' dan 1 Dokumen Peta Mitigasi	1,027,733,500	275 M' dan Sosialisasi Peta Mitigasi Bencana (250 Org)	1,074,506,850
1	19	7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kegiatan tanggap darurat	100 %	16 %	486.774.400	21 %	545.966.167
1	19	8	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Dini dan kesiapsiagaan pra bencana alam	100 %	20 %	840.000.000	20 %	850.000.000
1	19	9	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam	Terbangunnya Bangunan infrastruktur bencana alam	0 m	Talud penahan ombak 100 m	2.000.000.000	Talud penahan ombak 100 m	2.200.000.000
<b>1</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>Sub Urusan Kesbangpol, Satuan Pol - PP</b>				<b>8,865,556,085</b>		<b>9,943,607,706</b>
1	19	1	Program Administrasi Perkantoran	Peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	2,301,926,976	20%	2,581,841,296
1	19	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor	20%	20%	48,565,280	20%	54,470,818
1	19	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas	20%	20%	168,240,000	20%	188,697,984
1	19	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan	20%	20%	67,296,000	20%	75,479,194

Target Kinerja									
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab	
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
300 M'	1.041.280.200	325 M'	1.128.053.550	350 M'	1.214.826.900				
21 %	612.355.653	21 %	686.818.100	21 %	770.335.181				
20 %	860.000.000	20 %	870.000.000	20 %	880.000.000				
Talud pena- han ombak 100 m	2.300.000.000	Talud pena- han ombak 100 m	2.400.000.000	Talud pena- han ombak 100 m	2.500.000.000				
	<b>11,152,750,403</b>		<b>12,508,924,851</b>		<b>14,030,010,113</b>				<b>Kantor Satuan Polisi Pamong Praja</b>
20%	2,895,793,198	20%	3,247,921,651	20%	3,642,868,924				
20%	61,094,470	20%	68,523,557	20%	76,856,022				
20%	211,643,659	20%	237,379,528	20%	266,244,878				
20%	84,657,464	20%	94,951,811	20%	106,497,951				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Capaian Kinerja Keuangan	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP	20%	20%	7,290,400	20%	8,176,913
1	19	6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	38 Kali	38 Kali	4,502,102,400	41 Kali	5,049,558,052
1	19	7	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	420 Kali	420 Kali	1,607,049,903	422 Kali	1,802,467,171
1	19	8	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	6 Kali	6 Kali	163,085,126	12 Kali	182,916,278
1	20		<b>Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kepegawaian, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian</b>						
1	20	1	<b>Sekretariat Daerah :</b>				<b>70,280,801,920</b>		<b>787,826,848,118</b>
1	20	1	Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	18,734,084,800	20%	21,012,149,512
1	20	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor	20%	20%	35,078,040,000	20%	39,343,529,664
1	20	3	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja	Terwujudnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas	20%	20%	1,152,303,800	20%	1,292,423,942

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
20%	9,171,225	20%	10,286,446	20%	11,537,278			
40 Kali	5,663,584,311	42 Kali	6,352,276,163	46 Kali	7,124,712,945			
426 Kali	2,021,647,179	430 Kali	2,267,479,476	436 Kali	2,543,204,980			
14 Kali	205,158,897	16 Kali	230,106,219	18 Kali	258,087,135			
	<b>88,319,756,355</b>		<b>99,163,240,437</b>		<b>111,221,490,476</b>			<b>Sekretariat Daerah</b>
20%	23,567,226,892	20%	26,433,001,682	20%	29,647,254,687			
20%	44,127,702,871	20%	49,493,631,540	20%	55,512,057,136			
20%	1,449,582,693	20%	1,625,851,949	20%	1,823,555,546			





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparaturnya dalam melaksanakan tugas pelayanan	20%	20%	695,392,000	20%	779,951,667
1	20	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tersusunnya Dokumen LAKIP dan LPP	20%	20%	605,664,000	20%	679,312,742
1	20	6	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terciptanya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	20%	20%	712,216,000	20%	798,821,466
1	20	7	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terwujudnya peningkatan kerjasama antar pemerintahan daerah	20%	20%	1,952,509,320	20%	2,189,934,453
1	20	8	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Pembinaan Media	Terciptanya akses komunikasi dan informasi, serta publikasi hasil pembangunan dan pembinaan media	20%	20%	3,976,072,000	20%	4,459,562,355
1	20	9	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan	Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera adil dan mandiri	20%	20%	5,753,808,000	20%	6,453,471,053
1	20	10	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Terwujudnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah sesuai standar pelayanan minimal maupun standar operasional prosedur	85%	85%	891,672,000	85%	1,000,09,315
1	20	11	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terwujudnya kelancaran distribusi bbm, bahan pokok, dan kemudahan izin bagi investor	100%	279 Pangkalan dan 4 SPBU serta 600 pelaku usaha	241,144,000	279 Pangkalan dan 4 SPBU serta 650 pelaku usaha	270,467,110

Target Kinerja								
Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
20%	874,793,790	20%	981,168,715	20%	1,100,478,831			
20%	761,917,172	20%	854,566,300	20%	958,481,562			
20%	895,958,156	20%	1,004,906,668	20%	1,127,103,318			
20%	2,456,230,483	20%	2,754,908,110	20%	3,089,904,936			
20%	5,001,845,138	20%	5,610,069,506	20%	6,292,253,958			
20%	7,238,213,133	20%	8,118,379,850	20%	9,105,574,840			
85%	1,121,711,392	85%	1,258,111,497	100%	1,411,097,855			
279 Pang- kalan dan 4 SPBU serta 700 pelaku usaha	303,355,911	279 Pang- kalan dan 4 SPBU serta 750 pelaku usaha	340,243,990	1 Dokumen Lapora Evaluasi serta 800 pelaku usaha	381,617,659			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	12	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan	Tersedianya Sembako murah dan pangan bagi keluarga miskin	7 Kecamatan	2 Kec dan raskin di 7 kec. sebanyak 4.421 RTM	375,736,000	2 Kec dan raskin di 7 kec. sebanyak 4.421 RTM	421,425,498
1	20	13	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Sinkronisasi, Fasilitas Strategi Potensi Unggulan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	56,080,000	1 Laporan	62,899,328
1	20	14	Program Pengembangan Sen-tra-Sentra Industri Potensial	Evaluasi Keberadaan dan Berjalannya Evaluasi Daerah	Dokumen	Dokumen	56,080,000	Dokumen	62,899,328
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>				<b>7,297,129,600</b>		<b>8,184,460,558</b>
1	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	2,635,760,000	20%	2,956,268,416
1	20	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor	20%	20%	906,252,800	20%	1,016,453,140
1	20	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas	20%	20%	308,440,000	20%	345,946,304
1	20	4	Prog Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP	20%	20%	185,064,000	20%	207,567,782
1	20	5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terciptanya Pertanggung Jawaban Keuangan dan Aset Yang Memadai	6 Dokumen	6 Dokumen	3,205,532,800	6 Dokumen	3,595,325,588
1	20	6	Program Pendidikan Kedinasan	Terciptanya SDM Aparatur yang handal kompetitif	8 Orang	8 Orang	56,080,000	10 Orang	62,899,328

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
3 Kec dan raskin di 7 kec. sebanyak 4.421 RTM	472,670,838	4 Kec dan raskin di 7 kec. sebanyak 4.421 RTM	530,147,612	4 Kec dan raskin di 7 kec. sebanyak 4.421 RTM	594,613,562			
1 Laporan	70,547,886	1 Laporan	79,126,509	1 Laporan	88,748,293			
Dokumen	50,000,000	Dokumen	79,126,509	Dokumen	88,748,293			
	<b>9,179,690,963</b>		<b>10,295,941,385</b>		<b>11,547,927,856</b>			<b>Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>
20%	3,315,750,655	20%	3,718,945,935	20%	4,171,169,761			
20%	1,140,053,842	20%	1,278,684,390	20%	1,434,172,411			
20%	388,013,375	20%	435,195,801	20%	488,115,610			
100%	232,808,025	20%	261,117,481	20%	292,869,366			
6 Dokumen	4,032,517,180	6 Dokumen	4,522,871,269	6 Dokumen	5,072,852,415			
11 Orang	70,547,886	13 Orang	79,126,509	15 Orang	88,748,293			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja						
				Tahun 2017		Tahun 2018				
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>Dinas Pendapatan Daerah</b>				<b>7,377,888,389</b>		<b>8,275,039,618</b>	
1	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	1,923,095,360	20%	2,156,943,756	
1	20	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor	20%	20%	1,488,194,960	20%	1,669,159,467	
1	20	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas	20%	20%	56,080,000	20%	62,899,328	
1	20	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya kapasitas SDM Aparatur dalam meningkatkan pelayanannya	20%	20%	644,920,000	20%	723,342,272	
1	20	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP	2 Laporan Dokumen	2 Laporan Dokumen	138,515,581	2 Laporan Dokumen	155,359,076	
1	20	6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Terciptanya peningkatan system pengawasan yang terpadu dan terkendali dalam pelaksanaan kebijakan	20%	20%	168,240,000	20%	188,697,984	
1	20	7	Program Peningkatan Pencapaian PAD	Terwujudnya peningkatan cakupan pencapaian PAD	20%	20%	168,240,000	20%	188,697,984	
1	20	8	Program Intensifikasi Pajak Daerah	Terwujudnya kinerja intensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan PAD	20%	20%	1,544,740,424	20%	1,732,580,860	
1	20	9	Program Ekstensifikasi Pajak Daerah	Terwujudnya kinerja ekstensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan PAD	20%	20%	1,245,862,064	20%	1,397,358,891	
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>Inspektorat</b>				<b>5,384,415,770</b>		<b>6,039,160,728</b>	

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>9,281,284,433</b>		<b>10,409,888,620</b>		<b>11,675,731,078</b>			<b>Dinas Pendapa tan Daerah</b>
20%	2,419,228,116	20%	2,713,406,255	20%	3,043,356,456			
20%	1,872,129,258	20%	2,099,780,176	20%	2,355,113,446			
20%	70,547,886	20%	79,126,509	20%	88,748,293			
20%	811,300,692	20%	909,954,856	20%	1,020,605,367			
2 Laporan Dokumen	174,250,739	2 Laporan Dokumen	195,439,629	2 Laporan Dokumen	219,205,088			
20%	211,643,659	20%	237,379,528	20%	266,244,878			
20%	211,643,659	20%	237,379,528	20%	266,244,878			
20%	1,943,262,692	20%	2,179,563,435	20%	2,444,598,349			
20%	1,567,277,732	20%	1,757,858,704	20%	1,971,614,323			
	<b>6,773,522,671</b>		<b>7,597,183,029</b>		<b>8,521,000,484</b>			<b>Inspektorat</b>



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terciptanya penyelesaian pemeriksaan, Laporan hasil audit pengawasan, jumlah kasus yang ditindaklanjuti dan konsistensi kepatuhan penyelesaian laporan keuangan dan kinerja.	68%	Tingkat penyelesaian pemeriksaan APIP and BPK 40 %  Laporan Hasil pengawasan Intern 95 %  Jumlah kasus yang dapat ditindaklanjuti 100 %  Tingkat kepatuhan SKPD penyelesaian Laporan Keuangan dan Kinerja 100 %	3,397,041,514	Tingkat penyelesaian pemeriksaan APIP and BPK 50 %  Laporan Hasil pengawasan Intern 100 %  Jumlah kasus yang dapat ditindaklanjuti 100 %  Tingkat kepatuhan SKPD penyelesaian Laporan Keuangan dan Kinerja 100 %	3,810,121,762
1	20	2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terciptanya ketersediaan tenaga auditor yang memiliki kompetensi sesuai TUPOKSI	58%	Tingkat ketersediaan auditor 65%  SDM Pengawasan yang bersertifikat 42,11 %  Jumlah SDM yang bersertifikat khusus 1 Orang	573,922,720	Tingkat ketersediaan auditor 72,5%  SDM Pengawasan yang bersertifikat 55,26 %  Jumlah SDM yang bersertifikat khusus 2 Orang	643,711,723

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tingkat penyelesaian pemeriksaan APIP and BPK 55 %		Tingkat penyelesaian pemeriksaan APIP and BPK 60 %		Tingkat penyelesaian pemeriksaan APIP and BPK 65 %				
Laporan Hasil pengawasan Intern 95 %		Laporan Hasil pengawasan Intern 95 %		Laporan Hasil pengawasan Intern 95 %				
Jumlah kasus yang dapat ditindaklanjuti 100 %	4,273,432,568	Jumlah kasus yang dapat ditindaklanjuti 100 %	4,793,081,968	Jumlah kasus yang dapat ditindaklanjuti 100 %	5,375,920,735			
Tingkat kepatuhan SKPD penyelesaian Laporan Keuangan dan Kinerja 100 %		Tingkat kepatuhan SKPD penyelesaian Laporan Keuangan dan Kinerja 100 %		Tingkat kepatuhan SKPD penyelesaian Laporan Keuangan dan Kinerja 100 %				
Tingkat ketersediaan auditor 80%		Tingkat ketersediaan auditor 90%		Tingkat ketersediaan auditor 100 %				
SDM Pengawasan yang bersertifikat 68,42 %	721,987,068	SDM Pengawasan yang bersertifikat 84,21 %	809,780,696	SDM Pengawasan yang bersertifikat 100 %	908,250,028			
Jumlah SDM yang bersertifikat khusus 3 Orang		Jumlah SDM yang bersertifikat khusus 4 Orang		Jumlah SDM yang bersertifikat khusus 5 Orang				





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	964,811,536	100%	1,082,132,619
1	20	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor	100%	100%	420,600,000	100%	471,744,960
1	20	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Dokumen LAKIP dan LPP	2 Dokumen	2 Dokumen	28,040,000	2 Dokumen	31,449,664
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>				<b>21,686,392,678</b>		<b>24,323,458,028</b>
1	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	4,257,760,214	20%	4,775,503,856
1	20	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	20%	20%	5,108,641,584	20%	5,729,852,401
1	20	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya Peningkatan kinerja dan disiplin aparatur	20%	20%	391,158,000	20%	438,722,813
1	20	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan kinerja kapasitas aparatur	20%	20%	216,244,480	20%	242,539,809
1	20	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tersusunnya Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	28,040,000	1 Dokumen	31,449,664
1	20	6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terciptanya peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3 MP, 7 Perda, 7 Staf Ahli Fraksi	3 MP, 7 Perda, 7 Staf Ahli Fraksi	11,684,548,400	3 MP, 7 Perda, 7 Staf Ahli Fraksi	13,105,389,485
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</b>				<b>8,142,606,400</b>		<b>8,860,638,265</b>

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
100%	1,213,719,945	100%	1,361,308,291	100%	1,526,843,379			
100%	529,109,147	100%	593,448,819	100%	665,612,196			
2 Dokumen	35,273,943	2 Dokumen	39,563,255	2 Dokumen	44,374,146			
	<b>27,281,190,525</b>		<b>30,598,583,292</b>		<b>34,319,371,020</b>			<b>Sekretariat Dewan</b>
20%	5,356,205,125	20%	6,007,519,668	20%	6,738,034,059			
20%	6,426,602,453	20%	7,208,077,311	20%	8,084,579,513			
20%	492,071,507	20%	551,907,402	20%	619,019,342			
20%	272,032,650	20%	305,111,820	20%	342,213,417			
1 Dokumen	35,273,943	1 Dokumen	39,563,255	1 Dokumen	44,374,146			
3 MP, 7 Perda, 7 Staf Ahli Fraksi	14,699,004,847	3 MP, 7 Perda, 7 Staf Ahli Fraksi	16,486,403,836	3 MP, 7 Perda, 7 Staf Ahli Fraksi	18,491,150,543			
	<b>9,148,171,879</b>		<b>10,402,013,579</b>		<b>10,994,749,652</b>			<b>Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</b>



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,500,000,000	100%	1,507,445,295
1	20	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung terciptanya kinerja pelayanan	20%	20%	600,000,000	20%	408,845,632
1	20	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP	20%	20%	44,864,000	20%	50,319,462
1	20	4	Program Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Mengedepankan Akuntabilitas dan Percepatan Akses Pelayanan Di Bidang Perizinan Serta Mengerahkan Birokrasi Yang Inovatif Berbasis Investasi dan Entrepreneur	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perijinan untuk mendukung daya saing daerah serta menciptakan iklim investasi usaha yang baik	20%	Penyediaan 1 unit Mobil Pelayanan Berbasis IT dan Website Perijinan	1,200,000,000	Operasional Perijinan Berbasis IT	450,000,000
1	20	5	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Terciptanya peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam mendukung kinerja pelayanan	32 Org	40 Org	1,894,382,400	40 Org	2,124,739,300
1	20	6	Program Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Terciptanya system pelayanan terpadu satu pintu dalam mengoptimalkan layanan cepat, tepat dan efektif	20%	20%	3,000,000,000	20%	3,100,000,000
1	20	7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian serta sarana lain yang mendukung kinerja layanan aparatur	40 Org	40 Org	150,000,000	50 Org	150,000,000

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
100%	1,690,750,643	100%	1,896,345,921	100%	2,126,941,585			
20%	458,561,261	20%	514,322,310	20%	576,863,903			
20%	56,438,309	20%	63,301,207	20%	70,998,634			
Operasion- al Perijinan Berbasis IT	450,000,000	Operasion- al Perijinan Berbasis IT	450,000,000	Operasional Perijinan Berbasis IT	450,000,000			
40 Org	2,383,107,599	40 Org	2,672,893,483	40 Org	2,997,917,330			
20%	3,200,000,000	20%	3,300,000,000	20%	3,523,307,223			
55 Org	160,000,000	60 Org	160,000,000	70 Org	190,000,000			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	8	Program Penataan dan Penyempurnaan dan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terciptanya penataan, penyempurnaan system kebijakan dan prosedur pengawasan dalam meningkatkan PAD	20%	20%	168,240,000	20%	188,697,984
1	20	9	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Terciptanya peluang iklim investasi daerah guna mendukung terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20%	20%	785,120,000	20%	880,590,592
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>Kecamatan Ternate Utara</b>				<b>3,950,728,577</b>		<b>4,156,783,900</b>
1	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	1,734,339,399	20%	1,787,339,399
1	20	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur	20%	20%	386,000,000	20%	386,000,000
1	20	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terciptanya peningkatan SDM Aparatur dalam pelayanan	20%	20%	150,000,000	20%	150,000,000
1	20	4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP	2 Dokumen	2 Dokumen	10,655,200	2 Dokumen	11,950,872
1	20	5	Program Pengembangan dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	Terciptanya peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat	20%	20%	25,000,000	20%	25,000,000
1	20	6	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terciptanya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	100%	20%	1,569,733,978	20%	1,676,493,629
1	20	7	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Terwujudnya kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan keryukunan beragama	20%	20%	75,000,000	20%	120,000,000

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
20%	211,643,659	20%	237,379,528	20%	266,244,878			
20%	987,670,408	20%	1,107,771,130	20%	1,242,476,099			
	<b>5,125,339,423</b>		<b>4,706,161,145</b>		<b>5,184,748,389</b>			<b>Kantor Kecamatan Ternate Utara</b>
20%	1,945,235,070	20%	2,181,775,654	20%	2,447,079,574			
20%	386,000,000	20%	125,000,000	20%	125,000,000			
20%	125,345,000	20%	125,345,000	20%	125,345,000			
2 Dokumen	13,404,098	2 Dokumen	15,034,037	2 Dokumen	16,862,176			
20%	25,000,000	20%	25,000,000	20%	25,000,000			
20%	1,880,355,255	20%	2,109,006,454	20%	2,365,461,639			
20%	75,000,000	20%	125,000,000	20%	80,000,000			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>Kecamatan Ternate Selatan</b>				<b>4,452,542,731</b>		<b>4,972,691,928</b>
1	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	1,992,978,891	20%	2,235,325,124
1	20	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur	20%	20%	203,606,661	20%	228,365,231
1	20	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terciptanya peningkatan SDM Aparatur dalam pelayanan	20%	20%	150,000,000	20%	150,000,000
1	20	4	Program Pengembangan dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	Terciptanya peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat	20%	20%	25,000,000	20%	25,000,000
1	20	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP	2 Dokumen	2 Dokumen	17,821,988	2 Dokumen	19,989,142
1	20	6	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terciptanya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	20%	20%	1,913,960,612	20%	2,146,698,223
1	20	7	Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kewaspadaan keamanan dan kenyamanan lingkungan	20%	20%	16,936,160	20%	18,995,597
1	20	8	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	20%	20%	132,238,419	20%	148,318,611
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>Kecamatan Ternate Tengah</b>				<b>4,937,991,123</b>		<b>5,535,410,844</b>
1	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	2,325,570,304	20%	2,608,359,653

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	
	<b>5,531,436,266</b>		<b>6,185,776,965</b>		<b>6,919,685,491</b>			<b>Kantor Kecamatan Ternate Selatan</b>
20%	2,507,140,659	20%	2,812,008,964	20%	3,153,949,254			
20%	256,134,443	20%	287,280,392	20%	322,213,687			
20%	125,345,000	20%	125,345,000	20%	125,345,000			
20%	25,000,000	20%	25,000,000	20%	25,000,000			
2 Dokumen	22,419,822	2 Dokumen	25,146,072	2 Dokumen	28,203,835			
20%	2,407,736,726	20%	2,700,517,512	20%	3,028,900,442			
20%	21,305,462	20%	23,896,206	20%	26,801,984			
20%	166,354,154	20%	186,582,819	20%	209,271,289			
	<b>6,205,476,802</b>		<b>6,957,022,781</b>		<b>7,799,956,751</b>			<b>Kantor Kecamatan Ternate Tengah</b>
20%	2,925,536,187	20%	3,281,281,387	20%	3,680,285,204			





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur	20%	20%	280,400,000	20%	314,496,640
1	20	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan SDM Aparatur dalam pelayanan	20%	20%	302,832,000	20%	339,656,371
1	20	4	Program Pengembangan dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	Terciptanya peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat	20%	20%	25,000,000	20%	25,000,000
1	20	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP	2 Dokumen	2 Dokumen	122,254,400	2 Dokumen	137,120,535
1	20	6	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terciptanya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	20%	20%	1,749,696,000	20%	1,962,459,034
1	20	7	Program Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Kehidupan Beragama	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	20%	20%	132,238,419	20%	148,318,611
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>Kecamatan Pulau Ternate</b>				<b>3,680,396,032</b>		<b>3,988,821,301</b>
1	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	1,574,500,000	20%	1,643,297,912
1	20	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur	20%	20%	626,707,040	20%	698,017,016
1	20	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan SDM Aparatur dalam pelayanan		6 Org	80,000,000	6 Org	80,000,000
1	20	4	Program Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Terciptanya peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat	20%	20%	15,000,000	20%	15,000,000

Target Kinerja									
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab	
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
20%	352,739,431	20%	395,632,546	20%	443,741,464				
20%	380,958,586	20%	427,283,150	20%	479,240,781				
20%	25,000,000	20%	25,000,000	20%	25,000,000				
2 Dokumen	153,794,392	2 Dokumen	172,495,790	2 Dokumen	193,471,278				
20%	2,201,094,052	20%	2,468,747,089	20%	2,768,946,735				
20%	166,354,154	20%	186,582,819	20%	209,271,289				
	<b>4,311,509,972</b>		<b>4,794,381,584</b>		<b>5,327,350,696</b>				
20%	1,730,962,938	20%	1,941,448,031	20%	2,177,528,112			Kantor Keca- matan Pulau Ternate	
20%	734,255,886	20%	794,901,401	20%	840,489,411				
7 Org	85,000,000	7 Org	85,000,000	7 Org	90,000,000				
20%	20,000,000	20%	20,000,000	20%	25,000,000				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP	20%	20%	11,216,000	20%	12,579,866
1	20	6	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terciptanya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	20%	20%	1,278,624,000	20%	1,434,104,678
1	20	7	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	20%	20%	94,348,992	20%	105,821,829
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>Kecamatan Moti</b>				<b>1,658,200,080</b>		<b>2,058,013,209</b>
1	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	649,182,080	20%	728,122,621
1	20	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur	20%	20%	245,069,600	20%	274,870,063
1	20	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan SDM Aparatur dalam pelayanan	20%	20%	68,417,600	20%	76,737,180
1	20	4	Program Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Terciptanya peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat	20%	20%	15,000,000	20%	15,000,000
1	20	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP	20%	20%	8,412,000	20%	9,434,899
1	20	6	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terciptanya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	20%	20%	587,998,800	20%	859,499,454

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
20%	14,109,577	20%	15,825,302	20%	17,749,659			
20%	1,608,491,807	20%	1,804,084,411	20%	2,023,461,075			
20%	118,689,764	20%	133,122,439	20%	153,122,439			
	<b>2,487,123,616</b>		<b>2,499,485,847</b>		<b>3,185,413,726</b>			
20%	816,662,332	20%	915,968,471	20%	1,027,350,237			<b>Kantor Kecamatan Moti</b>
20%	508,294,263	20%	345,782,845	20%	587,830,039			
20%	86,068,421	20%	96,534,341	20%	108,272,917			
20%	20,000,000	20%	20,000,000	20%	25,000,000			
20%	10,582,183	20%	11,868,976	20%	13,312,244			
20%	939,694,588	20%	990,641,450	20%	1.290,525,850			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	7	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	20%	20%	84,120,000	20%	94,348,992
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>Kecamatan Pulau Batang Dua</b>				<b>2,018,599,600</b>		<b>2,264,061,312</b>
1	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	888,195,040	20%	996,199,557
1	20	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur	20%	20%	280,960,800	20%	315,125,633
1	20	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan SDM Aparatur dalam pelayanan	20%	20%	57,538,080	20%	64,534,711
1	20	4	Program Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Terciptanya peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat	20%	20%	39,256,000	20%	44,029,530
1	20	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP	20%	20%	10,935,600	20%	12,265,369
1	20	6	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terciptanya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	20%	20%	592,989,920	20%	665,097,494
1	20	7	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	20%	20%	148,724,160	20%	166,809,018
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>Kecamatan Pulau Hiri</b>				<b>1,624,197,776</b>		<b>1,821,700,226</b>
1	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	520,206,896	20%	583,464,054

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	
20%	105,821,829	20%	118,689,764	20%	133,122,439			
	<b>2,539,371,166</b>		<b>2,848,158,700</b>		<b>3,194,494,798</b>			<b>Kantor Kecamatan Batang Dua</b>
20%	1,117,337,423	20%	1,253,205,654	20%	1,405,595,461			
20%	353,444,910	20%	396,423,811	20%	444,628,947			
20%	72,382,131	20%	81,183,798	20%	91,055,748			
20%	49,383,520	20%	55,388,556	20%	62,123,805			
20%	13,756,838	20%	15,429,669	20%	17,305,917			
20%	745,973,350	20%	836,683,709	20%	938,424,448			
20%	187,092,994	20%	209,843,503	20%	235,360,472			
	<b>2,043,218,971</b>		<b>2,291,674,400</b>		<b>2,570,342,006</b>			<b>Kantor Kecamatan Hiri</b>
20%	654,413,283	20%	733,989,939	20%	823,243,115			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur	20%	20%	370,128,000	20%	415,135,565
1	20	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan SDM Apparatur dalam pelayanan	20%	20%	57,538,080	20%	64,534,711
1	20	4	Program Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Terciptanya peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat	20%	20%	39,256,000	20%	44,029,530
1	20	5	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terciptanya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	20%	20%	16,824,000	20%	18,869,798
1	20	6	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan	Terciptanya peningkatan Kualitas Pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	20%	20%	530,516,800	20%	595,027,643
1	20	7	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terciptanya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	20%	20%	89,728,000	20%	100,638,925
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>				<b>10,704,049,521</b>		<b>12,005,661,943</b>
1	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	1,205,720,000	20%	1,352,335,552
1	20	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur	20%	20%	392,560,000	20%	440,295,296
1	20	3	Program Peningkatan Disiplin Pegawai	Terciptanya peningkatan kinerja aparatur dalam pelayanan	20%	20%	201,888,000	20%	226,437,581
1	20	4	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas Pns	Terlaksananya Pensiun PNS Tepat Waktu	72 SK Pensiun	80 SK Pensiun	145,808,000	83 SK Pensiun	163,538,253

Target Kinerja									
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab	
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
20%	465,616,049	20%	522,234,961	20%	585,738,732				
20%	72,382,131	20%	81,183,798	20%	91,055,748				
20%	49,383,520	20%	55,388,556	20%	62,123,805				
20%	21,164,366	20%	23,737,953	20%	26,624,488				
20%	667,383,004	20%	748,536,778	20%	839,558,850				
20%	112,876,618	20%	126,602,415	20%	141,997,268				
	<b>13,465,550,435</b>		<b>15,102,961,366</b>		<b>16,939,481,469</b>			<b>Badan Kepegawain Daerah</b>	
20%	1,516,779,555	20%	1,701,219,949	20%	1,908,088,295				
20%	493,835,204	20%	553,885,565	20%	621,238,049				
20%	253,972,391	20%	284,855,433	20%	319,493,854				
86 SK Pensiun	183,424,504	87 SK Pensiun	205,728,924	89 SK Pensiun	230,745,561				





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	515 Peserta Sosialisasi dan 19 Peserta	520 Peserta Sosialisasi dan 23 Peserta	818,768,000	520 Peserta Sosialisasi dan 23 Peserta	918,330,189
1	20	6	Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP	2 Dokumen	2 Dokumen	67,296,000	2 Dokumen	75,479,194
1	20	7	Program Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya Pendidikan Kedinasan	53 Aparatur Pemerintah	53 Aparatur Pemerintah	396,485,600	56 Aparatur Pemerintah	444,698,249
1	20	8	Program Pembinaan dan Pengembangan Apratur	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	100%	5,628,711,466	100%	6,313,162,780
1	20	9	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	103 Peserta Calon PNS Daerah	100 Peserta Calon PNS Daerah	1,846,812,455	100 Peserta Calon PNS Daerah	2,071,384,849
<b>1</b>	<b>21</b>		<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				<b>14,606,684,714</b>		<b>16,352,593,576</b>
1	21	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	702,772,128	20%	788,229,219
1	20	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur	20%	20%	195,000,000	20%	200,000,000
1	20	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	20%	95,000,000	20%	95,000,000
1	21	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP	2 Dokumen	2 Dokumen	66,905,124	2 Dokumen	75,040,787
1	21	5	Program Penyusunan Data Base Kelurahan	Tersusunnya Profil Kelurahan		77 Kelurahan	112,160,000	77 Kelurahan	125,798,656

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
525 Peserta Sosialisasi dan 23 Peserta Bimtek	1,029,999,140	530 Peserta Sosialisasi dan 23 Peserta Bimtek	1,155,247,035	535 Peserta Sosialisasi dan 23 Peserta Bimtek	1,295,725,075			
2 Dokumen	84,657,464	2 Dokumen	94,951,811	2 Dokumen	106,497,951			
61 Aparatur Pemerintah	498,773,556	63 Aparatur Pemerintah	559,424,420	65 Aparatur Pemerintah	627,450,430			
100%	7,080,843,374	100%	7,941,873,928	100%	8,907,605,798			
100 Peserta Calon PNS Daerah	2,323,265,247	100 Peserta Calon PNS Daerah	2,605,774,301	100 Peserta Calon PNS Daerah	2,922,636,456			
	<b>18,453,196,953</b>		<b>20,433,236,903</b>		<b>22,906,585,711</b>			<b>Badan Pem-ber dayaan Masyarakat</b>
20%	884,077,892	20%	991,581,763	20%	1,112,158,106			
20%	321,500,000	20%	121,500,000	20%	125,000,000			
20%	121,500,000	20%	121,500,000	20%	125,000,000			
2 Dokumen	84,165,746	2 Dokumen	94,400,301	2 Dokumen	105,879,378			
77 Kelura- han	141,095,773	77 Kelura- han	158,253,019	77 Kelura- han	177,496,586			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	21	6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan posyandu	77 Kelurahan dan 924 Posyandu	77 Kelurahan dan 924 Posyandu	12,173,047,462	77 Kelurahan dan 924 Posyandu	13,653,290,033
1	21	7	Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Terciptanya Aparatur Kelembagaan Masyarakat yang Berkualitas 45 Orang mutu pelayanan Posyandu 100 Unit Meja 100 Unit	45 Org dan 100 Unit Meja Posyandu	45 Org dan 100 Unit Meja Posyandu	347,696,000	45 Org dan 100 Unit Meja Posyandu	389,975,834
1	21	8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Terciptanya peningkatan keberdayaan masyarakat di kelurahan yang mendukung terwujudnya pembangunan berbasis partisipatif, kegotong royongan dan kearifan lokal		77 Kel dan 7 Kec	706,608,000	77 Kel dan 7 Kec	792,531,533
1	21	9	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Terciptanya Peningkatan inovasi teknologi tepat guna yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan usahanya.	20 TTG	20 TTG	207,496,000	20 TTG	232,727,514
<b>1</b>	<b>22</b>		<b>Komunikasi dan Informatika</b>				<b>924.107.015</b>		<b>446.794.506</b>
1	22	1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terselenggaranya e-Procurement	100 %	20 %	85.992.283	20 %	92.011.743
1	22	2	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Akses internet lancar	100 %	20 %	123.325.732	20 %	131.958.533

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
77 Kelurahan dan 924 Posyandu	15,313,530,101	77 Kelurahan dan 924 Posyandu	17,175,655,362	77 Kelurahan dan 924 Posyandu	19,264,215,054			
45 Org dan 100 Unit Meja Posyandu	437,396,895	45 Org dan 100 Unit Meja Posyandu	490,584,357	45 Org dan 100 Unit Meja Posyandu	550,239,415			
77 Kel dan 7 Kec	888,903,367	77 Kel dan 7 Kec	996,994,017	77 Kel dan 7 Kec	1,118,228,489			
20 TTG	261,027,179	20 TTG	292,768,084	20 TTG	328,368,683			
	<b>471.070.121</b>		<b>497.045.030</b>		<b>524.838.182</b>			
20 %	98.452.565	20 %	105.344.245	20 %	112.718.342			Dinas Per- hubungan, Komunikasi dan Informa- tika
20 %	141.195.630	20 %	151.079.324	20 %	161.654.877			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan				Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja			
							Tahun 2017		Tahun 2018	
							Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	22	3	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Tersedianya informasi bagi masyarakat	100 %	20 %	114.789.000	20 %	122.824.230	
1	22	4	Program Penyediaan layanan nomor tunggal panggilan darurat	Tersedianya pelayanan panggilan darurat	0	60 %	600.000.000	10 %	100.000.000	
<b>1</b>	<b>23</b>		<b>Urusan Statistik</b>				<b>672,150,944</b>		<b>753,884,499</b>	
1	23	1	Program Pengembangan Data dan Informasi	Tersedianya Data dan Informasi	4 Laporan	4 Laporan	672,150,944	4 Laporan	753,884,499	
<b>1</b>	<b>24</b>		<b>Urusan Pertanahan</b>				<b>15,000,000,000</b>		<b>20,000,000,000</b>	
1	20	4	Program Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Mengedepankan Akuntabilitas dan Percepatan Akses Pelayanan Di Bidang Perizinan Serta Mengerahkan Birokrasi Yang Inovatif Berbasis Investasi dan Entrepreneur	Terwujudnya pendataan Tanah-tanah milik Masyarakat yang terkena pembangunan Pemerintah	-	Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi	15,000,000,000	Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi	20,000,000,000	
<b>1</b>	<b>25</b>		<b>Urusan Kearsipan</b>				<b>1,393,924,480</b>		<b>1,563,425,696</b>	
1	25	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%	753,939,520	20%	845,618,566	
1	25	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur	20%	20%	358,912,000	20%	402,555,699	
1	25	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	4 Org	100%	109,468,160	6 Org	122,779,488	
1	25	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Pencapaian dan Keuangan	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPP	2 Dokumen	2 Dokumen	14,580,800	2 Dokumen	16,353,825	

Target Kinerja									
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab	
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
20 %	131.421.926	20 %	140.621.461	20 %	150.464.963				
10 %	100.000.000	10 %	100.000.000	10 %	100.000.000				
	<b>845,556,854</b>		<b>948,376,567</b>		<b>1,063,699,158</b>			<b>Bappeda</b>	
4 Laporan	845,556,854	5 Laporan	948,376,567	6 Laporan	1,063,699,158				
	<b>25,000,000,000</b>		<b>25,000,000,000</b>		<b>30,000,000,000</b>			<b>Sekretariat Daerah</b>	
Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi	25,000,000,000	Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi	25,000,000,000	Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi	30,000,000,000				
	<b>1,753,538,261</b>		<b>1,966,768,513</b>		<b>2,205,927,566</b>			<b>Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi</b>	
20%	948,445,783	20%	1,063,776,790	20%	1,193,132,048				
20%	451,506,472	20%	506,409,659	20%	567,989,074				
7 Org	137,709,474	8 Org	154,454,946	10 Org	173,236,668				
2 Dokumen	18,342,450	2 Dokumen	20,572,892	2 Dokumen	23,074,556				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25	5	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tertatanya Sistem Administrasi kreasi-pan yang baik	20%	20%	112,160,000	20%	125,798,656
1	25	6	Prorgam Peningkatan Kualitas Layanan Kearsipan	Terpenuhinya kualitas pelayanan kearsipan bagi masyarakat	24 kali (Moti, Hiri, Batang Dua)	24 kali (Moti, Hiri, Batang Dua)	44,864,000	24 kali (Moti, Hiri, Batang Dua)	50,319,462
<b>1</b>	<b>26</b>		<b>Urusan Perpustakaan</b>				<b>594,448,000</b>		<b>666,732,877</b>
1	26	1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terciptanya budaya baca bagi masyarakat	20%	20%	594,448,000	20%	666,732,877
<b>2</b>			<b>Urusan Pilihan</b>				-		-
<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Urusan Pertanian</b>				<b>12,311,318,669</b>		<b>15,608,173,875</b>
2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kinerja penyelenggaraan dan tata administrasi perkantoran	100%	20 %	1,149,707,296	20%	1,289,511,703
2	1	2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Prsentase kecukupan persediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor Penunjang pelaksanaan program dan kegiatan	- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1 unit - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas roda 4, 2 unit	- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1 unit - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas roda 4, 2 unit	263,576,000	- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1 unit - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas roda 4, 2 unit	295,626,842
2	1	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan secara formal maupun teknis fungsional	11 org	28 Orang	239,798,080	30 Orang	268,957,527

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
20%	141,095,773	20%	158,253,019	20%	177,496,586			
24 kali (Moti, Hiri, Batang Dua)	56,438,309	24 kali (Moti, Hiri, Batang Dua)	63,301,207	24 kali (Moti, Hiri, Batang Dua)	70,998,634			
	<b>747,807,595</b>		<b>838,740,998</b>		<b>940,731,903</b>			
20%	747,807,595	20%	838,740,998	20%	940,731,903			<b>Kantor Per-pustakaan, Arsip dan Dokumen-tasi</b>
	-		-		-			
	<b>17,506,127,818</b>		<b>19,634,862,961</b>		<b>21,481,780,808</b>			
20%	1,446,316,326	20%	1,622,188,392	20%	1,278,753,796			<b>Dinas Pertan-ian, Perke-bunan dan Kehutanan</b>
- Pemeli-haraan rutin / berkala gedung kantor 1 unit - Pemeli-haraan rutin / berkala kendaraan dinas roda 4, 2 unit	331,575,066	- Pemeli-haraan rutin / berkala gedung kantor 1 unit - Pemeli-haraan rutin / berkala kendaraan dinas roda 4, 2 unit	371,894,594	- Pemeli-haraan rutin / berkala gedung kantor 1 unit - Pemeli-haraan rutin / berkala kendaraan dinas roda 4, 2 unit	417,116,976			
34 Orang	301,662,762	38 Orang	338,334,954	40 Orang	379,487,700			





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tertibnya pelaporan kinerja dan keuangan SKPD	6 Dokumen	10 Dokumen	224,768,640	10 Dokumen	252,100,507
2	1	5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani	0	- Pelatihan petani 27 Orang - Bimtek bagi petani 13 Klpk	1,172,072,000	- Pelatihan petani 10 Orang - Bimtek bagi petani 10 Klpk	1,314,595,955
2	1	6	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya nilai tukar produk pertanian/perkebunan	- Jalan Produksi 500 m	- Sarana Pengangkut (roda tiga) 10 unit - Jalan usaha tani 1500 m - Lantai jemur 2 unit - Rehap Lantai jemur 1 unit - Pembangunan jalan menuju Cengkeh afo 200 m - Pembangunan jalan menuju kebun induk cengkeh 250 m	4,207,402,000	- Sarana Pengangkut (roda tiga) 10 unit - Jalan usaha tani 1000 m - Lantai jemur 2 unit - Rehap Lantai jemur 1 unit - Pembangunan jalan menuju Cengkeh afo 200 m - Penguasaan sarana dan prasarana pembibitan tanman perkebunan 1 unit	4,719,022,083

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
10 Doku- men	282,755,928	10 Doku- men	317,139,049	10 Doku- men	355,703,157			
- Pelatihan petani 10 Orang - Bimtek bagi petani 10 Klpk	1,474,450,823	- Pelatihan petani 10 Orang - Bimtek bagi petani 10 Klpk	1,653,744,043	- Pelatihan petani 10 Orang - Bimtek bagi petani 10 Klpk	1,854,839,319			
- Jalan usaha tani 1500 m - Lantai jemur 2 unit - Pengadaan sarana dan prasarana pem- bibitan tanman perkebu- nan 1 unit	5,292,855,169	- Jalan usaha tani 1500 m - Lantai jemur 2 unit - Penga- daan sarana dan prasarana pem- bibitan tanman perkebu- nan 1 unit	5,936,466,357	- Jalan usaha tani 1500 m - Lantai jemur 2 unit - Pengadaan sarana dan prasarana pem- bibitan tanman perkebu- nan 1 unit	6,658,340,666			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja						
				Tahun 2017		Tahun 2018				
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						- Pembangunan pagar pembibitan tanaman perkebunan 100 m - Pembangunan gudang penyimpanan hasil produk Perkebunan 1 unit				
2	1	7	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya alih teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	- Pembangunan embung 16 unit - Pembangunan irigasi Air tanah 2 unit - Pengerjaan mesin pencacah rumput 2 unit - Pengerjaan sarana prasarana peningkatan mutu dan pemasaran produk perkebunan 51 klp	- Pembangunan embung 20 unit - Pembangunan irigasi Air tanah 2 unit - Pengerjaan mesin pencacah rumput 2 unit - Pengerjaan sarana prasarana peningkatan mutu dan pemasaran produk perkebunan 25 klp	2,397,262,976	- Pembangunan embung 20 unit - Pembangunan irigasi Air tanah 2 unit - Pengerjaan sarana prasarana peningkatan mutu dan pemasaran produk perkebunan 15 klp	2,688,770,154	

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembanguan embung 20 unit</li> <li>- Pembanguan irigasi Air tanah 2 unit</li> <li>- Pengadaan sarana prasarana peningkatan mutu dan pemasaran produk perkebunan 15 klp</li> </ul>	3,015,724,605	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembanguan embung 20 unit</li> <li>- Pembanguan irigasi Air tanah 2 unit</li> <li>- Pengadaan sarana prasarana peningkatan mutu dan pemasaran produk perkebunan 15 klp</li> </ul>	3,382,436,717	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembanguan embung 20 unit</li> <li>- Pembanguan irigasi Air tanah 2 unit</li> <li>- Pengadaan sarana prasarana peningkatan mutu dan pemasaran produk perkebunan 15 klp</li> </ul>	3,793,741,021			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja						
				Tahun 2017		Tahun 2018				
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	1	8	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Meningkatnya produksi hasil pertanian/perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Pupuk NPK, organic, urea, dan alat pertanian 6000 kg</li> <li>- Rehabilitasi tanaman perkebunan 4 klp.</li> <li>- Pengadaan bibit nangka dan mangga dodol 1000 pohon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Pupuk NPK, organic, urea, dan alat pertanian 7500 kg</li> <li>- Rehabilitasi tanaman perkebunan 4 klp.</li> <li>- Pengadaan bibit nangka dan mangga dodol 500 pohon</li> </ul>	892,793,600		1,001,357,302	
2	1	9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya keamanan pangan hewani dan jumlah ternak yang sehat	2 Kecamatan	3 Kecamatan	159,267,200	4 Kecamatan	178,634,092	
2	1	10	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya populasi dan produktivitas peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan ayam pedaging 3 Klp</li> <li>- Budidaya ternak ayam buras 3 Klp</li> <li>- Budidaya ternak itik 3 Klp</li> <li>- Penanaman hijauan pakan ternak 2 Ha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan ayam pedaging 3 Klp</li> <li>- Budidaya ternak ayam buras 3 Klp.</li> <li>- Budidaya ternak itik 3 Klp</li> <li>- Penanaman hijauan pakan ternak 2 Ha</li> </ul>	1,604,670,877		1,799,798,855	

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Pupuk NPK, organik, urea, dan alat pertanian 7500 kg</li> <li>- Rehabilitasi tanaman perkebunan 4 klp.</li> <li>- Pengadaan bibit nangka dan mangga dodol 500 pohon</li> </ul>	1,123,122,350	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Pupuk NPK, organik, urea, dan alat pertanian 7500 kg</li> <li>- Rehabilitasi tanaman perkebunan 4 klp.</li> <li>- Pengadaan bibit nangka dan mangga dodol 500 pohon</li> </ul>	1,259,694,027	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Pupuk NPK, organik, urea, dan alat pertanian 7500 kg</li> <li>- Rehabilitasi tanaman perkebunan 4 klp.</li> <li>- Pengadaan bibit nangka dan mangga dodol 500 pohon</li> </ul>	1,412,872,821			
5 kecamatan	200,355,997	6 Kecamatan	224,719,286	7 Kecamatan	252,045,152			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan ayam pedaging 3 Klp</li> <li>- Budidaya ternak ayam buras 3 Klp</li> <li>- Budidaya ternak itik 3 Klp</li> <li>- Budidaya Ternak Kambing 3 Klp</li> </ul>	2,018,654,396	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan ayam pedaging 3 Klp</li> <li>- Budidaya ternak ayam buras 3 Klp</li> <li>- Budidaya ternak itik 3 Klp</li> <li>- Budidaya Ternak Kambing 3 Klp</li> </ul>	2,264,122,771	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan ayam pedaging 3 Klp</li> <li>- Budidaya ternak ayam buras 3 Klp</li> <li>- Budidaya ternak itik 3 Klp</li> <li>- Budidaya Ternak Kambing 3 Klp</li> </ul>	2,539,440,100			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								- Penanaman hijauan pakan ternak 2 Ha	
2	1	11	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya nilai tukar produk peternakan	3 unit	0	0	3 unit 2 klpk	1,799,798,855
2	1	11	<b>Sub Urusan Pertanian, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan</b>				<b>3,140,984,800</b>	<b>3,101,565,863</b>	
2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	20%	845,125,600	20%	947,892,873
2	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 unit Rumah dinas BPP pulau Ternate, Rehap gedung dan pagar BPP Hiri 1 unit, Rehap Pagar BPP selatn 1 unit, sarana dan Prasarana pendukung BPP	Pemb. kantor BPP Ternate Utara, pembangunan Rumah dinas BPP Hiri 1 Unit, Pembangunan Gudang saprodi BPP hiri, 1 unit, Penambahan Ruangan Kerja BP4K, Pemb. lanjutan rumah dinas BPP pulau Ternate & Mobiler Ternate Utara	546,219,200	Pembangunan gudang saprodi ternate Utara, Pembangunan Gren Hause dan sarana pendukung BPP	612,639,455

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
- Pena- naman hijauan pakan ternak 2 Ha		- Pena- naman hijauan pakan ternak 2 Ha		- Pena- naman hijauan pakan ternak 2 Ha				
2 klpk	2,018,654,396	2 klpk	2,264,122,771	2 klpk	2,539,440,100			
	<b>3,478,716,272</b>		<b>3,901,728,172</b>		<b>4,376,178,317</b>			<b>Badan Penyuluh an Pertanian, Perikanan dan Ke- hutanan</b>
20 %	1,063,156,646	20 %	1,192,436,495	20 %	1,337,436,772			
Pembangu- nan Gren Hause Moti gudang Saprodi Moti, Jalan sarana pendukung BPP Moti	687,136,412	Pembangu- nan Pagar BPP ternate utara, Pemb- angsunan Gren Hause BBP Ternate utara dan Tengah, Rehap Rumah Di- nas di BPP Tengah	770,692,200	Pengadaa- n Kendaraan operasional Roda 4 dan Roda 3 dan saran Pendukung BPP	864,408,372			





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal 11 org, dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 83 org	Pendidikan dan pelatihan formal 10 untuk struktural dan 12 Org untuk fungsional	128,984,000	Pendidikan dan pelatihan formal 10 untuk struktural dan 12 Org untuk fungsional	144,668,454
2	1	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja dan kerja SKPD	2 dokumen	3 Dokumen	22,432,000	3 Dokumen	25,159,731
2	1	5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani	2 Orang Petani	Petani 22 Orang , Pendamping 10 orang, Peninjau 42 Orang	600,000,000	Petani 7 Orang , Pendamping 3 orang,	251,597,312
2	1	6	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	0,5 Ha	0,75 Ha	106,552,000	1 Ha	119,508,723
2	1	7	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Meningkatnya sistem penyuluhan perikanan	- 1 unit kolam ikan BPP Selatan - 2 Nelayan	- 1 unit kolam ikan BPP Pulau - 4 Nelayan dan 3 Pendamping	112,160,000	- 1 unit kolam ikan BPP Tengah - 6 Nelayan dan 3 Pendamping	125,798,656
2	1	8	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan	75 Orang Penyuluh	62 Penyuluh	678,568,000	65 Penyuluh	761,081,869
2	1	9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya jumlah ternak yang terbebas dari penyakit	5700 ekor	5800 Ekor Ternak	56,080,000	5900 Ekor Ternak	62,899,328

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pendidikan dan pelati- han formal 10 untuk struktural dan 12 Org untuk fungsional	162,260,138	Pendidikan dan pelati- han formal 10 untuk struktural dan 12 Org untuk fungsional	181,990,971	Pendidikan dan pelati- han formal 10 untuk struktural dan 14 Org untuk fungsional	204,121,073			
3 Dokumen	28,219,155	3 Dokumen	31,650,604	3 Dokumen	35,499,317			
Petani 10 Orang , Pendamp- ping 3 orang,	282,191,545	Petani 22 Orang , Pendamp- ping 10 orang, Peninjau 42 Orang	316,506,037	Petani 15 Orang pen- damping 3 orang	354,993,171			
1,25 Ha	134,040,984	1, 50 Ha	150,340,368	1,75 Ha	168,621,756			
- 1 unit kolam ikan BPP Utara - 8 Nelayan dan 3 Pend- amping	141,095,773	Nelayan 10 orang dan Pendamp- ping 4 Orang	158,253,019	Nelayan 12 orang dan Pendamp- ping 4 Orang	177,496,586			
67 Penyuh- luh	853,629,424	67 Penyuh- luh	957,430,762	70 Penyuh- luh	1,073,854,343			
6200 Ekor Ternak	70,547,886	6500 Ekor Ternak	79,126,509	7000 Ekor Ternak	88,748,293			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	10	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Meningkatnya populasi ternak yg bebas dr penyakit	0	1 unit Percontohan ( 1000 ekor ayam potong )	44,864,000	1 unit percontohan ( 10 Ekor kambing )	50,319,462
<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Urusan Kehutanan</b>				<b>2,484,344,000</b>		<b>2,786,440,230</b>
2	2	1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan non kayu	4 Ha, 4 Klpk	4 Ha, 4 Klpk	308,440,000	4 Ha, 4 Klpk	345,946,304
2	2	2	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya peran dan fungsi kawasan hutan	146,5 Ha	240 Ha	1,238,246,400	240 Ha	1,388,817,162
2	2	3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya perlindungan hutan dan fungsi konservasi hutan	0	7 kec. 2 unit 100 pal	578,745,600	7 kec. 2 unit 100 pal	649,121,065
2	2	4	Program Pembinaan Industri Hasil Hutan	Meningkatnya Pengawasan Peredaran hasil hutan	4 kali	6 kali	89,728,000	6 Kali	100,638,925
2	2	5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Meningkatnya sarana dan prasarana	0	1 klpk , 60 buah	168,240,000	1 klpk , 60 buah	188,697,984
2	2	6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan	Meningkatnya sarana dan prasarana penyuluh kehutanan	2 unit	1 Unit	100,944,000	1 Unit	113,218,790
<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Urusan Pariwisata</b>				<b>4,185,000,000</b>		<b>4,160,000,000</b>

Target Kinerja									
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab	
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1 unit per- contohan dan (5 ekor sapi)	56,438,309	1 kelompok penerima bantuan	63,301,207	1 kelompok penerima bantuan	70,998,634				
	<b>3,125,271,362</b>		<b>3,505,304,361</b>		<b>3,931,549,370</b>				
4 Ha, 4 Klpk	388,013,375	4 Ha, 4 Klpk	435,195,801	4 Ha, 4 Klpk	488,115,610				<b>Dinas Perta- nian, Perke- bunan dan Kehutanan</b>
240 Ha	1,557,697,329	240 Ha	1,747,113,324	240 Ha	1,959,562,305				
7 kec. 2 unit 100 pal	728,054,186	7 kec. 2 unit 100 pal	816,585,576	7 kec. 2 unit 100 pal	915,882,382				
6 Kali	112,876,618	6 Kali	126,602,415	6 Kali	141,997,268				
1 klpk , 60 buah	211,643,659	1 klpk , 60 buah	237,379,528	1 klpk , 60 buah	266,244,878				
1 Unit	126,986,195	1 Unit	142,427,717	1 Unit	159,746,927				
	<b>4,195,000,000</b>		<b>5,185,000,000</b>		<b>5,985,000,000</b>				<b>Dinas Kebu- da yaan dan Pari wisata</b>



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	1	Program Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Revitalisasi Cagar Budaya serta Infrastruktur Pendukung untuk Mendorong Ternate sebagai Icon Kota Religius, Kota Pariwisata Unggulan dan Kota Pusaka Dunia Berbasis Sejarah, Budaya dan Bahari	Meningkatnya potensi wisata sejarah, budaya dan bahari	0 unit	1 unit Bangunan Tourism Information Center (86%)	300.000.000	1 unit Bangunan Tourism Information Center (14%)	50.000.000
2	3	2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Promosi Pariwisata	100 %	20 %	1.675.000.000	20 %	1.650.000.000
2	3	3	Program Pengembangan Sarana Pariwisata	Terwujudnya Sarana dan parasaran Pariwisata	100 %	15 %	2.210.000.000	12 %	2.460.000.000
<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>				<b>13,886,800,000</b>		<b>12,936,100,000</b>
2	4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran Administrasi perkantoran	100 %	100 %	2,070,600,000	100 %	2,443,800,000
2	4	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	- 3 unit Gedung kantor - Kendaraan Dinas Roda 4, 1 unit	- 3 unit Gedung kantor - Kendaraan Dinas Roda 4, 1 unit	397,200,000	- 3 unit Gedung kantor - Kendaraan Dinas Roda 4, 1 unit	593,300,000
2	4	3	Program Peningkatan Kapasiats Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur	4 kali Bimtek	6 kali Bimtek	300,000,000	7 kali Bimtek	320,000,000
2	4	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terciptanya Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel	6 Dokumen	6 Dokumen	129,000,000	6 Dokumen	149,000,000

Target Kinerja									
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab	
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0	0	0	0	0	150,000,000				
				Peta Titik Spot Diving di Area Wisata (1 Dokumen)					
20 %	1.725.000.000	20 %	1.725.000.000	20 %	1.725.000.000				
17 %	2.470.000.000	29 %	3.460.000.000	27 %	4.110.000.000				
	<b>10,622,950,000</b>		<b>11,606,700,000</b>		<b>8,204,900,000</b>				<b>Dinas Ke- lautan dan Perikanan</b>
100 %	2,532,450,000	100 %	2,706,000,000	100 %	2,801,900,000				
- 3 unit Gedung kantor - Kendaraan Dinas Roda 4 , 1 unit	625,500,000	- 3 unit Gedung kantor - Kendaraan Dinas Roda 4 , 1 unit	631,700,000	- 3 unit Gedung kantor - Kendaraan Dinas Roda 4 , 1 unit	669,000,000				
7 Kali Bimtek	350,000,000	7 Kali Bimtek	370,000,000	7 Kali Bimtek	400,000,000				
6 Dokumen	154,000,000	6 Dokumen	159,000,000	6 Dokumen	164,000,000				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	5	Program Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Revitalisasi Cagar Budaya serta Infrastruktur Pendukung untuk Mendorong Ternate sebagai Icon Kota Religius, Kota Pariwisata Unggulan dan Kota Pusaka Dunia Berbasis Sejarah, Budaya dan Bahari	Meningkatnya Pemetaan Infrastruktur Dasar yang relevan dengan kondisi wilayah berbasis maritim dan pesisir	0 unit	2 Lokasi (Kel. Rua dan Kel. Tobololo)	1,000,000,000	2 Lokasi (Kel. Rua dan Kel. Tobololo)	1,000,000,000
1	4	6	Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan Berbasis Maritim dan Pesisir	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur Dasar yang relevan dengan kondisi wilayah berbasis maritim dan pesisir	- Marine boy 8 unit - Pembangunan sarana perikanan	2 unit marine boy dan 3 kecamatan (Moti, Hiri dan Batang Dua)	400,000,000	2 unit marine boy dan 3 kecamatan (Moti, Hiri dan Batang Dua)	450,000,000
2	4	7	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	25 Ton	27 Ton	3,180,000,000	30 Ton	3,510,000,000
2	4	8	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Produksi Budidaya Perikanan	15277 Ton	18332.4 Ton	80,000,000	19249.02 Ton	90,000,000
2	4	9	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran	Meningkatnya Sarana dan prasarana Pengolahan dan Pemasaran	- 1 Unit lantai jemur rumput laut - 1 Unit Gudang Rumput laut	- 1 Unit lantai jemur rumput laut - Revitalisasi Depo Ikan Hygienis 1 unit - Penyediaan 5 peralatan Rumah Produksi hasil olahan	4,100,000,000	- Revitalisasi Depo Ikan Hygienis 1 unit - Penyediaan 5 peralatan Rumah Produksi hasil olahan	3,100,000,000

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
2 Lokasi (Kel. Rua dan Kel. Tobololo)	1,000,000,000	2 Lokasi (Kel. Rua dan Kel. Tobololo)	1,000,000,000	2 Lokasi (Kel. Rua dan Kel. Tobololo)	1,000,000,000			
2 unit marine boy dan 3 kecamatan (Moti, Hiri dan Batang Dua)	500,000,000	2 unit marine boy dan 3 kecamatan (Moti, Hiri dan Batang Dua)	550,000,000	2 unit marine boy dan 3 kecamatan (Moti, Hiri dan Batang Dua)	600,000,000			
32 Ton	3,820,000,000	33 Ton	4,140,000,000	34 Ton	655,000,000			
20211.47 Ton	100,000,000	21222.04 Ton	110,000,000	22283.15 Ton	120,000,000			
Penyediaan 5 peralatan Rumah Produksi hasil olahan	200,000,000	Penyediaan 5 peralatan Rumah Produksi hasil olahan	200,000,000	Penyediaan 5 peralatan Rumah Produksi hasil olahan	200,000,000			





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	10	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya Jumlah produksi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Pengolahan : - Ikan pindang 1140 Kg pertahun - Kecap 1080 kg / thn - Abon 1.680 kg / thn - Ikan Asap 18 ton/ thn	Jumlah Pengolahan : - Ikan pindang 1510 Kg pertahun - Kecap 1134 kg / thn - Abon 1764 kg / thn - Ikan Asap 18,9 ton/ thn	245,000,000	Jumlah Pengolahan : - Ikan pindang 158,5 Kg / thn - Kecap 1190 kg / thn - Abon 1852 kg / thn - Ikan Asap 19,85 ton/ thn	250,000,000
2	4	11	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Terjaganya Ekosistem Wilayah Pesisir dan peningkatan kualitas masyarakat pesisir	Penanaman - Man-grove 4 Ha - Peningkatan Kesejahteraan 90 kelompok nelayan	Penanaman - Man-grove 4,25 Ha - Terumbu karang 1 Ha - Peningkatan Kesejahteraan 100 kelompok nelayan	1,815,000,000	Penanaman - Man-grove 4,75 Ha - Terumbu karang 1,5 Ha	840,000,000
2	4	12	Program Pengawasan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan	Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan	- 1kali operasi pengawasan - 2 kelompok pengawasan	- 1kali operasi pengawasan - 2 kelompok pengawasan	170,000,000	- 1kali operasi pengawasan - 2 kelompok pengawasan	190,000,000
				Meningkatnya pemahaman masyarakat pesisir	1 kali penyuluhan	1 kali penyuluhan		1 kali penyuluhan	
2	5		<b>Urusan Perdagangan</b>				<b>4,381,876,560</b>		<b>3,510,712,749</b>

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
Jumlah Pengolahan : - Ikan pindang 166 Kg pertahun - Kecap 1249 kg / thn - Abon 1944 kg /thn - Ikan Asap 20,8 ton/ thn	295,000,000	Jumlah Pengolahan : - Ikan pindang 174 Kg pertahun - Kecap 1311 kg / thn - Abon 2041 kg /thn - Ikan Asap 22,9 ton/ thn	405,000,000	Jumlah Pengolahan : - Ikan pindang 182 Kg pertahun - Kecap 1376kg / thn - Abon 2143 kg /thn - Ikan Asap 24 ton/ thn	415,000,000			
Penanaman - Mangrove 5 Ha - Terumbu karang 2 Ha	995,000,000	Penanaman - Mangrove 5,25 Ha - Terumbu karang 2,5 Ha	1,100,000,000	Penanaman - Mangrove 5,50 Ha - Terumbu karang 3 Ha	1,355,000,000			
- 1kali operasi pengawasan - 2 kelompok pengawasan	205,000,000	- 1kali operasi pengawasan - 2 kelompok pengawasan	235,000,000	- 1kali operasi pengawasan - 2 kelompok pengawasan	240,000,000			
1 kali penyuluhan		1 kali penyuluhan		1 kali penyuluhan				
	<b>5,367,375,420</b>		<b>4,055,248,272</b>		<b>2,978,126,461</b>			<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	5	1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya Pengawasan peredaran barang perdagangan	2 Mall dan 2 Pasar	Pengawasan barang beredar 30 Toko 2 Mall, dan 2 pasar	663,426,400	Pengawasan barang beredar 30 Toko 2 Mall, dan 2 pasar	744,099,050
2	5	2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya regulasi pedagang dan laporan SIUP, TDP dan TDG	3 laporan Pengawasan SIUP, TDP, TDG 3 laporan	- 1 Dokumen regulasi - 3 laporan Pengawasan SIUP, TDP, TDG	994,130,160	Pengawasan SIUP, TDP, TDG 3 laporan	1,115,016,387
2	5	3	Program Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan serta Pemberdayaan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Penyediaan Sarana Perdagangan (Pasar Rakyat) dan Gudang Sistem Resi Gudang (SRG)	0	1 Pasar Batang Dua	2,500,000,000	1 Pasar Hiri	1,400,000,000
2	5	4	Program Pembinaan Pedagang	Sosialisasi serta pembinaan Pedagang	25 Pedagang dan 7 Pengecer	85 Pedagang, 250 UTPP	224,320,000	85 Pedagang, 350 UTPP	251,597,312
2	5	4	<b>Sub Urusan Perdagangan, Pasar</b>				<b>11,245,823,000</b>		<b>10,604,905,300</b>
2	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	20 %	20 %	2,796,323,000	20 %	3,075,955,300

Target Kinerja									
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab	
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Penga- wasan barang beredar 30 Toko 2 Mall, dan 2 pasar	834,581,495	Penga- wasan barang beredar 30 Toko 2 Mall, dan 2 pasar	936,066,605	Penga- wasan barang beredar 30 Toko 2 Mall, dan 2 pasar	1,049,892,304				
Penga- wasan SIUP, TDP, TDG 3 laporan	1,250,602,380	Penga- wasan SIUP, TDP, TDG 3 laporan	1,402,675,630	Penga- wasan SIUP, TDP, TDG 3 laporan	1,573,240,986				
1 Pasar Kota Baru	3,000,000,000	1 Unit SRG	1,400,000,000	0	0				
85 Peda- gang, 250 UTTP	282,191,545	85 Peda- gang, 350 UTTP	316,506,037	85 Peda- gang, 250 UTTP	354,993,171				
	<b>10,336,395,830</b>		<b>10,624,135,913</b>		<b>11,244,828,954</b>				<b>Dinas Pasar</b>
20 %	3,383,550,830	20%	3,721,905,913	20 %	4,094,096,504				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	5	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	- Pemeliharaan gedung kantor 1 unit - Pemeliharaan gedung kantor 1 unit - Peralatan dan perlengkapan gedung kantor 9 unit - Peralatan dan perlengkapan gedung kantor 9 unit - Peralatan dan perlengkapan gedung kantor 9 unit	- Pemeliharaan gedung kantor 1 unit - Peralatan dan perlengkapan gedung kantor 9 unit - Peralatan dan perlengkapan gedung kantor 9 unit - Peralatan dan perlengkapan gedung kantor 9 unit	2,760,000,000	2,646,000,000	
2	5	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur	6 orang	10 orang	150,000,000	12 Orang	165,000,000
2	5	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya systim pelaporan capaian kinerja keuangan	3 dokumen	4 Dokumen	14,500,000	4 Dokumen	15,950,000
2	5	5	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Meningkatnya Kualitas dan kapasitas pedagang kaki lima dan asongan	Jasa Petugas kebersihan Pasar 45 orang	Jasa Petugas kebersihan Pasar 45 orang	1,899,000,000	Jasa Petugas kebersihan Pasar 45 orang	2,088,900,000

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
- Pemeliharaan gedung kantor 1 unit - Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 unit - Pengadaan kendaraan roda 2, 4 unit - Pengadaan papan informasi 1 unit	2,437,100,000	- Pemeliharaan gedung kantor 1 unit - Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 8 unit - Pengadaan kendaraan roda 2, 2 unit - Pengadaan papan informasi 1 unit	2,994,810,000	- Pemeliharaan gedung kantor 1 unit - Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 10 unit - Pengadaan kendaraan roda 2, 2 unit dan roda 4 = 1 unit - Pengadaan papan informasi 1 unit	2,875,791,000			
14 orang	181,500,000	16 orang	199,650,000	18 orang	219,615,000			
3 Dokumen	17,545,000	3 Dokumen	18,000,000	3 Dokumen	21,229,450			
Jasa Petugas kebersihan Pasar 45 orang	2,297,790,000	Jasa Petugas kebersihan Pasar 45 orang	2,527,569,000	Jasa Petugas kebersihan Pasar 45 orang	2,780,325,900			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	5	6	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan prasarana penunjang pasar (WC umum) 14 unit</li> <li>- Pemeliharaan gedung pasar 5 unit</li> <li>- Pemeliharaan gedung pasar 4 unit</li> <li>- Pembangunan jembatan penghubung bangunan pasar 1 unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan prasarana penunjang pasar (WC umum) 14 unit</li> <li>- Pemeliharaan gedung pasar 5 unit</li> <li>- Pembangunan jembatan penghubung bangunan pasar 1 unit</li> <li>- Fasilitas penunjang pasar Gamalama 2 lokasi</li> </ul>	3,561,000,000	2,488,100,000	
2	5	7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		20 %	65,000,000	20 %	125,000,000
<b>2</b>	<b>6</b>		<b>Urusan Perindustrian</b>				<b>4,892,431,680</b>		<b>5,485,344,972</b>
2	6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Presentase pelayanan aparatur terhadap administrasi perkantoran	100 %	20 %	1,491,503,680	20 %	1,672,870,527

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
- Pemeliharaan prasarana penunjang pasar (WC umum) 14 unit - Pemeliharaan gedung pasar 5 unit - Fasilitas penunjang pasar Gamalama 2 lokasi	1,882,910,000	- Pemeliharaan prasarana penunjang pasar (WC umum) 14 unit - Pemeliharaan gedung pasar 5 unit	1,010,701,000	- Pemeliharaan prasarana penunjang pasar (WC umum) 14 unit - Pemeliharaan gedung pasar 5 unit	1,096,771,100			
20 %	136,000,000	20 %	151,500,000	20 %	157,000,000			
	<b>6,150,356,522</b>		<b>6,896,233,474</b>		<b>6,997,463,600</b>			
20 %	1,876,291,584	20 %	2,104,448,640	20 %	2,360,349,595			Dinas Perindustrian dan Perdagangan





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja					
				Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	6	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasaran aparaturnya	- Rehap Gedung Kantor 1 unit - Kendaraan operasional kantor 4 unit roda 2	- Pengadaan Kendaraan operasional kantor roda 4, 1 unit - Rehap Gedung Kantor 1 unit	970,184,000	- Pengadaan Kendaraan operasional kantor roda 2, 3 unit - Pembangunan gedung serbaguna 1 unit	1,088,158,374
2	6	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3 dokumen	3 dokumen	16,500,000	3 dokumen	16,500,000
2	6	4	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatkan SDM IKM dalam produksi dan promosi	0	45 IKM	586,036,000	60 IKM	657,297,978
2	6	5	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensi	Penyediaan Sarana Informasi IKM	0	3 Papan Peta IKM, 30 Buku Katalog IKM	370,128,000	1 unit website, 30 Buku Katalog IKM	415,135,565
2	6	6	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan dan pengembangan pelayanan untuk menerapkan SNI	Pelatihan 30 IKM,	- Pelatihan 20 IKM - Sosialisasi 20 IKM	112,160,000	- Pelatihan 20 IKM - Sosialisasi 20 IKM	125,798,656
2	6	7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Fasilitasi peralatan bagi pelaku IKM	0	100 IKM	1,345,920,000	100 IKM	1,509,583,872
<b>TOTAL BELANJA MODAL</b>				<b>606.440.317.909</b>		<b>710.945.208.651</b>		<b>780.979.366.698</b>	

Target Kinerja								
Tahn 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penang gung Jawab
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
- Pengadaan Kendaraan operasional kantor roda 2, 3 unit - Pembangunan Gedung Kantor lantai 1, 1 unit	1,220,478,433	- Pengadaan Kendaraan operasional kantor roda 4, 1 unit dan roda 2, 3 unit - Pembangunan gedung kantor lantai 2, 1 unit	1,368,888,610	Pengadaan peralatan gedung kantor : Mesin Genset 1 unit, Komputer Dekstop 10 unit, laptop 3 unit, Perangkat internet 1 set	800,000,000			
3 dokumen	16,500,000	3 dokumen	16,500,000	3 dokumen	16,500,000			
50 IKM	737,225,412	60 IKM	826,872,022	60 IKM	927,419,660			
3 Papan peta IM, 30 Buku Katalog IKM	465,616,049	2500 Lembar Brosur IKM, 30 Buku Katalog IKM	522,234,961	2000 Lembar brosur IKM, 30 Buku Katalog IKM	585,738,732			
- Pelatihan 20 IKM - Sosialisasi 20 IKM	141,095,773	- Pelatihan 20 IKM - Sosialisasi 20 IKM	158,253,019	- Pelatihan 20 IKM - Sosialisasi 20 IKM	177,496,586			
100 IKM	1,693,149,271	100 IKM	1,899,036,222	100 IKM	2,129,959,027			
	<b>780.979.366.698</b>		<b>848.463.735.799</b>		<b>875.086.952.769</b>			

## BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH



Tujuan penetapan indikator kinerja daerah adalah dalam rangka memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatannya yaitu pada Tahun 2021, khususnya dalam mengukur keberhasilan capaian target kinerja selama 5 (lima) tahun memimpin. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*out-comes*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Sehubungan dengan pencapaian indikator kinerja yang merupakan penjabaran dari keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 sebagaimana telah diuraikan pada Bab-Bab terdahulu, maka untuk mencapainya diperlukan upaya dari seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan untuk mendukung dan mendorong tercapainya target-target indikator yang meliputi :

1. Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2. Indikator Aspek Pelayanan Umum; dan
3. Indikator Aspek Daya Saing Daerah.

Selanjutnya uraian rinci tentang pencapaian target indikator kinerja pada aspek-aspek tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

### 9.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek Kesejahteraan Masyarakat, penentuan capaian target indikator kinerja tiap tahunnya meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta seni budaya dan olahraga. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, diharapkan akan tumbuh setiap tahunnya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Demikian pula dengan persentase laju inflasi setiap tahunnya sepanjang 5 (lima) tahun ke depan,

diharapkan dapat ditekan sampai akhir perodesasi RPJMD yaitu tahun 2021. Sedangkan Angka kemiskinan dan pengangguran ditargetkan dapat turun setiap tahunnya sepanjang kurun 5 (lima) tahun ke depan.

Hasil evaluasi kinerja pada aspek kesejahteraan dimaksud, selanjutnya dituangkan dalam tabel tentang Indikator Kinerja Daerah berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat. Data dan informasi dalam tabel tersebut selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hal ini sebagai penjabaran dari Misi ke 3, yaitu “Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan Yang Merata Antar Wilayah Perkotaan” dan penjabaran dari Misi ke 4, yaitu “Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim”.

## 9.2. Aspek Pelayanan Umum

Selanjutnya, indikator kinerja aspek Pelayanan Umum dalam 5 (lima) tahun mendatang akan terus didorong untuk menghasilkan *performance* kinerja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Strategi yang akan dirumuskan untuk meningkatkan *performance* kinerja pelayanan umum adalah dengan mengelola secara profesional setiap urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun urusan bersifat pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pengelolaan setiap urusan pemerintahan dimaksud akan dikendalikan dan dievaluasi secara periodik baik oleh setiap Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab maupun oleh Walikota. Hasil evaluasi dimaksud akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan selanjutnya.

Hasil evaluasi kinerja pada aspek pelayanan umum dimaksud, selanjutnya akan dituangkan dalam tabel tentang Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Pelayanan Umum, untuk selanjutnya akan dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hal ini terkait dengan upaya untuk mengimplementasikan Misi ke 1, yaitu “Membangun Ternate yang Mandiri Adil dan Sejahtera” dan penjabaran dari Misi ke 2 yaitu “Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Berbudaya dan Agamais”, serta penjabaran dari Misi ke 5, yaitu “Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari”.

## 9.3. Aspek Daya Saing Daerah

Meningkatkan kinerja pada aspek daya saing daerah merupakan salah satu upaya yang tidak kalah beratnya dengan peningkatan aspek-aspek lainnya. Jika aspek ini dapat didorong tumbuh secara berkelanjutan, maka akan membawa dampak ganda yang sangat positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate.



Ada beberapa dampak positif yang akan didapat oleh masyarakat tidak sebatas pada masyarakat di Kota Ternate saja, tetapi masyarakat di sekitar Kota Ternate juga akan mendapatkan nilai tambah yang cukup signifikan, antara lain :

1. Meningkatnya perekonomian masyarakat disebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat dari berbagai usaha kecil masyarakat;
2. Mengurangi angka kriminalitas, karena berkurangnya tingkat pengangguran;
3. Meningkatnya pendapatan asli daerah, karena tumbuhnya ekonomi masyarakat; dan,
4. Berkurangnya angka buta huruf dikarenakan semakin bertambahnya orang yang mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, hasil evaluasi kinerja pada aspek daya saing daerah akan dituangkan dalam tabel tentang Indikator Kinerja Daerah berdasarkan aspek daya saing daerah. Selanjutnya data dan informasi dalam tabel tersebut akan dipublikasikan kepada masyarakat umum, para pemangku kepentingan dan akan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi. Hal ini sebagai penjabaran dari Misi ke 3, yaitu “Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan” dan penjabaran dari Misi ke 4, yaitu “Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim”, serta penjabaran dari Misi ke 5, yaitu : “Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari”.

Untuk memberikan informasi tentang indikator capaian kinerja yang harus dapat dicapai dari setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kota Ternate dalam kurun waktu tahun 2016-2021, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016-2021**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahunan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	3	4	5	6	7			8	9
<b>I Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>																
<b>A Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>																
<b>1</b>	<b>Otonomi Daerah</b>															
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%		8,10	8,27	8,45	8,66	8,73	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	
1.2	Indeks Pembangunan Manusia	%		78,68	78,68	78,82	78,88	79,12	79,34	79,34	79,34	79,34	79,34	79,34	79,34	
1.3	Laju Inflasi	%		4,52	4,50	4,25	4,12	4,12	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
1.4	PDRB Perkapita ADHB	Rp.		35.156.449,5	37.121.695,0	39.196.797,8	41.387.898,8	43.701.482,3	46.144.395,2	46.144.395,2	46.144.395,2	46.144.395,2	46.144.395,2	46.144.395,2	46.144.395,2	
<b>B Fokus Kesejahteraan Sosial</b>																
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>															
1.1	Angka Melek Huruf	%		96,96	96,96	97,11	97,44	97,65	97,89	97,89	97,89	97,89	97,89	97,89	97,89	
1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
1.3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%		95,43	95,43	96,12	96,80	97,26	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	
1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%		81,68	81,68	79,55	80,45	81,34	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	
1.5	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA	%		81,68	81,68	82,07	82,46	82,84	83,23	83,23	83,23	83,23	83,23	83,23	83,23	
1.6	Angka Partisipasi Murni SD/MI	%		82,22	82,22	83,13	83,59	83,59	84,04	84,04	84,04	84,04	84,04	84,04	84,04	
1.7	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%		76,51	76,51	77,40	78,30	79,19	80,09	80,09	80,09	80,09	80,09	80,09	80,09	
1.8	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	%		78,61	78,61	79,39	80,17	80,95	81,72	81,72	81,72	81,72	81,72	81,72	81,72	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)			Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>1</b>	<b>2</b>												
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>												<b>Dinas Kesehatan</b>
2.1	Angka Kelangsungan Hidup bayi	%	996,50	997,40	997,50	997,50	997,50	997,60	997,60	997,60	997,60	997,60	
2.2	Angka Harapan Hidup	%	71,55	71,55	71,75	71,85	71,95	72,03	72,03	72,03	72,03	72,03	
2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,61	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
<b>3</b>	<b>Pertanahan</b>												<b>Sekretariat Daerah</b>
3.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Tanah Bersertifikat	%	0,54	0,54	1,23	1,23	1,64	2,11	2,77	2,77	2,77	2,77	
<b>4</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>												<b>Disnakersos</b>
4.1	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	53,34	53,34	53,44	53,49	53,54	53,59	53,59	53,59	53,59	53,59	
4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,85	6,57	6,35	5,82	5,55	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	
<b>C</b>	<b>Fokus Seni Budaya dan Olah Raga</b>												
<b>1</b>	<b>Kebudayaan</b>												<b>Disbudpar</b>
1.1	Jumlah Grup Kesenian	Grup	51	2	2	2	2	2	2	2	2	61	
1.2	Jumlah Museum	Buah	2	-	-	1	-	-	-	-	-	3	
<b>2</b>	<b>Penuda dan Olah Raga</b>												<b>Dispora</b>
2.1	Jumlah Klub Olah Raga	Klub	98	2	2	2	2	2	2	2	2	108	
2.2	Jumlah Gedung Olahraga	Gedung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahunan							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>II Aspek Pelayanan Umum</b>											
<b>A Fokus Layanan Urusan Wajib</b>											
<b>1 Urusan Pendidikan</b>											
1.1	Angka Melek Huruf	%	96,96	96,96	97,11	97,44	97,65	97,89	97,89	97,89	
1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA	% % %	95,43 78,66 81,68	95,43 78,66 81,68	96,12 79,55 82,07	96,80 80,45 82,84	97,95 81,34 82,84	97,95 82,24 83,23	97,95 82,24 83,23	97,95 82,24 83,23	
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA	% % %	82,22 76,51 78,61	82,22 76,51 78,61	82,67 77,40 79,39	83,13 78,30 80,17	83,59 79,19 80,95	84,04 80,09 81,72	84,04 80,09 81,72	84,04 80,09 81,72	
1.5	Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA	% % %	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	
1.6	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.7	Jumlah Guru Dengan Kualifikasi S1/D4	Guru	2.395	2.406	2.427	2.450	2.471	2.499	2.499	2.499	
1.8	Rasio sekolah / siswa - SD/MI - SMP/MTS - SMA/SMK/MA	% % %	197,65 239,31 344,16	197,65 240 344	203,03 245,08 345,21	203,41 245,45 346,26	204,35 245,77 347,32	204,58 245,77 347,32	204,58 245,77 347,32	204,58 245,77 347,32	
1.9	Rasio guru / siswa - SD/MI - SMP/MTS - SMA/SMK/MA	% % %	15,81 12,20 11,68	15,81 12,20 11,68	15,82 12,23 11,71	15,83 12,24 11,75	15,84 12,25 11,78	15,85 12,26 11,82	15,85 12,26 11,82	15,85 12,26 11,82	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahunan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.10	Cakupan Angka Partisipasi PAUD	%	85	85	86	87	90	90	90	90	90	90			
1.11	Cakupan Angka Partisipasi Pendidikan Menengah	%	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.12	Peningkatan Sarana Prasarana Pembelajaran PAUD, Paket A, Paket B dan Paket C Meningkatkan.	%	85	87	90	93	95	95	95	95	95	95			
1.13	Angka Putus Sekolah	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- SD/MI	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- SMP/MTS	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- SMA/SMK/MA	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.14	Jumlah sekolah kondisi bangunan baik (sarana dan prasarana lengkap)	%	80	80	80	85	85	85	85	85	85	85			
	- SD/MI	%	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90			
	- SMP/MTS	%	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90			
	- SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
1.15	Angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
<b>2</b>	<b>Urusan Kesehatan</b>														<b>Dinas Kesehatan</b>
2.1	Angka Kematian Ibu (per 1000 KH)	%	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0			
2.2	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	%	3,8	3,5	3,5	3	3	3	3	3	3	3			
2.3	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	%	2/1000	1,8	1,8	1,5	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25			
2.4	Angka Usia Harapan Hidup	%	70,07	70,37	70,67	71,25	71,77	71,77	71,77	71,77	71,77	71,77			
2.5	Prosentase Gizi Buruk	%	3,8	3	2,7	2,4	2	2	2	2	2	2			
2.6	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)			Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2.7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	95	95	96	97	98	100	100			
2.8	Cakupan Rumah Tangga Ber-Pola Hidup Bersih dan Sehat	%	65,5	65,5	70	71	75	80	85			
2.9	Cakupan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	%	65	65	75	80	85	90	90			
2.10	Cakupan Rumah Yang Memenuhi Sanitasi Dasar	%	90	90	90	90	90	90	90			
<b>3</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum</b>										<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>	
3.1	Cakupan Jalan Kondisi Baik	Km	319,7	24,06	2,93	3,28	3,68	4,13	357,774			
3.2	Cakupan Jembatan Kondisi Baik	Km	1.520,55	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	1.522,55			
3.3	Jumlah Gedung Pemerintahan	Unit	136	2	2	2	2	2	156			
3.4	Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat	M	48.361	8,644	1,051	1,179	1,322	1,483	62,040			
3.5	Peningkatan Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	Km		5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	15,5			
3.6	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Air	M3	8.550.000	250	275	300	325	350	8.551.500			
3.7	Cakupan Ketersediaanya Air Baku	Titik	3	3	3	3	3	3	3			
3.8	Cakupan Lingkungan Pemukiman Kumuh	Ha	65	50	35	25	12	0	0			
3.9	Cakupan Pelayanan Air Bersih	Liter/ Detik	406	10	10	10	10	10	456			
<b>4</b>	<b>Perumahan</b>										<b>Kantor Pemadam Kebakaran</b>	
4.1	Cakupan Layanan Bencana Kebakaran dan Bencana Alam Lainnya.	%	90	100	100	100	100	100	100			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahunan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>5</b>	<b>Urusan Penataan Ruang</b>									<b>Dinas Tata Kota dan Pertamanan</b>			
5.1	Perpersentase Bangunan ber-IMB	%	42	48	54	55	56	57	57				
5.2	Cakupan Luas Wilayah Produktif	Ha	14.169	14.170	14.175	14.180	14.185	14.190	14.190				
5.3	Luas Wilayah Industri	Ha	8	10	11	12	14	15	15				
5.4	Wilayah Kebanjiran	Titik	2	3	3	2	2	2	14				
5.5	Luas Wilayah Perkotaan	Ha	1.623	1.625	1.630	1.635	1.640	1.645	1.645				
5.6	Persentase Dokumen RDTR yang Tersusun	%	40	70	80	100	100	100	100				
<b>6</b>	<b>Urusan Perencanaan Pembangunan</b>									<b>Bappeda</b>			
	Ketepatan waktu penerbitan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda :												
6.1	- RPJPD; - RPJMD; - RPKD.	Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak	Ya Ya Ya	Ya Ya Ya	Ya Ya Ya	Ya Ya Ya	Ya Ya Ya	Ya Ya Ya	Ya Ya Ya				
6.2	Keselarsan program dalam RPKD dengan program dalam RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100				
6.3	Jumlah Kajian/ Penelitian Yang Ditindak Lanjuti	Dokumen	5	7	10	10	10	12	12				
6.4	Peringkat Nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	LPPD	-	-	-	-	-	-	-				
<b>7</b>	<b>Urusan Perhubungan</b>									<b>Dishub Kominfo</b>			
7.1	Prosentase Pemasangan (Rambu-Rambu, Warning Light, Marka, Guardrail)	%	19,32	16,06	16,10	16,16	16,16	16,21	100				
7.2	- Rambu-rambu	Buah	48	20	30	40	40	60	238				

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)				Target Capaian Tahunan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7.3	- Warning Light	Unit	3	2	2	2	3	2	14			
7.4	- Marka	M'	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	62.000			
7.5	- Guard Rail	Buah	48	40	50	80	80	90	388			
7.6	Panjang Median Jalan Kondisi Baik	Meter	66.206	66.019	65.812	65.432	65.027	64.805	64.805			
<b>8</b>	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>										<b>BLH dan Dinas Kebersihan</b>	
8.1	Persentase Penanganan Sampah/ Persentase Sampah yang Terangkut	%	65	67,2	69,4	71,6	73,8	76	76			
8.2	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (Per Satuan Penduduk)	%	54,04	54,55	54,99	55,35	55,85	56,05	56,05			
8.3	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	20,05	21	22	25	27	28	28			
8.4	Persentase Jumlah TPS Per Kelurahan	%	8	10	20	30	40	50	50			
<b>9</b>	<b>Urusan Pertanahan</b>										<b>Sekretariat Daerah</b>	
9.1	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Kali	4	7	7	6	5	5	5			
<b>10</b>	<b>Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil</b>										<b>Disdukcapil</b>	
10.1	Penduduk ber KTP	%	76,69	75	78	79	79	85	85			
10.2	Penduduk Berakte Kelahiran	%	94	94	94	97	98	99	99			
10.3	Pasangan Berakte Nikah	%	53	53	53	63	66	74	74			
10.4	Pengurusan e-KTP	hari	6	5	5	5	4	4	4			



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target/Capaian Tahunan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
<b>11</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>														<b>KPPPA</b>
11.1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	29,89	30,23	30,75	31,29	32	32,61	32,61					32,61	
11.2	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	39,64	40,01	40,25	40,55	40,75	41,00	41,00					41,00	
11.3	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	0,053	0,05	0,042	0,031	0,038	0,022	0,022					0,022	
11.4	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	35,15	36,14	37,19	38,12	39,15	40,00	40,00					40,00	
11.5	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan	%	75	80	85	90	95	100	100					100	
<b>12</b>	<b>Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>														<b>BPKKBD</b>
12.1	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif	%	92,1	93,5	93,7	94	94,5	95	95					95	
12.2	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BK) ber-KB	%	85,3	85,5	86	86,5	87,5	88	88					88	
12.3	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan anggota sejahtera yang ber-KB.	%	85	85,5	86	87	88	88	89					89	
12.4	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.	%	70	72	75	78	80	85	85					85	
12.5	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2	2	2	1,9	1,9	1,8	1,8					1,8	
<b>13</b>	<b>Urusan Sosial</b>														<b>Dinas Nakersos</b>
13.1	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	65	75	85	90	95	100	100					100	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)						Target Capaian Tahunan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			3	4	5	6	7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
13.2	PMKS yang Tertangani (orang)	Orang	224	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1.224	
13.3	Jumlah Kegiatan Keagamaan	kali	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
<b>14</b>	<b>Urusan Ketenagakerjaan</b>															<b>Dinas Nakeresos</b>
14.1	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun	%	20	23	26	20	14	18	18	18	18	18	18	18	18	
14.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,71	62,71	63,25	63,15	63,74	64,50	64,50	64,50	64,50	64,50	64,50	64,50	64,50	
14.3	Pencari kerja yang Ditempatkan	%	64,18	67	70	73	76	79	79	79	79	79	79	79	79	
14.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,66	6,33	6,15	5,95	5,55	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	
14.5	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>15</b>	<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>															<b>Dinas Koperasi dan UKM</b>
15.1	Peningkatan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	%	9,09	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	
15.2	Koperasi Aktif	%	32	37	42	47	52	57	57	57	57	57	57	57	57	
<b>16</b>	<b>Urusan Penanaman Modal</b>															<b>BP2TSP</b>
16.1	Jumlah Ijin yang Diterbitkan	Buah	55	57	62	66	68	73	73	73	73	73	73	73	381	
16.2	Jumlah Investor	PMA/ PMDN	8	10	8	8	12	15	15	15	15	15	15	15	61	
<b>17</b>	<b>Urusan Kebudayaan</b>															<b>Disbudpar</b>
17.1	Jumlah Kelompok Kesenian	Grup	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
17.2	Penyelenggaraan Festival/Event Seni dan Budaya	Kali	2	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)						Target Capaian Tahunan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			3	4	5	6	7	8	9	10						
1	2															
17.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
<b>18</b>	<b>Usuran Pemuda dan Olahraga</b>															<b>Dispora</b>
18.1	Jumlah Organisasi Olah Raga	Klub	100	100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	110	
18.2	Jumlah Aktivitas dan Pengembangan Kepemudaan	Kali	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
<b>19</b>	<b>Usuran Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri</b>															<b>Badan Kesbang linmas</b>
19.1	Jumlah Pembinaan Politik Daerah	Parpol	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
19.2	Jumlah Pembinaan Terhadap LSM, Ormas OKP	Kali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
<b>20</b>	<b>Usuran Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peringkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;</b>															<b>Sekretariat Daerah, Sekwan, DPKAD, Dis- penda, Kantor Satpol PP, Kantor Pema- dan Kebakaran, Inspektorat, BPBD, BKD, Kecamatan</b>
20.1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Rasio	1:562	1:562	1:562	1:562	1:562	1:562	1:562	1:562	1:562	1:562	1:562	1:562	1:562	
20.2	Rasio Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk	%	5,04	5,04	5,25	5,5	5,75	5,99	5,99	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	
20.3	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan	%	7,37	7,37	7,39	7,44	7,62	7,57	7,57	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	
20.4	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20.5	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keterlibatan, Ketenagamaan, Keindahan)	%	87,44	87,44	87,34	87,01	85,55	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05	
20.6	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	48,33	48,33	48,55	48,99	49,45	49,89	49,89	49,89	49,89	49,89	49,89	49,89	49,89	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)				Target Capaian Tahunan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			3	4	5	6	7	8	9	10		
20.7	Tingkat Waktu Tanggap (response time) Daerah Layanan Wilayah Manajemenn Kebakaran (WMK)	Menit	15	14	13	12	11	10	10	10		
20.8	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar	%	10	20	30	40	50	60	70			
20.9	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3.000-5.000 liter pada WMK	Unit	6	3	3	3	3	3	21			
20.10	Jumlah Kelurahan Siaga bencana	Kelurahan	15	25	40	55	60	77	77			
20.11	Jumlah Infrastruktur Bencana yang Terbangun	Meter	200	700	1200	1700	2200	2700	2700			
20.12	Ketersediaan Sistem informasi manajemenn pemerintahan daerah	%	51	53	55	57	59	61	61			
20.13	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	55%	65%	75%	87%	87%	87%	87%			
20.14	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
20.15	Persentase Penegakan Perda	%	97,95%	97,45%	97%	98%	99%	100%	100%			
20.16	Pengesahan Perda APBD tepat waktu (Desember Tahun ke n-1)	Ya/ Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya			
20.17	Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Keuangan (maks 31 Januari) Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100			
20.18	Persentase Temuan Audit yang Ditindak Lanjuti	%	35%	35,50%	36,15%	36,95%	37%	40%	42,50%			
20.19	Persentase SKPD Yang Menyelesaikan Lap Kinerja (max 28 Februari ) Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100			
20.20	Persentase Perda yang Dilakukan Konsultasi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100			





No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)				Target Capaian Tahunan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
20.21	Persentase SKPD yang Telah Dilakukan Anjab dan ABK	%	95	97	96	98	99	100	100			
20.22	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	%	11	11	11	12	12	12	12			
20.23	Persentase Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Dilkat Kepemimpinan Sesuai Jenjangnya	%	64	71	79	86	93	100	100			
20.24	Persentase Jabatan Struktural yang Dilaksanakan Dibanding Dengan Jabatan Menurut PP 18 tahun 2016	%	100	100	100	100	100	100	100			
20.25	Laporan Keuangan Pemda Disusun Tepat Waktu	Ya/ Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya			
20.26	Persentase Peningkatan PAD	%	8,5	8,9	8,7	9,3	9,6	9,7	9,7			
20.27	Prosentase Capaian SPM	%	75%	75%	75%	75%	80%	85%	90%			
20.28	Perubahan kelembagaan dan Tupoksi SKPD	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
20.29	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3			
20.30	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3			
20.31	Prosentase PD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	50%	75%	75%	75%	80%	80%	80%			
<b>21</b>	<b>Urusan Ketahanan Pangan</b>											
21.1	Skor Pola Pangan Harapan (%)	%	67,23	78,35	67,85	78,98	79,15	79,73	79,73			
21.2	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)						Target Capaian Tahunan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			3	4	5	6	7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
<b>22</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>															<b>BPM</b>	
22.1	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81		
22.2	Jumlah Aparatur Kelurahan yang Mendapat Pembinaan	Orang	12	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
22.3	Jumlah Kelembagaan Masyarakat / Organisasi Masyarakat Kelurahan yang Dibina	Kelompok	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58		
22.4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Berprestasi	Kelurahan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77		
<b>23</b>	<b>Urusan Statistik</b>															<b>Bappeda</b>	
23.1	Buku Kota Ternate Dalam Angka	Buku	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
23.2	Buku PDRB Kota Ternate	Buku	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
<b>24</b>	<b>Urusan Kersipan</b>															<b>Kantor Arsip dan Perpustakaan</b>	
24.1	Jumlah Arsip Yang Dikelola	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.2	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	20	25	30	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40	55	
<b>25</b>	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>															<b>Dishub Kominfo</b>	
25.1	SKPD Yang Terkoneksi Dalam Jaringan Sever Pemerintah Daerah	%	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	95	
25.2	Website Milik Pemerintah Daerah	Unit	20	25	35	40	40	40	40	45	45	45	45	45	45	50	
25.3	Jumlah Web/Blog SKPD yang Aktif (unit)	Unit	10	12	14	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	20	
25.4	Media Interpersonal Sarasehan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahunan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
<b>26</b>	<b>Usuran Perpustakaan</b>														<b>Kantor Arsip dan Perpustakaan</b>
26.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	13.350	13.500	13.650	13.800	13.850	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
26.2	Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	1.052	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	2.427	
26.3	Jumlah Perpustakaan	Buah	101	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	109	
<b>B</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>														
<b>1</b>	<b>Urusan Pertanian</b>														<b>Dinas Pertanian dan Kehutanan</b>
1.1	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	%	29,33	33,66	33,66	38,17	38,79	39,11	39,11	39,11	39,11	39,11	39,11	39,11	
1.2	Produktivitas Jagung	(Kw/Ha)	15,0	15,4	17,0	18,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	
1.3	Produktivitas Bawang Merah	(Kw/Ha)	29,1	29,6	30,0	31,0	31,5	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	
1.4	Produktivitas Cabe	(Kw/Ha)	2,54	3,5	4,6	5,5	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
1.5	Jumlah Produksi Kakao	Ton	10	10,5	11	11,5	12	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
1.6	Jumlah Produksi Kelapa	Ton	702	722	742	762	782	802	802	802	802	802	802	802	
1.7	Jumlah Produksi Pala	Ton	1.407	1.422	1.437	1.452	1.467	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	
1.8	Jumlah Produksi Cengkeh	Ton	354	364	374	384	394	404	404	404	404	404	404	404	
1.9	Jumlah Produksi Kayu Manis	Ton	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1.10	Jumlah Populasi Sapi Potong	Ekor	2.623	3.150	3.543	3.918	4.270	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	
1.11	Jumlah Populasi Kambing	Ekor	21.952	22.135	22.255	23.920	23.935	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	
1.12	Jumlah Populasi Ayam Buras	Ekor	33.415	33.670	33.850	33.980	34.200	34.520	34.520	34.520	34.520	34.520	34.520	34.520	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Tahunan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>2</b>	<b>Usuran Kehutanan</b>									<b>Dinas Pertanian dan Kehutanan</b>	
2.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Ha	26,31	240	290	100	100	100	100	100	
2.2	Luas Lahan Kritis Dan Lahan Tidak Produktif yang Tertanami	Ha	1.822	100	100	100	100	100	100	100	
2.3	Luas Hutan Rakyat	Ha	210	100	100	100	100	100	100	100	
2.4	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	9	9	8,43	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	
<b>3</b>	<b>Usuran Energi dan Sumber Daya Mineral</b>									<b>DTKP</b>	
3.1	Kontribusi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Terhadap PDRB	%	7	7,15	7,30	7,30	7,30	7,50	7,50	7,50	
3.2	PIU Kondisi Baik	Titik	1.925	35	35	35	35	35	35	2.100	
4	Usuran Pariwisata									<b>Disbudpar</b>	
4.1	Kunjungan Wisata	Orang	122,070	121.000	123.000	125.000	127.000	129.000	129.000	129.000	
<b>5</b>	<b>Usuran Kelautan dan Perikanan</b>									<b>DKP</b>	
5.1	Produksi Berbagai Jenis Perikanan	Ton	43.993,85	44.500	45.000	45.500	46.000	46.575	46.575	46.575	
5.2	Konsumsi Ikan	Ton	10.439	10.539	10.550	10.560	10.570	10.600	10.600	10.600	
<b>6</b>	<b>Usuran Perdagangan</b>									<b>Dinas Perindag</b>	
6.1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	25	29	32	35	32	33	37	37	
<b>7</b>	<b>Usuran Perindustrian</b>										
7.1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	13	15	18	12	15	19	19	19	
7.2	Pertumbuhan Industri	%	4	5	6	5	6	8	8	8	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahunan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
<b>III Aspek Daya Saing Daerah</b>														
<b>A Fokus Kemampuan Ekonomi daerah</b>														
1	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peringkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.													
2	Pertanian													
<b>B Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>														
1	Perhubungan													
2	Penataan Ruang													DTKP
2.1	Ketaatan Terhadap RTRW	%	49,63	53,7	57,77	61,84	65,91	70	70					
2.2	Luas Wilayah Produktif	Ha	14.169	14.270	14.330	14.355	14.375	14.390	14.390					
2.3	Luas Wilayah Industri	Ha	8	10	10	12	12	14	14					
2.4	Wilayah Kebanjiran	Titik	2	3	3	2	2	2	14					
<b>3 Fasilitas Bank dan Non Bank</b>														
3.1	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Unit	19	1	1	1	1	1	24					
3.2	Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang	Unit	5	1	1	1	1	1	10					
3.3	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran	Unit	95	2	2	2	2	2	105					
3.4	Jumlah Penginapan/Hotel	Unit	70	2	2	2	2	2	80					
<b>4 Lingkungan Hidup</b>														
4.1	Pencemaran Status Mutu Air	%	40	40	50	50	50	60	60					BLH

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)						Target Capaian Tahunan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2																
4.2	Jumlah TPS Tersedia di Kelurahan	Buah	6	10	15	20	25	30									
5	Komunikasi dan Informatika																
5.1	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	%	69,6	69,6	69,6	77	77	77									
5.2	Presentase Penduduk yang Menggunakan HP/Help	%	70	70	75	80	85	90									
<b>C Fokus Iklim Investasi</b>																	
<b>1 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian</b>																	
1.1	Angka Kriminalitas	%	56,7	56	55	54	51	50									
1.2	Jumlah Demonstrasi	Kali	25	27	30	30	30	30									
1.3	Lama Proses Perijinan	Hari	3	2	2	2	1	1									
1.4	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	Buah	7	8	8	8	8	8									
1.5	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi	Buah	4	1	1	1	1	1									
1.6	Persentase Perda yang Disahkan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100									
<b>D Fokus Sumber Daya Manusia</b>																	
<b>1 Ketenagakerjaan</b>																	
1.1	Rasio Ketergantungan	%	42,23	41,15	40,59	39,97	37,25	35,79									
1.2	Rasio Lulusan S1/S2/S3	%	19,56	22,68	24,36	26,22	27,45	28,68									

# BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN



**D**okumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari sistem Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan antara lain, bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

Dengan demikian, dalam upaya untuk menjamin terjadinya sinkronisasi, keselarasan dan sinergitas antara dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 dengan dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019, maka substansi dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP dan RPJMN. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## 10.1. Pedoman Transisi

Masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Ternate terpilih Tahun 2016-2021 akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2021. Sementara itu, dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 akan berakhir pada akhir bulan Desember 2021. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan memastikan, bahwa pada akhir perodesasi dari dokumen RPJMD ini tidak akan terjadi kekosongan regulasi, maka ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Walikota dan Wakil Walikota terpilih Tahun 2016-2021 dapat terus melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;
2. Sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2021-2025, maka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate Tahun 2021 selain menjabarkan Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan 5 (lima) tahunan keempat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 39 Tahun 2012 tentang RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, juga memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Terkait dengan angka 2 di atas, maka substansi yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2021, menjadi substansi tahun pertama dari Rancangan Awal RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2025;
4. Periodesasi tahun pertama dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2025, adalah Tahun 2021 dan seterusnya untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun kedepan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

## 10.2. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 selanjutnya dijadikan sebagai landasan oleh Pemerintah Kota Ternate dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan ke dalam dokumen rencana pembangunan tahunan Kota Ternate untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, termasuk dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahunan untuk selama 5 (lima) tahun ke depan.





Berkaitan dengan hal tersebut, dalam dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 perlu dirumuskan beberapa kebijakan terkait dengan kaidah pelaksanaan, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Ternate dan seluruh pemangku kepentingan seperti masyarakat umum, dunia usaha, para akademis dan seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan, serta pagu indikatif sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 dengan penuh tanggung jawab;
2. Walikota dan Wakil Walikota, dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan bersinergi dengan dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021;
3. Untuk menjamin agar target capaian setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya Sekretaris Daerah Kota Ternate berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021;
4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam lingkungan Pemerintah Kota Ternate berkewajiban untuk menjabarkan RPJMD ke dalam dokumen Renstra PD dan Renja PD;
5. Dalam upaya menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan RPJMD Kota Ternate tahun 2016-2021, Bappeda Kota Ternate berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana perangkat daerah;
6. Sesuai Pasal 43 dan 46 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Walikota wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap setiap dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja PD) yang disusun oleh seluruh Perangkat Daerah;
7. Dalam hal target capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD tidak dapat/sulit dicapai yang disebabkan oleh berbagai kendala sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka dokumen RPJMD ini perlu dilakukan penyesuaian/revisi;
8. Walikota dan/atau Wakil Walikota sesuai dengan kewenangan, berkewajiban untuk menyebarluaskan informasi RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 kepada seluruh masyarakat Kota Ternate;
9. RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Walikota dan Wakil Walikota Ternate di akhir periode masa jabatan, serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

10. Pada akhirnya keberhasilan/ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan di Kota Ternate, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap, mental, etika, tekad dan semangat, ketaatan dan taat asas para penyelenggara pemerintahan daerah;
11. Guna mewujudkan visi Pemerintah Kota Ternate, yaitu “Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan”, serta untuk mendorong terwujudnya keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah di Kota Ternate, maka perlu didukung oleh:
  - a. Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis;
  - b. Konsistensi kebijakan Pemerintah Daerah;
  - c. Keberpihakan pembangunan kepada rakyat;
  - d. Peran serta segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Ternate; dan
  - e. Menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016- 2021 adalah dokumen perencanaan yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan Provinsi Maluku Utara dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia, secara keseluruhan. Implementasi pelaksanaan RPJMD ini harus dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu koordinasi, sinergi dan harmonisasi antara tiga pilar tata kelola negara, yakni: pemerintahan, dunia usaha (swasta), dan warga masyarakat (*civil society*).

### 10.3. Penutup

Pada Pasal 263 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Selanjutnya Dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 yang disusun berpedoman pada ketentuan regulasi dimaksud, sebelum dijadikan landasan untuk penyusunan



Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, terlebih dahulu perlu dilakukan penyempurnaan dengan mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholders*, di antaranya masukan dari DPRD, masukan dari para pakar akedemisi, masukan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, masukan dari ormas, LSM, organisasi kepemudaan dan masukan dari *stakeholder* lainnya.

Dari dimensi periodesasinya, Dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah daerah yang perlu dipahami dan dipedomani sebagai dokumen bersama seluruh pemangku kepentingan masyarakat se Kota Ternate dalam rangka melaksanakan pembangunan sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya, dokumen RPJMD secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam rangka perencanaan tahunan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam upaya menjamin terciptanya keselarasan, sinergitas dan konsistensi antara RPJMD dengan RKPD, antara RKPD dengan APBD dan antara RPJMD dengan Renstra PD, serta antara Renstra PD dengan Renja PD, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap rumusan kebijakan dan pengendalian terhadap pelaksanaan, serta melakukan evaluasi hasil pelaksanaan yang dilakukan secara periodik. Dengan langkah demikian, maka akan dicapai target konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunannya agar rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Ternate sebagai bagian dari proses meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin dalam upaya untuk "Terwujudnya Ternate Menjadi Kota "Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan".

Mengingat proses penyusunan Dokumen RPJMD juga terkait dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya sebagai satu kesatuan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, maka keberhasilan pencapaian target kinerja dari RPJMD akan sangat ditentukan oleh keberhasilan pencapaian target kinerja Rensta PD, RKPD dan Renja PD. Oleh karena itu, sebagus apapun kualitas dokumen RPJMD jika tidak dapat diterjemahkan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah lainnya secara berkualitas, maka dapat dipastikan bahwa target capaian yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai secara maksimal.

Oleh karena itu, maka kunci keberhasilan pencapaian target kinerja RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 terletak pada konsistensi, keselarasan dan sinergitas di antara dokumen rencana pembangunan dimaksud. Dalam konteks konsistensi, keselarasan dan sinergitas, ukurannya adalah konsistensi target sasaran, perumusan strategi dan kebijakan antara Renstra PD dengan RPJMD, antara RKPD dengan RPJMD, serta antara Renja PD dengan Renstra PD dan RKPD tahun berkenaan.





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA TERNATE TAHUN 2016**